



EKONOMI PEMBANGUNAN

Tim Penulis:

Fitri Amalia, Roeskani Sinaga, Asyari, Rahmah Farahdita Soeyatno,
Dikson Silitonga, Akhmad Solikin, Aulia Keiko Hubbansyah,
Robert Tua Siregar, Dessy Maulina, Ria Kusumaningrum,
Nur Fitriyani Sahamony, Erdah Litriani, Nurjanna Ladjin.

Editor:

Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si.

EKONOMI PEMBANGUNAN

Tim Penulis:

Fitri Amalia, Roeskani Sinaga, Asyari, Rahmah Farahdita Soeyatno,
Dikson Silitonga, Akhmad Solikin, Aulia Keiko Hubbansyah,
Robert Tua Siregar, Dessy Maulina, Ria Kusumaningrum,
Nur Fitriyani Sahamony, Erdah Litriani, Nurjanna Ladjin.



EKONOMI PEMBANGUNAN

Tim Penulis:

Fitri Amalia, Roeskani Sinaga, Asyari, Rahmah Farahdita Soeyatno, Dikson Silitonga,
Akhmad Solikin, Aulia Keiko Hubbansyah, Robert Tua Siregar, Dessy Maulina,
Ria Kusumaningrum, Nur Fitriyani Sahamony, Erdah Litriani,
Nurjanna Ladjin.

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Ria Kusumaningrum

ISBN:

978-623-5811-94-9

Cetakan Pertama:

Februari, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Ekonomi Pembangunan” telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Ekonomi Pembangunan.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan *“tiada gading yang tidak retak”* dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Februari, 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PEMBANGUNAN EKONOMI DAN EKONOMI PEMBANGUNAN	1
A. Pendahuluan	2
B. Pembangunan Ekonomi	2
C. Ekonomi Pembangunan	9
D. Nilai Inti dan Tujuan Pembangunan	11
E. Pembangunan Ekonomi, Ekonomi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi	14
F. Rangkuman Materi	17
BAB 2 PEMBANGUNAN EKONOMI DUNIA	21
A. Pendahuluan	22
B. Perkembangan Ekonomi di Dunia	24
C. Pembangunan Ekonomi Tiap-Tiap Negara	29
D. Rangkuman Materi	35
BAB 3 FAKTOR-FAKTOR PENENTU KESEJAHTERAAN	41
A. Pendahuluan	42
B. Pendapatan (<i>Income</i>)	44
C. Pendidikan (<i>Education</i>)	48
D. Kesehatan	49
E. Modal Sosial	49
F. Perspektif Islam Tentang Kesejahteraan	51
G. Rangkuman Materi	51
BAB 4 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN EKONOMI	57
A. Pendahuluan	58
B. Tantangan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2021	60
C. Masalah Krisis Domestik Selama Pandemi Covid 19	61
D. Isu-Isu Internasional di Negara-Negara Penghasilan Rendah	71
E. Peran dan Fungsi Perempuan Saat Mengatasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi	79
F. Rangkuman Materi	81

BAB 5 EFEK PEMBANGUNAN EKONOMI	85
A. Pendahuluan.....	86
B. Efek Pembangunan Ekonomi.....	87
C. Rangkuman Materi.....	96
BAB 6 HUBUNGAN EKSPOR DAN PEMBANGUNAN EKONOMI	101
A. Pendahuluan.....	102
B. Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi Jangka Pendek.....	103
C. Teori Perdagangan Internasional.....	106
D. Hambatan Perdagangan Internasional.....	109
E. Dari <i>Inward Looking</i> Ke <i>Outward Looking</i>	110
F. Keterbukaan Ekonomi, Perjanjian Perdagangan Internasional & Regionalisasi.....	113
G. Kebijakan Pembatasan Ekspor di Indonesia: Bea Keluar.....	114
H. Ekspor, Impor dan <i>Global Value Chain</i>	115
I. Rangkuman Materi.....	116
BAB 7 PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DALAM PROSES PEMBANGUNAN	121
A. Pembangunan Ekonomi dan Transformasi Struktural.....	122
B. Transformasi Struktural: Kasus Meksiko dan Indonesia – Suatu Perbandingan.....	127
C. Jebakan Pendapatan Menengah (<i>Middle Income Trap</i>) : Prospek Indonesia.....	133
D. Rangkuman Materi.....	143
BAB 8 TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI	147
A. Pendahuluan.....	148
B. Pengertian Pembangunan Ekonomi.....	150
C. Tujuan dan Manfaat Pembangunan Ekonomi.....	151
D. Pendekatan dalam Pembangunan Ekonomi.....	153
E. Pengertian Unsur dan Fungsi Perencanaan Pembangunan Ekonomi.....	154
F. Tahap-Tahap Perencanaan Pembangunan Ekonomi.....	154
G. Proses Perencanaan Pembangunan Ekonomi.....	155
H. Masalah-Masalah Perencanaan Pembangunan Ekonomi.....	157
I. Strategi Perencanaan Pembangunan Regional dalam Kajian Variasi Keruangan.....	157

J. Cara Mencapai Tujuan dalam Pembangunan Ekonomi.....	159
K. Rangkuman Materi	161
BAB 9 PROSES PEMBANGUNAN DALAM PEREKONOMIAN.....	163
A. Pendahuluan.....	164
B. Memahami Makna Proses.....	165
C. Proses Pembangunan Secara Umum.....	166
D. Hubungannya Proses Pembangunan dengan Perekonomian	167
E. Proses Pembangunan dalam Perekonomian.....	168
F. Teori Lewis: Tentang Proses Pembangunan di Lihat pada Sisi Penawaran Tenaga Kerja	169
G. Perbandingan Teori Lewis dan Ranis-Fei (Tentang Proses Pembangunan dalam Perekonomian).	172
H. Kritik Terhadap Teori Lewis dan Ranis-Fei.....	177
I. Proses Pembangunan Ekonomi Negara Maju dan Berkembang (Studi Kasus Indonesia dan Jepang)	178
J. Rangkuman Materi	181
BAB 10 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	183
A. Pendahuluan.....	184
B. Syarat Umum Pembangunan Ekonomi.....	184
C. Masalah Pembangunan Ekonomi	190
D. Kebijakan Pembangunan	192
E. Rangkuman Materi	199
BAB 11 TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI	203
A. Definisi Teori Pertumbuhan Ekonomi	204
B. Teori Pertumbuhan Klasik	204
C. Teori Pertumbuhan Neo Klasik	211
D. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.....	215
E. Rangkuman Materi	217
BAB 12 PEMBANGUNAN SEIMBANG DAN PEMBANGUNAN TIDAK SEIMBANG	219
A. Pembangunan Seimbang (<i>Balanced Growth</i>).....	221
B. Keterbatasan Pertumbuhan Berimbang.....	227
C. Pembangunan Tidak Seimbang (<i>Unbalanced Growth</i>).....	228
D. Keterbatasan Pembangunan Tidak Seimbang.....	231
E. Rangkuman Materi	231

BAB 13 SUMBER DANA PEMBANGUNAN	235
A. Pendahuluan.....	236
B. Pendapatan Negara	236
C. Rangkuman Materi	248
GLOSARIUM	251
PROFIL PENULIS	258

EKONOMI PEMBANGUNAN

BAB 1: PEMBANGUNAN EKONOMI DAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Dr. Fitri Amalia, M.Si

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah

BAB 1

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN EKONOMI PEMBANGUNAN

A. PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan membahas dari sebuah pertanyaan yang mungkin muncul pada sebagian orang mengenai apakah sebenarnya pembangunan itu. Dalam pandangan tradisional pembangunan identik dengan peningkatan pendapatan perkapita atau diistilahkan sebagai pertumbuhan ekonomi. Lalu muncul pandangan baru mengenai pembangunan yang mengkritik pandangan tradisional. Pertumbuhan ternyata tidak identik dengan pembangunan sebab pertumbuhan yang tinggi masih memunculkan berbagai permasalahan dalam pembangunan seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran dan lain-lain. Konsep ekonomi pembangunan sebagai cabang ilmu ekonomi diuraikan dalam tulisan ini, termasuk evolusi makna pembangunan mulai dari awal munculnya ekonomi pembangunan sampai saat ini.

B. PEMBANGUNAN EKONOMI

1. Ruang Lingkup Pembangunan Ekonomi

Akhir-akhir ini sebagian besar ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu dan lembaga internasional mulai memberikan perhatian besar terhadap permasalahan pembangunan di negara berkembang. Permasalahan ini sebelumnya telah dianalisis oleh para ekonom pada masanya. Para ekonom sejak zaman merkantilis, klasik hingga Keynes telah tertarik dengan masalah tersebut. Sebagai contoh di masa Klasik telah disinggung

masalah pembangunan ekonomi dalam karya Smith “*The Wealth of Nations*” pada tahun 1776 (Smith, 1776).

Permasalahan pembangunan muncul dan bangkit lagi pada saat Perang Dunia Kedua. Para ekonom mulai memberi perhatian terhadap masalah pembangunan, hal ini disebabkan beberapa faktor (Meier & Rouch, 2005), yaitu:

- a. Pada masa sebelum perang dunia kedua, negara berkembang umumnya adalah negara jajahan.
- b. Minim dan kurangnya perhatian dari para pemimpin negara-negara jajahan untuk membahas masalah pembangunan, mereka lebih mementingkan usaha dalam meraih kemerdekaan.
- c. Riset mengenai masalah di negara berkembang masih relatif sedikit dan terbatas Di kalangan para ekonom sendiri, penelitian dan analisis tentang masalah pembangunan ekonomi (masalah ekonomi jangka panjang) masih terbatas, perhatian lebih tertuju pada masalah ekonomi jangka pendek yaitu masalah pengangguran dan ketidakstabilan perekonomian.

Pasca perang dunia kedua, mulai tumbuh cepat perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi, sebabnya antara lain karena:

- a. Besarnya tekad negara-negara berkembang untuk mengejar negara maju dari sisi ekonomi. Berkembangnya keinginan untuk mengejar ketinggalan mereka dalam bidang ekonomi. Umumnya negara berkembang merupakan negara miskin dengan jumlah penduduk yang banyak sehingga *focus* negara ini adalah untuk memperbaiki nasib dan kesejahteraan rakyatnya dengan prioritas keperluan yang dianggap *urgent* seperti masalah kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan masalah perbaikan pembangunan lain dikesampingkan.
- b. Negara maju mulai peduli dengan nasib negara berkembang, ada rasa kemanusiaan dan keinginan membantu negara berkembang agar tidak tertinggal dari negara maju terutama dari sisi ekonominya. Motif untuk mendapat dukungan politik juga dilakukan seperti yang dilakukan negara Amerika kepada negara berkembang.

Peningkatan kesejahteraan dalam arti yang luas merupakan target dari kebijakan pembangunan. Pembangunan ekonomi menjadi bagian dari seluruh usaha pembangunan yang dilakukan oleh suatu masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya melalui peningkatan pendapatan serta pembangunan sosial, politik, dan kebudayaan. Dalam arti lain pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan perkapita dalam periode yang panjang. Konsep pembangunan ekonomi mencakup empat unsur penting, yaitu:

- a. Pembangunan merupakan sebuah proses
Konsep ini diartikan bahwa dalam ada suatu tahap yang harus dijalani bagi seluruh masyarakat atau rakyatnya. Sama halnya dengan individu yang baru lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui setiap tahap pertumbuhan. Setiap tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera haruslah dilalui.
- b. Pembangunan merupakan Kenaikan Pendapatan Per kapita
Pembangunan merupakan bentuk usaha dalam rangka peningkatan *income percapita* setiap negara. Dalam pencapaiannya maka diperlukan keaktifan dan keterlibatan seluruh masyarakat, pemerintah, unsur lain yang terdapat dalam suatu negara. Dengan kenaikan pendapatan perkapita maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai.
- c. Kenaikan Pendapatan Per kapita pada Jangka Panjang
Ketika *income per capita* relatif meningkat dalam jangka Panjang, artinya perekonomian dianggap mengalami perkembangan. Tentunya kenaikan pendapatan perkapita tidak selamanya harus menunjukkan kenaikan disaat muncul hal-hal diluar perkiraan seperti adanya musibah, bencana alam, masalah konflik dan kekacauan politik sehingga perekonomian mengalami resesi atau kemunduran. Meskipun hal tersebut hanya sementara, namun yang terpenting secara rata-rata perekonomian mengalami peningkatan setiap tahun.
- d. Penyempurnaan Sistem Kelembagaan
Perbaikan sistem kelembagaan dapat dilihat dari dua sisi yaitu perbaikan di sisi aturan main atau "*rule of the games*" pada peraturan

formal dan *non* formal serta perbaikan di sisi organisasi sebagai “pemain” dari aturan yang dibuat tersebut.

Pengertian pembangunan dimaknai dari tiga hal penting berikut yaitu suatu proses perubahan yang terjadi secara *continue* atau berkelanjutan, adanya kenaikan pendapatan per kapita dan kenaikannya harus terus berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Dalam buku “*Economics for Development World: An Introduction*” dikemukakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan (Todaro, 2010). Adapun makna dari pembangunan sebagai suatu proses multi-dimensi yang didalamnya terjadi suatu “*structural change*” dari sikap, mental, sosial, institusi termasuk target capaian pembangunan seperti percepatan pertumbuhan dan masalah kemiskinan.

2. Paradigma Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi dilihat dari sudut pandang tradisional melihat pembangunan sebagai kenaikan pendapatan saja. Hal ini merupakan suatu jebakan paradigma sebab jika hanya menggunakan indikator ini maka pembangunan ekonomi tidak seperti harapan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dinegara berkembang tidak disertai perubahan dari sisi kualitas hidup rakyatnya. Hal ini yang berlangsung di beberapa negara berkembang. Hanya Sebagian kecil masyarakat yang menikmati dan merasakan pembangunan, bukan pada lapisan masyarakat miskin yang ada. Kualitas hidup masyarakat miskin tidak berubah menjadi lebih baik.

Pembangunan ekonomi bukan hanya dapat menciptakan penambahan *output* atau kekayaan masyarakat atau meningkatkan perekonomian saja, namun juga memberi kesempatan bagi masyarakat dalam melakukan pilihan secara lebih luas, masyarakat diberi kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih. Artinya akan semakin banyak pilihan barang pemuas kebutuhan dan kesempatan bagi seseorang dalam memilih kesenangan mereka. Dengan demikian adanya pembangunan ekonomi dapat memperkecil jurang atau *gap* diantara negara berkembang dan negara maju.

a. Paradigma Tradisional

Konsep pembangunan awalnya serupa dengan pertumbuhan atau *“development with growth”*. Namun setelahnya tak lagi serupa sebab konsepnya bergeser dengan menambah *“development with change”* di dalamnya. Dalam buku *“The Theory of Economic Growth”*, Arthur Lewis menyamakan pembangunan dengan pertumbuhan. Target pembangunan ekonomi yang terpenting adalah mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk mencapainya membutuhkan adanya pembentukan modal (*capital accumulation*). Akumulasi modal akan menciptakan industri baru dengan *value added* yang lebih tinggi. Konsep ini sulit diterapkan pada negara berkembang sebab sebagian besar negara berkembang adalah negara miskin yang sulit melakukan pembentukan modal, sehingga investasi asing maupun utang luar negeri menjadi pilihan bagi negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut.

Model pembangunan yang berorientasi mengejar pertumbuhan tentunya menimbulkan banyak permasalahan, diantaranya rusaknya lingkungan yang ditandai dengan meningkatnya pencemaran, polusi maupun kerusakan hutan. Masyarakat miskin semakin sulit. Ketika model pembangunan lebih mengedepankan industri yang bersifat *capital intensive* dibandingkan *labor intensive* yang menyebabkan semakin meningkatkan jumlah pengangguran. Begitupun dampak lainnya seperti semakin tidak meratanya distribusi pendapatan. Ketimpangan ini dikarenakan *“kue pembangunan”* yang tidak merata dan hanya dinikmati oleh kelompok pemilik modal atau golongan masyarakat kaya saja. Atau dengan kata lain *“memiskinkan”* orang miskin.

Selama ini pembangunan belum mampu menciptakan *trickle down effect*, namun justru menciptakan masalah baru yang krusial seperti masalah pengangguran maupun kemiskinan dan ketimpangan. Konsep *trickle down effect* (menetes ke bawah) dianggap belum berhasil. Pembangunan hanya berpusat pada kelompok atau wilayah tertentu saja, sehingga *“kue pembangunan”* belum dapat dirasakan pada semua lapisan masyarakat.

b. Paradigma Baru

Pada akhir tahun 1960, banyak negara sedang berkembang menyadari bahwa pertumbuhan (*growth*) tidak selalu identik dengan pembangunan (*development*). Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (*necessary*) tetapi tidak mencukupi (*sufficient*) bagi sebuah proses pembangunan (Esmara, 1986; Meier & Rauch, 2005). Pertumbuhan hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedangkan pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak lagi berorientasi pertumbuhan sebagai sasaran pembangunannya, namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses multi-dimensi yang mencakup berbagai aspek, dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi maupun *non*-ekonomi.

Pembangunan diartikan adanya pergerakan ke atas dari sistem sosial secara menyeluruh (Myrdal, 1974) Banyak pula pandangan yang memberi arti penting pada pertumbuhan dan perubahan ("*growth with change*"), terutama perubahan nilai-nilai dan institusi. Hal Ini dilandasi argumen adanya dimensi kualitatif yang jauh lebih penting dibanding pertumbuhan ekonomi. Dalam pembangunan, bukan hanya pendapatan per kapita yang meningkat secara menerus dalam kurun waktu lama, namun hal penting yaitu bagaimana agar tercipta pemerataan pendapatan dan tingkat kemiskinan dapat ditekan. Ada tiga sasaran penting dari pembangunan, Seers (1983), antara lain:

- 1) "*What has been happening to poverty?*"
- 2) "*What has been happening to unemployment?*"
- 3) "*What has been to inequality?*"

Myrdal, Dudley dan Seers, melihat bahwa cenderung pembangunan lebih banyak ditekankan masalah sosial, seperti pengurangan kemiskinan, angka pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hal tersebut, maka pembangunan haruslah ditujukan pada perluasan kesempatan kerja dan pemerataan distribusi pendapatan. Selanjutnya konsep baru dari pembangunan ini yang kemudian digunakan.

Pembangunan ekonomi mempunyai dimensi kualitatif yang membutuhkan adanya perubahan struktur yang mendasar, seperti mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, Pendidikan, Kesehatan maupun peningkatan taraf hidup. Pembangunan ekonomi merupakan suatu cara perubahan ekonomi miskin yang berbasis sektor pertanian (primer) menuju perekonomian yang berbasis pada kehidupan kota yang *sustainable*. Pembangunan ekonomi yang berhasil ditandai dengan adanya sebaran pertumbuhan dan pengembangan ekonomi (Blackman *et al.*, 2001). Dengan demikian konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonom dapat dibedakan secara jelas.

c. Pembangunan dengan Pendekatan “Kapabilitas”

Amartya Sen seorang peraih Nobel bidang ekonomi di tahun 1998 yang memandang pembangunan dari pendekatan kapabilitas (*capability approach*). Menurutny untuk menentukan miskin tidaknya seseorang dapat dilihat dari *capability to function*. Pendapatan bukan tolok ukur seseorang disebut miskin melainkan Ketika kapabilitas itu hilang atau “deprivasi kapabilitas”. Hilangnya kapabilitas tentunya menyebabkan rendahnya kualitas hidup yang dapat dinikmati. Oleh karena itu dalam pembangunan harus mengarah pada terpenuhinya kapabilitas tersebut. Pendekatan yang dikemukakan Sen dalam memahami kualitas hidup (*quality of life*) lebih manusiawi (Sen, 1993).

Dalam pandangannya, tidak memandang pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan. Usaha meningkatkan kualitas hidup dan kebebasan harus menjadi *focus* yang lebih diperhatikan dalam pembangunan. Ukuran kemiskinan tidak didasarkan pada pendapatan ataupun utilitas sebagaimana yang digunakan selama ini. Kesejahteraan bukanlah sekedar komoditas yang dikonsumsi melainkan manfaat yang dapat diperoleh konsumen dari komoditas tersebut.

Kebijakan pembangunan cenderung berpusat pada upaya agar kesejahteraan ekonomi maksimal namun mengabaikan aspek nilai lainnya, seperti hak dan kebebasan. Dalam pembangunan, perlindungan hak dan kebebasan menjadi harus maksimal, bukan hanya pada kesejahteraan ekonomi semata. Jaminan pada kebebasan dapat berkontribusi positif bagi kesejahteraan ekonomi (Sen, 1993). Ia menilai negara-negara dengan

sistem demokrasi dianggap lebih mampu memberi kesejahteraan rakyatnya dibandingkan negara-negara otoriter.

Sen mengartikan kapabilitas sebagai kebebasan yang dimiliki seseorang dalam kaitannya dengan pilihan keberfungsian, sesuai dengan karakteristik pribadi dan kendali mereka atas komoditas. Pemikiran Sen membantu para ahli ekonomi pembangunan dalam menekankan pentingnya Pendidikan, Kesehatan, inklusi sosial maupun pemberdayaan. Para pakar telah menyimpulkan bahwa negara-negara dengan tingkat pendapatan tinggi namun standar kesehatan dan pendidikannya rendah merupakan negara yang “tumbuh tetapi tidak berkembang”. Dari pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan kapabilitas yang mengukur dari sisi kualitas hidup manusia, maka pembangunan akan lebih bermakna.

C. EKONOMI PEMBANGUNAN

1. Ruang Lingkup Ekonomi Pembangunan

Ekonomi pembangunan dapat diartikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang fokus pada aktivitas negara dalam meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan hidup masyarakatnya. Dalam ekonomi pembangunan membahas juga permasalahan pembangunan di negara berkembang serta mencoba memberikan solusi dan kebijakan yang dirasa tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut untuk mewujudkan pembangunan ekonomi.

Ruang lingkup ilmu *development economics* sangat luas. Bukan hanya membahas alokasi sumber daya agar efisien penggunaannya dan keberlanjutan, cabang ilmu ekonomi ini juga menjelaskan pentingnya hubungan faktor pembangunan seperti sosial, ekonomi, politik, serta institusi agar berjalan sinergis agar pembangunan ekonomi dapat segera tercapai. Luasnya cakupan studi ini meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya maupun politik dalam mencapai suatu transformasi baik *structural* ataupun kelembagaan secara keseluruhan demi tercapainya kemajuan ekonomi. Ilmu ekonomi pembangunan berupaya agar masyarakat miskin dapat keluar dari perangkap kemiskinan (“*poverty trap*”) dengan mencari strategi yang paling efektif untuk mencapainya. Peran pemerintah memainkan peran yang paling penting dalam ekonomi pembangunan

melalui pengambilan keputusan ekonomi yang terkoordinasi sebagai upaya mencapai transformasi ekonomi. Studi ekonomi pembangunan harus bersifat eklektik, berusaha mengkombinasikan model, teori maupun konsep baru yang relevan dengan pendekatan”multidisiplin”. Tujuan akhir ekonomi pembangunan adalah memberi pemahaman ekonomi negara berkembang agar kesejahteraan hidup masyarakatnya meningkat.

Cabang ilmu ini tidak hanya menganalisis masalah pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan transformasi *structural* saja melainkan juga berupaya meningkatkan potensi dan kualitas penduduk yang terukur dari sisi kesehatan, pendidikan maupun pekerjaannya. Ilmu ini menggabungkan teori dan metode yang bertujuan dalam menentukan faktor-faktor ekonomi dan *non* ekonomi sehingga dapat diterapkan pada level domestik atau internasional.

2. Perkembangan Ekonomi Pembangunan secara Teoritik

Teori ekonomi pembangunan dimaknai secara bervariasi, sebab acuan dari ilmu ini belum bersifat universal dan belaku umum, tidak seperti teori ekonomi mikro dan makro. Teori dari ilmu ini belum diterima secara luas dan baku sebab cakupan analisis dan pembahasannya sangat luas. Konsep ekonomi pembangunan rumit dan sulit terukur dibandingkan dengan konsep pertumbuhan ekonomi (Hess & Ross, 1997). Ada beberapa aspek yang dianalisis dalam ekonomi pembangunan menurut Arsyad (2015), diantaranya:

- a. Masalah Pertumbuhan ekonomi.
- b. Masalah akumulasi modal
- c. Masalah tabungan
- d. Dan masalah bantuan luar negeri

Keempat aspek tersebut berperan penting, meskipun belum diketahui pasti mana yang paling dominan diantaranya bagi pembangunan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan belum ada *grand theory* pembangunan sebagai acuan dasar dan bersifat general untuk menjelaskan proses pembangunan ekonomi (Arsyad, 2015). Berikut faktor yang menyebabkan ketidaksamaan pola analisis pembangunan:

- a. masalah yang kompleks dan rumit dan banyaknya faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi itu sendiri seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, akumulasi modal, transformasi struktural, maupun hutang luar negeri sehingga sulit mencari pola analisisnya.
- b. Belum memiliki *grand theory* yang digunakan sebagai acuan atau kerangka dasar yang berlaku umum dalam menentukan pola pembangunan ekonomi.

Namun demikian bukan berarti ciri pola analisis dalam ekonomi pembangunan sulit diketahui. Arsyad (2015) mengelompokkan ekonomi pembangunan dalam dua kelompok:

- a. Pertama, bersifat deskriptif dan analitis. Tujuan kelompok ini menggambarkan berbagai sifat perekonomian dan masyarakat di negara sedang berkembang, serta implikasinya sehingga program pembangunan ekonomi dikawasan tersebut tercapai.
- b. Kedua, memberikan pilihan-pilihan kebijakan pembangunan dalam rangka percepatan proses pembangunan di negara berkembang.

Berdasarkan dua pembagian kelompok di atas maka *economic development* merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas permasalahan pembangunan di negara berkembang dan memberi landasan teori dan strategi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut agar negara sedang berkembang tersebut mencapai pembangunan ekonomi yang cepat dan *sustain* (berkelanjutan).

D. NILAI INTI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan uraian mengenai konsep pembangunan, setidaknya ada beberapa hal penting yang melekat dalam sebuah pembangunan, diantaranya: adanya perubahan transformasi (*transformation*), kemajuan (*progress*), pertumbuhan (*growth*), modernisasi (*moderniation*) dan pembangunan (*development*). Perubahan itu dapat saja terjadi tanpa adanya pembangunan, begitupun pertumbuhan dapat terjadi tanpa adanya pembangunan. Dengan demikian, apakah pertumbuhan dan perubahan itu sama maknanya dengan pembangunan? Setidaknya

menurut Goulet (1971; Todaro & Smith, 2011), terdapat tiga nilai dasar atau tiga komponen nilai yang difungsikan sebagai konsep dasar dan sebagai pedoman dalam memaknai sebuah arti pembangunan sesungguhnya. Tiga nilai itu antara lain :

a. “Kecukupan (*sustenance*)”

Sustenance memiliki arti kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) atau kebutuhan penunjang kelangsungan hidup yang meliputi sandang (pakaian), pangan (makan), papan (tempat tinggal), pendidikan, kesehatan, keamanan serta komunikasi. Jika dari *basic need* atau kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kondisi “keterbelakangan absolut”. Keberhasilan pembangunan ekonomi ini merupakan prasyarat bagi membaiknya kualitas kehidupan. Kecukupan ini mencakup penyediaan barang dan layanan dasar yang diperlukan dalam menunjang kehidupan manusia pada tingkat terendah yang merupakan kebutuhan dasar.

b. Harga diri (*self esteem*)

Harga diri merupakan suatu kemampuan seseorang menjadi seorang insan atau pribadi. Harga diri sebagai bagian dari suatu kehidupan yang baik dan melibatkan perasaan serta bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Bentuk harga diri ini dapat disebut sebagai otentisitas, martabat, identitas, penghargaan, pengakuan maupun kehormatan. Perbedaan sifat dan bentuk harga diri ini menjadikan masyarakat di negara berkembang menjadi bingung sebab mereka merasa memiliki harga diri yang rendah Ketika bersosialisasi langsung dengan masyarakat maju dan modern yang mempunyai perekonomian dan teknologi yang sudah maju. Hal ini terjadi sebab ukuran yang universal dari keberhargaan diukur dari kemakmuran nasional. Bahkan Goulet (1971) menyebutkan bahwa “Pembangunan telah dilegitimasi sebagai tujuan karena merupakan hal yang penting, bahkan mungkin merupakan cara yang sangat berharga untuk meraih harga diri”.

c. Kebebasan (*freedom*)

Kebebasan dimaknai bukan hanya dari sisi politik atau ideologi saja, melainkan juga mencakup hak dan keleluasaan diri dari di rampasnya kondisi materil kehidupan, penjajahan sosial atas manusia,

alam dan kebodohan maupun keyakinan yang bersifat dogmatik, yang menyatakan bahwasanya kemiskinan itu adalah nasib yang telah di gariskan Tuhan. Pembangunan diartikan juga adanya suatu pilihan yang luas bagi masyarakat. Amartya Sen dalam bukunya *Development as Freedom* menyebut pembangunan sebagai kebebasan. Menurut penekanan Arthur Lewis mengenai pertumbuhan dan kebebasan. Ia memberikan kesimpulan bahwa tidak selamanya pertumbuhan ekonomi itu akan meningkatkan kadar kebahagiaan, akan tetapi pertumbuhan ekonomi itu akan memberikan banyak pilihan untuk manusia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sejumlah negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian ditandai dengan pendapatan yang tinggi seperti Cina, Arab Saudi, Singapura serta Malaysia ternyata mampu menghadirkan tingkat yang setara dalam hal kebebasan manusia.

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasanya pembangunan merupakan hal nyata yang memiliki bentuk fisik dan mental (*state of mind*) dari suatu masyarakat, negara, dengan melalui kombinasi tertentu seperti proses sosial, ekonomi dan lembaga dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik. Untuk tercapainya komponen yang baik tersebut, maka pembangunan harus memiliki tujuan. Proses pembangunan pada dasarnya harus memiliki tiga tujuan inti, menurut Todaro (2010) yaitu :

- a. Peningkatan pasokan ketersediaan serta perluasan saluran distribusi berbagai kebutuhan dasar.
- b. Meningkatkan standar kelayakan hidup, tidak saja dari sisi penerimaan namun penyediaan lahan pekerjaan, pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas maupun peningkatan nilai-nilai kultur dan kemanusiaan.
- c. Memberikan pilihan ragam ekonomi dan sosial bagi setiap individu sehingga mereka terbebas dari setiap perbudakan dan ketidakmandirian.

Pembangunan juga dapat dilihat dari sisi lain, yakni adanya peningkatan kapasitas dalam mempengaruhi kehidupan di masa depan. Bryant dan White (Effendy, 1989) melihat pembangunan dari empat aspek.

- a. Pembangunan harus menekankan pada peningkatan kapasitas (*capacity*), yaitu meningkatkan kemampuan pada apa yang harus dilakukan
- b. Pembangunan harus menekankan pada pemerataan (*equity*), memperhatikan ketidakmerataan pada sekelompok masyarakat
- c. Pembangunan diartikan adanya pelimpahan kekuasaan juga kewenangan (*empowerment*) pada rakyat dalam porsi yang lebih besar
- d. Adanya keberlanjutan (*sustainable*) dan “interdependensi” diantara setiap negara.

E. PEMBANGUNAN EKONOMI, EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Di dalam pembahasannya ilmu ekonomi selalu ada kaitannya dengan efisiensi dan alokasi kelangkaan (*scarcity*) dari sumber daya seperti: tenaga kerja, modal, dan teknologi yang erat kaitannya untuk menghasilkan produk secara optimal. Dalam Ekonomi pembangunan tidak selamanya berbicara mengenai alokasi sumber daya, tetapi berbicara juga mengenai kebijakan pemerintah baik ekonomi maupun *non* ekonomi. Hal itu melibatkan variabel ekonomi makro seperti pendapatan, investasi, kesempatan kerja dan gabungan faktor-faktor *non*-ekonomi seperti sumber daya efisien, perbaikan institusi (Lembaga), usaha perbaikan diri, nilai-nilai sikap ekonomi dan politik yang di lakukan oleh publik dan swasta untuk mempercepat dan memperbesar tingkat skala hidup.

Ekonomi pembangunan (*Development Economics*) didefinisikan sebagai "Bidang studi di dalam suatu ilmu ekonomi yang di dalamnya mempelajari tentang permasalahan ekonomi di negara berkembang dan kebijakan yang perlu dilaksanakan agar dapat mewujudkan pembangunan ekonomi" (Sukirno, 2017). Dalam buku "*Economics Development, Theory, History and Policy*" dijelaskan bahwasanya pembangunan ekonomi dahulu di definisikan sebagai proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat mengalami kenaikan dalam kurun waktu yang panjang (Meier & Baldwin, 1957). Dalam uraian tersebut terdapat tiga unsur : Pertama, pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses; Kedua, upaya peningkatan pendapatan perkapita dan ketiga, kenaikan

pendapatan per kapita harus berjalan dalam waktu jangka panjang. Ukuran perkembangan dengan menggunakan pendapatan per kapita mengandung kelemahan di dalamnya, di antaranya: pertama, sulitnya mengukur tingkat kesejahteraan karena sifatnya yang subyektif; kedua, dalam perhitungannya kurang dalam memperhatikan sisi pemerataan pendapatan; ketiga, pendapatan perkapita ini belum mampu menggambarkan mengenai pengangguran.

Walaupun demikian, karena tidak adanya indikator lain yang lebih tepat atau cocok, maka data pendapatan perkapita masih digunakan oleh ahli ekonomi dengan memiliki dua tujuan: pertama, memberikan gambaran secara kasar mengenai tingkat kemajuan atau kecepatan pembangunan ekonomi yang di capai pada suatu tahun; kedua membandingkan tingkat kemakmuran yang telah di capai oleh berbagai negara di dunia. Pakar atau ahli ekonomi pembangunan dan pakar perencanaan ekonomi pembangunan dalam memberikan definisi pembangunan ekonomi ini terjadi evolusi di dalam pemikiran mereka. Lalu lahir definisi pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Michael P. Todaro dalam bukunya **Economics for Development World; An Introduction to Principles Problem and Polecies for Development** yakni, *multidimension process* yang melibatkan di dalamnya sebuah transformasi sosial ekonomi.

Proses multidimensi yang melekat dalam Pembangunan ekonomi mencakup juga berbagai aspek dan kebijakan yang komprehensif, baik segi ekonomi maupun segi *non*-ekonomi. Di suatu negara keberhasilan pembangunan ekonomi di tampilkan kedalam tiga nilai pokok menurut Todaro & Smith (2011), yakni :

- a. Berkembang atau berprosesnya kemampuan individu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*).
- b. Rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia mengalami peningkatan.
- c. Masyarakat sudah dapat meningkatkan kemampuan dalam hal memilih (*freedom from seritude*) yang dimana hal tersebut salah satu dari hak asasi manusia.

Menurut Todaro dalam sasaran pembangunan itu minimal harus ada seperti : Kebutuhan Pokok, meningkatnya taraf hidup, dan memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial. Dalam memenuhi capaian sasaran pembangunan, diperlukannya strategi pembangunan ekonomi yang dimana strategi itu di arahkan kepada : Meningkatkan *output* nyata/ produktivitas yang tinggi yang terus menerus meningkat.

- a. Produktivitas tinggi dan terus mengalami peningkatan sehingga *output* nyata meningkat.
- b. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup dapat mempengaruhi pengangguran, sehingga mengalami penurunan dan tingkat penggunaan tenaga kerja dapat maksimal.
- c. Mengurangi dan memberantas kesenjangan
- d. Perubahan sosial, sikap mental, dan tingkah laku masyarakat dan lembaga pemerintah

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang di tambah dengan suatu perubahan. Literatur ekonomi pada umumnya mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang di gambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu yang apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (sukirno, 2017). Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu kenaikan GDP atau GNP tanpa melihat apakah peningkatan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sistem kelembagaan atau tidak. Secara umum, pertumbuhan ekonomi ini dapat digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi di negara maju. Sedangkan istilah pembangunan ekonomi untuk melihat perkembangan ekonomi di negara sedang berkembang.

Pembangunan ekonomi dapat diwujudkan jika salah satu syaratnya terpenuhi, yakni ketika tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk. Dalam proses pembangunan peningkatan pertumbuhan ekonomi harus mampu di imbangi dengan pertumbuhan penduduk. Namun demikian, cakupan pembangunan tidak sekedar sampai pada proses menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga hal lainnya seperti perubahan penggunaan sumber daya produktif untuk kegiatan

ekonomi, distribusi kekayaan di antara pelaku ekonomi dan penduduk serta perubahan dalam kerangka kelembagaan dalam masyarakat secara luas.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli bahwa secara prinsip pertumbuhan berbeda dari pembangunan. Pertumbuhan lebih melihat dari aspek kuantitas serta variabel-variabel ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan tujuan hasil (*output*) dalam suatu kegiatan ekonomi. Sedangkan pembangunan lebih melihat dari sisi kualitas sebagai proses merealisasikan potensi manusia. Perbedaan lainnya adalah dalam proses pembangunan hal yang perlu ditingkatkan adalah jumlah produksi serta kelompok masyarakat atau individu yang terlibat, sedangkan dalam pertumbuhan yang di tingkatkan hanya jumlah besaran produksi tanpa memandang bagaimana sebaran dan kontribusi kelompok masyarakat atau individu yang terlibat. Karenanya, pembangunan sebagai cara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kearah lebih baik tentunya harus memiliki implikasi tertentu, antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas (*capacity*) untuk mengembangkan kompetensi menuju suatu perubahan
- b. Adanya rasa keadilan (*equity*)
- c. Memberikan kuasa dan wewenang (*empowerment*)
- d. Jaminan akan adanya keberlanjutan pembangunan (*sustainable development*)

F. RANGKUMAN MATERI

Dalam paradigma lama tradisional perbedaan antara negara maju dan berkembang adalah dari sisi pendapatannya, namun pendapatan atau tepatnya pertumbuhan ekonomi bukanlah ukuran yang tepat dalam memaknai sebuah pembangunan. Karena pertumbuhan ekonomi masih menyisakan masalah pembangunan lainnya seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran dan lain sebagainya. Perkembangan selanjutnya muncul pandangan baru yang melihat pembangunan secara multidimensi. Pembangunan ekonomi juga harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar manusia maupun aspek lain seperti pembangunan berkelanjutan, perhatian terhadap alam dan lingkungan

maupun memperhatikan sisi kelembagaan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Berikan penjelasan yang menjadi dasar adanya pergeseran makna pembangunan.

Terjadinya pergeseran makna pembangunan dapat terjadi karena terdapat kesalahan dalam mengidentikkan antara pertumbuhan dengan pembangunan. Selama ini menggunakan acuan pertumbuhan ekonomi meskipun jika menggunakan acuan pertumbuhan nyatanya masih ditemukan banyak masalah pembangunan, sehingga dilakukan revisi dan paradigma baru untuk memperbaiki pandangan lama yang ada sebelumnya.

2. Sebutkan dan jelaskan tiga nilai inti pembangunan!

Tiga nilai inti pembangunan antara lain: pertama, kecukupan (*sustenance*), dimana tercukupinya kebutuhan dasar setiap masyarakat yang meliputi: sandang, pangan, papan, Kesehatan, Pendidikan, keamanan dan komunikasi. Kedua, penghargaan terhadap diri sendiri (*self esteem*) yaitu ketika seseorang mampu menjadi insan atau suatu pribadi dan menyangkut perasaan layak dan menghormati diri sendiri. Ketiga, Kebebasan (*freedom*), yaitu bukan hanya bebas dari sisi politik atau ideologi saja melainkan juga mencakup kebebasan atau emansipasi dari kondisi materiil kehidupan yang dirampas, dari penajahan sosial atas manusia, terhadap alam, ketidaktahuan maupun keyakinan yang bersifat dogmatik.

3. Jelaskan mengenai ilmu ekonomi pembangunan?

Ilmu ekonomi pembangunan sebagai salah satu cabang ilmu ekonomi yang membahas permasalahan di negara-negara berkembang dan kebijakan-kebijakan maupun strategi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan dan mempercepat pembangunan agar tidak tertinggal dari negara maju.

4. Bagaimana konsep pembangunan dengan pendekatan kapabilitas oleh Sen?

Dalam pembangunan harus mengupayakan pada pemenuhan “kapabilitas yang bernilai (*capability function*). Pendekatan ini lebih manusiawi dalam memahami kualitas hidup (*quality of life*). Menurut pendekatan ini pertumbuhan ekonomi tidak boleh dipandang sebagai suatu tujuan. Perhatian pembangunan ekonomi ditujukan pada upaya meningkatkan kualitas hidup maupun kebebasan.

5. Berikan perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan lebih melihat dari aspek kuantitas serta variabel-variabel ekonomi yang digunakan dalam peningkatan *output* suatu kegiatan ekonomi. Sedangkan pembangunan lebih melihat dari sisi kualitas sebagai proses merealisasikan potensi manusia. Dalam proses pembangunan diperlukan peningkatan jumlah produksi serta kelompok individu yang terlibat, sedangkan dalam pertumbuhan yang ditingkatkan hanya jumlah besaran produksi tanpa memandang bagaimana sebaran dan kontribusi individu yang terlibat. Perbedaan lain adalah pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara-negara maju sebab hanya melihat kenaikan pada pendapatan semata, sedangkan pembangunan ekonomi diartikan sebagai bentuk untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara sedang berkembang, yang juga melihat dari sisi multidimensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi Pembangunan* (5th ed.). UPP STIM YKPN.
- Blackman, A., Mathis, M., & Nelson, P. (2001). The Greening of Development Economics: A Survey. *Discussion Papers, January*, 1–43. <https://doi.org/10.22004/ag.econ.10662>
- Esmara, H. (1986). *Politik Perencanaan Pembangunan: Teori, Kebijaksanaan dan Prospek*. Gramedia.
- Goulet, D. (1971). *The Cruel Choice: A New Concept in The Theory of Development* (1st ed.). Atheneum.
- Hess, P., & Ross, c. (1997). *Economic Development: Theories, Ividence and Policies*. Harcourt Brace & Company.
- Meier, G. M., & Baldwin, R. E. (1957). *Economic Development: Theory, History, Policy*. John Wiley & Son, Inc.
- Meier, G. M., & Rauch, J. E. (2005). *Leading Issues in Economic Development* (Eighth Edi). Oxford University Press.
- Myrdal, G. (1974). What Is Development. *Journal of Economic Issues*, 8(4), 729–736.
- Seers, D. (1983). *The Political Economy of Nationalism*. Oxford University Press.
- Sen, A. (1993). Capability and Well Being. In *The Quality of Life* (p. 30). Oxford University Press.
- Sukirno, S. (2017). *Ekonomi Pembangunan* (8th ed.). Prenada.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed.). Erlangga.

EKONOMI PEMBANGUNAN

BAB 2: PEMBANGUNAN EKONOMI DUNIA

Roeskani Sinaga, S.P., M.Si

Universitas Simalungun

BAB 2

PEMBANGUNAN EKONOMI DUNIA

A. PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas proses, pola dan pembangunan ekonomi dunia, dimana pembangunan ekonomi mulai di perhatikan sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua yaitu abad ke-19. Abad ke-19 negara-negara yang merdeka mulai membenahi perekonomiannya untuk mengejar ketertinggalan. Negara-negara yang tertinggal mulai berbenah dan memperbaiki negaranya dan pembangunan ekonomi menjadi perhatian yang utama serta menjadi kebutuhan yang mendesak bagi negara-negara tersebut. Teori pembangunan ekonomi di dasari oleh tiga pilar yaitu pertumbuhan ekonomi, bantuan luar negeri dan perencanaan (Kuncoro 1997).

Menurut (Purnamasari 2019) ada beberapa *variable* yang menyebabkan kurangnya perhatian beberapa negara terhadap pembangunan ekonomi sebelum perang dunia kedua, yaitu:

1. Masih adanya penjajahan, dimana penjajahan ini mengutamakan keuntungan untuk negara penjajah dan tidak memperhatikan ekonomi negara yang dijajah. Negara penjajah hanya mengeksploitasi kekayaan negara jajahannya untuk bahan baku produksi di negara penjajah. Hal ini juga terjadi untuk negara Indonesia, dimana negara penjajah membawa hasil bumi Indonesia ke negaranya dan penjajalah yang menguasai perdagangan.

2. Kurangnya perhatian dari para pejabat ataupun pimpinan dan masyarakat negara terjajah. Perhatian yang kurang terhadap isu pembangunan ekonomi negara sendiri membuat pertumbuhan ekonomi menjadi tertinggal.
3. Teori mengenai pembahasan pembangunan ekonomi dikalangan para cendekiawan seperti ahli ekonomi, ahli sosial, dan ahli dibidangnya masih minim. Untuk ahli-ahli ekonomi barat sudah memusatkan perhatian untuk teori mengenai pembangunan ekonomi dan sudah menganalisis depresi ekonomi serta pengangguran.

Negara-negara Eropa mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari pertumbuhan penduduknya pada tahun 1820-an (Amerika Utara, Australia dan New Zealand). Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa negara tersebut tergolong negara maju, dimana sesudah Perang Dunia II taraf kemakmuran mereka mencapai tingkat yang sangat tinggi (Sukirno 2007). Negara-negara yang terjajah (India, Indonesia, Ghana dan negara lainnya) dan negara yang memiliki pemerintahan sendiri (China dan Thailand) pembangunan ekonomi tidak berjalan. Untuk negara Amerika Latin tidak jauh berbeda pertumbuhan ekonomi dengan negara-negara di Asia dan Afrika.

Berbagai studi empiris dilakukan mengenai sejarah perkembangan ekonomi di berbagai negara. Pada bab ini akan dibahas tentang pembangunan ekonomi dunia. Perkembangan perekonomian tiap-tiap negara berbeda, perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan tingkat pertumbuhan antara negara sedang berkembang dan negara maju. Menurut (Purnamasari 2019) ada beberapa faktor yang mendukung pentingnya tinjauan yang mendalam terhadap aspek-aspek pembangunan ekonomi oleh beberapa negara yaitu:

1. Negara-negara berkembang memiliki keinginan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Negara berkembang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi di bandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi, sehingga terjadi masalah jumlah penduduk yang tinggi dan sulit diatasi sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk yang miskin. Untuk mengatasi persoalan tersebut dibutuhkan pembangunan ekonomi.

2. Negara-negara maju memiliki keinginan untuk membantu negara-negara berkembang termasuk negara bekas jajahannya. Beberapa negara maju memberikan bantuan kepada negara berkembang dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian negara yang dibantu. Negara maju tersebut pasti memiliki maksud tertentu dengan memberikan bantuan, salah satu tujuannya adalah dukungan politik.
3. Pembangunan ekonomi di dukung untuk mencegah munculnya paham komunisme. Setelah Perang Dunia II berakhir ada transformasi dalam perpolitikan, dimana mulai muncul negara-negara berpaham komunis. Paham komunis ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Para ekonom menyoroti kekurangan dari paham komunis ini yaitu terjadinya monopoli pemerintahan, ini akan menjadikan tata politik negara hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Paham tersebut akan membatasi hak setiap warga negara dan tidak ada kebebasan Hak Asasi setiap individu.
4. Pemberian bantuan oleh negara maju ke negara berkembang bertujuan untuk mempererat hubungan antar negara sehingga meningkatkan hubungan ekonomi juga.

B. PERKEMBANGAN EKONOMI DI DUNIA

a. Jumlah Penduduk, Pendapatan Nasional dan Per Kapita Dunia

Tabel 2.1 Jumlah penduduk, pendapatan nasional (GDP), dan pendapatan per kapita Dunia

Tahun	Jumlah Penduduk (juta Jiwa)	GDP per Kapita (Dollar 1990, dalam PPP)	GDP Dunia (Dollar 1990, Miliar dalam PPP)
1	168	467	78,4
1000	265	453	120
1500	438	625	274
1820	1.042	712	741
1870	1.276	884	1.128
1913	1.793	1.543	2,767
1950	2.528	2.104	5.318
1990	5.269	5.149	27.133
2000	6.077	6.057	36.806

2010	6.783	7.814	53.704
2019	7.620	9.663	73.640

Sumber: (The World Bank 2021a)

Jumlah penduduk, pendapatan nasional (GDP), dan pendapatan per kapita dunia dapat dilihat di Tabel 2.1. Kegiatan ekonomi sudah dimulai dari zaman *Paleolithic* tetapi belum mengenal alat tukar. Sumber ekonomi pada zaman itu semua berasal dari alam. Seiring dengan berjalannya waktu jumlah penduduk meningkat, sumber daya alam yang tidak dibudidayakan semakin menurun, permintaan akan bahan baku meningkat membuat masyarakat mulai mengembangkan teknologi dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya. Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa:

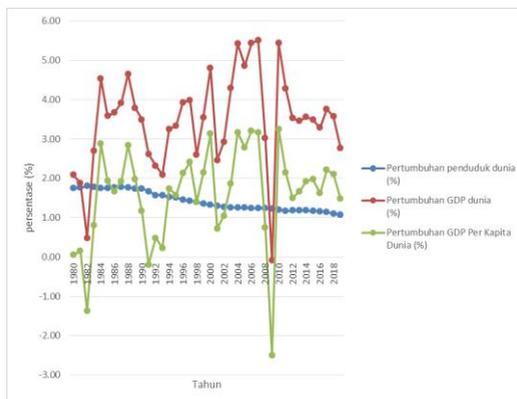
1. Pada tahun 1 adalah awal Masehi jumlah penduduk adalah 168 juta jiwa, GDP per kapita 467 Dollar AS, dan GDP dunia adalah 78,4 juta Dollar AS (tahun dasar 1990. Pada tahun 1 disebut sebagai abad kuno.
2. Pada tahun 1820-1913 jumlah penduduk adalah 1.042 juta jiwa menjadi 1.793 jiwa, GDP perkapita US\$ 712 menjadi US\$ 1.543 yang berarti mengalami pertumbuhan yang lebih dari 2 persen baik dari pertumbuhan penduduk maupun pertumbuhan GDP per Kapita. Pada tahun ini disebut dengan revolusi industri II di negara seluruh Eropa, Amerika Serikat dan Sebagian negara dunia (Hobsbawm *and* Wrigley 1999). Paham merkantilisme digantikan oleh paham kapitalisme yang lebih bebas. Revolusi industri adalah terjadinya perubahan penggunaan tenaga kerja (awal terjadi kasus ini adalah di Inggris) yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan ternak (hewan) kemudian digantikan oleh mesin atau teknologi. Revolusi Industri terjadi karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan sains. Akibat revolusi industri terhadap perekonomian adalah barang mulai melimpah dan harga terjangkau, perdagangan semakin berkembang, transportasi lancar, usaha yang masih menggunakan Tenaga kerja manusia maupun hewan banyak yang gulung tikar karena biaya produksi yang tinggi (Teich *and* Porter 1996).

3. Periode tahun 1913-1950, pada periode ini terjadi perang dunia I (tahun 1914-1918) dan perang dunia II (1939-1945). Pertambahan pendapatan perkapita lebih lambat dari periode 1870-1913. Akibat terjadinya perang dunia I dan II menyebabkan depresi ekonomi (Roses and Wolf 2010).
4. Periode tahun 1950-1990. Perkembangan GDP dunia sangat pesat yaitu US\$ 5.318 (1950) menjadi US\$ 27.133 (1990) artinya pertumbuhan GDP dunia per tahun rata-rata 10,25 persen. Pertumbuhan penduduk per tahun rata-ratanya adalah sebesar 2,16 persen sedangkan rata-rata pertumbuhan GDP perkapita per tahun adalah 2,90 persen. Pertumbuhan GDP perkapita lebih besar dari pertumbuhan penduduk. Periode 1950-an perekonomian Eropa dan Amerika berkembang sangat cepat. Pada tahun 1950-1973 PDB perkapita Eropa Barat bertumbuh 4 persen per tahun, ini tiga kali lebih besar perkembangan dari pada sebelumnya dan disebut *Golden Age* untuk Eropa Barat, dan dimasa inilah semakin berkembang industri untuk mendorong pertumbuhan perekonomian (Maddison 2008).
5. Periode tahun 2000-2010. Rata-rata jumlah pertumbuhan penduduk per tahun adalah 1,16 persen sedangkan rata-rata pertumbuhan GDP per kapita adalah 2,90 persen. Pertumbuhan GDP dunia per tahun rata-rata sebesar 4,59 persen. Gambar 2.1 menunjukkan pada tahun 2008-2010 terjadi pertumbuhan GDP per kapita dan GDP dunia negatif sehingga disebut dengan terjadinya krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini diduga berasal dari melonjaknya harga minyak dunia, dimana dampak kenaikan harga minyak dunia mendorong kenaikan harga bahan pangan sehingga teretuslah ide untuk membuat energi alternatif pengganti minyak. Energi alternatif pengganti yang dicetuskan berasal dari bahan pangan yang di ubah menjadi etanol dan biosel (Hidayat 2008). Adanya energi alternatif tersebut membuat permintaan akan pangan menjadi meningkat sehingga harga pangan naik. Selain naiknya harga minyak dunia pada tahun 2008 perekonomian Amerika Serikat dalam tahap bahaya resesi yang disebabkan oleh keuangan yang rapuh, pasar tetap lemah, adanya

ketidakjelasan bank-bank besar terkena dampak krisis kredit, tinggi harga minyak dan lemahnya daya beli konsumen (Sugema 2012).

6. Periode tahun 2010-2019. Pertumbuhan jumlah penduduk per tahun rata-rata sebesar 0,65 persen sedangkan pertumbuhan GDP per kapita per tahun rata-rata sebesar 1,25 persen. Pertumbuhan GDP dunia per tahun rata-rata sebesar 1,95 persen.
7. Periode tahun 2019-2021. Pada periode ini negara-negara dunia mengalami wabah pandemik yang membuat perekonomian setiap negara merosot. Wabah pandemik Corona Virus (Covid-19). Wabah ini dimulai dari Wuhan, dan kemudian menyebar keseluruh dunia termasuk Indonesia. IMF memprediksi selama wabah *pandemic* Covid-19 negara-negara maju (*advance Country*) mengalami pertumbuhan ekonomi antara -5,5 persen (Jerman) hingga -15,4 persen (AS), dan negara-negara maju diprediksi mengalami pertumbuhan minus 10, 7 persen (Junaedi *and* Salistia 2020). Pertumbuhan ekonomi negara menengah dan berkembang (*Emerging Country and Middle Country*) adalah rata-rata -9,10 persen sedangkan untuk Rusia -4,8 persen dan Afrika Selatan -13,3 persen (Junaedi *and* Salistia 2020). Negara Miskin (*Low Income Developing Country*) adalah sebesar -5,7 persen.

b. Perkembangan Pertumbuhan Penduduk, GDP per Kapita dan GDP Dunia



Sumber: World Bank, 2021 diolah.

Gambar 2.1 Kurva pertumbuhan populasi dunia (%), pertumbuhan GDP dunia (%), dan pertumbuhan GDP per Kapita Dunia (%)

Gambar 2.1 memberikan gambaran tentang pertumbuhan penduduk, GDP dan GDP per Kapita penduduk di dunia. Pada tahun 1980 pertumbuhan penduduk lebih tinggi di bandingkan dengan pertumbuhan GDP per Kapita. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertumbuhan *output* negara tersebut. Pertumbuhan *output* yang berupa barang dan jasa di pengaruhi oleh tiga komponen utama yaitu sumber daya alam, tenaga kerja dan jumlah persediaan barang. Dengan demikian jumlah penduduk atau populasi mempengaruhi GDP dan GDP per kapita suatu negara. David Ricardo dan TR Malthus mengkritik teori Adam Smith yang berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut David Ricardo pertumbuhan penduduk yang terlalu besar (hingga 2 kali lipat) bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Sedangkan sumber daya pangan bertambah menurut deret hitung (1,2,3,4, dan seterusnya), sedangkan pertumbuhan penduduk bertambah menurut deret ukur (1,2,4,8,16, dan seterusnya).

Gambar 2.1 dapat dijelaskan yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk dunia. Dari *trend* gambar 2.1 dapat dijelaskan mulai tahun 1980-2018 pertumbuhan penduduk dunia mengalami penurunan. Beberapa negara maju termasuk yang berkembang sudah mulai menerapkan peraturan untuk menekan pertumbuhan penduduk. Termasuk negara Indonesia melalui program KB dengan slogan dua anak cukup.
2. Pertumbuhan GDP Per Kapita dan GDP dunia. GDP per kapita diperoleh dari GDP dunia di bagi dengan jumlah penduduk dunia, maka gambaran GDP per kapita menggambarkan GDP dunia juga. Pertumbuhan GDP per kapita mengalami fluktuasi. Mulai tahun 1980 GDP perkapita mengalami penurunan bahkan pertumbuhannya sampai negatif pada tahun 1980. Pertumbuhan *negative* ini disebabkan naiknya harga minyak dunia dari tahun 1973-1974 dan 1979-1980, dan naiknya tingkat suku bunga tahun 1980-1982 sehingga menyebabkan perekonomian setiap negara menurun. Pada tahun 2008-2010 juga terjadi pertumbuhan GDP per kapita negatif. Seperti yang dijelaskan pada halaman sebelumnya, perekonomian global dipengaruhi oleh negara-negara maju lainnya.

C. PEMBANGUNAN EKONOMI TIAP-TIAP NEGARA

**Tabel 2.2 Pengklasifikasian Negara menurut UNDP,
Bank Dunia dan IMF**

Kategori Negara	UNDP	World Bank	IMF
<i>Developed Countries</i>	<i>Developed Countries</i>	Negara berpendapatan tinggi	Negara yang telah maju (<i>Advanced countries</i>)
<i>Developing Countries</i>	<i>Developing Countries</i>	Negara berpendapatan rendah dan menengah	Negara menengah dan berkembang (<i>Emerging and Developing Countries</i>)
<i>Development Threshold</i>	Distribusi indeks pembangunan manusia atau HDI 75 persen	GNI per kapita adalah US\$6.000 (dengan harga dasar 1987)	Tidak ada penjelasan
<i>Subcategories of developing countries</i>	<ol style="list-style-type: none"> Indeks pembangunan manusia yang rendah (<i>Low human development countries</i>), Indeks pembangunan manusia yang sedang (<i>Medium human development countries</i>), dan Negara indeks pembangunan manusia yang tinggi (<i>High human development countries</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> Negara berpendapatan rendah Negara berpendapatan menengah 	<ol style="list-style-type: none"> Negara berkembang dengan pendapatan rendah (<i>low-income developing countries</i>), dan Negara baru berkembang dan negara berkembang (<i>Emerging and other developing countries</i>)

Sumber: (Agussalim 2019), halaman 106.

Lembaga-Lembaga internasional mengklasifikasikan negara menurut perekonomiannya menjadi negara maju dan berkembang. Lembaga tersebut adalah United Nations Development Programme (UNDP), Bank Dunia, dan IMF. Setiap Lembaga memiliki ambang batas kategori yang berbeda dari waktu ke waktu. Tujuan mengklasifikasi negara tersebut adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan/masalah pertumbuhan ekonomi disetiap negara, dengan harapan adanya solusi untuk meningkatkan GDP per kapita negara tersebut (Vázquez and Sumner 2016). Dengan peningkatan GDP per kapita harapan untuk menjadi negara yang memiliki taraf hidup lebih tinggi terwujud. Klasifikasi negara menurut UNDP, Bank Dunia dan IMF dapat dilihat pada Tabel 2.2. Untuk sub bab berikutnya yang akan di bahas adalah kategori Negara berdasarkan klasifikasi ekonomi menurut IMF. IMF membagi negara menjadi 3 kategori pertumbuhan dan perkembangan ekonominya yaitu *advanced countries*, *emerging and developing countries*, dan *emerging market and income countries*.

a. Pertumbuhan Ekonomi di Negara *Advanced Economic* (Negara Maju)

Negara maju didefinisikan sebagai negara yang memiliki standar hidup yang relatif tinggi baik dari sisi ekonomi maupun teknologi. Menurut IMF, 2021 yang termasuk *Advanced Economic* adalah negara United States (US), Euro Area (Jerman, Prancis, Italia, Spanyol dan negara lainnya). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan PDB. Ada sejumlah alasan dasar untuk memilih pertumbuhan PDB dibandingkan indikator lain (seperti PNB). Tingkat pertumbuhan GDP real dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Pertumbuhan GDP Real di Negara *Advanced Economies*

Negara	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Advanced Economies</i>	1,4	2,0	2,3	1,8	2,5	2,3	1,7	-4,5
United States	1,8	2,3	2,7	1,7	2,3	2,9	2,3	-3,4
Europa Area	-0,2	1,4	2,0	1,9	2,6	1,9	1,5	-6,3
Japan	2,0	0,3	1,6	0,8	1,7	0,6	0,0	-4,6
United Kingdom	2,2	2,9	2,4	1,7	1,7	1,3	1,4	-9,8
Korea	3,2	3,2	2,8	2,9	3,2	2,9	2,2	-0,9

Canada	2,3	2,9	0,7	1,0	3,0	2,4	1,9	-5,3
Australia	2,1	2,6	2,3	2,7	2,4	2,8	1,9	-2,4
Taiwan	2,5	4,7	1,5	2,2	3,3	2,8	3,0	3,1
Switzerland	1,9	2,4	1,6	2,0	1,7	2,9	1,2	-2,5
Swedan	1,2	2,7	4,5	2,1	2,6	2,0	2,0	-2,8
Singapore	4,8	3,9	3,0	3,3	4,5	3,5	1,3	-5,4
Hong Kong	3,1	2,8	2,4	2,2	3,8	2,8	-1,7	-6,4
Czech Republic	0,0	2,3	5,4	2,5	5,2	3,2	3,0	-5,8
Israel	4,8	4,1	2,3	4,5	4,4	4,0	3,8	-2,2
Norway	1,0	2,0	2,0	1,1	2,3	1,1	0,9	-0,8
Denmark	0,9	1,6	2,3	3,2	2,8	2,0	2,1	-2,1
New Zealand	2,3	3,7	3,6	3,9	3,5	3,4	2,4	-2,1
Puerto Rico	-0,3	-1,2	-1,0	-1,3	-2,9	-4,2	1,5	-3,9
Macao	10,8	-2,0	-21,5	-0,7	10,0	6,5	-2,6	-56,3
Iceland	4,6	1,7	4,4	6,3	4,2	4,9	2,4	-6,5
Andora	-3,5	2,5	1,4	3,7	0,3	1,6	2,0	-12,0
San Marino	-0,8	-0,7	2,7	2,3	0,3	1,5	2,4	-6,5

Sumber: (International Monetary Fund 2021), halaman 112

Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju pada tahun 2013 berada pada tren yang membaik, meskipun secara umum masih melambat dari pertumbuhan tahun 2012 (tabel 2.3). Pada Tabel 2.4 menunjukkan akselerasi aktivitas manufaktur di AS dan Jepang menunjukkan peningkatan, ini terlihat dengan kenaikan GDP per kapita AS sebesar US\$ 22.140,1 (rata-rata 1961-2012) menjadi US\$53.106,5 (2013). Ini menandai arah perbaikan ekonomi negara maju tersebut. Indikasi pemulihan Kawasan Eropa juga mulai menemukan titik terang meskipun masih dipenuhi dengan ketidakpastian. Secara umum, tren kenaikan ekonomi negara maju tersebut belum dapat menopang perekonomian negara maju tahun 2013 untuk tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2012. Perbaikan ekonomi AS memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kawasan Eropa.

Tabel 2.4 GDP per kapita dalam US\$ Negara *Advanced Economies*

Negara	Tahun								
	1961-2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
World	3.874,6	10.784,7	10.951,8	10.223,0	10.267,6	10.801,4	11.345,3	11.394,9	10.909,3
United States	22.140,1	53.106,5	55.050,0	56.863,4	58.021,4	60.109,7	63.064,4	65.279,5	63.543,6
Euro area	15.418,8	39.099,6	39.853,1	34.366,4	35.134,7	37.058,1	40.038,3	39.168,7	37.938,5
Japan	20.617,0	40.898,6	38.475,4	34.960,6	39.400,7	38.891,1	39.808,2	40.777,6	39.538,9
United Kingdom	17.396,3	43.401,3	47.452,2	45.039,2	41.048,3	40.304,7	42.992,8	42.354,4	40.284,6
Korea, Rep.	7.404,3	27.182,7	29.249,6	28.732,2	29.288,9	31.616,8	33.422,9	31.846,2	31.489,1
Canada	18.272,2	52.635,2	50.956,0	43.596,1	42.315,6	45.129,4	46.454,7	46.326,7	43.258,2
Australia	17.452,3	68.150,1	62.510,8	56.755,7	49.971,1	54.028,0	57.355,0	55.057,2	51.812,2
Switzerland	35.358,6	88.109,5	89.684,7	84.776,1	83.073,3	83.352,1	86.388,4	85.334,5	87.097,0
Sweden	22.733,7	61.126,9	60.020,4	51.545,5	51.965,2	53.791,5	54.589,1	51.939,4	52.259,3
Singapore	14.616,5	56.967,4	57.562,5	55.646,6	56.848,2	61.176,5	66.679,0	65.640,7	59.797,8
Hong Kong SAR, China	13.436,2	38.403,8	40.315,3	42.431,9	43.731,1	46.165,9	48.542,7	48.354,5	46.323,9
Czech Republic	10.601,7	20.133,2	19.890,9	17.829,7	18.575,2	20.636,2	23.419,7	23.660,1	22.932,2
Israel	15.903,2	36.316,5	37.738,4	35.813,7	37.282,5	40.474,7	41.704,8	43.588,7	43.610,5
Norway	29.276,2	102.913,5	97.019,2	74.355,5	70.460,6	75.496,8	82.267,8	75.826,1	67.389,9
Denmark	25.490,2	61.191,2	62.549,0	53.254,9	54.664,0	57.610,1	61.591,9	59.775,7	61.063,3
New Zealand	12.851,2	42.976,6	44.572,9	38.630,7	40.080,5	42.992,9	43.306,1	42.755,2	41.477,9
Puerto Rico	9.762,3	28.513,2	28.981,5	29.763,5	30.627,2	31.108,8	31.604,7	32.850,5	32.290,9
Macao SAR, China	21.156,8	89.260,8	93.022,9	74.839,3	73.569,4	81.044,9	87.554,7	86.117,7	
Iceland	21.689,4	49.805,0	54.576,7	52.951,7	61.987,9	72.010,1	74.469,8	68.941,5	59.270,2

Sumber: (The World Bank 2021b)

b. Pertumbuhan Ekonomi di *Emerging Market and Developing Economies* (Negara Menengah dan Berkembang)

**Tabel 2.5 Pertumbuhan GDP Real di Negara
*Emerging and Developing Economies***

Negara	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Asia	6,9	6,9	6,8	6,6	6,4	5,4	-0,8	-4,5
Europa	3,1	1,8	1,0	1,9	4,1	3,4	2,5	-2,0
Latin America dan Caribbean	2,9	1,3	0,4	-0,6	1,4	1,2	0,1	-7,0
Middle East dan Central Asia	3,0	3,3	2,7	4,6	2,5	2,2	1,5	-2,8
Sub-Saharaan Africa	4,9	5,0	3,2	1,5	3,0	3,3	3,1	-1,7

Sumber: (*International Monetary Fund* 2021)

Negara menengah dan berkembang adalah negara yang tahap perekonomiannya masih dalam berkembang. Ciri-ciri negara berkembang adalah tingkat pendapatan perkapita rendah, impor lebih besar daripada ekspor, jumlah pengangguran tinggi, mengandalkan sektor primer, dan tingkat korupsi tinggi. Pada tahun 2018 terjadi perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat dan ini berakhir pada akhir tahun 2019. Perang dagang tersebut berdampak pada negara-negara berkembang yang menjadi mitra dari kedua negara tersebut. Ini dapat terlihat pada Tabel 2.5 dimana tingkat pertumbuhan negara di Asia rata-rata -0,8 persen. Akibat perang dagang tersebut membuat defisit perdagangan AS dan terjadinya kenaikan harga. Perang dagang kedua negara tersebut berimbas kepada perekonomian negara lainnya, secara keseluruhan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi global (Goulard 2020). World Bank mengelompokkan negara-negara berkembang ke dalam empat kelompok pendapatan, yaitu:

1. Negara yang memiliki pendapatan nasional per kapita rendah US\$975 atau kurang
2. Negara yang memiliki pendapatan nasional per kapita menengah bawah US\$ 976-US\$3.855
3. Negara yang memiliki pendapatan nasional per kapita menengah atas US\$ 3.856-US\$11.905
4. Negara yang memiliki pendapatan nasional per kapita tinggi lebih dari US\$11.905

Dengan demikian dapat dilihat dari Tabel 2.6 perkembangan pendapatan nasional per kapita negara-negara yang sedang berkembang. Beberapa negara berkembang masuk dalam kategori negara miskin, dimana pembentukan modal sangat sulit sehingga mengundang investor asing melalui Penanaman Modal Asing (PAM). Model pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pengembangan industrialisasi dilakukan oleh negara yang sedang berkembang. Hal tersebut menimbulkan masalah baru yaitu kerusakan lingkungan.

**Tabel 2.6 GDP per kapita dalam US\$ Negara
Emerging Market and Developing Economies**

Negara	Tahun								
	1961-2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
World	3.874,6	10.784,7	10.951,8	10.223,0	10.267,6	10.801,4	11.345,3	11.394,9	10.909,3
East Asia & Pacific	2.609,6	9.486,6	9.717,2	9.615,4	9.886,9	10.491,1	11.349,4	11.532,3	11.495,4
East Asia & Pacific (excluding high income)	865,7	5.886,7	6.299,5	6.514,9	6.605,3	7.168,1	7.963,0	8.189,0	8.286,4
East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries)	875,5	5.953,1	6.370,4	6.588,0	6.679,3	7.248,2	8.051,8	8.280,2	8.378,6
Latin America & Caribbean	3.030,0	10.339,8	10.433,0	8.631,0	8.351,8	9.187,4	8.893,4	8.692,7	7.202,6
Latin America & Caribbean (excluding high income)	2.877,4	9.829,4	9.775,9	8.241,1	7.930,7	8.743,8	8.395,1	8.213,1	6.733,1
Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries)	2.974,9	10.261,6	10.350,2	8.482,6	8.186,5	9.036,0	8.730,5	8.512,7	7.026,6
Low & middle income	1.035,7	4.565,2	4.660,5	4.369,5	4.340,3	4.707,9	4.929,9	4.998,0	4.745,3
Low income	339,4	694,7	733,1	713,8	658,7	663,1	667,4	688,3	689,1
Lower middle income	567,6	2.093,4	2.145,5	2.075,0	2.134,9	2.266,9	2.264,4	2.352,8	2.200,4
Sub-Saharan Africa	630,7	1.842,9	1.863,6	1.660,4	1.510,1	1.566,0	1.598,7	1.600,9	1.485,5
Africa Eastern and Southern	638,9	1.653,2	1.658,7	1.507,8	1.405,0	1.540,2	1.534,2	1.485,3	1.330,1
Africa Western and Central	623,3	2.123,4	2.166,7	1.886,2	1.666,4	1.607,0	1.696,0	1.772,3	1.714,4

Sumber:(The World Bank 2021b)

c. Pertumbuhan Ekonomi Dunia di Selama Wabah Corona Virus (Covid-19)

Kondisi perekonomian belum sepenuhnya meningkat pesat karena adanya perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok pada tahun 2018-2019. Akhir tahun 2019 terjadi pandemik Covid-19 yang awalnya terdeteksi di Wuhan, Tiongkok. Pandemi Covid-19 membuat perekonomian secara global mengalami penurunan ini dapat dilihat pada Tabel 2.7. Hasil *monitoring* IMF 2020 memperkirakan dampak dari pandemi Covid-19 di 3 kategori negara (*Advanced Economies, Emerging Market and Middle Income Economies* serta *Low Income Developing Countries*) memiliki pertumbuhan GDP negara negatif. Pada masa pandemi covid-19 beberapa negara memberlakukan *Lockdown* sehingga ada pembatasan aktivitas masyarakat termasuk aktivitas ekonomi. Beberapa negara yang GDP nasional berasal dari pariwisata akan terkena imbas, dimana ada pembatasan penerbangan antar negara dan itu berdampak pada perekonomian negara tersebut.

Tabel 2.7 Pertumbuhan Ekonomi Dunia (GDP real, dalam persentase)

Negara/Tahun	2020	Prediksi	
		2021	2022
Dunia	-3,12	5,88	4,89
<i>Advanced Economies</i>	-4,54	5,20	4,54
United States	-3,40	5,97	5,20
Euro Area	-6,34	5,04	4,35
Germany	-4,56	3,05	4,56
France	-7,99	6,29	3,93
Italy	-8,87	5,77	4,23
Spain	-10,82	5,74	6,39
Japan	-4,59	2,36	3,20
United Kingdom	-9,85	6,76	5,01
Canada	-5,31	5,69	4,89
<i>Other Advanced Economies</i>	-1,92	4,63	3,70
<i>Emerging Market and Developing Economies</i>	-2,07	6,37	5,15
<i>Emerging and Developing Asia</i>	-0,85	7,22	6,32
China	2,34	8,02	5,60
India	-7,25	9,50	8,52
ASEAN-5	-3,40	2,95	5,85
<i>Emerging and Developing Europe</i>	-1,97	5,99	3,59
Russia	-2,95	4,69	2,95
Latin America and the Caribbean	-7,02	6,34	3,05
Brazil	-4,06	5,23	1,52
Mexico	-8,31	6,25	4,00
<i>Middle East and Central Asia</i>	-2,79	4,11	4,07
Saudi Arabia	-4,11	2,84	4,83
Sub-Saharan Africa	-1,66	3,70	3,80
Nigeria	-1,79	2,64	2,66
South Africa	-6,43	5,00	2,16
<i>Memorandum</i>			
<i>Emerging Market and Middle-Income Economies</i>	-2,27	6,67	5,13
<i>Low-Income Developing Countries</i>	0,15	3,03	5,28

Sumber: (International Monetary Fund 2021)

D. RANGKUMAN MATERI

1. Pembangunan ekonomi dunia telah berkembang, pembangunan ekonomi setiap negara berbeda sehingga memunculkan istilah negara maju dan negara berkembang. Negara maju adalah negara yang Pada abad ke-19 negara-negara yang merdeka setelah perang dunia II mulai berbenah untuk memperbaiki perekonomian negaranya. Negara maju merupakan negara yang memiliki standar hidup yang relatif tinggi baik dari sisi ekonomi maupun teknologi. Negara menengah dan berkembang adalah negara yang tahap perekonomiannya masih dalam berkembang. Ciri-ciri negara berkembang adalah tingkat pendapatan perkapita rendah, impor lebih besar daripada ekspor, jumlah pengangguran tinggi, mengandalkan sektor primer, dan tingkat korupsi tinggi.

2. Pembangunan ekonomi penting karena negara-negara berkembang memiliki keinginan untuk mengejar ketertinggalan mereka dimana negara berkembang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi di bandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi, sehingga terjadi masalah jumlah penduduk yang tinggi dan sulit diatasi sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk yang miskin. Negara-negara maju memiliki keinginan untuk membantu negara-negara berkembang termasuk negara bekas jajahannya. Pembangunan ekonomi di dukung untuk mencegah munculnya paham komunisme.
3. Indikator yang biasa digunakan oleh para ekonom untuk mengukur tingkat perekonomian oleh suatu negara adalah melalui pertumbuhan GDP real negara tersebut.
4. Pandemi Covid-19 membuat perekonomian global menurun karena adanya pembatasan aktivitas setiap individu, sehingga berdampak pada perekonomian. Negara-negara yang terpapar Covid-19 memberlakukan *Lock-Down*, dimana banyak kegiatan yang terhambat sehingga berpengaruh terhadap perekonomian rumah tangga dan berdampak pada GDP Nasional.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan mengapa pembangunan ekonomi sebagian negara kurang diperhatikan sebelum perang dunia II?
2. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor pendorong pembangunan ekonomi oleh tiap negara?
3. Sebutkan dan jelaskan tiga komponen utama yang mempengaruhi *output* oleh suatu negara?
4. Jelaskan mengapa pada tahun 2008-2010 pertumbuhan GDP dunia, GDP per kapita bernilai negatif dan apa faktor penyebabnya?
5. Selama *pandemic* Covid-19 setiap negara mengalami pertumbuhan GDP dan GDP per kapita yang *negative*, jelaskan secara sistematis hubungan pandemi Covid-19 dengan perekonomian!

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, D. 2019. Contending Images of World Politics: Penelusuran Kritis terhadap Asal-Usul dan Perdebatan Mengenai Konsep “Developing Countries.”
- Goulard, S. 2020. The Impact of the US–China Trade War on the European Union. *Global Journal of Emerging Market Economies* 12(1): 56–68. DOI: 10.1177/0974910119896642
- Hidayat, A. 2008. Integrasi Ekonomi Asia: Solusi Asia Menghadapi Krisis Global 2008. *The Winners* 9(2): 180–190.
- Hobsbawm, E. J., and Wrigley, C. 1999. *Industry and Empire: from 1750 to the Present Day*. The new press.
- International Monetary Fund. 2021. *WORLD ECONOMIC OUTLOOK INTERNATIONAL MONETARY FUND Recovery During a Pandemic Health Concerns, Supply Disruptions, and Price Pressures*. International Monetary Fund.
- Junaedi, D., and Salistia, F. 2020. DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA TERDAMPAK. *Simposium Nasional Keuangan Negara* 2(1): 995–1013.
- Kuncoro, M. 1997. *Ekonomi pembangunan: teori, masalah, dan kebijakan*. Unit Penerbit dan Percetakan, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Maddison, A. 2008. The west and the rest in the world economy: 1000–2030. *World Economics* World Economics, 1 Ivory Square, Plantation Wharf, London, United Kingdom ... 9(4): 75–99.
- Purnamasari, S. 2019. *Ekonomi pembangunan*. (S. Hidayati and E. Mulyanto, eds.) Unpam Press, Banten.
- Roses, J. R., and Wolf, N. 2010. Aggregate Growth, 1913–1950. *The Cambridge economic history of modern Europe* Stephen Broadberry and Kevin H. O’Rourke 2: 181–207.
- Sugema, I. 2012. Krisis keuangan global 2008-2009 dan implikasinya pada perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* 17(3): 145–152.

- Sukirno, S. 2007. *EKONOMI PEMBANGUNAN: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta.
- Teich, M., and Porter, R. 1996. *The Industrial Revolution in national context*. Cambridge University Press.
- The World Bank. 2021a. World Development Indicators. <<https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=N.Y.GDP.MKTP.KD.ZG&country=WLD#>> (Nov. 10, 2021).
- The World Bank. 2021b. Countries and Economic. *The World Bank* <<https://data.worldbank.org/country>> (Nov. 10, 2021).
- Vázquez, S. T., and Sumner, A. 2016. Is the ‘developing world’ changing? A dynamic and multidimensional taxonomy of developing countries. *The European Journal of Development Research* Springer 28(5): 847–874.
- Agussalim, D. 2019. Contending Images of World Politics: Penelusuran Kritis terhadap Asal-Usul dan Perdebatan Mengenai Konsep “Developing Countries.”
- Goulard, S. 2020. The Impact of the US–China Trade War on the European Union. *Global Journal of Emerging Market Economies* 12(1): 56–68. DOI: 10.1177/0974910119896642
- Hidayat, A. 2008. Integrasi Ekonomi Asia: Solusi Asia Menghadapi Krisis Global 2008. *The Winners* 9(2): 180–190.
- Hobsbawm, E. J., and Wrigley, C. 1999. *Industry and Empire: from 1750 to the Present Day*. The new press.
- International Monetary Fund. 2021. *WORLD ECONOMIC OUTLOOK INTERNATIONAL MONETARY FUND Recovery During a Pandemic Health Concerns, Supply Disruptions, and Price Pressures*. International Monetary Fund.
- Junaedi, D., and Salistia, F. 2020. DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA TERDAMPAK. *Simposium Nasional Keuangan Negara* 2(1): 995–1013.
- Kuncoro, M. 1997. *Ekonomi pembangunan: teori, masalah, dan kebijakan*. Unit Penerbit dan Percetakan, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

- Maddison, A. 2008. The west and the rest in the world economy: 1000-2030. *World Economics* World Economics, 1 Ivory Square, Plantation Wharf, London, United Kingdom ... 9(4): 75–99.
- Purnamasari, S. 2019. *Ekonomi pembangunan*. (S. Hidayati and E. Mulyanto, eds.) Unpam Press, Banten.
- Roses, J. R., and Wolf, N. 2010. Aggregate Growth, 1913–1950. *The Cambridge economic history of modern Europe* Stephen Broadberry and Kevin H. O'Rourke 2: 181–207.
- Sugema, I. 2012. Krisis keuangan global 2008-2009 dan implikasinya pada perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* 17(3): 145–152.
- Sukirno, S. 2007. *EKONOMI PEMBANGUNAN: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta.
- Teich, M., and Porter, R. 1996. *The Industrial Revolution in national context*. Cambridge University Press.
- The World Bank. 2021a. World Development Indicators. <<https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=N.Y.GDP.MKTP.KD.ZG&country=WLD#>> (Nov. 10, 2021).
- The World Bank. 2021b. Countries and Economic. *The World Bank* <<https://data.worldbank.org/country>> (Nov. 10, 2021).
- Vázquez, S. T., and Sumner, A. 2016. Is the 'developing world' changing? A dynamic and multidimensional taxonomy of developing countries. *The European Journal of Development Research* Springer 28(5): 847–874.

EKONOMI PEMBANGUNAN

BAB 3: FAKTOR-FAKTOR PENENTU KESEJAHTERAAN

Dr. H. Asyari, S.Ag., M.Si., CSS., CRP

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bukittinggi-Sumatera Barat

BAB 3

FAKTOR-FAKTOR PENENTU KESEJAHTERAAN

A. PENDAHULUAN

Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Setiap negara menempatkan tujuan ini sebagai fokus dan sekaligus barometer keberhasilan kepemimpinan kepala negara. Oleh karenanya segala sumber daya yang dimiliki diolah secara maksimal dan dialokasikan untuk tercapai dan terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut dilakukan dengan menstimulasi tabungan, riset dan pengembangan, mengadopsi teknologi pada dunia industri, memperkuat perdagangan internasional dan meningkatkan kualitas pendidikan (McTanggar, 1953). Pendapat lainnya menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi didorong oleh berbagai faktor; diantaranya; (1). sumber daya alam, (2). akumulasi modal, (3). organisasi (4). kemajuan teknologi (5). pembagian kerja dan skala produksi (6) sumber daya manusia (Adisasmita, 2013).

Secara bahasa ada 3 istilah yang dipakai untuk menyebutkan kesejahteraan; *happy*, *wellbeing* dan *welfare*. *Happy* berarti *feeling or expressing satisfied* (perasaan yang menggambarkan kesenangan). *Wellbeing* memiliki arti *beig happy or healthy* (menjadi bahagia atau sehat). Sedangkan *welfare*, berarti *good health, happiness or comfort* (kesehatan yang baik, bahagia atau menyenangkan) (AS Horby, 1985). *Happiness* pertama kali diusung oleh Socrates dan diikuti oleh Aristipus,

plato, Epicurus, Aristoteles dan Jeremy Bentham (Ismail & Haron, 2014). Jeremy Bentham mendefinisikan *happiness* yang populer dengan sebutan *greatest happiness with greatest number* atau lebih dikenal dengan istilah lainnya *more is better* (Ismail & Haron, 2014)

Para ahli selain tidak detail memberikan arti terhadap kebahagiaan juga terdapat ketidaksamaan dan ketidaksepakatan di kalangan mereka. Dalam ilmu ekonomi, kebahagiaan adalah suatu yang sulit diartikan namun meskipun demikian kebahagiaan dapat diukur. Ng (1997) mengartikan kebahagiaan sama dengan kata *welfare*. Clark dan Oswald (1994), mengartikan kebahagiaan sebagai *pleasure* atau *satisfaction*. Easterlin (1995), tidak membedakan *well-being* dengan *satisfaction*, *utility* dan *welfare*. Frey dan Stutzer (2002) mendefinisikan kebahagiaan sebagai *subjective well-being* yang direpresentasikan atau proksi bagi *utility*. Kebahagiaan dalam pandangan ahli sosiologi adalah tidak berbeda dengan *life satisfaction*. (Veenhoven, 1988), lebih lanjut dia menjelaskan bahwa kebahagiaan sebagai *over all appreciation of one's life as a whole*. Jerami Betham, mendefinisikan *the sum of pleasure and pains*. Komponen kebahagiaan terdiri dari afektif dan kognitif. Dalam psikologi, kebahagiaan tidaklah sama dengan *life satisfaction*. Psikolog menggunakan kata *subjective well being* suatu keadaan kesejahteraan secara umum dalam durasi yang panjang (*long run*) meliputi komponen efektif dan afektif (Clark, Frijters, & Shields, 2008; Clark & Oswald, 2016; Clark & Senik, 2011; Fleurbaey, 2012; Leite-Mota, 2007; Tinbergen, 1991). Dalam *literature* ekonomi istilah yang sering digunakan dan dimunculkan dalam kaitannya dengan kesejahteraan dan kebahagiaan adalah *welfare*, *well-being* dan *happiness* (Abdel-Khalek, 2011; Agama, 2012; Babigumira & Wunder, 2016; Cobb-Clark, Kassenboehmer, & Schurer, 2014; Kristoffersen, 2018; Ohtake, 2014).

Tulisan ini bertujuan untuk membentangkan apa faktor penentu dari kesejahteraan yang menjadi target utama setiap pembangunan yang dilaksanakan dengan sokongan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara Dalam pembahasan, tulisan ini menggunakan pendekatan ekonomi dan didukung oleh berbagai temuan penelitian. Selain itu juga karena berbagai perkembangan mutakhir tentang kajian *welfare* telah terjadi maka selain analisis faktor ekonomi sebagai penentuan

kesejahteraan (*wellbeing/welfare*) maka faktor *non* ekonomi seperti agama juga ikut menentukan *welfare*. Tinbergen menyebutkan bahwa *welfare* tidak hanya berkaitan dengan faktor-faktor ekonomi (materialistik) tapi juga dengan mental/spiritual) (Tinbergen, 1991). Di bagian akhir, pembahasan ini diperkenalkan pendekatan Islam (*islamic views*) tentang tentang kesejahteraan.

Pembahasan Materi

Berdasarkan berbagai temuan penelitian dijelaskan bahwa terdapat banyak faktor. yang menentukan kesejahteraan. Bagian ini berisikan pembahasan terkait faktor-faktor penentu kesejahteraan tersebut.

B. PENDAPATAN (*INCOME*)

Hubungan pendapatan dengan kesejahteraan telah banyak dijelaskan oleh para ahli melalui hasil riset-riset yang dilakukan, seperti; Easterlin, Stevenson dan Wolfers, dan Clark serta Ball dan Chernova (Babigumira & Wunder, 2016; Clark *et al.*, 2008; Clark & Oswald, 2016; Clark & Senik, 2011). Namun disampaikan bahwa temuan-temuan dari penelitian tersebut terdapat kondisi paradoks (Clark *et al.*, 2008). *Income* dengan kebahagiaan atau kesejahteraan tidak selalu berhubungan positif. Terdapat temuan bahwa masyarakat di negara-negara industri tidak lebih bahagia (*happier*) meskipun *economic growth* tinggi di negara tersebut (Easterlin., 1974; Winkelmann & Winkelmann, 1998).

Herrera dan Hamilto menemukan bahwa *income* dikaitkan dengan *happiness* melalui peran *social classes* dalam hidup. Dalam penelitian mereka dikenal ada 2 bentuk *social class*; *Objective Social Class* (OSC) dan *Subjective Social Class* (SSC). Karakteristik kelompok ini kebiasaan konsumsi. yang bersifat material. Umumnya mereka berasal dari kelompok dengan pendapatan yang lebih tinggi memiliki pengaruh pada kebahagiaan (Islam, Wills-Herrera, & Hamilton, 2009). Pendapatan yang hilang tersebut oleh keluar pekerja dari pasar kerja secara paksa memiliki dampak bagi kebahagiaan namun tidak berdampak bagi yang keluar secara sukarela/*volunteer* (Dave, Rashad, & Spasojevic, 2011).

Dalam konteks ekonomi makro, menurut Poernomosidi Hadjisarosa pendapatan yakni pendapatan per kapita bukan merupakan indikator tingkat kesejahteraan yang tepat bagi suatu wilayah. Sebagai contoh, suatu wilayah berpendapatan per kapita tinggi karena merupakan hasil kekayaan alam yang sangat potensial tapi tidak tersedia pelayanan dokter ahli paru sehingga masyarakat penderita sakit paru mesti mengambil keputusan untuk pergi ke kota untuk berobat (Adisasmita, 2013)

Pengukuran kinerja pembangunan ekonomi berdasarkan pendapatan per kapita mendatangkan berbagai sorotan dan kritikan para ahli di ranah ekonomi. Dari penelusuran literatur terdapat berbagai argumen bahwa pendapatan per kapita dipandang kurang tepat dipakai atau digunakan untuk menentukan ukuran atau tingkat kesejahteraan suatu negara:

1. pendapatan per kapita sebagai jumlah yang merefleksikan atau menggambarkan ukuran kasar jumlah pendapatan yang diterima oleh tiap warga negara. Gap pendapatan akan terjadi cukup lebar antar-kelompok di dalam masyarakat tersebut. Sebagai konsekuensi logisnya ukuran ini menyebabkan bias.
2. terdapat perbedaan ukuran satuan *currency* di setiap negara. Hal ini dapat menimbulkan bias jika dilakukan perbandingan kesejahteraan antar-negara (Huda *et al.*, 2015).

Ahli lainnya menerangkan bahwa ada beberapa argumentasi, pendapatan per kapita kurang akurat dalam mengukur kemakmuran di suatu negara, yaitu:

1. terdapat sektor *non*-keuangan yang masih diberlakukan di negara sedang berkembang, terutama negara-negara dimana industri keuangannya belum berkembang pesat. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam perhitungan pendapatan nasional.
2. kekurangan spesialisasi pekerjaan di negara-negara tersebut menyulitkan perhitungan pendapatan nasional karena distribusi atau asal bidang usaha begitu rancu.
3. tingkat kepemilikan rekening tabungan yang rendah di sebagian negara sedang berkembang. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar perkembangan keuangan inklusif di negara-negara sedang berkembang.

4. penduduk yang hidup di daerah pedesaan di negara sedang berkembang membuat sendiri benda-benda konsumsi dari barang-barang sederhana sehingga mampu menghemat atau meniadakan beberapa pos pengeluaran.
5. pendapatan nasional tidak mampu menampilkan biaya nyata pembuatan suatu barang, pengorbanan kesenangan dan waktu luang yang diberikan dalam proses produksi tersebut. Hal ini menyebabkan perhitungan pendapatan nasional seringkali menghitung terlalu rendah terhadap pendapatan nyata.
6. perkiraan pendapatan nasional tidak dapat mengukur secara tepat perubahan *output* yang disebabkan oleh perubahan tingkat harga.
7. perbedaan satuan mata uang di tiap negara menjadikan perbandingan pendapatan nasional secara internasional. Hal ini menjadi kurang akurat sebagai akibat dari konversi nilai tukar berbagai mata uang ke dalam satu mata uang bersama, yaitu dolar AS.
8. data penduduk yang kurang akurat di negara sedang berkembang akan menyebabkan perhitungan pendapatan per kapita suatu negara terbelakang bisa terlalu besar atau terlalu kecil.
9. terdapat kesulitan dalam mendefinisikan istilah pendapatan sebagai akibat dipergunakannya konsep yang berbeda-beda didalam menghitung pendapatan nasional di berbagai negara dan di dalam menghitung sumbangan aktivitas pemerintah terhadap pendapatan nasional. (Jhingan, 2011)

Rahardjo Adisasmita (Adisasmita, 2013), menyebutkan bahwa *income* per kapita sebagai ukuran kesejahteraan mengandung banyak catatan kekurangan; pertama; perbedaan kondisi geografis dan iklim. Perbedaan kondisi geografis dan iklim ini akan memiliki efek pada laju pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Daerah yang didataran dan beriklim panas dipandang memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang secara ekonomi dibanding daerah perbukitan dengan iklim yang dingin. Kedua, perbedaan corak masyarakat. Masyarakat yang memiliki kebiasaan menabung dan bekerja keras serta melaksanakan kegiatan yang produktif akan memiliki peluang untuk menikmati laju pertumbuhan ekonomi dibanding yang mementingkan konsumsi. Ketiga, perbedaan komposisi

produksi GDP dihasilkan dari berbagai komponen oleh seluruh sektor produksi. Setiap sektor produksi memiliki peran yang berbeda. Sektor yang dominan tentu membutuhkan modal yang besar yang akhirnya diharapkan berkontribusi ada laju pertumbuhan ekonomi. Keempat, perbedaan dalam distribusi pendapatan. Wilayah yang memiliki *income* per kapita yang sama tapi berbeda dalam distribusi pendapatannya akan mempengaruhi dalam laju pertumbuhan ekonomi. Kelima, koreksi positif. Kegiatan yang berskala mikro ada juga yang tidak terdata dan tidak masuk ke dalam nilai produk total karena berkategori ilegal tapi memiliki dan menghasilkan nilai. Keenam, koreksi negatif. Dalam proses produksi dampak lingkungan yang ditimbulkan tidaklah dapat dielakkan. Polusi udara telah menimbulkan sebuah masalah penting sebagai akibat dari kegiatan produksi dan industri pabrik berskala besar. Termasuk juga kerusakan lingkungan dalam bentuk ekosistem tumbuhan dan pencemaran sungai. Kondisi semua itu adalah berkategori eksternalitas negatif. Idealnya seluruh biaya yang ditimbulkan ini harus *diinput* ke dalam nilai produk nasional.

Terakhir ahli yang menjelaskan bahwa pendapatan per kapita yang berasal dari GDP tidak memperhitungkan biaya sosial (*social cost*) seperti, biaya eksternalitas, mementingkan peningkatan pendapatan absolut, mengabaikan distribusi pendapatan, tidak mengukur aktivitas di luar pasar atau transaksi informal dan mengabaikan dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan (Bergh, 2009). Fleurbaey, menyatakan bahwa GDP mengabaikan variasi kekayaan, jasa produksi rumah tangga (*household*), kerusakan lingkungan alam, kualitas relasi sosial, keamanan ekonomi dan keselamatan personal dan harapan hidup (Fleurbaey, 2012)

Pendapatan per kapita tidak mampu menunjukkan persamaan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat antar-wilayah atau bahkan antar negara. Hal ini terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi argumentasi mengapa terjadi perbedaan tingkat kesejahteraan meskipun tingkat pendapatan per kapitanya relatif sama: (1). pola pengeluaran masyarakat. Perbedaan pola pengeluaran masyarakat menyebabkan dua negara dengan pendapatan per kapita yang sama belum tentu menikmati tingkat kesejahteraan yang sama. Hal ini terkait dengan perbedaan gaya hidup dan kebiasaan yang terdapat pada setiap negara. (2). perbedaan iklim. Perbedaan iklim termasuk salah satu yang memungkinkan timbulnya

perbedaan pola pengeluaran masyarakat. Masyarakat yang hidup di empat iklim tentu akan memiliki pengeluaran yang berbeda dengan masyarakat yang hidup di dua iklim. (3). struktur produksi nasional. Perbedaan pada komposisi sektoral akan mempengaruhi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Suatu masyarakat akan menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih rendah jika proporsi pendapatan nasional yang digunakan untuk anggaran pemerintah dan pembentukan modal lebih tinggi dibandingkan di negara lain yang memiliki tingkat pendapatan per kapita yang relatif sama (Ibrahim, n.d.).

C. PENDIDIKAN (*EDUCATION*)

Kesejahteraan atau kebahagiaan memiliki hubungan dengan pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Chen (Chen, 2012) menemukan bahwa tidak dapat dijelaskan secara langsung hubungan pendidikan dengan kesejahteraan. Pendidikan memiliki pengaruh ke kesejahteraan dikaitkan dengan variabel lain. Penelitian ini menjelaskan bahwa pendidikan dan diikutsertakan (digabungkan) dengan variabel lain yaitu kemampuan mengembangkan hubungan lebih luas dengan yang lainnya akan mempengaruhi kesejahteraan.

Peneliti lainnya, menemukan bahwa pendidikan dapat meningkatkan kepercayaan diri. Adanya pendidikan dan munculnya rasa percaya diri dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan yang luas dan tinggi serta nantinya memperoleh *income*. Oswald, dkk (Blanchflower, Oswald, Blanchflower, & Oswald, 1994), mengungkapkan bahwa pendidikan akan menciptakan (*creat*) selain memberikan peningkatan kesempatan kerja yang luas dan semakin menarik juga dapat meningkatkan kualitas kerja yang semakin baik. Hubungan pendidikan dengan *wellbeing* ditemukan positif. Namun ada juga temuan yang menjelaskan hubungan positif pada level pendidikan yang *moderate*. Bahkan ada juga pendidikan yang ditempatkan sebagai *control variable*. (Kristoffersen, 2018)

Pendidikan memberikan keuntungan secara ekonomi dalam bentuk *economic returns* pada investasi human *capital*. Pendidikan memberikan manfaat langsung bagi individu melalui produktivitas, biaya yang lebih rendah *job search* dan pengurangan ketergantungan pada transfer

payment. Temuan lainnya mengungkap bahwa pendidikan menjadikan prospek produktivitas lebih tinggi bagi yang memiliki pendidikan dan prospek penerimaan (Babigumira & Wunder, 2016).

D. KESEHATAN

Kesehatan (*healthy*) dapat mempengaruhi kebahagiaan. Temuan di kalangan *expert* belum dapat dijelaskan dengan baik dalam satu kesepakatan. Di kalangan mereka terdapat perbedaan; ada yang menemukan pengaruh positif namun ada yang menjelaskan kesehatan mempengaruhi kebahagiaan dengan menyertakan variabel lainnya. Green dan Elliot, menyatakan bahwa orang yang lebih religius memiliki kesehatan mental tanpa membedakan agama. Singer, dkk (Singer, Hopman, & Mackenzie, 1999) menjelaskan bahwa penurunan kualitas kesehatan tidak terjadi meskipun umur bertambah. Hal ini karena umur yang semakin berkurang tentunya akan dilakukan penyesuaian mental terhadap penyakit dan penyesuaian ini membuat orang lebih kuat. Agama memiliki peran dalam penurunan kesehatan namun tetap dapat menciptakan orang bahagia.

E. MODAL SOSIAL

Selain faktor pendapatan, pendidikan dan kesehatan, kebahagiaan juga dipengaruhi oleh faktor lainnya yaitu *social capital* yang dijadikan proksinya adalah *social trust*. Bahkan diantara ahli ada yang menyatakan bahwa *more important* dari *income* sebagai faktor ekonomi. Ukuran lainnya *social capital* adalah ketahanan keluarga, kedekatan anggota keluarga, partisipasi publik dan *social norms*. Pada level mikro, hubungan *well being* dengan *social capital* yang menjadi fokus adalah dimensi interpersonal *trust* dan hubungan sosial. Dalam banyak penelitian, ditemukan bahwa *happiness* selain ditentukan oleh *economic conditions*, hubungan sosial menjadi satu determinan penting terhadap *wellbeing*. *Social capital* yang semakin tinggi menjadikan kondisi *wellbeing* lebih baik (Cobb-Clark *et al.*, 2014; Putnam1, 2001)

Modal sosial dalam bentuk kejujuran memiliki pengaruh terhadap kebahagiaan. *Trust* yang ada dalam hubungan antara individu di masyarakat dapat menciptakan kebahagiaan (HELLIWELL, 2019).

Kepercayaan kepada kelembagaan (*institution*) di masyarakat serta kerja sama secara *volunteer* di masyarakat menciptakan kebahagiaan (Francesco & Sarracino, 2012).

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan (*happiness*), Rayo dan Becker (Rayo & Becker, 2010), membuat formula untuk menyederhanakan :

$$W_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \epsilon_{it}$$

$X = x_1, x_2, \dots, x_n$ = variabel seperti ; sosio demografi, sosio ekonomi dan kondisi lembaga serta kondisi ekonomi. i = individu dan t = waktu (*time*).

Selain menggunakan formula di atas, ada juga dengan menggunakan daftar untuk pengukuran kesejahteraan. Daftar tersebut (Leite-Mota, 2007):

1. Konsumsi
 - I.A. Komponen kebutuhan individual yang bersifat material
 - !.B.1. Komponen kebutuhan yang bersifat spiritual
 - I.B.1. Keyakinan/Kepercayaan
 - I.C. Hubungan sosial
 - I.C.1. Hubungan kebahagiaan seksual
 2. Hubungan kebagian lainnya
 3. hubungan dengan anggota keluarga lainnya
2. Pendidikan Formal
 1. Pendidikan wajib
 2. Lanjutan
3. Aktivitas. produktif
 1. Diklat
 2. Kreativitas
 3. Kebanggaan pada kinerja
4. Bersenang-senang
 1. tersalurkannya hobi
 2. Liburan

F. PERSPEKTIF ISLAM TENTANG KESEJAHTERAAN

Dalam Islam ada dua terminologi yang terkait dengan kesejahteraan; masalah dan barakah. Kata masalah tidak ditemukan dalam al-Quran namun lawan dari kata ini adalah fasaid atau sayyi'ah. al-Quran menggunakan kata fasaid atau sayyi'ah sebanyak 108 kali. Masalah diartikan dengan segala sesuatu yang bermanfaat baik secara individu, *social* atau alam sekitar.

Sedangkan kata barakah, secara bahasa berarti *jiyadah* (bertambah), sa'adah, baqa dan taqdis. Secara istilah barakah memiliki arti Allah menetapkan kebaikan kepada sesuatu. Allah memberikan kepada sesuatu yang awalnya tidak ada kemudian Allah berikan atau anugerahkan kebaikan al-Quran menyebutkan 14 kali dan penyebutan barakah dengan menunjukkan kata tempat seperti menyebut, Makkah (QS. 3:96), menyebut benda seperti air (QS. 50:9), zaitun (QS.7: 97) (Agama, 2012).

Pembangunan dalam Islam memiliki makna lebih luas dan komprehensif dengan menyasar unsur dasar kemanusiaan. Islam mengintegrasikan semua elemen kemanusiaan tidak hanya unsur material namun juga spiritual dan moral (Muhammad, Abdul, & Manan, 1992). Islam tidak mengabaikan unsur materialistik. Islam memberikan ruang kepada hal yang bersifat materialistik, seperti pendapatan *income* per kapita dan faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat dan terus-menerus. Namun perlu diingat bahwa faktor-faktor tersebut harus menciptakan yang diinginkan Islam yaitu keseimbangan material dan *non-material* (Muhammad *et al.*, 1992)

G. RANGKUMAN MATERI

Kesejahteraan menjadi poin penting bagi pencapaian pembangunan ekonomi. Untuk memperoleh kesejahteraan ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya, pendapatan, pendidikan, kesehatan, *social capital*. Diantara faktor-faktor tersebut ditemukan juga oleh beberapa peneliti memiliki pengaruh melalui faktor lain baik itu sebagai mediasi ataupun moderasi.

Islam menempatkan kebahagiaan sebagai konsep yang luas. Horizon waktu kebahagiaan tidak hanya di dunia (*here*) tapi juga akhirat (*here after*). Untuk meraih kebahagiaan diperlukan keterpenuhan dua aspek; material dan *non* material secara seimbang.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan apa yang Saudara ketahui tentang konsep kesejahteraan
2. Jelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi kesejahteraan
3. Jelaskan apa saja kelemahan *income* per kapita sebagai ukuran kesejahteraan
4. Jelaskan pendapat Saudara, apakah Indonesia telah berkategori sebagai negara yang sejahtera?
5. Jelaskan konsep Islam tentang kesejahteraan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel-Khalek, A. M. (2011). Religiosity, subjective well-being, self-esteem, and anxiety among Kuwaiti Muslim adolescents. *Mental Health, Religion and Culture*, 14(2), 129–140. <https://doi.org/10.1080/13674670903456463>
- Adisasmita, R. (2013). *TEORI-TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agama, K. (2012). *Pembangunan Ekonomi Ummat, Tafsir Al Quran Tematik*. Jakarta.
- AS Horby. (1985). *Oxford Advanced Learner's* (New Edition, ed.). AS: Oxford University Press.
- Babigumira, R., & Wunder, S. (2016). [Publication information]. 1–1. <https://doi.org/10.1109/iccsp.2016.7754574>
- Bergh, J. C. J. M. va. den. (2009). The GDP paradox. *Journal of Economic Psychology*, 30(2), 117–135. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2008.12.001>
- Blanchflower, D. G., Oswald, A. J., Blanchflower, D. G., & Oswald, A. J. (1994). Estimating a Wage Curve for Britain 1973-90 Published by : Wiley on behalf of the Royal Economic Society Stable. *The Economic Journal*, 104(426), 1025–1043.
- Chen, W. chi. (2012). How Education Enhances Happiness: Comparison of Mediating Factors in Four East Asian Countries. *Social Indicators Research*, 106(1), 117–131. <https://doi.org/10.1007/s11205-011-9798-5>
- Clark, A. E., Frijters, P., & Shields, M. A. (2008). Relative income, happiness, and utility: An explanation for the Easterlin paradox and other puzzles. *Journal of Economic Literature*, 46(1), 95–144. <https://doi.org/10.1257/jel.46.1.95>
- Clark, A. E., & Oswald, A. J. (2016). *Unhappiness and Unemployment Published by : Wiley on behalf of the Royal Economic Society Stable URL : http://www.jstor.org/stable/2234639 Accessed : 08-04-2016 22 : 06 UTC*. 104(424), 648–659.

- Clark, A. E., & Senik, C. (2011). Will GDP growth increase happiness in developing countries? *Revue d'Economie Du Developpement*, 25(2–3), 113–190. <https://doi.org/10.3917/edd.252.0113>
- Cobb-Clark, D. A., Kassenboehmer, S. C., & Schurer, S. (2014). Healthy habits: The connection between diet, exercise, and locus of control. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 98, 1–28. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2013.10.011>
- Dave, D., Rashad, I., & Spasojevic, J. (2011). The Effects of Retirement on Physical and Mental Health Outcomes. *SSRN Electronic Journal*, 75(2), 497–523. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1024475>
- Easterlin., R. . (1974). Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence. In *Nation Aand Households in Economic Growth: Essays in Honour of Moses Abramowits* (pp. 89–125).
- Fleurbaey, M. (2012). Beyond GDP: The quest for a measure of social welfare. Part I. *Voprosy Ekonomiki*, 2012(2), 67–93. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2012-2-67-93>
- Francesco, & Sarracino. (2012). Money, Sociability and Happiness: Are Developed Countries Doomed to Social Erosion and Unhappiness? Time-series Analysis of Social Capital and Subjective Well-being in Western. *Social Indicators Research*, 109(2), 135–188. <https://doi.org/10.1007/sl>
- HELLIWELL, J. F. . (2019). *WELL-BEING AND SOCIAL CAPITAL: DOES SUICIDE POSE A PUZZLE ?* /www.jstor.org/stable/20734436 *WEL*. 81(3), 455–496. <https://doi.org/10.1007/sll205-006-0022-y>
- Huda, N., Rifaldi, I., Alhifni, A., El Hasan, S. S., Afrianti, S., & Noer, T. F. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*.
- Ibrahim, A. (n.d.). *Azharyah Ibrahim | Erika Amelia | Nashr Akbar Nur Kholis | Suci Aprilliani Utami | Nofrianto*.
- Islam, G., Wills-Herrera, E., & Hamilton, M. (2009). Objective and subjective indicators of happiness in brazil: The mediating role of social class. *Journal of Social Psychology*, 149(2), 267–272. <https://doi.org/10.3200/SOCP.149.2.267-272>
- Ismail, A. G., & Haron, N. (2014). Happiness in economics as understood across lsm and religion. *SAGE Open*, 4(4). <https://doi.org/10.1177/2158244014560543>

- Jhingan, M. (2011). *The Economic of Development and Planning 40th*. Delhi.
- Kristoffersen, I. (2018). Great expectations: Education and subjective wellbeing. *Journal of Economic Psychology*, 66(April), 64–78. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2018.04.005>
- Leite-Mota, G. (2007). *Why Should Happiness have a role in Welfare Economics? Happiness versus Orthodoxy and Capabilities*. (December 2007).
- McTanggar, D. (1953). *economics*. Australia: National Library of University.
- Muhammad, Abdul, & Manan. (1992). *Islamic economic: Theory and Practice*. Houder and Stoughton Ltd.
- Ohtake, F. (2014). Unemployment and happiness. *IZA World of Labor*, 59–74. <https://doi.org/10.15185/izawol.94>
- Putnam1, R. (2001). Kennedy School of Government, Harvard University. 1. *The Contribution of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-Being*, 117–135.
- Rayo, L., & Becker, G. S. (2010). Happiness, income and economic policy. *CESifo DICE Report*, 8(4), 13–16.
- Singer, M. A., Hopman, W. M., & Mackenzie, T. A. (1999). Physical functioning and mental health in patients with chronic medical conditions. *Quality of Life Research*, 8(8), 687–691. <https://doi.org/10.1023/A:1008917016998>
- Tinbergen, J. (1991). On the measurement of welfare. *Journal of Economic*, 7–13.
- Winkelmann, L., & Winkelmann, R. (1998). The Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines Why are the Unemployed So Unhappy? Evidence from Panel Data Author (s): Liliana Winkelmann and Rainer Winkelmann Published by : Wiley on behalf of The London School of E. *Economica*, 65(257), 1–15.

EKONOMI PEMBANGUNAN

BAB 4: PERMASALAHAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Rahmah Farahdita Soeyatno, S.P., M.Si

Universitas Pamulang

BAB 4

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN EKONOMI

A. PENDAHULUAN

Kemajuan pembangunan ekonomi itu sendiri menyiratkan bahwa pembangunan ini merupakan interaksi multidimensi yang dapat membawa pendapatan per kapita penduduk di negara berkembang untuk periode jangka panjang dan selanjutnya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial yang ramah. Pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan sebuah komponen pembangunan nasional yang telah dimodifikasi oleh pemerintah dengan tujuan akhir untuk memahami cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pembangunan nasional secara umum digambarkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Pembangunan Nasional, yaitu suatu upaya yang dijalani seluruh komponen negara untuk mencapai tujuan suatu negara.

Interaksi yang menyebabkan peningkatan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang sejalan dengan peningkatan dalam sistem kelembagaan merupakan keseluruhan ciri dari pembangunan ekonomi. Prinsip pokok dari pengertian pembangunan ekonomi adalah: a.) Proses, sebagaimana yang dikembangkan adalah interaksi atau perubahan yang terjadi secara terus-menerus; b.) Peningkatan pendapatan per kapita, karena sedang dikembangkan adalah pekerjaan untuk meningkatkan untuk setiap pendapatan kapita; c.) Peningkatan nilai pendapatan per kapita yang sedang berlangsung dapat terjadi ketika ada kecenderungan untuk meningkatkan pendapatan setiap

kapita sesekali dalam jangka panjang, dan d.) Perbaiki sistem kelembagaan, sebagaimana yang sedang dikembangkan harus mengingat perbaikan kerangka kelembagaan untuk semua bidang (misalnya moneter, politik, hukum, sosial, dan sosial), baik dari bagian kemajuan di bidang aturan main dan asosiasi yang menjalankan prinsip-prinsip aturan main (Arsyad, L., 2017, hal 7-8). Berdasarkan pemahaman tentang pembangunan ekonomi ini, sebuah indikator diharapkan untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi suatu negara. Keuntungan utama penanda ini adalah cenderung digunakan untuk memikirkan tingkat kemajuan kemajuan atau tingkat bantuan pemerintah daerah antar daerah atau negara dan untuk mengetahui contoh kemajuan setiap negara atau daerah. Petunjuk tersebut bisa berupa fiskal, finansial, sosial, dan politik (Arsyad, L. , 2017, hlm.11)

Definisi pembangunan ekonomi yaitu tahapan proses perubahan yang menuju perbaikan serta diimplementasikan secara sadar dan terencana demi meningkatkan taraf hidup individu yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang sejalan perubahan struktur ekonomi juga pola aktivitas ekonomi atau upaya peningkatan pendapatan perkapita melalui upaya pengolahan potensi. Kekuatan ekonomi berubah menjadi ekonomi riil yaitu melalui kegiatan investasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan pengetahuan, kompetensi, peningkatan keterampilan organisasi dan manajemen. Dengan pembangunan ekonomi, struktur ekonomi akan terjadi perubahan dari bidang pertanian ke industri atau dari bidang primer ke sekunder atau tersier. Perubahan suatu struktur akan mempengaruhi perubahan perannya dalam pendapatan nasional dan peluang kerja. Sejalan dengan itu, komitmen yang diberikan oleh setiap sektor akan bertransformasi dari hadirnya pembangunan ekonomi. Perbaikan pembangunan ekonomi yang diselesaikan secara konsisten memiliki efek, baik positif maupun negatif. Efek positif dari pembangunan ekonomi, adalah terbukanya kesempatan kerja, pendapatan yang meningkat, kehadiran fasilitas publik, serta perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat lokal yang umumnya berpusat di sektor ekonomi, telah beralih ke industri. Adapun Masalah atau Isu-isu pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang antara lain:

B. TANTANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2021

Perekonomian Indonesia selama triwulan II tahun 2021 mencatat perkembangan positif yang menarik dari maraknya pandemi virus Corona di pertengahan tahun 2020 yang mencapai 7,07% (yoy). Pameran ini berlanjut dengan peningkatan saat ini hingga triwulan utama tahun 2021 dan merupakan peningkatan yang paling tinggi dari triwulan terakhir tahun 2004 (7,16%, yoy). Perkembangan ini membuat nilai Produk Domestik Bruto asli pada kuartal berikutnya berada di atas harga Produk Domestik Bruto asli pada kuartal terakhir tahun 2019, sebelum pandemi Coronavirus. Perbaikan moneter ditopang dengan pelaksanaan yang pasti dari seluruh komponen kepentingan dan bidang usaha (LU). Ke depan, untuk mendukung perbaikan keuangan, Bank Indonesia akan terus meningkatkan koordinasi strategi dengan otoritas publik serta organisasi terkait, termasuk koordinasi strategi keuangan moneter, pendekatan untuk membangun, serta pertimbangan keuangan dan moneter, di tengah peningkatan kecepatan yang berkesinambungan dari program imunisasi dan pelaksanaan konvensi kesejahteraan (Indonesia, B., 2020).

Ranah fiskal moneter terutama belanja pemerintah dan tata kelola utang perlu diatasi secara hati-hati bagi negara yang terdampak pandemi. Salah satunya dengan meningkatkan efektivitas belanja dan utang negara agar berdampak positif terhadap pemulihan ekonomi. Saat ini Indonesia memiliki tantangan pemulihan ekonomi sebagai berikut : a) kebijakan PPKM yang dijalankan dari 3 Juli sampai 9 Agustus 2021, memberikan konsekuensi perlambatan ekonomi di kuartal III 2021 serta terkontraksi 1,7-2 persen; b). Pemerintah wajib disiplin mewujudkan target penurunan Covid-19 dengan kebijakan PPKM; c). Bidang pertanian, terutama tanaman pangan terkontraksi 8,16 persen, maka musti ditanggulangi pemerintah supaya tidak berakibat serius kepada ketahanan pangan nasional; d). Pemerintah wajib mengefektifkan program bantuan sosial, terutama bagi keluarga miskin; e). Otoritas pemerintah perlu mengantisipasi ekspor impor produk yang berbeda yang membantu produk domestik bruto. Misalnya, karena kekurangan kompartemen, administrasi *Customs Excise Information System and Automation* (CEISA) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak rumit; f) Mengantisipasi kebijakan pengetatan moneter

yang akan dijalankan oleh *The Fed* pada Oktober 2021 namun, dengan asumsi ekonomi (AS) menunjukkan perbaikan, ada kemungkinan lonjakan modal di pasar moneter publik yang dengan demikian akan mendorong turun rupiah (Rakyat, D. P. 2021).

C. MASALAH KRISIS DOMESTIK SELAMA PANDEMI COVID 19

Pemerintah Indonesia fokus berkomitmen dalam menjalankan pembangunan berkesinambungan berdasarkan aturan RPJMN 2020-2024 yang mana pembangunan berkesinambungan sudah disahkan selaku sebuah aspek yang dimaksudkan memberikan akses pembangunan yang adil serta inklusif, juga memelihara lingkungan hidup. Maka dari itu, pembangunan berkesinambungan harapannya bisa berdampak terhadap tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Sampai sekarang, semua negara di dunia masih berjuang dengan usaha penanganan Covid-19 serta memperbaiki ekonomi nasional. Kasus virus Covid-19 yang menyerang di banyak negara di semua dunia sudah menyadarkan akan urgensinya aspek lingkungan serta sosial pada aktivitas ekonomi. Hal ini membuat situasi pandemi jadi momentum yang pas guna mengimplementasikan sejumlah kebijakan pemulihan ekonomi yang mempertimbangkan aspek-aspek Keberlanjutan (Indonesia, K. K. B. P. R. (2021). Perbaikan keuangan yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan berhasil akan mempengaruhi model kemajuan yang kuat, tidak hanya dilihat dari bagian pembangunan moneter tetapi juga mencakup pengakuan nilai terdekat, sektoral, dan individu. Tujuan utama dari upaya peningkatan keuangan melewati pemahaman pembangunan yang paling penting, juga harus menghapus atau mengurangi tingkat ketidakseimbangan gaji, kebutuhan, dan pengangguran (Todaro, 2009). Dalam pelaksanaan pembangunan, pada dasarnya terdapat isu-isu lintas sektoral yang cukup signifikan yang biasanya mampu dimiliki oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagai berikut:

a. Industrialisasi

Pembangunan ekonomi memfokuskan terhadap kapasitas sebuah negara untuk menaikkan *output* yang bisa diatas tingkat pertumbuhan penduduk serta dibarengi terhadap munculnya perubahan pada struktur perekonomian dari bidang pertanian ke bidang industri. Di lain sisi

pembangunan industri dipengaruhi oleh kemajuan dari pembangunan ekonomi, sosial, budaya serta politik. Pembangunan ekonomi nasional yakni suatu sistem, oleh sebab itu kebijakan pembangunan sektor industri pada jangka panjang tidak sekedar dimaksudkan guna menjawab permasalahan dalam sektor industri namun wajib mampu menjawab permasalahan ekonomi secara nasional. Permasalahan itu diantaranya pertumbuhan ekonomi yang minim, minimnya infrastruktur, adanya ketimpangan pendapatan serta banyaknya jumlah pengangguran juga tingkat kemiskinan yang merebak. Persoalan serta tantangan yang dihadapi pada pembangunan ekonomi itu ialah suatu titik tolak pada rangka meningkatkan proses industrialisasi. Pembangunan sektor industri membutuhkan arahan serta kebijakan yang jelas, yang mana suatu kebijakan itu yakni menarik investasi industri dengan memberikan lokasi yakni kawasan industri. Kawasan industri merupakan suatu lahan satu hamparan yang dilengkapi terhadap banyak sarana serta prasarana baik berbentuk infrastruktur dasar ataupun infrastruktur pendukung yang akan dipakai perusahaan industri dengan bersama-sama serta dikelola oleh sebuah perusahaan yang mempunyai izin usaha kawasan industri (Priyarsono, D. S., *et al*, 2018).

Bukti nyata bahwa industri berperan penting dalam pengakuan roda perekonomian, termasuk konsistensi komitmen terbesar terhadap produk domestik bruto masyarakat. Tahun 2020, komitmen sektor industri pengolahan adalah 17,89%. Hal lainnya berupa presentasi besar dari daerah modern tercermin dalam mengamankan nilai komoditas dan spekulasi. Sedangkan untuk perdagangan ekspor sektor industri senilai USD 131,13 miliar adapun bertambah 80,30% dari total produk publik. Total investasi sektor industri pada tahun 2020 senilai Rp 272,9 triliun, mengalami peningkatan dari tahun 2019 yakni senilai Rp 216 triliun. Untuk mendorong pembangunan industri di negara ini, misalnya bekerja dengan perbaikan kawasan industri. Sampai saat ini, ada 128 daerah yang saat ini memiliki kawasan industri untuk beroperasi dan saat ini berfungsi. Untuk sementara, 38 Kawasan industri sampai saat ini masih dalam siklus pembangunan. Kemajuan kebutuhan rumah modern (KI) dalam RPJMN 2020-2024, jumlah 27 KI, sebagian besar di luar Jawa, khususnya 14 KI di Sumatera, 6 KI di Kalimantan, 1 KI di Madura, 1 KI di Jawa, 3 KI di Sulawesi

dan Maluku, 1 KI di Papua, tambahan 1 KI di Nusa Tenggara. Kementerian Perindustrian juga secara efektif melakukan peningkatan kecepatan peningkatan domain halal modern, khususnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Strategi Keterangan dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal (Indonesia, K. P.R., 2021). Direktorat Jendral KPAlI menambahkan, sarana untuk membangun keseriusan *industry* nasional juga ditempuh melalui pelaksanaan panduan *Making* Indonesia. Program ini berfokus pada kemajuan tujuh sektor untuk menerapkan inovasi terkomputerisasi dalam siklus penciptaan mereka agar lebih produktif dan kejam. Terdapat tujuh sektor prioritas yakni sektor industri makanan dan minuman, kimia, tekstil serta pakaian, otomotif, elektronik, farmasi, juga alat kesehatan. Sektor ini dapat menawarkan lebih dari 60% Produk Domestik Bruto Nasional, sehingga dipercaya bahwa Indonesia akan menjadi 10 besar ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030. Dalam mempercepat pelaksanaan teknologi industri 4.0 dalam perakitan di tanah air, Dinas Perindustrian telah memulai pengembangan *Advancement and Improvement Center*. Industri SDM 4.0. Di bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM), Kementerian Perindustrian memiliki program *e-smart* IKM. Dengan tujuan akhir untuk menarik usaha di seluruh dunia dan meningkatkan pasar perdagangan untuk kawasan industri, Kementerian Perindustrian melibatkan Indonesia sebagai *partner country Hannover Messe 2021* yang akan menjadi kekuatan penting bagi Indonesia untuk meningkatkan penilaian publik secara adil. Untuk memberdayakan kemampuan perakitan yang diperluas dan peningkatan kerangka kerja maju di negara ini. Selain itu, program penggantian impor 35% pada tahun 2022, yang diselesaikan bersamaan dengan perluasan penggunaan kreasi, mendukung perluasan desain modern, serta investasi yang berkembang. Indikator untuk menyelesaikan program penggantian impor ini mencakup penerapan *tariff measures*, *non-tariff measures*, *trade remedies*, serta tata niaga impor (Indonesia, K. P. R. , 2021).

b. Pertanian

Dapat dibuktikan bahwa dengan berkembangnya industrialisasi berbasis *non*-pertanian di dunia, terutama negara yang memiliki wilayah tidak luas, akan membawa perkembangan sumber daya dari sektor pertanian ke luar sektor *non* pertanian. Oleh karena itu, produksi pertanian di negara yang bersangkutan akan menurun karena tidak kompetitif dengan sektor lainnya. Isu ini secara efektif mulai muncul di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Korea Selatan, Taiwan dan Jepang. Dua isu ini akan mempercepat peluang pasar yang sangat besar untuk produk agribisnis di pasar dunia, dengan demikian negara-negara berbasis pertanian yang sebenarnya memiliki ruang yang cukup untuk pengembangan kawasan agribisnis, dimana Indonesia mempunyai kesempatan luar biasa supaya memanfaatkan hal tersebut. Hal ini karena kenaikan pendapatan masyarakat dunia akan meningkatkan produk permintaan yang permintaannya elastis terhadap perubahan barang, misalnya produk agribisnis yang merupakan dampak dari pengaruh kemajuan liberalisasi perdagangan dunia akan meningkatkan pendapatan negara-negara dunia (Saragih.B, 2018).

Jika dahulu pendorong utama berupa pertanian primer, melalui penyesuaian tujuan akhir yakni ke sektor industri pengolahan hasil pertanian primer, khususnya sektor agroindustri hilir. Hal ini menggambarkan bahwa sebelumnya aktivitas pertanian primer menentukan aktivitas industri pengolahan maka dewasa ini kegiatan industri pengolahan hasil guna menciptakan aktivitas pertanian primer dan selanjutnya menentukan aktivitas ketersediaan fasilitas/sarana produksi. Dengan cara ini, untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan pendapatan, penting untuk pengembangan sektor ekonomi yang mampu menggabungkan ekonomi antara budi daya dan industri atau jasa; antara ekonomi desa dan ekonomi kota; antara ekonomi dataran rendah dan tinggi; dan antara perekonomian Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Kemudian, setiap pembangunan ekonomi di daerah maju atau metropolitan akan menarik pembangunan ekonomi di daerah tertinggal atau pedesaan Pertanian merupakan sektor penggerak ekonomi mempunyai peranan penting di lingkup pembangunan ekonomi (Saragih. B, 2018). Pertanian bisa bekerja sama dengan bagus terhadap

bidang-bidang lain guna menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat, menurunkan kemiskinan, serta menjaga lingkungan. Bidang pertanian berperan terhadap pembangunan selaku sebuah aktivitas ekonomi, selaku mata pencaharian serta selaku teknik guna melestarikan lingkungan, hal ini membuat sektor pertanian menjadi suatu instrumen unik untuk pembangunan (Saepudin, A., 2012)

Sejak *pandemic* Covid-19 melanda Indonesia di awal tahun 2020 semua sektor mulai merangkak bangun lagi ke posisi awal usai merasakan keterpurukan. Beda halnya terhadap sektor pertanian, sektor pertanian membukukan peningkatan yang lebih tinggi daripada pertumbuhan PDB Nasional. Di Triwulan IV-2020 bidang pertanian menorekan pertumbuhan sejumlah 2,57 Persen (YoY). Oleh sebab itu bisa dinyatakan jika pandemi bukan faktor yang mempengaruhi kinerja sektor pertanian, tetapi masa tanam yang mempengaruhi masa panen raya masa tanam utama terutama padi terjadi di bulan November sampai Maret alhasil jika dihitung masa tanam padi di bulan November hingga Maret yakni 3 bulan, panen raya ada di bulan Februari hingga Juni. Hal tersebut yang menyebabkan siklus pertumbuhan sektor pertanian di triwulan IV-2020 selalu mengalami kontraksi (Statistik, B.P., 2021).

Pertanian merupakan bidang yang menjunjung tinggi ketahanan pangan, yang akan signifikan di tengah keadaan darurat ekonomi. Ini tidak hanya terbatas pada daya tahan tetapi juga masalah penerimaan asupan gizi individu. Ada tambahan perenungan yang mengangkat keseriusan sektor pertanian lebih tinggi. Keadaan pertukaran global, mengindikasikan sektor pertanian sedang terganggu. Darurat pandemi virus corona telah memperluas sumber kerentanan di kalangan pelaku ekonomi, termasuk petani. Misalnya, kasus di Jawa Barat, dengan aset terbatas dan unsur-unsur pandemi yang cepat, dibutuhkan skala prioritas dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sifatnya *low-pain high-gain* atau *low-hanging fruits*. Contoh simulasi adalah dengan memusatkan perhatian di wilayah penciptaan yang berfungsi untuk memasok hasil pertanian ke pasar-pasar di wilayah metropolitan berpenduduk padat. Di Wilayah Bandung Raya yang berpenduduk sekitar 8 juta jiwa dan memiliki tingkat ketergantungan pangan yang tinggi, atau di Wilayah Jabodetabek, perlu

dijamin bahwa koordinasi atau kelancaran logistik hasil pertanian dari pedesaan ke pasar (Yusuf *et al*, 2021).

c. Distribusi pendapatan dan kemiskinan

Definisi distribusi pendapatan menggambarkan disparitas/ketimpangan atau menyebarnya kemajuan pembangunan suatu daerah atau negara, baik yang diperoleh setiap individu atau dari tanggung jawab kepemilikan faktor faktor produksi di antara masyarakat (Hakiki, F. M., & Hayati, B., 2015). Disparitas dalam distribusi pendapatan ialah melibatkan kontras pendapatan antara masyarakat maupun perbedaan pendapatan antar daerah yang maju terhadap daerah yang tertinggal. Semakin besar *gap* pendapatan, semakin menggambarkan variasi dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan dapat memicu penyimpangan antar daerah. Hal ini tidak dapat dihindarkan karena adanya dampak aliran turun dari hasil secara luas ke daerah yang lebih luas yang tidak muncul secara sempurna (Hikmah, 2021).

Kemiskinan adalah problematika kehidupan yang sudah mendunia, dalam artian isu kemiskinan telah menjadi perhatian dunia, dan isu tersebut ada pada semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan sangat berbeda-beda (Mukhamad, 2018). Masyarakat miskin memiliki ketidakmampuan dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas produksi yang memadai, sehingga tidak mendapatkan manfaat dari proses pembangunan yang sedang terjadi. Kondisi demikian menggambarkan kemiskinan dengan gambaran situasi masyarakat yang tidak atau belum mampu untuk ikut serta dalam proses perubahan pembangunan ekonomi. Ketidakmampuan tersebut dapat disebabkan oleh pengaruh dari luar (*external factors*) maupun pengaruh dari dalam (*internal factors*). Pengaruh dari luar dapat disebabkan kondisi perekonomian suatu negara yang memburuk maupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum tepat sasaran dalam menurunkan angka kemiskinan, sedangkan pengaruh dari dalam dapat disebabkan karena pasrah dengan keadaan atau kurangnya usaha dalam meningkatkan kesejahteraan (Prawoto, 2019).

Menurut Mukhamad (2018), kemelaratan disebabkan oleh dua hal, pertama: Kemiskinan terjadi secara umum, atribut yang muncul dari daerah atau perilaku individu, khususnya: a) Aset modal terbatas, terbatas

(SDM) dapat diartikan sebagai sifat SDM, misalnya. kemampuan, instruksi, dan pemahaman; dan b) Tempat atau keadaan topografi suatu ruang yang terpencil dan sulit dijangkau, sehingga sulit untuk bekerja sama dengan suatu populasi yang diciptakan. Yang kedua, khususnya kebutuhan yang ditimbulkan oleh pengaturan kemajuan atau strategi pemerintah, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, khususnya: a) Peningkatan yang tidak menganggap terpencil dan sulit dijangkau di daerah atau daerah; b) Ada ketimpangan diantara pembangunan di wilayah desa atau metropolitan; c) Tidak adanya perhatian terhadap ruang lingkup usaha atau produk lokal atau UMKM. Ada berbagai jenis metode yang bisa dijumpai dalam mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk (*Distribution Income Disparities*), alah satunya adalah Kurva Lorenz (*Lorenz Curve*), Rasio Gini, dan *Regional Income Disparities* (Tiara, 2016).

Berdasarkan data BPS (2021) Maret 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia sebagai negara berkembang diperkirakan dengan *Gini Ratio*, yaitu senilai 0,384. Jumlah tersebut turun 0,001 poin apabila dibandingkan *Gini Ratio* pada September 2020 senilai 0,385 lalu meningkat 0,003 poin dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2020 yang sebesar 0,381. *Gini Ratio* di Perkotaan saat Maret 2021 tercatat senilai 0,401, naik dari *Gini Ratio* pada September 2020 senilai 0,399 dan *Gini Ratio* pada Maret 2020 senilai 0,393. Peningkatan *Gini Ratio* menyiratkan bahwa ada peningkatan tingkat ketidakseimbangan pendapatan. Sementara itu, *Gini Ratio* di wilayah pedesaan pada Maret 2021 tercatat senilai 0,315, turun dari Proporsi Gini September 2020 senilai 0,319 dan *Ratio Gini* Maret 2020 senilai 0,317. Dilihat dari proporsi ketidakseimbangan Bank Dunia, alokasi konsumsi untuk 40% terakhir adalah 17,76 persen. Hal ini menggambarkan bahwa belanja pengeluaran penduduk pada Maret 2021 termasuk kategori ketimpangan yang rendah. Apabila kategori dipisahkan menurut wilayah, informasi di wilayah kota senilai 16,81 persen merupakan kategori memiliki ketimpangan sedang. Untuk wilayah pedesaan, angka senilai 20,68 persen tersebut, yang tergolong klasifikasi ketimpangan rendah.

Hal tersebut disebabkan pembangunan ekonomi serta distribusi pendapatan cukup merata. Negara berkembang yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan yang berlebihan dalam distribusi

pendapatan maka perlu mengetahui cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Jika dilihat dari hubungan antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan maka terdapat efek dari kebijakan dan program yang melibatkan aspek *non*-pendapatan. Dengan cara mengidentifikasi empat area luas dari kemungkinan intervensi kebijakan pemerintah, yang sesuai dengan empat elemen utama berikut dalam penentuan distribusi pendapatan negara berkembang sebagai berikut (Todaro *et al*, 2012, p 243) :

1. Mengubah distribusi fungsional yaitu pengembalian dari tenaga kerja, tanah, dan modal dikendalikan oleh faktor harga tingkat pemanfaatan, dan bagian konsekuensi yang diperoleh dari pendapatan nasional masing-masing pemilik faktor;
2. Menurunkan distribusi ukuran yaitu distribusi pendapatan dari suatu ekonomi dicirikan sebagai sirkulasi ukuran dengan informasi tentang bagaimana kepemilikan dan kendali atas sumber daya yang produktif dan kemampuan kerja terkonsentrasi dan tersebar ke seluruh masyarakat. Kepemilikan sumber daya dan kemampuan kemampuan ini nantinya akan mempengaruhi distribusi pendapatan individu;
3. Memoderasi (mengurangi) distribusi ukuran di tingkat atas lewat progresif perpajakan atas gaji serta kekayaan pribadi. Pajak tersebut dapat memperluas pendapatan pemerintah menurunkan porsi kekayaan yang dapat dibelanjakan (*procured pay*), misalnya dengan kebijakan yang hebat, menempatkan ke dalam sumber daya manusia dan kebutuhan infrastruktur lain yang masih tertinggal, dengan cara ini memajukan pembangunan yang inklusif. (Penghasilan sekali pakai individu atau keluarga misalnya besaran hasil yang dapat diakses untuk konsumsi tenaga kerja dan produk dan tabungan);
4. Memoderasi (meningkatkan) distribusi ukuran pendapatan di level bawah lewat penggunaan pendapatan pajak publik untuk memberi upah masyarakat miskin melalui cara langsung (contohnya, dengan transfer tunai bersyarat atau tidak bersyarat) atau tidak langsung (seperti, lewat penciptaan lapangan kerja umum misal proyek infrastruktur lokal atau penyediaan pendidikan dasar dan layanan medis). Kebijakan publik seperti itu menaikkan tingkat upah riil orang miskin di atas tingkat pendapatan pribadi mereka sendiri dan secara

wajar saat terbangunnya kemampuan serta sumber daya individu yang hidup dalam kemiskinan.

d. Pertumbuhan penduduk

Dollar & Kray (2001) menyatakan pembangunan kelak membawa manfaat yang lebih besar untuk masyarakat miskin, apabila pembangunan dipadukan dengan pendekatan implementasi hukum, disiplin fiskal, penerimaan terhadap perdagangan dunia, dan sistem penghapusan kemiskinan. Dengan cara ini, untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan dan kemiskinan serta untuk menginspirasi pembangunan, diperlukan seperangkat kebijakan yang saling mendukung, yaitu menggabungkan empat komponen kebijakan antara lain (Todaro, 2012): (1) pengurangan variabel distorsi harga faktor, (2) mencapai perubahan struktural pada distribusi aset, pengaruh akses pendidikan, yang disertai dengan kebebasan demi mendapatkan penghasilan, (3) pengembangan distribusi pendapatan lebih lanjut: bagi golongan ekonomi kuat dijalankan dengan kebijakan perpajakan atas pendapatan serta nilai kekayaan, sementara bagi golongan ekonomi lemah dilakukan dengan penyediaan tunjangan finansial juga barang serta jasa dan konsumsi, (4) memperluas peningkatan inovasi dan kemajuan pemasangan yang menyoroti pada pemberian fasilitas perawatan medis, penginapan, pelatihan terjangkau, perebakan sarana pertanian, dan membuka lapangan usaha. Hal ini sesuai dengan riset Cingano (2014).

e. Perubahan Demografi

Berdasarkan tatanan demografis, negara Indonesia mempunyai modal yang cukup guna jadi bangsa maju di tahun 2045 serta termasuk ke dalam 5 negara dengan GDP Tertinggi dengan jumlah penduduk 319 juta jiwa penduduk yang mana 47% antara lain adalah produktif, 73% persen penduduk menjalankan urbanisasi dan 70% penduduk Indonesia merupakan *middle-class*. Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Tokyo *Fiscal Policy* Forum ke-5 yang diselenggarakan pada 20-21 November 2019 di Tokyo, Jepang, untuk menjadi negara maju di 2045 memerlukan syarat yaitu kesiapan infrastruktur, SDM berkualitas, kesiapan teknologi, perencanaan yang terinteraksi dengan daerah, dan

kebijakan ekonomi yang kredibel. Peningkatan penduduk usia produktif dan posisi *demographic dividend* yang menguntungkan dapat mendatangkan tantangan tersendiri bagi Indonesia, yakni kualitas pekerja yang rendah dan *miss-match* di pasar tenaga kerja. Menurut Suahasil, untuk mengatasi tantangan tersebut Pemerintah Indonesia memprioritaskan investasi pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) baik dalam konteks meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia melalui pembangunan sektor kesehatan dan sektor pendidikan maupun melalui penyiapan SDM Indonesia sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi yang siap menghadapi tantangan *knowledge economy* atau industri 4.0. Prioritas pembangunan SDM merupakan pilihan yang tidak populer secara politik, mengingat hasil pembangunan yang dilakukan tidak mudah untuk langsung dapat dilihat dalam jangka pendek. Namun demikian, aspek ini merupakan hal penting dan krusial untuk akselerasi pembangunan, maka pilihan ini harus dilakukan. SDM Indonesia yang sehat, berkualitas, kompetitif dan adaptif dengan dinamika perubahan menjadi kunci sukses menjadi negara maju. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan dan akademika perlu bekerja meyakinkan publik pentingnya investasi pembangunan sumber daya manusia agar negara-negara berkembang termasuk Indonesia tidak terjebak dalam kondisi tua sebelum kaya.

Tokyo *Fiscal Policy Forum* merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh *Policy Research Institute* (PRI) Kementerian Keuangan Japan, IMF, dan ADB *Institute* untuk mempertemukan para *policy maker* dan *experts* dalam suatu *melting pot* untuk mendiskusikan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dan kebijakan fiskal menghadapi tantangan penuaan populasi (*aging population*). Pada kesempatan ini delegasi Indonesia juga melakukan *financial policy dialog framework* dengan *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC) dan *Joint Working Group* (JWG) dengan Kementerian Keuangan Jepang. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan sebagai forum bertukar pikiran dalam upaya memperkuat kerja sama bilateral kedua negara di bidang ekonomi dan keuangan. Dengan JBIC, secara umum delegasi Indonesia membahas potensi dan tantangan situasi ekonomi saat ini, pembiayaan hijau, pembiayaan infrastruktur sosial, dan kolaborasi lebih lanjut antara

Bank Exim Indonesia dan JBIC. Sementara itu, dalam forum JWG, delegasi Indonesia mendiskusikan dukungan untuk sektor penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) dalam bentuk insentif fiskal (Indonesia, B.K.F.K.R. , 2021).

D. ISU-ISU INTERNASIONAL DI NEGARA-NEGARA PENGHASILAN RENDAH

Ketergantungan luar biasa dan kelemahan hubungan dunia di negara-negara keuangan negara berkembang sangat dipengaruhi oleh kondisi moneter negara-negara sekitarnya, terutama negara maju. Hal ini disebabkan oleh lemahnya minat dalam negeri, yang sangat bergantung pada pasar ekspor, khususnya barang dagangan yang diekspor, menjadi produk esensial tertentu. Pasar di negara berkembang umumnya tidak memberikan informasi lengkap. Struktur pasar tenaga kerja dan produk biasanya secara umum akan cacat. Memang, sindikasi dan oligopoli bisa terjadi di pasar faktor produksi. Demikian pula, sebagian besar informasi pasar hanya diperoleh oleh pelaku bisnis yang memiliki hubungan dekat dengan birokrasi yang ada. Kondisi informasi yang cacat ini hanya akan merugikan individu.

a. Bantuan luar negeri

Pada awalnya, utang luar negeri itu umumnya diambil oleh pemerintah. Pinjaman Pemerintah diperoleh sebagai wujud hibah dan pinjaman lunak dan berasal dari negara-negara lain dan lembaga *international*, melalui kerja sama bilateral atau multilateral (IGGI dan CGI). Seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia, pinjaman luar negeri yang bersyarat lunak dengan kondisi yang sulit ternyata semakin dibatasi, sehingga untuk keperluan tertentu dan dengan jumlah yang terbatas, pemerintah akan memanfaatkan pinjaman komersial serta obligasi dari kreditur swasta internasional. Perkembangan kemajuan yang semakin pesat dan tidak adanya kemampuan pemerintah untuk terus menjadi pendorong utama pembangunan nasional, terutama dari keadaan darurat harga minyak dunia selama tahun 1980-an, mengakibatkan pemerintah untuk melakukan upaya deregulasi di berbagai sektor pembangunan. Hal ini direncanakan untuk memberikan dukungan kepada

kerja sama swasta dalam pembangunan perekonomian Indonesia, dengan memperluas minat investasi di banyak sektor pembangunan yang diizinkan. Dengan meningkatnya minat investasi swasta, namun tanpa ditunjang oleh sumber-sumber dana investasi yang memadai di dalam negeri, telah mendesak pihak swasta untuk mengambil pinjaman ke luar negeri, baik sebagai pinjaman komersial maupun investasi portofolio, yang tentu saja biasanya dengan persyaratan kredit yang tidak menguntungkan. tidak rumit (bersifat bisnis), baik biaya pinjaman atau jangka waktu penggantian. Terlepas dari adanya perubahan struktur utang luar negeri Indonesia, utang luar negeri pemerintah masih menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan guna mengantisipasi konsekuensi dari APBN yakni sangat besar. Kemajuan utang luar negeri Indonesia kadang-kadang menunjukkan kenaikan dari waktu ke waktu. Hal ini menimbulkan banyak konsekuensi bagi masyarakat Indonesia, baik untuk sementara maupun jangka panjang. Untuk saat ini, utang luar negeri perlu dianggap sudah membuat kontribusi cukup besar untuk pembiayaan pada aspek pembangunan ekonomi nasional (Atmadja, 2000).

Posisi Utang Luar Negeri (UTL) Indonesia menjelang akhir triwulan II 2021 tercatat senilai US\$415,1 miliar, turun 0,1% (qtq) dibandingkan dengan posisi utang luar pada triwulan pokok 2021 senilai US\$415,3 miliar. Secara tahunan, peningkatan kewajiban luar pada triwulan II 2021 juga kembali menurun, dari 7,2% (yoy) pada triwulan lalu menjadi 1,9% (yoy). Perbaikan ini disebabkan oleh terhentinya pengembangan utang luar pemerintah dan penarikan utang luar negeri swasta. Situasi utang luar negeri pemerintah pada triwulan II 2021 mencapai USD 205,0 miliar, meningkat 4,3% (yoy), lebih rendah dibandingkan perkembangan triwulan pokok 2021 yang senilai 12,6% (yoy). Kemajuan ini dikarenakan oleh berkurangnya posisi pinjaman luar negeri (loan) sesuai dengan pelunasan dari pinjaman yang jatuh tempo selama triwulan kedua tahun 2021. Pelunasan pinjaman luar negeri merupakan komponen penting dalam menjaga kredibilitas pemerintah ketika mengelola UTL. Sementara itu, aliran masuk modal neto di pasar SBN domestik oleh *non-occupant financial backers* meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan perkembangan kepastian *financial backer*, sehingga mendukung likuiditas di pasar SBN *homegrown*. Pola positif dapat menjunjung tinggi

kewenangan pemerintah saat mengawasi pembiayaan secara hati-hati dan terukur. Pembiayaan merupakan menjadi bagian penting untuk penanganan pandemi virus corona seperti halnya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada triwulan II 2021 tercatat sebesar 207,2 miliar dollar AS, atau turun 0,8 (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dilihat dari sektornya, ULN swasta berasal dari sektor jasa keuangan serta asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa 76,3% dari total ULN swasta. ULN ini masih dibatasi oleh ULN jangka panjang dengan tujuan hingga 76,7% dari ULN swasta. Dampaknya terlihat jika ULN Indonesia pada triwulan kedua tahun 2021 masih terpenuhi sebagian, yang tercermin dari proporsi ULN Indonesia terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) yang dipertahankan sebesar 37,5%, merosot dibandingkan proporsinya pada triwulan sebelumnya senilai 39,0%. Selain itu, konstruksi kewajiban luar negeri Indonesia tetap baik, terbukti dengan kewajiban luar negeri Indonesia yang tetap kewalahan oleh kewajiban luar jangka panjang, dengan porsi sebesar 88,4% dari total ULN. Untuk menjaga struktur ULN yang kokoh, Bank Indonesia dan pemerintah terus mempererat koordinasi dalam mencermati perkembangan ULN, dengan tetap menjunjung tinggi penerapan standar kehati-hatian dalam penyelenggaraannya. Peran ULN kelak secara berkelanjutan akan terus diperkuat demi menyokong pendanaan pembangunan serta pemulihan ekonomi nasional, yakni dengan membatasi risiko yang nanti mempengaruhi stabilitas perekonomian Indonesia (Indonesia. B, 2021).

b. Penanaman Modal Asing Swasta dan Perusahaan Multinasional

Di banyak negara berkembang, modal asing tampaknya telah berubah menjadi modal pembangunan yang diprioritaskan. Memang, berbagai negara menarik modal asing sebanyak yang bisa diharapkan dengan menawarkan berbagai sejumlah fasilitas yang menguntungkan untuk para investor serta kreditur. Untuk modal asing sebagai bentuk pinjaman luar negeri terhadap pemerintah, baik yang bersifat *grant*; *soft loan*; ataupun *hard loan*, sudah mendominasi sektor penerimaan pada anggaran APBN yang akan dipergunakan untuk menutupi pengeluaran pemerintah,

maupun program program pembangunan negara atau investasi pemerintah di ranah publik. Adapun tugas pemerintah merupakan faktor penentu utama bagi ekonomi di sebagian besar negara yang tengah berkembang. Hal ini menyebabkan pemerintah perlu memiliki sejumlah modal yang baik untuk menyusun sarana dan prasarana yang berbeda, adapun batas keuangan pemerintah masih terbatas atau kurang stabil. Oleh karena itu, pinjaman/utang luar negeri pemerintah ternyata menjadi modal yang vital untuk pendanaan perekonomian masyarakat. Bahkan dapat dapat disimpulkan *outing* asing telah menjadi sumber pembiayaan yang cukup signifikan bagi pembangunan perekonomian nasional negara berkembang, yakni termasuk juga negara Indonesia (Atmadja, 2000).

Menurut Aronaga, P. (1998) bahwa investor asing dalam menempatkan modal ke suatu negara adalah untuk sebagian besar berbentuk Perusahaan Multinasional, MNC adalah: perusahaan multinasional di seluruh dunia yang memanfaatkan penanaman modal secara langsung di negara-negara asing dengan mendirikan cabang atau mengambil kendali atas perusahaan asing di mana tujuan investasi adalah pengawasan manajemen terhadap unit produksi di negara yang asing. Perspektif para investor internasional tentang pengelolaan Perusahaan yang Baik di Indonesia pada tingkat Nasional di Indonesia pada tingkat nasional, dijelaskan oleh Linnan, D. K. (2010). sebagai berikut: 1) Saat ini, sebagian besar investor nasional (manajer investasi) menganggap bahwa Pengelolaan Perusahaan yang Baik di Indonesia berada di bawah standar internasional; 2.) Tingkat keraguannya tinggi sehingga pembentukan Komite Nasional Pengelolaan Perusahaan yang Baik sebagai citra tidak cukup; 3.) Karena persaingan global dalam mendapatkan dana investasi, investor global telah memilih untuk tidak menempatkan investasi ke dalam perusahaan di Indonesia seperti sekarang dan condong ke negara-negara Asia lainnya yang memiliki tingkat Pengelolaan Perusahaan yang Baik (sebagai contoh Negara Singapura); 4.) Terlepas dari keyakinan, investor portofolio kurang memiliki perhatian tentang bahaya atau kerentanan politik di Indonesia dan lebih khawatir tentang pengelolaan perusahaan yang baik (berbeda pada beberapa tingkatan dari menjalankan bisnis dan dapat menghadapi berbagai risiko). Seperti yang dikemukakan oleh Irianto, S. (2016), kebutuhan modal adalah kasus isu

yang diperhatikan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemampuan ekonomi pembangunan Indonesia. Kebutuhan akan modal ini secara mutlak memerlukan penanaman modal asing karena tidak mungkin dapat dipenuhi oleh pemerintah dan penanam modal dalam negeri. Penanaman akan inovasi, pengelolaan perusahaan yang baik yang dapat diinvestasikan untuk meningkatkan SDM Indonesia, disamping akan kebutuhan modal dalam kegiatan penanaman investasi. Pada umumnya penanam modal asing yang menanamkan modalnya di Indonesia berbentuk perusahaan transnasional. Faktor bisnis dengan berfokus pada keuntungan daripada sektor sektor lain yang ada adalah hal yang dipertimbangkan oleh perusahaan asing. Dengan demikian, dalam aktivitas penanaman modal diperlukan pengaturan yang jelas dan lugas dengan perangkat hukum yang memadai dan menghapus berbagai hambatan yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah menghimpun bermacam-macam kepentingan dan pengaturan yang terkait penanaman modal asing, meliputi aspek tidak diperkenankan ada tindakan diskriminasi antara penanam modal asing dengan dalam negeri, serta menghindari perbuatan menasionalisasi terhadap penanaman modal asing. Adapun pengaturan sehubungan dengan modal asing langsung adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa investasi asing harus tetap menyetujui pengaturan yang relevan di bidang penanaman modal asing di Indonesia.

Realisasi Investasi selama Triwulan II 2021 meningkat senilai 16,2% daripada periode yang sama pada tahun 2020 (Rp 191,9 triliun). Dengan demikian, keuntungan usaha pada periode Januari-Juni memberikan 49,2% dari target 2021 yang telah disesuaikan menjadi Rp 900 triliun dan dapat menggunakan tenaga kerja Indonesia hingga 311.922 orang. Capaian Triwulan II yang diteliti dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, PMA naik menjadi 19,6% dan PMDN senilai 12,7%. Untuk sektor penyumbang terbesar berasal dari sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (19,3%), sedangkan untuk lokasi proyek dengan realisasi investasi paling tinggi di Jawa Timur (13,1%). Pada periode yang sama, pengakuan PMA menambahkan hingga Rp 116,8 triliun atau 52,4% dari total pencapaian dengan kapasitas memanfaatkan tenaga kerja Indonesia sebanyak 146,238 orang. Kemudian, pada saat itu, sektor yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap pengakuan PMA adalah

dari sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin serta Peralatannya (22,1%), dan untuk lokasi proyek dengan realisasi investasi terbanyak ada di Jawa Barat (19,8%). PMA yang paling banyak memberikan pengakuan berasal dari Singapura (26,4%). Terdapat lima sektor PDAM terbaik di kuartal berikutnya mencakup sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin serta peralatannya yang terjadi di wilayah Sulawesi, Maluku Utara dan Riau, serta area modern dan perkantoran di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sedangkan Lima besar sektor PMDN diantaranya sektor industri makanan serta minuman, dan sektor transportasi, gudang serta telekomunikasi di wilayah Pulau Jawa. Dalam realisasi investasi periode Januari-Juni 2021, ternyata komitmen terbesar datang dari PMA, yakni Rp 228,5 triliun atau 51,6% dari jumlah keseluruhan, dengan kemampuan tenaga ahli Indonesia sebanyak 292.401 orang. Kemudian, untuk daerah yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari daerah Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (22,2%) serta lokasi proyek yang memiliki realisasi investasi terbanyak adalah Jawa Barat (19,4%). Sementara negara asal investasi terbesar adalah Singapura (Indonesia, K.I./B.K.P.M.R, 2021).

c. Lembaga Keuangan Internasional (Bank Dunia, IMF, WTO)

Akibat bertambahnya jumlah negara yang jatuh ke dalam darurat utang luar negeri, IMF dan Bank Dunia harus menyarankan agar sejumlah negara menjalankan aktivitas perubahan mendasar pada ekonomi lokal, misalnya dengan mengurangi berbagai jenis subsidi BBM dan kebutuhan mendasar lainnya; menunda kenaikan kompensasi bagi pegawai negeri; seperti halnya berbagai pendekatan kebijakan kontraksi kebijakan fiskal, sebagai syarat penting demi mendapatkan angka penurunan utang maupun mendapatkan pinjaman baru, kondisi ini juga dapat ditemui pada Negara Indonesia (Atmadja, A.S., 2000).

Indonesia mengedepankan urgensi kolaborasi dunia, multilateral maupun regional, di luar penguatan ekonomi nasional, untuk mendukung perekonomian dunia di tengah tekanan dampak virus Corona. Pelaksanaan respons bauran kebijakan perlu terorganisir, baik dari sisi fiskal, moneter maupun struktural untuk memitigasi dampak virus corona terhadap perekonomian telah didukung oleh Bank Indonesia. Di sisi lain, fungsi

lembaga internasional juga penting untuk mengikuti resiliensi dinamika ekonomi dan stabilitas sistem keuangan global, termasuk menjaga likuiditas demi memajukan pemulihan aktivitas ekonomi. Dalam upaya di atas, Indonesia dan negara-negara G20 lainnya dalam mendukung upaya Kegiatan G20 *Action Plan* untuk mengelola keadaan darurat yang ditimbulkan oleh Coronavirus sebagai referensi respons kebijakan untuk meringankan efek wabah Coronavirus.

Seperti yang diungkapkan Hasan, M. dan Azis, M. (2018) kerugian sebuah pembangunan ekonomi bisa berwujud materi atau *non* materi. Indikasi substansial kerugian dari dampak pembangunan ekonomi bisa ditentukan sebagai biaya, namun kerugian *non*-materi ini benar-benar rumit untuk dihitung dengan biaya. Kedua kerugian tersebut mampu didelegasikan sebagai bentuk biaya sosial yang ditanggung pihak pemerintah atau daerah setempat. Oleh karena itu, berbagai kendala mulai muncul karena pembangunan ekonomi ini, antara lain:

a. Pencemaran Lingkungan

Pembangunan sektor industri biasanya mendominasi tingkat kemajuan pembangunan ekonomi negara berkembang. Kesepakatan ini dapat dirasakan, mengingat agar negara-negara berkembang menjadi negara-negara maju, maka kawasan industri harus diciptakan. Persepsi ini dibangkitkan oleh keadaan bangsa-bangsa Eropa yang di luar dugaan merupakan negara maju, dengan sektor industri yang berkembang pesat. Pembangunan sektor industri secara langsung diidentikkan dengan lingkungan. Negara-negara berkembang yang biasanya kaya dalam sumber daya alam, benar-benar memanfaatkan kondisi ini dengan menarik investor dari luar negeri. Menurut pandangan negara-negara berkembang, penting bahwa sektor industri mampu memberikan kontribusi kepada negara, sehingga selama ini dapat dilakukan, berbagai hal lain seperti lingkungan tidak dipikirkan secara serius, misalnya kerugian karena pencemaran limbah industri, penebangan hutan secara liar, maupun aspek lainnya.

b. Tatanan Nilai-Nilai Sosial Budaya yang Rusak

Pembangunan menyiratkan transparansi, kesempatan untuk mempertahankan banyak kualitas ataupun nilai-nilai di masyarakat umum. Dengan meluasnya transparansi hubungan ke dunia dunia, akan ada lebih banyak nilai-nilai sosial yang berinteraksi dengan nilai-nilai budaya yang melingkupinya. Pergeseran nilai banyak terjadi dan menyebabkan keprihatinan tersendiri bagi masyarakat setempat dengan alasan bahwa nilai-nilai sosial yang memiliki asal dari luar negeri sebenarnya tidak cocok dengan nilai-nilai sosial masyarakat lokal. Jadi dalam keadaan seperti ini, dapat muncul benturan-benturan. Bertindak dengan mentalitas materialistis merupakan cara hidup masyarakat kapitalis. Cara hidup seperti itu merupakan hal yang wajar, namun bagi individu masyarakat di negara berkembang, itu pasti bisa menjadi sesuatu yang dianggap tidak sopan dan tidak pantas untuk nilai dan budaya mereka.

c. Ketimpangan Pembangunan di Berbagai Bidang

Bentuk pembangunan yang tepat merupakan cerminan wujud nyata yang dibarengi oleh penyebaran kemajuan akan hasil dari pembangunan yang adil bagi semua sektor dan antar daerah. Saat ini yang terjadi adalah pembangunan membuat banyak jenis ketimpangan. Perkembangan berbagai disparitas ini, tidak dapat dipisahkan jumlah modal dan administrasi yang ada, tetapi hambatan ini sebenarnya bukanlah pembenaran mendasar bagi munculnya ketimpangan. Kepastian skala prioritas untuk pembangunan (karena aset terbatas) perlu serius diselesaikan dengan wajar dan tidak memihak. Kenyataannya adalah pilihan utama tergantung pada kepentingan politik atau individu. Oleh sebab itu, bukan suatu yang aneh jika di negara-negara berkembang ada banyak isu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah.

d. Peningkatan Kaum Urban

Model pembangunan yang tidak konsisten bisa memicu banyak tekanan sosial di lingkungan sekitar. Model pembangunan biasanya berpusat di sekitar kota jelas bisa membuat iri para penduduk di wilayah tertinggal. Kehidupan urban dipandang lebih baik jika dilihat dari aspek

gaji, dimana akan mendorong individu pedesaan untuk pindah ke masyarakat perkotaan dan melamar pekerjaan di daerah perkotaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di daerah-daerah dengan tingkat konsentrasi industri yang signifikan, dapat dibuktikan angka migran jauh lebih banyak dibandingkan penduduk asli.

e. Peningkatan Jumlah Pengangguran

Peningkatan pengangguran merupakan dampak langsung dari jumlah masyarakat yang terus berkembang. Terlebih lagi, ketimpangan antara jumlah permintaan dan penawaran jumlah tenaga kerja mampu menimbulkan kondisi pengangguran. Biasanya di negara Indonesia, model pembangunan dilakukan lebih difokuskan terhadap tenaga kerja berbakat, khususnya di sektor industri. Sedangkan, kondisi masyarakat di negara berkembang umumnya berbudaya agraris. Hal ini menjadi kontradiksi karena wilayah agraris pada umumnya terabaikan dan terpinggirkan dari ruang lingkup pembangunan.

f. Pergeseran Mata Pencarian

Peningkatan fokus pembangunan di bidang industri dapat memindahkan fungsi pertanian ke industri dalam pendapatan nasional. Perpindahan tersebut dengan sendirinya mampu menggerakkan mata pencarian penduduk. Misalnya, kontrol mendasar dari petani kemudian dipindahkan ke buruh industri atau pekerja bangunan di daerah perkotaan. Pergeseran tersebut bisa dipaksa ataupun disengaja. Pergerakan yang terjadi secara paksa, misalnya pelebaran jalan termasuk persawahan atau pembangunan *real estate*. Saat itu pergeseran yang terjadi dengan cara disengaja dapat memperbaiki tingkat pendapatan.

E. PERAN DAN FUNGSI PEREMPUAN SAAT MENGATASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Perempuan dan anak kecil masih dikenang karena kelompok yang cenderung kekejaman, dan sebagainya. Hal ini tidak hanya di Indonesia, namun seluruh dunia. Meski saat kemerdekaan ini, perempuan dipandang sebagai suatu entitas yang lebih rendah (bawahan) sehingga mereka tidak mendapatkan kebebasan yang setara dengan laki-laki. Perempuan

dipandang unik dalam menjalankan bisnis yang berkaitan dengan urusan keluarga. Padahal perempuan mampu menjadi aktor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan. Kontribusi perempuan yang terlibat pada kemajuan di kota-kota, juga untuk pembangunan nasional yang mampu merubah eksistensi individu Indonesia untuk lebih baik dan memiliki kesejahteraan. Saat ini perempuan sudah bangkit dan telah menunjukkan bahwa realitas mereka layak untuk dipikirkan. Pengetahuan dan wawasan para perempuan saat ini tidak bisa dianggap main-main, karena telah berperan dalam pembangunan ekonomi. Tugas perempuan adalah dalam upaya membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di bidang perikanan, perempuan melakukan 70% pekerjaan produksi perikanan dengan masa kerja selama 17 jam. Mulai tahap penyediaan bahan bakar, kemudian memperbaiki alat tangkap, menyiapkan makanan untuk nelayan pria. Setelah ikan muncul di dermaga, perempuan itu kemudian bertindak sebagai pedagang atau pemipil. Selain itu perempuan bertugas untuk memasak ikan menjadi sumber makanan siap saji seperti tekwan, sambal, maupun kerupuk, sehingga harga jual ikan jadi naik. Dalam suatu forum *Trading Development and Gender Equality* yang diselenggarakan pada acara *Asian Development Bank Annual Meeting 2019* di Nadi, Fiji, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/ Bappenas) mengatakan bahwa wanita adalah sumber daya yang signifikan, potensi dan investasi bagi Indonesia yang dapat berkontribusi secara fundamental yang ditunjukkan oleh kemampuan dan kapasitasnya. Berkaitan dengan kemajuan pembangunan, pengarusutamaan gender, dan penguatan perempuan secara tegas diidentikkan dengan perbaikan generasi masa depan bangsa. Berdasarkan perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia tahun 2018 tidak kurang dari 264,2 juta orang atau 50,2% merupakan laki-laki sedangkan 131,5 juta orang atau 49,8% merupakan perempuan. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Indonesia diketahui telah berkembang dari 90,82 pada 2016 menjadi 90,99 pada 2018. IPG yang bergerak menuju 100 menunjukkan bahwa jika bertambah kecil kesenjangan pembangunan diantara laki-laki serta perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) juga meningkat dari 71,39 pada 2016 menjadi 71,74 pada 2017. IPG adalah penanda guna menyatakan apakah

perempuan mampu berperan serta pada aspek moneter dan politik (Manusia, K. K. B. P., & Indonesia, K. R., 2019).

Sehubungan dengan penguatan wanita di bidang ekonomi, industri kreatif adalah solusinya. Saat ini peran perempuan mendominasi inisiasi serapan kerja pada bidang industri kreatif. Berdasarkan Laporan Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif, BPS dan Badan Ekonomi Imajinatif (Bekraf) menjelaskan bahwa perempuan telah dipercaya menjadi pemeran ini dalam industri kreatif dari 2011 sampai 2016. Jumlah perempuan di bidang ini adalah 53,86%. Persentase ini sangat tinggi daripada penataan usaha pada umumnya, dimana pekerja perempuan yakni berkisar 37,16%, sedangkan perwakilan laki-laki 62,84%. Pada 2016, ada 9,4 juta wanita yang bekerja di bidang ekonomi kreatif. Sektor Industri ekonomi kreatif mampu memberikan kebebasan kepada perempuan untuk terlibat, terutama secara ekonomi, melalui dunia hiburan. Seperti akhir-akhir ini, Indonesia mendominasi produser perempuan, baik sebagai sutradara, jurnalis naskah, pembuat, hingga teknik suara video. Terlepas dari semua bidang yang biasanya dapat dikaitkan dengan perempuan, sejauh ini perempuan dapat menunjukkan kontribusi mereka dalam proses pembangunan. Nantinya, pemerintah serta semua mitra terkait dapat memberi sebuah peluang lebih luas untuk perempuan guna pekerjaan yang diberikan bisa jauh ideal (Manusia, K. K. B. P., & Indonesia, 2019).

F. RANGKUMAN MATERI

Perbedaan tingkat kemajuan antar daerah yang berlebihan bisa mengakibatkan pembangunan ekonomi yang tidak merata dan hanya mendominasi pengaruh yang menguntungkan kepada pertumbuhan daerah. Seperti halnya kemiskinan dimana keadaan individu yang belum mampu berperan serta dalam proses perubahan yang disebabkan ketidakmampuan pada kepemilikan faktor faktor produksi dan kualitas produksi yang memadai. Oleh sebab itu masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari proses pembangunan yang sedang terjadi. Selain itu, perkembangan penduduk yang tinggi dan masalah kependudukan yang lain ialah distribusi yang tidak merata serta ini menjadi tantangan untuk Indonesia. Supaya Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045, maka Indonesia memerlukan syarat yaitu kesiapan infrastruktur, SDM

berkualitas, kesiapan teknologi, perencanaan yang terintegrasi dengan daerah, dan kebijakan ekonomi yang kredibel. Dimana keberadaan fungsi pemerintah adalah penggerak utama aspek perekonomian di mayoritas negara berkembang mengakibatkan pemerintah memerlukan modal yang banyak guna membuat sarana prasarana, namun finansial yang dipunyai pemerintah masih terbatas. Di samping itu, pemerintah perlu mempersiapkan langkah strategis guna menjawab masalah pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, juga mewujudkan tujuan pembangunan berkesinambungan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) serta mengupayakan pemberdayaan perempuan pada sektor ekonomi industri kreatif.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan permasalahan pembangunan ekonomi dari aspek sektor industri!
2. Sebutkan penentuan distribusi pendapatan negara berkembang!
3. Jelaskan bentuk pembangunan luar negeri!
4. Jelaskan kerugian yang ditimbulkan akibat pembangunan ekonomi!
5. Bagaimana peran perempuan dalam mengatasi masalah pembangunan ekonomi!

DAFTAR PUSTAKA

- Aronaga, P. (1998). Perusahaan Multi Nasional-Penanaman Modal Asing. *Jakarta: Pustaka*.
- Arsyad, L. (2017). Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi. *Tersedia secara online di: <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA4324-M1.pdf> [diakses di Lembang, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2018]*.
- Atmadja, A. S. (2000). Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Perkembangan dan Dampaknya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 83-94.

- Cingano, F. (2014). Trends in income inequality and its impact on economic growth.
- Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Growth is Good for the Poor. *Journal of economic growth*, 7(3), 195-225.
- George, S. (2019). *The debt boomerang*. Routledge.
- Hakiki, F. M., & Hayati, B. (2015). *Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Masyarakat Perkotaan (Kasus Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal.
- Hikmah, A. N. (2021). *Analisis Pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kota Surabaya Tahun 2011-2018* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Indonesia, B. (2020). Indonesia Dorong Kerja Sama Internasional Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19. *Siaran Pers*.
- Indonesia, B. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan Iv 2020 Melanjutkan Perbaikan. *Siaran Pers*, (23/33).
- Indonesia, B. (2021). Utang Luar Negeri Indonesia Triwulan II 2021 Menurun. *Siaran Pers*.
- Indonesia, B.K.F.K.R (2021). Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. Pemerintah Prioritaskan Investasi pada Pengembangan SDM.
- Indonesia, K. K. B. P. R. (2021). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Pemerintah Tetap Berkomitmen Jalankan Pembangunan Berkelanjutan di tengah Pandemi.
- Indonesia, K. P. R. (2021). Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Pemerintah Optimalkan Peran Industri Pulihkan Ekonomi Nasional. Tanggal 7 Maret 2021.
- Indonesia, K.I. /B.K.P.M.R (2021). Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI. Indonesia Tetap Optimis, Investasi Penyokong Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19.
- Irianto, S. (2016). Pentingnya Penanaman Modal Asing Dan Pengaturannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 9(1).

- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American economic review*, 45(1), 1-28.
- Linnan, D. K. (2010). 'Reading the tea leaves' in the Indonesian Commercial Court: A cautionary tale, but for whom?. In *New Courts in Asia* (pp. 72-96). Routledge.
- Manusia, K. K. B. P., & Indonesia, K. R. (2019). Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Pembangunan.
- Mukhamad, B. S. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten Ponorogo* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Prawoto, N. (2019). Pengentasan Kemiskinan.
- Priyarsono, D. S., Siregar, H., & Kustanto, H. (2018). *Dampak Pembangunan Kawasan Industri Terhadap Output, Penyerapan Tenaga Kerja, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Jawa Barat* (Doctoral dissertation, IPB (Bogor Agricultural University)).
- Rakyat, D. P. (2012). Enam Tantangan Hadapi Ekonomi ke Depan.
- Saepudin, A. (2012). Peran Bank Dunia Dalam Pengelolaan Hutan Indonesia Di Era Reformasi. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan*.
- Saragih, B. (2018). *Agribisnis: Paradigma baru pembangunan ekonomi berbasis pertanian*. PT Penerbit IPB Press.
- Statistik, B.P. 2021. Gini Ratio Maret 2021 tercatat sebesar 0,38. *Siaran Pers*.
- Tiara, S. (2016). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomikawan*, 16(1), 77513.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). Economic Development.
- Yusuf, A.A., et al. (2020). Perspektif 2030: SDGs Center Policy Brief No. 2 /2020. Strategi Sektor Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19.

EKONOMI PEMBANGUNAN

BAB 5: EFEK

PEMBANGUNAN EKONOMI

Dr. Dikson Silitonga, M.M

Institut Bisnis Nusantara (IBN) Jakarta

BAB 5

EFEK PEMBANGUNAN EKONOMI

A. PENDAHULUAN

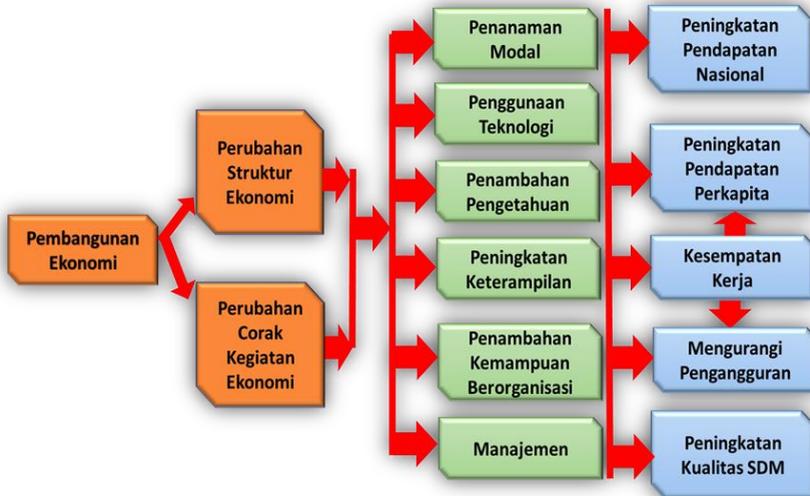
Pada dasarnya pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya penambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi *input* pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik. Bahkan Sukirno (2008:423) menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Sehingga Rahardja dan Manurung (2008:312) mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan pekerjaan yang sangat besar, rumit dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Pembangunan ekonomi sangat membutuhkan biaya dan pengorbanan besar. Bahkan pembangunan ekonomi merupakan proses antar generasi. Apa yang dirintis oleh generasi saat ini, baru akan dinikmati oleh beberapa generasi yang akan datang.

Artinya, bahwa pembangunan ekonomi diharapkan akan memberikan dampak (efek) positif bagi bangsa dan negara yang akan dinikmati bagi generasi berikutnya, yaitu kehidupan yang lebih baik, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi juga akan melahirkan dampak (efek) negatif.

B. EFEK PEMBANGUNAN EKONOMI

1. Efek Positif Pembangunan Ekonomi

Pada uraian di atas disebutkan, bahwa pembangunan ekonomi (*Economic Development*) adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi atau usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Bahkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan hampir selalu disertai dengan perbaikan teknologi yang memungkinkan manusia (tenaga kerja), tanah, dan modal yang ada (gedung, mesin yang ada, dan sebagainya) menjadi lebih produktif (Acemoglu *et al*, 20 :78). Ini berarti, dengan terjadinya pembangunan ekonomi, struktur ekonomi akan mengalami perubahan dari sektor pertanian ke sektor industri atau dari sektor primer ke sekunder maupun ke tersier. Selanjutnya dengan terjadinya perubahan struktur ekonomi akan berakibat pula perubahan peranannya terhadap pendapatan nasional maupun kesempatan kerja. Artinya, pembangunan ekonomi berperan menciptakan lapangan kerja sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat untuk mengurangi tingkat pengangguran. Dengan adanya banyak lapangan pekerjaan, pendapatan nasional dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) pun mengalami peningkatan sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor akan mengalami perubahan dengan adanya pembangunan ekonomi. Singkatnya, pembangunan ekonomi membuat pelaksanaan kegiatan perekonomian berjalan lebih lancar dan mempercepat proses pertumbuhannya.



Gambar 5.1 Efek Positif Pembangunan Ekonomi

Jika diuraikan secara rinci pembangunan ekonomi memiliki efek (dampak) positif, yaitu antara lain :

- Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.
- Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian akan mengurangi pengangguran.
- Terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional.
- Melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis.
- Pembangunan ekonomi menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga dalam hal ini, dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Dengan demikian, akan makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut Hasan dan Azis (2018) menyebutkan ada lima dampak positif pembangunan ekonomi, yaitu :

- 1) Tingkat produksi meningkat
- 2) Adanya berbagai alternatif kemudahan
- 3) Terdapat perubahan pada aspek sosial, ekonomi, dan politik
- 4) Meningkatnya nilai-nilai kebersamaan
- 5) Tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.

1) Tingkat Produksi Meningkat

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP). Konsep GDP secara makro diartikan sama dengan *output* atau produksi, yaitu produksi barang dan jasa. Dengan adanya pembangunan ekonomi, maka perekonomian akan mengalami perkembangan, berupa peningkatan akan produk barang dan jasa suatu negara.

2) Adanya Berbagai Alternatif Kemudahan

Dengan adanya peningkatan produksi barang dan jasa, akan membuat masyarakat semakin terbuka untuk melakukan berbagai pilihan. Kebebasan ini tentu menguntungkan sebab masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal yang disukainya. Contoh keuntungan yang diperoleh masyarakat adalah kemudahan dalam membeli barang atau kemudahan dalam memilih sarana transportasi.

3) Terdapat Perubahan Pada Aspek Sosial, Ekonomi, dan Politik

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang terjadi dalam jangka panjang. Karena bersifat jangka panjang, maka perubahan yang terjadi akibat pembangunan ekonomi tidak hanya secara fisik saja, tetapi juga akan berdampak pada perubahan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Contoh perubahan di bidang sosial adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat, seperti wawasan atau pandangan masyarakat tentang ilmu pengetahuan. Perubahan di bidang ekonomi berupa kenaikan tingkat pendapatan masyarakat dan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perubahan di bidang politik, yaitu semakin terbukanya pemahaman masyarakat akan demokrasi dan sistem politik yang lebih adil.

4) Meningkatnya Nilai-nilai Kebersamaan

Jika pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara berhasil, maka masyarakat negara tersebut bisa dikatakan sudah makmur. Karena kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi, sebagai kompensasi mereka akan mulai memperhatikan lingkungan sekitar. Ketika kesejahteraan masyarakat sudah tinggi, maka akan terjadi kecenderungan mereka akan mulai memperhatikan masalah-masalah yang berhubungan dengan keadilan, terutama masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM).

5) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Meningkat

Pembangunan ekonomi yang direalisasikan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan mengakibatkan perekonomian masyarakat berkembang. Perekonomian yang berkembang, secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat secara otomatis juga mengalami peningkatan. Hal ini sesuai pendapat yang dikemukakan Frisdiantara dan Mukhlis (2016), bahwa pembangunan ekonomi yang berhasil tidak hanya ditandai dengan pendapatan masyarakat yang meningkat. Tetapi juga terpenuhinya pemenuhan kebutuhan hidup pada bidang kesehatan dan pemenuhan pada bidang pendidikan. Jadi, pembangunan ekonomi yang berhasil akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari tiga hal, yaitu pendapatan yang meningkat, terpenuhinya pemenuhan kebutuhan hidup pada bidang kesehatan, dan terpenuhinya pemenuhan kebutuhan hidup pada bidang pendidikan.

2. Efek Negatif Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi memiliki efek (dampak) negatif yang kompleks karena pembangunan ekonomi saling terkait dengan aspek lainnya. Pembangunan ekonomi dapat berdampak negatif terhadap kerusakan lingkungan, terlebih jika terdapat pembangunan yang tidak terencana dengan baik. Pasalnya, pembangunan biasanya akan memperbanyak industrialisasi dan mengakibatkan lahan pertanian menjadi berkurang.

Kondisi ini diperparah dengan ketidakdisiplinan manusia dalam pembangunan yang memicu terjadinya pencemaran tanah, air, dan udara.

Dengan adanya pembangunan ekonomi, tentu akan berakibat pada kemudahan transportasi. Namun, meningkatnya jumlah transportasi tentunya akan meningkatkan polusi udara. Karena adanya polusi udara, tentunya akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Sehingga Shou *et al.* (2019) menyebutkan, *“Some scholars take samples for experiments to evaluate the concentration of PM2.5 polution, and the results confirm that PM2.5 has an impact on human health because it can enter the human body through various pathways and cause cardiovascular and respiratory diseases, and it even has an impact on human central nervous system”*. Seiring pembangunan ekonomi, populasi terus membanjiri kota-kota besar dan kecil. Industri sekunder dan tersier terus berkembang, membuat skala urbanisasi terus meluas. Banyak zona pengembangan ekonomi dan area konstruksi perkotaan juga berkembang. Karena kemajuan urbanisasi yang terus-menerus, pola penggunaan lahan telah berubah, dan sumber daya lahan telah digunakan secara sembrono. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan kelangkaan sumber daya. Menurut Gan *et al.* (2020. : 12), *“local economic development and urbanization have a significant impact on haze pollution in neighboring areas”*. Menurut Gan *et al* (2020 : 3), di bawah pengaruh urbanisasi, pembangunan ekonomi dapat menyebabkan polusi asap yang lebih serius.



Gambar 5.2 Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi Terhadap Polusi.

Jika diuraikan secara rinci pembangunan ekonomi memiliki efek (dampak) negatif, yaitu antara lain :

- a) Adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup.
- b) Industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian.
- c) Hilangnya habitat alam, baik hayati atau hewani.
- d) Pencemaran udara.

Lebih lanjut Hasan dan Azis (2018) menyebutkan ada lima dampak negatif pembangunan ekonomi, yaitu :

- 1) Pencemaran udara
- 2) Tatanan sosial budaya menjadi rusak
- 3) Ketimpangan di berbagai bidang
- 4) Meningkatkan kaum urban
- 5) Meningkatkan pengangguran.

1) Pencemaran Udara

Di negara berkembang, pada umumnya pembangunan ekonomi berfokus pada pembangunan di sektor industri. Hal ini dikarenakan di negara berkembang yang ingin menjadi negara maju harus mengembangkan sektor industrinya terlebih dahulu. Pada umumnya, Pembangunan di negara yang sedang berkembang sangat terkait dengan lingkungan karena mereka memiliki sumber daya alam yang melimpah. Oleh sebab itu mereka memanfaatkan kelebihan ini untuk menarik para investor dari luar sehingga dapat memberikan pemasukan bagi negara.

2) Tatanan Sosial Budaya Menjadi Rusak

Ketika adanya proses pembangunan ekonomi akan membuat masyarakat menjadi lebih terbuka untuk menyerap berbagai kebudayaan dari luar. Dengan keterbukaan ini akan membuat nilai budaya baru akan bercampur dengan nilai budaya sosial yang ada. Pergeseran nilai sosial budaya ini dapat menimbulkan permasalahan didalam masyarakat karena terkadang nilai budaya asing yang masuk tidak sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Perbedaan nilai sosial budaya ini terkadang dapat menimbulkan konflik atau benturan di dalam masyarakat

3) Ketimpangan di Berbagai Bidang

Pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang merata disegala bidang dan antar daerah. Namun dalam realisasinya, proses pembangunan ini menimbulkan berbagai ketimpangan-ketimpangan. Munculnya ketimpangan-ketimpangan didalam pembangunan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan dana dan manajemen yang dimiliki. Namun seluruh hambatan ini bukanlah alasan yang terjadinya ketimpangan. Untuk mengatasi segala ketimpangan ini maka dalam proses pembangunan harus menentukan skala prioritas. Penentuan skala prioritas ini terkadang tercampur dengan kepentingan politik dan kepentingan pribadi. Sehingga hal ini dapat menyebabkan negara berkembang sulit untuk maju karena permasalahan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pembangunan antara wilayah.

4) Meningkatkan Kaum Urban

Ketimpangan pembangun bisa menimbulkan gejala sosial dari masyarakat karena pembangunan yang tidak merata dapat menimbulkan rasa iri bagi masyarakat. Oleh sebab itu, wilayah yang memiliki tingkat konsentrasi industri yang tinggi maka dapat di pastikan bahwa jumlah penduduk pendatang akan lebih besar dibandingkan penduduk aslinya.

5) Meningkatnya Pengangguran

Dampak negatif pembangunan ekonomi selanjutnya adalah meningkatnya jumlah pengangguran akibat dari peningkatan jumlah penduduk. Selain itu tidak adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja bisa menimbulkan pengangguran.

Tabel 5.1 Tabel Dampak Positif dan Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi

No.	Dampak Positif	No.	Dampak Negatif
1	Tingkat produksi meningkat	1	Pencemaran udara
2	Adanya berbagai alternatif kemudahan	2	Tatanan sosial budaya menjadi rusak
3	Terdapat perubahan pada aspek sosial, ekonomi, dan politik	3	Ketimpangan di berbagai bidang

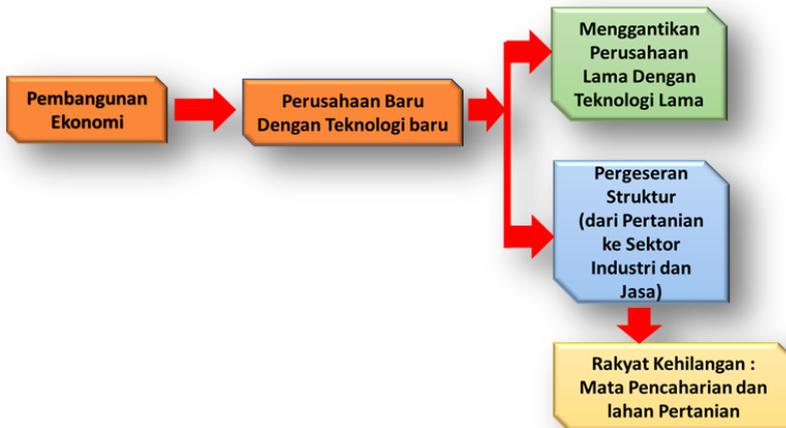
4	Meningkatnya nilai-nilai kebersamaan	4	Meningkatkan kaum urban
5	Tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat	5	Meningkatnya pengangguran

Sumber : Diolah (Hasan dan Azis, 2018)

Selain dampak (efek) negatif di atas, pembangunan ekonomi juga berdampak negatif terhadap pergeseran struktur (*Creative destruction*) dan peningkatan ketidakseimbangan pendapatan.

1) Pergeseran Struktur (*Creative destruction*)

Acemoglu (2009) menyatakan bahwa terkadang “hubungan produktif” antara perusahaan dan mata pencaharian individu akan dihancurkan oleh proses pembangunan ekonomi, hal ini karena pertumbuhan yang dicapai akan mendorong pengenalan teknologi baru dan penciptaan perusahaan baru”, dan ini menggantikan keberadaan perusahaan dan teknologi yang ada. Pengembangan ekonomi juga menyebabkan pergeseran struktur produksi, dengan perpindahan dari pertanian dan manufaktur ke jasa. Akibatnya akan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan lahan pertanian.



Gambar 5.3 Pergeseran Struktur (sumber : diolah dari Pendapat Acemoglu, 2009)

2) Peningkatan Ketidakeimbangan Pendapatan

Menurut Saputra (2014), persoalan klasik yang masih menjadi masalah besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah masalah ketimpangan pembangunan (*inequality*). Hal ini sejalan dengan pendapat Carluer (2007) yang mengemukakan bahwa : “*One of the basic problems in economic development is the inequality of per capita income and growth rates between regions within a country or between countries*”.



Gambar 5.4 Peningkatan Ketimpangan Ekonomi Antara Pedesaan dan Perkotaan
(Sumber : Diolah dari Pendapat Saputra (2014) dan Carluer (2021).

Pemerintah menjadikan eksploitasi kekayaan alam sebagai instrumen menciptakan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini mendorong terjadinya penguasaan sumber daya alam oleh pemilik modal. Padahal yang dieksploitasi adalah sektor-sektor ekstraktif yang tidak memiliki relevansi besar terhadap nilai tambah ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan. Selain itu, transformasi ekonomi ini tidak dibarengi oleh kebijakan transformasi struktural. Struktur tenaga kerja Indonesia masih di dominasi oleh sektor pertanian sedangkan semakin tahun nilai tambah sektor pertanian semakin berkurang. Menurut Saputra (2014:5), ini yang menyebabkan jumlah penduduk miskin yang berada di sektor pertanian sangat besar dan menciptakan ketimpangan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan di Indonesia.

C. RANGKUMAN MATERI

1. Pembangunan ekonomi diharapkan akan memberikan efek positif bagi bangsa dan negara yang akan dinikmati bagi generasi berikutnya, yaitu kehidupan yang lebih baik, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi juga akan melahirkan efek negatif.
2. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi atau usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.
3. Dengan terjadinya pembangunan ekonomi, struktur ekonomi akan mengalami perubahan dari sektor pertanian ke sektor industri atau dari sektor primer ke sekunder maupun ke tersier. Dengan terjadinya perubahan struktur ekonomi akan berakibat pula perubahan peranannya terhadap pendapatan nasional maupun kesempatan kerja. Dan dengan adanya banyak lapangan pekerjaan, pendapatan nasional dapat diperbaiki dan ditingkatkan.
4. Dampak positif pembangunan ekonomi antara lain : (a) Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi; (b) Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian akan mengurangi pengangguran; (c) Terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional; (d) Melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis; dan (e) Pembangunan ekonomi menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga dalam hal ini, dimungkinkan ilmu pengetahuan dan

teknologi akan berkembang dengan pesat. Dengan demikian, akan makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Hasan dan Azis menyebutkan ada lima dampak positif pembangunan ekonomi, yaitu : (1) Tingkat produksi meningkat; (2) Adanya berbagai alternatif kemudahan; (3) Terdapat perubahan pada aspek sosial, ekonomi, dan politik; (4) Meningkatnya nilai-nilai kebersamaan; dan (5) Tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.
6. Dampak negatif pembangunan ekonomi, yaitu antara lain : (a) Adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup; (b) Industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian; (c) Hilangnya habitat alam, baik hayati atau hewani; (e) Pencemaran udara.
7. Menurut Hasan dan Azis (2018) ada lima dampak negatif pembangunan ekonomi, yaitu : (a) Pencemaran udara; (b) Tataan sosial budaya menjadi rusak; (c) Ketimpangan di berbagai bidang; (d) Meningkatkan kaum urban; dan (e) Meningkatnya pengangguran.
8. Pengembangan ekonomi menyebabkan pergeseran struktur produksi, dengan perpindahan dari pertanian dan manufaktur ke jasa. Akibatnya akan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan lahan pertanian.
9. Menurut Saputra, persoalan klasik yang masih menjadi masalah besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah masalah ketimpangan pembangunan (*inequality*).

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan bagaimana pembangunan ekonomi berdampak positif terhadap :
 - a) Peningkatan pendapatan
 - b) Peningkatan pendapatan perkapita
 - c) Kesempatan kerja
 - d) Mengurangi pengangguran
 - e) Peningkatan kualitas SDM.
2. Jelaskan lima dampak (efek) positif pembangunan ekonomi menurut Hasan dan Azis !
3. Jelaskan bagaimana pembangunan ekonomi berdampak terhadap peningkatan polusi !
4. Jelaskan lima dampak (efek) negatif pembangunan ekonomi menurut Hasan dan Azis ! Berikan solusi yang tepat untuk mengurangi dampak tersebut !
5. Jelaskan bagaimana pembangunan ekonomi berdampak terhadap peningkatan ketimpangan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan !

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D. (2013). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty* (Pbk. ed.). Crown Business.
- Cahya Dicky Pratama.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/03/181955269/dampak-positif-pembangunan-ekonomi?page=all>, diakses tanggal 14 November 2021
- CARLUER, F (2007). [Contributions to Conflict Management, Peace Economics and Development] Managing Conflict in Economic Convergence of Regions in Greater Europe Volume 3 || Managing Conflict in Economic Convergence of Regions in Greater Europe. , (), ix–302. doi:10.1016/S1572-8323(06)03001-3, diakses tanggal 23 November 2021.
- Frisdiantara, Christea dan Mukhlis, Imam. (2016). *Ekonomi Pembangunan : Sebuah Kajian Teoritis dan Emperis*. Malang : Lembaga Penerbitan Universitas Kanjuruhan Malang.
- Gan, Ting; Liang, Wei; Yang, Huachao; Liao, Xianchun (2020). *The effect of Economic Development on haze pollution (PM2.5) based on a spatial perspective: Urbanization as a mediating variable*. *Journal of Cleaner Production*, 266(), 121880–. doi:10.1016/j.jclepro.2020.121880
- Hasan, Muhammad dan Muhammad Aziz. 2018. *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. t.t.p.: CV Nur Lina
<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-13>, diakses tanggal 14 November 2021
<https://slidetodoc.com/pertumbuhan-ekonomi-dan-pembangunan-ekonomi-kompetensi-dasar-3/>, diakses tanggal 24 November 2021.
<https://www.merdeka.com/trending/ketahui-tujuan-pembangunan-ekonomi-lengkap-beserta-faktor-dan-dampaknya-kln.html>, diakses tanggal 14 November 2021
<https://www.pahlevi.net/dampak-positif-pembangunan-ekonomi/>, diakses tanggal 14 November 2021

- Jhingan, M. L. (2000). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Press : Jakarta.
- Rahardja, Prathama dan Manurung, Mandala. (2008). *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Saputra, W. (2014). *Pembangunan Ekonomi dan Terancamnya Hak Dasar Masyarakat, Perkumpulan Prakarsa*, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (2008). *Makroekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Suryana. (2000). *Ekonomika Pembangunan, Salemba Empat* : Jakarta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, 2006. *Ekonomi Pembangunan, Edisi ke-sembilan*, Erlangga, Jakarta.
- Todaro, Michael, (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga : Jakarta.

EKONOMI PEMBANGUNAN

BAB 6: HUBUNGAN EKSPOR DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Akhmad Solikin, S.E., M.A., Ph.D., CA

Politeknik Keuangan Negara STAN

BAB 6

HUBUNGAN EKSPOR DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

A. PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai perdagangan internasional (*international trade*) khususnya ekspor dan perannya dalam pembangunan ekonomi. Saat ini hampir semua negara di dunia menerapkan perekonomian terbuka, dalam arti mereka melakukan perdagangan dengan negara-negara lain. Perdagangan internasional terdiri dari ekspor dan impor. Ekspor merupakan penjualan barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara untuk dikonsumsi di negara lain. Kebalikannya disebut dengan impor, yaitu pembelian atau konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan di luar negeri oleh subjek ekonomi dalam negeri. Subjek ekonomi tersebut dapat berupa perusahaan, orang, maupun pemerintah.

Mengingat pentingnya hubungan antara ekspor dengan kemajuan ekonomi, Bab ini secara khusus akan membahas tentang strategi pertumbuhan ekonomi lewat ekspor, teori perdagangan internasional, kebijakan perdagangan internasional dan ekspor Indonesia, serta kaitan antara ekspor dengan rantai nilai global (*global value chain*). Dengan mempelajari Bab ini, diharapkan pembaca memahami pentingnya ekspor bagi pembangunan serta kebijakan yang dapat ditempuh untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari aktivitas ekspor tersebut.

B. EKSPOR DAN PERTUMBUHAN EKONOMI JANGKA PENDEK

Ekspor merupakan kelebihan produksi yang dijual ke negara lain, sedangkan impor merupakan kekurangan produksi yang harus dipenuhi dari negara lain. Meskipun demikian, ekspor tidak semata-mata menunjukkan kelebihan produksi, ekspor juga merupakan indikasi adanya daya saing produksi di dalam negeri yang laku dijual di negara lain. Hal ini karena setiap negara di dunia berusaha untuk meningkatkan eksportnya sebagai salah satu strategi pertumbuhan ekonomi.

Perdagangan internasional merupakan sumber pertumbuhan (*source of growth*) dan jika dilakukan secara inklusif akan dapat mengurangi kemiskinan di negara tersebut. Sebagaimana diketahui, dalam kajian tentang ekonomi makro, khususnya tentang Produk Domestik Bruto (PDB) diketahui bahwa PDB dari sisi pengeluaran dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut:

$$PDB = C + I + G + X - M \dots\dots\dots (1)$$

C merupakan konsumsi (*consumption*), I merupakan investasi (*investment*), G merupakan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*), X merupakan ekspor (*export*), dan M merupakan impor (*import*). Berdasarkan rumus tersebut, permintaan barang dan jasa yang berasal dari luar negeri dalam bentuk ekspor merupakan unsur yang meningkatkan *output* nasional. Ketika permintaan *output* meningkat, maka permintaan tenaga kerja juga meningkat.

Dalam rumus (1), ketika X-M adalah positif, yaitu ekspor lebih besar daripada impor, maka hal tersebut disebut kondisi surplus neraca perdagangan. Sebaliknya, ketika impor lebih besar daripada ekspor, kondisi tersebut disebut sebagai defisit. Selisih antara ekspor dan impor disebut dengan neraca perdagangan (*balance of trade*). Jadi dikenal dengan neraca perdagangan surplus dan neraca perdagangan defisit. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2019 dengan harga yang berlaku, persentase ekspor terhadap PDB sebesar 18,4 persen; dengan sumbangan terbesar terhadap PDB berasal dari konsumsi dan investasi. Perlu diingat bahwa rumus tersebut merupakan sisi permintaan, yang biasanya berjangka pendek. Strategi untuk meningkatkan *output* jangka panjang

memerlukan perbaikan dari sisi modal, sumber daya manusia, dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, ekspor Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 ditujukan terutama ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Sebagaimana tercantum pada Tabel 6.1, sepuluh negara tujuan ekspor Indonesia merupakan sekitar 70 persen dari nilai ekspor Indonesia. Kecuali Amerika Serikat, negara-negara tersebut merupakan negara-negara yang terletak di benua Asia. Kawasan yang sangat sedikit menyerap barang dari Indonesia adalah kawasan Afrika. Negara-negara yang masih rendah pangsa ekspornya dan mempunyai potensi berdasarkan pertimbangan PDB riil, jumlah penduduk, dan nilai tukar, dapat menjadi negara-negara yang potensial sebagai tujuan nontradisional bagi ekspor *nonmigas* Indonesia (Hotsawadi & Widyastutik, 2020).

Tabel 6.1 Negara Tujuan Ekspor Indonesia (2019-2020)

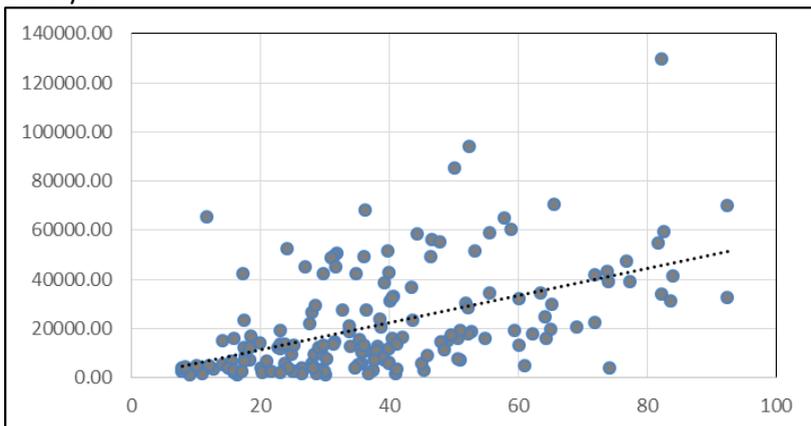
No	Negara	2019		2020	
		Nilai FOB	%	Nilai FOB	%
1	Tiongkok	27,961.9	17.13	31,781.8	19.48
2	Amerika Serikat	17,844.6	10.93	18,622.5	11.41
3	Jepang	16,003.3	9.81	13,664.7	8.37
4	Singapura	12,916.7	7.92	10,661.9	6.53
5	Malaysia	8,801.8	5.39	8,098.8	4.96
6	Korea Selatan	7,234.4	4.43	6,507.6	3.99
7	Filipina	6,770.1	4.15	5,900.7	3.62
8	Thailand	6,218.4	3.81	5,110.3	3.13
9	Vietnam	5,153.4	3.16	4,941.4	3.03
10	Taiwan	4,034.8	2.47	4,097.4	2.51
Jumlah			69.21		67.03

Sumber: Diolah dari data BPS

Sebagaimana tercantum pada Gambar 6.1, terdapat hubungan positif antara persentase ekspor terhadap PDB dengan PDB per kapita. Negara-negara dengan ekspor terhadap PDB yang tinggi cenderung mempunyai PDB per kapita yang tinggi. Mengingat bahwa PDB per kapita sering dipakai sebagai ukuran kemajuan suatu negara, Gambar 6.1 juga

menunjukkan bahwa negara-negara dengan ekspor yang besar cenderung merupakan negara maju atau mempunyai kesejahteraan yang tinggi. Dengan demikian, strategi perdagangan internasional merupakan suatu strategi yang penting untuk mencapai kemajuan suatu negara.

Pengertian ini perlu dikemukakan karena kebijakan ekspor tidak terlepas dari kebijakan impor dalam masa globalisasi ini. Globalisasi dapat mengemuka dalam berbagai wujud. Globalisasi perekonomian berarti integrasi ekonomi dunia tanpa hambatan teritorial, sehingga dalam prosesnya akan menghapuskan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa (Mulyani, 2017). Dengan demikian, strategi untuk meningkatkan ekspor ke negara lain harus diimbangi dengan kesediaan untuk membuka diri terhadap barang dan jasa impor dari negara lain. Masuknya barang dan jasa impor akan meningkatkan persaingan di pasar dalam negeri, di mana produsen dalam negeri yang tidak efisien kemungkinan akan kalah bersaing sehingga dapat menyebabkan penurunan penjualan dan pengurangan tenaga kerja. Jika dikelola dengan baik, peningkatan persaingan tersebut akan memberikan dorongan bagi perusahaan dalam negeri untuk melakukan inovasi sehingga dapat bersaing dengan produk yang berasal dari luar negeri. Proses inovasi tersebut merupakan dampak jangka panjang yang akan dibahas lebih lanjut pada subbab-subbab berikutnya.



Gambar 6.1 Hubungan Ekspor/PDB dan PDB/Kapita Negara-Negara di Dunia Tahun 2019

Sumber: Olahan Penulis, data dari data.worldbank.org

C. TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Mengapa suatu negara melakukan perdagangan dengan negara lain? Perdagangan dilakukan karena memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yang dikenal sebagai *gains from trade*. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, perdagangan internasional dapat merupakan sumber pertumbuhan, memperbesar penyerapan tenaga kerja (meskipun juga terdapat potensi pengurangan tenaga kerja apabila impor lebih maju daripada ekspor), mendorong proses investasi, industrialisasi, produktivitas dan inovasi di suatu negara. Selanjutnya, perdagangan internasional juga dapat meningkatkan daya saing lewat proses spesialisasi, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia lewat tukar-menukar informasi dan teknologi, memperluas diversifikasi barang, jasa, maupun pasar; serta memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran (Oktaviani, Novianti, & Widyastutik, 2014).

Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional juga dalam bentuk ekspor yang berperan penting untuk memperoleh devisa. Neraca perdagangan yang surplus berperan dalam memperkuat neraca transaksi berjalan yang berpengaruh terhadap kurs nominal dalam jangka pendek dan kurs riil dalam jangka panjang (Verico, 2017). Dengan demikian devisa yang besar berperan penting dalam stabilisasi kurs mata uang. Selain itu, devisa berperan penting dalam pembayaran impor, baik barang maupun jasa. Devisa juga diperlukan untuk pembayaran utang, baik pokok maupun bunganya. Selain berasal dari kegiatan ekspor, devisa dapat berasal dari pinjaman luar negeri, hibah/bantuan, maupun dari kiriman uang (*remittance*) tenaga kerja di luar negeri yang pada prinsipnya seperti ekspor jasa tenaga kerja.

Kemungkinan dampak negatif dari perdagangan internasional antara lain (Oktaviani, Novianti, & Widyastutik, 2014): (1) terpaparnya kondisi ekonomi domestik dari gejolak di perekonomian dunia, (2) tergantung terhadap produk asing, (3) eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan, (4) mendorong munculnya proteksi nontarif ketika proteksi tarif tidak lagi dapat dilaksanakan berdasarkan perjanjian perdagangan internasional yang ditandatangani oleh negara tersebut. Demikianlah potensi manfaat dan kerugian dari perdagangan internasional. Selanjutnya, mengapa

negara-negara melakukan perdagangan internasional? Marilah kita tinjau secara teori.

Perdagangan internasional sebagai suatu praktik telah dilakukan sejak beribu tahun yang lalu, tetapi sebagai suatu ilmu, perdagangan internasional baru muncul pada abad ke-17. Pada awalnya teori perdagangan internasional adalah merkantilisme. Merkantilis berpendapat bahwa cara suatu negara untuk menjadi kaya adalah dengan memperbesar ekspor dan mengurangi impor, kemudian menyimpan surplus perdagangannya dalam bentuk logam mulia (Yanuar, 2016). Teori ini tentu sudah tidak relevan lagi pada masa sekarang.

Kemudian terdapat teori keunggulan mutlak (*absolute advantage*) yang sering secara salah dinisbatkan kepada Adam Smith (Schumacher, 2012). Menurut teori ini, suatu negara sebaiknya memproduksi atau menjual barang yang dapat diproduksi dengan biaya yang lebih murah dari negara lain. Suatu negara perlu melakukan spesialisasi dengan memproduksi dan menjual atau mengekspor barang yang mempunyai keunggulan mutlak dan mengimpor barang yang tidak mempunyai keunggulan mutlak. Teori ini secara umum kalah pamor dari teori keunggulan komparatif.

Teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dipelopori oleh David Ricardo. Teori ini berpendapat bahwa meskipun suatu negara memiliki keunggulan mutlak pada semua barang yang diproduksi, perdagangan internasional tetap dapat terjadi. Hal tersebut karena yang penting bukan efisiensi secara mutlak, tetapi bagaimana biaya kesempatan (*opportunity costs*) dalam penggunaan faktor produksi. Dalam hal ini, suatu negara tidak mungkin mempunyai keunggulan komparatif atas semua produk. Suatu negara sebaiknya khusus memproduksi dan mengekspor barang yang dapat diproduksi dengan produktivitas faktor produksi yang lebih tinggi.

Teori Heckscher-Ohlin merupakan kelanjutan dari teori keunggulan komparatif, dengan melihat lebih mendalam bahwa keunggulan tersebut berasal dari faktor pendukung yang dipunyai (*factor endowment*) suatu negara dalam bentuk tanah, tenaga kerja, atau modal. Selain itu, keunggulan juga diperoleh dari proporsi faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi suatu produk tertentu. Menurut teori ini,

perdagangan internasional merupakan pemindahan faktor produksi yang melimpah ke negara yang mempunyai faktor produksi yang minimal. Sebagai contoh, negara dengan modal yang melimpah tetapi mempunyai tenaga kerja yang minimal akan mengekspor barang yang padat modal dan mengimpor barang yang padat karya.

Terdapat juga *New Trade Theory* yang bersumber dari teori organisasi perusahaan. Perdagangan antar negara tetap dapat terjadi meskipun semua negara mempunyai produktivitas yang sama (berlawanan dengan teori keunggulan komparatif) dan mempunyai faktor produksi yang sama (yang berlawanan dengan teori Heckscher-Ohlin. Teori Perdagangan Baru menggunakan asumsi *increasing returns* (Krugman, 1992) bahwa skala produksi yang besar akan menyebabkan biaya produksi per unit menjadi lebih murah. Teori ini juga dapat bersifat proteksionisme, misalnya dengan suatu negara berkonsentrasi pada ceruk pasar tertentu yang dilindungi atau diproteksi dengan tarif bea masuk yang tinggi. Konsentrasi pada ceruk tersebut kemudian akan mendominasi secara global, sehingga meskipun memproduksi barang yang spesifik tetapi pasarnya luas secara global. Proteksionisme merupakan salah satu hambatan dalam perdagangan internasional, dengan penjelasan lebih lanjut sebagaimana berikut ini.

Dengan berbagai bahasan tentang manfaat dan teori perdagangan internasional tersebut, kembali dikemukakan pertanyaan: apakah perdagangan internasional berpengaruh terhadap pertumbuhan? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin berbeda, apabila kita menggunakan kacamata teori yang berbeda. *Review* atas literatur yang dilakukan oleh Singh (2010) menemukan bahwa secara makro, terdapat banyak bukti empiris bahwa ekspor dapat meningkatkan *output* dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hipotesis sebaliknya (yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi mendorong ekspor, *growth-led export*) tidak banyak terbukti secara empiris. Secara mikro, hipotesis bahwa terdapat peningkatan produktivitas lewat perdagangan kurang didukung oleh penelitian empiris. Terdapat banyak faktor, khususnya reformasi di negara sedang berkembang yang meningkatkan produktivitas tersebut. Tentu saja, hasil penelitian empiris sangat tergantung dari metode yang dipergunakan selain dipengaruhi juga oleh teori.

D. HAMBATAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Dalam pembahasan sebelumnya sudah dikenal adanya proteksionisme sebagai lawan dari liberalisasi perdagangan (*trade liberalisation*). Proteksionisme dilakukan dengan memberikan hambatan masuknya barang dari luar negeri, dalam bentuk tarif, nontarif, maupun kuota. Sebaliknya, liberalisasi perdagangan dilakukan dengan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan tersebut. Pembahasan tentang liberalisasi perdagangan akan dibahas dalam subbab tersendiri, sedangkan subbab ini akan lebih dahulu membahas tentang hambatan perdagangan.

Hambatan pertama berupa tarif, yang dapat dikenakan atas impor maupun ekspor. Bentuknya dapat berupa tarif spesifik (yaitu jumlah rupiah tertentu) atau tarif *advalorem* yang berupa persentase dari harga barang. Untuk memproteksi industri dalam negeri dari persaingan barang impor, tarif impor dapat dinaikkan; sedangkan untuk membantu produsen domestik memperoleh bahan baku atau membantu konsumen memperoleh barang jadi maka tarif ekspor bisa dikenakan. Dampak dari kenaikan tarif impor dapat berupa (Oktaviani, Novianti, & Widyastutik, 2014): (1) berkurangnya konsumsi (*consumption effect*) dalam negeri karena barang impor menjadi lebih mahal setelah ditambah tarif, (2) bertambahnya produksi (*production effect*) dalam negeri karena berkurangnya pesaing dari luar negeri, (3) turunnya impor (*trade effect*), dan (4) peningkatan pendapatan pemerintah (*revenue effect*) yang berasal dari bea masuk.

Hambatan perdagangan dalam bentuk kuota dilakukan dengan membatasi jumlah maupun nilai barang yang diekspor maupun diimpor. Sebagai contoh, untuk membatasi impor minuman beralkohol maka dikenakan kuota impor. Tujuan penerapan kuota impor misalnya untuk (Oktaviani, Novianti, & Widyastutik, 2014) melindungi sektor industri domestik tertentu, melindungi sektor pertanian (misalnya dalam kasus Indonesia adalah beras), memperbaiki neraca pembayaran dengan membatasi impor. Selanjutnya, hambatan perdagangan dalam bentuk *nontariff* (*nontariff measures*, NTM) juga marak, sehingga terdapat kesepakatan untuk mengurangi hambatan. Salah satu contohnya adalah kesepakatan APEC untuk mengurangi tarif atas barang-barang yang baik bagi lingkungan, yang dikenal dengan APEC *environmental goods*

(Mahendra & Solikin, 2019). Selain itu terdapat juga kebijakan perdagangan yang tidak adil dalam bentuk kebijakan subsidi ekspor maupun kebijakan dumping. Subsidi ekspor diberikan kepada eksportir agar bisa bersaing di luar negeri. Kebijakan dumping dilakukan dengan menjual barang di dalam luar dengan harga yang di bawah harga wajar atau lebih murah daripada harga di dalam negeri. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat merugikan negara tujuan ekspor.

Faktor-faktor yang mendorong suatu negara menerapkan hambatan perdagangan (*trade barriers*) antara lain (Singh, 2010): (1) melindungi industri dalam negeri yang baru tumbuh (*infant industry*) agar tidak kalah bersaing dengan barang impor, (2) tidak tertarik melakukan perdagangan karena syarat perdagangan yang kurang menguntungkan, (3) tidak percaya dengan manfaat perdagangan bebas, (4) ketakutan adanya penurunan upah riil dan berkurangnya kesempatan kerja karena industri dalam negeri kalah bersaing dengan barang impor, serta (5) mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan. Di lain pihak, proteksionisme tersebut dapat menyebabkan: (1) inefisiensi pada industri dalam negeri dan (2) harga barang yang lebih tinggi harus ditanggung oleh konsumen (Singh, 2010). Dua hal tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan yang menyengsarakan (*immiserizing growth*) sebagaimana disampaikan oleh Jagdish Bahghwati. Bagi negara pengekspor, pertumbuhan yang menyengsarakan dapat terjadi jika penurunan *terms of trade* menyebabkan pertumbuhan ekonominya justru menurunkan kesejahteraan. Syarat untuk terjadinya hal tersebut adalah apabila negara pengekspor tersebut dapat memengaruhi harga yang berlaku di pasar dunia.

E. DARI INWARD LOOKING KE OUTWARD LOOKING

Untuk dapat melakukan ekspor, tentu produksi harus lebih besar daripada kebutuhan di dalam negeri. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi yaitu dengan kebijakan industrialisasi. Industrialisasi merupakan perubahan struktural dari ekonomi berbasis pertanian menuju ekonomi yang mengadopsi teknologi dan inovasi organisasi. Dengan industrialisasi dapat tercapai peningkatan produktivitas, *output*, dan pendapatan (Grübler, 1995). Kebijakan

industrialisasi tersebut mampu memberikan keberhasilan bagi negara-negara yang maju lebih awal pada abad ke-18 dan abad ke-19 serta negara-negara yang maju setelah Perang Dunia II (Fahmi, 2019).

Pada awal pembangunan, tentu kebijakan ekspor sulit diwujudkan. Pada umumnya, ketika di masa awal industrialisasi, produksi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (*inward looking development policies*). Sebagai contoh, pada masa awal Orde Baru di Indonesia, kebijakan yang dilakukan merupakan kebijakan substitusi impor. Kebijakan ini berarti produksi barang dan jasa yang ditujukan di pasar domestik dengan memproduksi barang yang pada awalnya merupakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Kebijakan awal di masa tersebut ditandai dengan liberalisasi perdagangan internasional, penerbitan UU Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 1967 dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 1968 (Roeslan & Zuhdi, 2019). Kebijakan substitusi impor dilakukan karena pangsa pasar dalam negeri yang besar ditinjau dari jumlah penduduknya. Dengan pangsa pasar yang besar dan insentif investasi, muncul investasi baru di bidang tekstil, peralatan elektronika, kendaraan bermotor, bahan konstruksi (besi, semen, kayu), dan sebagainya (Budiono, 2019).

Pada awalnya ekspor yang terbesar dari Indonesia adalah ekspor komoditas minyak bumi. Indonesia mendapatkan berkah yang tidak terduga dalam bentuk kenaikan harga minyak empat kali lipat pada tahun 1974 dan dua kali lipat pada tahun 1979/1980. Dengan berkah penerimaan negara yang besar dari ekspor minyak bumi, Indonesia mampu melakukan program-program pembangunan dan secara otomatis terbebas dari defisit ganda, yaitu defisit perdagangan dan defisit APBN (Budiono, 2019). Defisit APBN karena penerimaan tidak dapat mencukupi kebutuhan pengeluaran pada orde sebelumnya, khususnya pengeluaran untuk prioritas politik, misalnya untuk operasi keamanan, subsidi BUMN dan swasta, konfrontasi dengan Malaysia dan pembebasan Irian Barat. Ketika harga minyak bumi turun, maka pemerintah mengubah kebijakannya lebih berorientasi ekspor.

Strategi pembangunan *outward looking* di negara-negara Asia pada umumnya merupakan kombinasi antara keterbukaan ekonomi lewat perdagangan internasional dan kebijakan investasi. Kaitan antara

perdagangan internasional (baik ekspor maupun impor) dan investasi asing langsung (*foreign direct investment*, FDI) merupakan pendorong produktivitas sekaligus dapat memberikan kesempatan bagi lebih banyak penyerapan tenaga kerja. Dengan karakteristik tersebut, kebijakan ekspor dan investasi dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif (*inclusive development*) sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*, SDGs) (Sawada dkk., 2020).

Meskipun demikian, pilihan strategi dalam proses keterbukaan tersebut juga sangat penting. Pengalaman Tiongkok, Korea Selatan dan Mexico dapat menjadi bahan pembelajaran tentang perlunya keterbukaan yang strategis (Mugasejati, Pratiwi, & Zayzda, 2016). Tiongkok membuka perekonomiannya dan kemudian menggunakan investasi asing langsung (*foreign direct investment*, FDI) sebagai sumber inovasi *indogenous*. Korea Selatan relatif tertutup dalam hal FDI tetapi menggunakan dana bantuan dan hutang untuk membangun industri besar (*chaebols*) yang kemudian juga menjadi agen inovasi Korea Selatan. Sebaliknya, Mexico membuka perekonomiannya lewat perdagangan bebas NAFTA (*North American Free Trade Agreement*) tetapi kemudian mengalami stagnasi, Hal tersebut karena Mexico tidak melengkapi keterbukaan perdagangan internasionalnya dengan kebijakan industrialisasi dan sistem inovasi (Mugasejati, Pratiwi, & Zayzda, 2016).

Dalam kenyataannya, kondisi perekonomian global sangat memengaruhi perkembangan ekspor. Selain masalah daya saing, defisit perdagangan Indonesia juga disebabkan oleh misalnya perlambatan ekonomi dari *emerging markets*, misalnya Tiongkok dan India yang merupakan tujuan ekspor Indonesia yang penting. Demikian pula, harga komoditas yang turun menyebabkan turunnya penerimaan ekspor bagi Indonesia (Widodo, dkk. 2017). Demikian juga misalnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2019 tentu akan memberikan dampak bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Dari sisi perdagangan, Indonesia berpeluang mengekspor barang yang sebelumnya diimpor oleh Tiongkok dari Amerika Serikat misalnya minyak sawit berpotensi menggantikan minyak kedelai yang berasal dari Amerika Serikat. Meskipun demikian, Indonesia juga dapat kehilangan pangsa pasar ekspor batu bara atau komoditas ke Tiongkok karena penurunan produksi

di Tiongkok akibat penurunan permintaan dari Amerika Serikat sebagai akibat perang dagang (INDEF, 2018).

Dalam bidang impor jasa, sumber kebocoran yang cukup besar adalah defisit transaksi berjalan untuk transportasi laut. Defisit tersebut merupakan pembayaran sewa kapal asing (Budhi, 2018). Dengan pembayaran jasa tersebut, devisa Indonesia tentu menjadi berkurang. Strategi pembangunan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan mengembangkan industri galangan kapal nasional. Salah satu insentif investasi yang diberikan yaitu dalam bentuk *tax allowance*, meskipun pada kenyataannya fasilitas tersebut belum efektif untuk menarik investasi pada industri galangan kapal (Putra & Solikin, 2018). Hal ini memberikan contoh bahwa kebijakan industri dan kebijakan fiskal saling terkait dengan kebijakan lain dan dapat dipergunakan untuk meningkatkan peran perdagangan internasional bagi perekonomian.

F. KETERBUKAAN EKONOMI, PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL & REGIONALISASI

Keterbukaan ekonomi pada umumnya dilakukan dalam kerangka WTO. Meskipun demikian, terdapat ketidakpuasan atas kemajuan dalam perundingan WTO, sehingga beberapa negara melakukan perjanjian perdagangan bilateral maupun regional. Dalam perjanjian bilateral, Indonesia misalnya mempunyai perjanjian perdagangan dengan Jepang (IJEPA), Pakistan (IP-PTA), Korea Selatan (IKCEPA), Bangladesh (IB-PTA), dan Australia (IA-CEPA), untuk menyebut beberapa (Ditjen PPI, 2020). Dalam konteks ASEAN, dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-13 tahun 2007 disepakati pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA/ASEAN *Economic Community*, AEC) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi regional, salah satunya lewat menghilangkan hambatan tarif dan nontarif di lingkup ASEAN. Regionalisasi tersebut dimulai dengan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) dengan pemberlakuan *common effective preferential tariff* (CEPT) (Widodo, dkk. 2017). Lewat ASEAN, Indonesia juga mempunyai perjanjian dengan negara lain secara bilateral atau dengan mitra strategis (Ditjen PPI, 2020).

Indonesia berpeluang memanfaatkan MEA untuk meningkatkan ekspor, meskipun perlu disadari bahwa ekspor Indonesia masih berupa komoditas. Hal tersebut merupakan masalah dalam usaha untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Dengan melihat pada data *Revealed Comparative Advantage* (RCA) dan *Constant Market Share Analysis* (CMSA) diketahui bahwa Indonesia unggul dalam produk primer berupa hasil pertanian dan migas. Indonesia juga kuat pada produk industri makanan dan minuman. Di lain pihak, industri tekstil, pakaian dan alas kaki sebagai industri padat karya yang sebelumnya menjadi idola, sedang menuju *sunset industry* yang mempunyai daya saing yang menurun (Verico, 2017). Proses deindustrialisasi yang dirasakan sejak awal tahun 2000-an tentu membuat ekspor hasil industri menjadi semakin berkurang.

Dengan kondisi bahwa sebagian besar barang yang diekspor merupakan komoditas, menyebabkan daya saing ekspor rendah. Oleh karena itu, idealnya komoditas tersebut perlu diolah lebih dahulu oleh industri di dalam negeri agar memberikan nilai tambah yang tinggi. Dalam kaitan dengan investasi, Indonesia dapat memanfaatkan MEA sebagai sumber investasi masuk karena selama ini Indonesia merupakan penerima investasi-intra-kawasan ASEAN yang terbesar (Verico, 2017). Investasi yang berasal dari kawasan ASEAN tersebut dapat didorong untuk ditanamkan di industri yang mengubah komoditas menjadi produk industri.

G. KEBIJAKAN PEMBATAAN EKSPOR DI INDONESIA: BEA KELUAR

Untuk mendorong agar ekspor Indonesia tidak hanya berupa bahan mentah, maka pemerintah mengenakan pajak ekspor atau bea keluar atas berbagai produk. Sebagai contoh, pada tahun 2010 pemerintah mengenai bea keluar atas biji kakao untuk menghambat ekspor serta meningkatkan bahan baku bagi produsen kakao dalam negeri. Kebijakan pembatasan ekspor tersebut berhasil menurunkan ekspor dan meningkatkan jumlah perusahaan pengolah biji kakao meskipun tidak beroperasi dengan kapasitas penuh (Syadullah, 2012).

Selain itu, pajak ekspor dikenakan juga terhadap minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*, CPO). Ketika terjadi kenaikan harga komoditas CPO dan penurunan nilai tukar rupiah, maka produsen CPO lebih memilih untuk mengekspor produksinya. Akibatnya terjadi kelangkaan bahan baku di

dalam negeri, sehingga berimbas pada kenaikan harga minyak goreng (Nasution & Faisal, 2016). Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok, sehingga pemerintah melakukan intervensi dengan mengenakan bea keluar.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/2014 ditetapkan bea keluar mineral. Mineral yang dikenakan bea keluar adalah konsentrat mangan, besi, tembaga, timbal, seng, *ilmenite* dan titanium dengan tarif bervariasi antara 20 sampai dengan 60 persen tahun 2014 sampai dengan 2016 (Abidin, 2014). Sama dengan penjelasan pada paragraf sebelumnya, tujuan kebijakan ini adalah untuk menjaga pasokan bahan baku bagi industri dalam negeri sekaligus memaksa investor untuk melaksanakan proses hilirisasi produksi. Dalam kasus mineral ini, yang dimaksud adalah agar pengusaha tambang membangun pemurnian (*smelter*) di dalam negeri dan tidak semata-mata mengekspor dalam bentuk konsentrat yang belum memberikan nilai tambah yang tinggi.

Berdasarkan PMK 166/PMK.010/2020, selain biji kakao, CPO, dan mineral logam; bea keluar juga dikenakan terhadap kulit serta kayu. Apabila kebijakan ini dilakukan dengan konsisten dan ditunjang dengan insentif yang lain, diharapkan terjadi proses hilirisasi industrialisasi dan perubahan struktural dari ekspor berbasis barang komoditas dari proses ekstraktif menjadi ekspor berbasis barang produk industri manufaktur, baik barang setengah jadi maupun barang jadi. Dengan demikian dapat ditarik benang merah dari kebijakan ekspor untuk mendukung kebijakan industri yang pada gilirannya nanti akan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi.

H. EKSPOR, IMPOR DAN GLOBAL VALUE CHAIN

Rantai nilai global (*global value chain, GVC*) telah menjadi topik yang menarik dalam studi perdagangan internasional. Partisipasi suatu negara GVC berperan positif bagi pembangunan ekonomi lewat mekanisme peningkatan kemampuan industri (*upgrading*). Dengan berpartisipasi pada GVC, suatu negara tidak perlu membangun seluruh rantai nilai tambah, dalam arti suatu negara hanya perlu berkonsentrasi pada suatu proses nilai tambah tertentu dimana negara tersebut mempunyai keunggulan. Dengan partisipasi pada GVC, suatu negara juga semakin terlibat pada

proses globalisasi ekonomi dan mendapatkan akses pada teknologi asing, investasi, dan peningkatan sumber daya manusia. Dengan proses tersebut terjadi inovasi dan suatu negara dapat mengejar ketertinggalan dari negara lain baik lewat *learning by doing* maupun *learning by using* sehingga suatu negara dapat semakin maju (Zhuqing, 2019). Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan kaitan ekspor atau perdagangan dengan investasi, perolehan teknologi, dan peningkatan SDM dalam pembangunan. Kebijakan ekspor tidak dapat semata-mata berdiri sendiri untuk meningkatkan pembangunan. Kebijakan tersebut harus didukung dengan kebijakan-kebijakan lain yang bersinergi dan tidak saling bertentangan.

Untuk berpartisipasi dalam GVC, perlu dikembangkan lebih dahulu rantai nilai domestik (*domestic value chain*, DVC) yang kuat. DVC yang telah berkembang akan menjadi dasar bagi GVC (Beverelli dkk., 2019). Sayangnya dalam kasus Indonesia, karakter produk ekspor yang didominasi oleh komoditas dan produk yang menggunakan teknologi yang rendah. Dengan karakter produk tersebut, Indonesia tidak terlalu banyak berperan dalam GVC. Selain itu, produk yang diekspor oleh Indonesia mengandung komponen barang antara (*intermediate goods*) yang berasal dari impor (IsDB & ADB, 2019). Dengan demikian, impor tidak selalu berkonotasi negatif, karena barang yang diimpor tersebut berperan penting untuk memproduksi barang tujuan ekspor. Dalam kaitan ini, Dalam kaitan ini, salah satu kebijakan yang dapat diambil yaitu penurunan tarif impor bagi barang-barang antara (*intermediate goods*) yang diproduksi lebih lanjut di dalam negeri untuk kemudian diekspor (Solikin, 2019).

I. RANGKUMAN MATERI

Peran ekspor dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, hubungan tersebut secara populer dapat dilihat pada rumus Produk Domestik Bruto berdasarkan pengeluaran. Peran ekspor bagi pembangunan dalam jangka panjang harus dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan lain, khususnya yang terkait dengan investasi, industrialisasi, peningkatan teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Posisi suatu negara dalam rantai

nilai global (GVC) juga perlu diperhitungkan sebagai strategi untuk pembangunan ekonomi. Untuk memperkuat peran dalam GVC, perlu dilakukan penguatan rantai nilai domestik (DVC). Dalam hal ini, kebijakan perdagangan luar negeri termasuk kebijakan ekspor harus dilakukan secara tepat dan selektif.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan peran ekspor dalam meningkatkan *output* dalam jangka pendek dengan menggunakan rumus PDB berdasarkan pengeluaran!
2. Jelaskan teori-teori perdagangan internasional!
3. Berikan contoh komoditas-komoditas yang dikenakan pembatasan ekspor di Indonesia!
4. Jelaskan kaitan antara kebijakan perdagangan internasional dan investasi dengan pembangunan ekonomi!
5. Jelaskan peran partisipasi dalam rantai nilai global (GVC) bagi pembangunan ekonomi suatu negara!

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, N. Z. (2014). Rasionalitas dan evaluasi penetapan Bea Keluar dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan mineral. *Jurnal Bina Praja*, 6(2), 129-142.
- Beverelli, C., Stolzenburg, V., Koopman, R. B., & Neumueller, S. (2019). Domestic value chains as stepping stones to global value chain integration. *World Economy*, (42), 1467–1494.
- Budhi, S. (2018). *Makro Ekonomi: Aplikasi untuk Indonesia*. Yogyakarta: Expert.
- Budiono. (2019). *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Ditjen PPI. (2020). Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kemneterian Perdagangan. <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/bilateral>
- Fahmi, I. (2019). *Dasar-dasar Perekonomian Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Grübler, A. (1995). *Industrialization as a Historical Phenomenon*. Working Paper RR-95-9 International Institute for Applied Systems Analysis. Luxembourg, Austria.
- Hotsawadi & Widyastutik. (2020). Diversifikasi ekspor non migas Indonesia ke pasar non tradisional. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 14(2), 215-238.
- INDEF. (2018). *Proyeksi Ekonomi Indonesia 2019: Adu Strategi Hadapi Perang Dagang*. Jakarta: INDEF.
- IsDB & ADB. (2019). *The Evolutions of Indonesia's Participation in Global Value Chains*. Manila: ADB.
- Krugman, P. (1992). Does the New Trade Theory require a new trade policy? *The World Economy*, 15(4), 423-441.
- Mahendra, M. S. & Solikin, A. (2019). Impacts of import tariffs and nontariff measures on Indonesia's trade performances of environmental goods: A gravity model. *AFEBI Economics and Finance Review (AEFR)*, 4(1), 61-69.

- Mugasejati, N. P., Pratiwi, D. R. & Zayzda, N. A. (2016). *Strategi Menghadapi Middle Income Trap: Pengalaman dari Cina, Meksiko dan Korea Selatan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mulyani, E. (2017). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Nasution, A. H. & Faisal. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pajak ekspor terhadap perdagangan minyak sawit di Indonesia. *Pekbis Jurnal*, 8(1), 61-72.
- Oktaviani, R., Novianti, T. & Widyastutik. (2014). *Kebijakan Perdagangan Internasional (Aplikasinya di Indonesia)*. Bogor: IPB Press.
- Putra, A. & Solikin, A. (2018). Unattractive incentive: The case of tax allowance policy in Indonesia's shipyard industry. *Jurnal BPPK*, 11(2), 101-113.
- Putra, W. (2018). *Perekonomian Indonesia: Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Roeslan, F. & Zuhdi, S. (2019). From inward looking to outward looking: Dynamics of Indonesian economic policy during the New Era. *Proceeding of the 13th International Conference on Malaysia-Indonesia Relations (PAHMI)* (pp.21-26).
- Sawada, Y., Park, C.-Y., Khan, F. H. & Justo, C. J. (2020). Trade, global value chains and inclusive growth in Asia and the Pacific. Dalam Klasen, A. (Ed.). *The Handbook of Trade Global Policy*, 1st ed. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Schumacher, R. (2012). Adam Smith's theory of absolute advantage and the use of doxography in the history of economics. *Erasmus Journal of Philosophy and Economics*, 5(2), 54-80.
- Singh, T. (2010). Does international trade cause economic growth? A survey. *The World Economy*, 33(1), 1517-1564.
- Solikin, A. (2019). Harmonisasi tarif bea masuk untuk mendukung kebijakan industrialisasi dan rantai nilai global. Dalam Akhmadi, H. (Ed.). *Esai Keuangan Negara: Kebijakan APBN Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Bogor: Jeda.
- Syadullah, M. (2012). Dampak kebijakan bea keluar terhadap ekspor dan industri pengolahan kakao. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 6(1), 53-68.

- Verico, K. (2017). Perdagangan internasional Indonesia menuju 2030 dan seterusnya. Dalam ILUNI FEB UI (Ed.). *Indonesia Tahun 2030: Ide dan Gagasan Ekonom Muda FEB UI*. Jakarta: Kontan Publishing.
- Widodo, T., Susanto, A., Musthofa, M., Hidriyani, M., & Kamil, A. M. (2017). *Menuju Negara Maju: Apakah Indonesia Bergerak ke Arah yang Benar?* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Yanuar. (2016). *Makro Ekonomi: Suatu Analisis Konteks Indonesia*, Edisi 3. Kota Tangerang: Pustaka Mandiri.
- Zhuqing, M. (2019). *Global Value Chains (GVCs), Upgrading and Economic Growth*. Doctoral thesis, Department of Economics, The Graduate School, Seoul National University.

EKONOMI PEMBANGUNAN

BAB 7: PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DALAM PROSES PEMBANGUNAN

Aulia Keiko Hubbansyah, S.I.A., S.Akt., M.M., M.S.E

Universitas Pancasila

BAB 7

PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DALAM PROSES PEMBANGUNAN

A. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN TRANSFORMASI STRUKTURAL

Pembangunan ekonomi yang dimaknai sebagai upaya suatu negara untuk mengembangkan aktivitas ekonomi adalah fokus utama dari setiap pengambil kebijakan di semua negara. Pembangunan ekonomi yang oleh Meier (2001) didefinisikan sebagai proses mendorong peningkatan pendapatan per kapita suatu negara dalam jangka panjang menjadi penting karena sedikitnya memiliki tiga tujuan pokok yang harus dicapai. Tujuan pertama, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok. Tujuan kedua, peningkatan standar hidup. Dan, tujuan ketiga, perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial, baik bagi individu maupun masyarakat (Todaro dan Smith, 2000).

Pada prakteknya, pembangunan ekonomi selalu dicirikan dengan adanya proses transformasi struktural dimana pada periode ini beberapa sektor tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang lain (Mecik, 2014). Transformasi struktural didefinisikan sebagai perubahan struktur ekonomi dari sektor tradisional yang memiliki produktivitas rendah menuju sektor ekonomi dengan produktivitas tinggi (Szirmai *et al.*, 2012). Dalam hal ini, transformasi dari sektor pertanian menuju industri ditandai oleh semakin meningkatnya peran sektor manufaktur dan jasa terhadap total *output* dan total pekerja.

Dalam operasionalnya, salah satu pendekatan yang diambil para pemutus kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi adalah dengan cara mengakselerasi proses transformasi struktural. Kebijakan transformasi struktural mengupayakan terjadinya realokasi sumber daya (*resources*) di antara sektor dalam perekonomian (Herrendorf, *et.al*, 2013). Umumnya, kebijakan transformasi struktural memanfaatkan surplus sumber daya seperti, kapital dan tenaga kerja yang terdapat pada sektor primer atau sektor tradisional untuk diarahkan pada sektor yang lebih produktif, yakni sektor sekunder dan tersier atau sektor modern. Pada pelaksanaannya, proses transformasi struktural dicirikan dari tiga hal, yakni pertama, transformasi struktural menciptakan adanya perubahan pada struktur ketenagakerjaan. Dalam hal ini, berlangsungnya proses transformasi struktural akan menyebabkan terjadinya migrasi tenaga kerja dari sektor primer sektor pertanian ke sektor manufaktur dan jasa. Kedua, adanya perubahan dalam struktur permintaan, dari yang sebelumnya lebih dominan pada komoditas pertanian, perlahan mengarah ke hasil produksi manufaktur dan jasa. Hal ini menyebabkan proporsi anggaran untuk belanja komoditas pertanian rumah tangga relatif menurun sepanjang waktu. Ketiga, adanya perubahan dalam struktur produksi. Perubahan dalam struktur produksi, sebagai akibat dari proses transformasi struktural, sebenarnya merupakan konsekuensi dari adanya perpindahan atau realokasi sumber daya, dan perubahan dalam struktur permintaan masyarakat. Perubahan struktur produksi ditandai dengan lebih dominannya barang-barang yang bersifat industrial dalam suatu perekonomian.

Kebijakan transformasi sektoral mengandaikan bahwa sektor modern lebih produktif, sehingga lebih relevan untuk ditumbuhkembangkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena pada sektor modern akan dihasilkan nilai tambah (*value added*) yang lebih besar dibandingkan sektor tradisional, dan oleh karena itu, surplus sumber daya harus sepenuhnya dialokasikan ke sektor modern. Dalam kebanyakan model teoretikal dinyatakan bahwa sektor tradisional akan terserap atau menghilang dalam jangka panjang (Agrawal, *et.al*, 2013). Dalam empirisnya, langkah transformasi struktural yang mengarah pada penumbuhkembangan sektor modern telah terbukti berhasil

meningkatkan standar hidup di negara-negara dunia pertama berdasarkan fakta historis, negara maju lebih dulu melakukan realokasi sumber daya ke sektor modern, dan ini menjadi salah satu faktor yang mendorong kemajuan mereka. Pengaruh keberhasilan penerapan kebijakan transformasi struktural di negara-negara maju inilah yang kemudian membuat pengambil kebijakan di negara-negara dunia ketiga yakni, kelompok negara-negara berkembang pada akhirnya memilih jalur kebijakan yang sama dalam rangka membangun perekonomiannya.

Salah satu teori yang paling utama dalam pembahasan transformasi struktural adalah model pembangunan dua sektor yang dikembangkan oleh Arthur Lewis. Menurut Model Lewis ini, pada tahap awal perkembangannya, perekonomian terdiri dari dua sektor, yakni: (1) sektor tradisional, yaitu sektor perdesaan subsisten yang kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marjinal tenaga kerja sama dengan nol, kondisi ini merupakan situasi yang memungkinkan Lewis untuk mendefinisikan kondisi surplus tenaga kerja (surplus labor) sebagai suatu fakta bahwa jika sebagian tenaga kerja tersebut ditarik dari sektor pertanian maka sektor itu tidak akan kehilangan *output*nya, dan (2) sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang di transfer sedikit demi sedikit dari sektor subsisten.

Model dua sektor Arthur Lewis memusatkan perhatian utamanya pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja, pertumbuhan *output* dan peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor modern. Pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja dimungkinkan oleh adanya perluasan *output* sektor modern. Kecepatan perluasan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri sangat tergantung pada tingkat investasi di bidang industri dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor modern.

Peningkatan investasi dimungkinkan oleh adanya kelebihan keuntungan sektor modern dari selisih upah dengan asumsi bahwa para pemilik modal yang berkecimpung di sektor modern menanamkan kembali seluruh keuntungannya. Asumsi selanjutnya adalah tingkat upah pada sektor modern diasumsikan konstan dan berdasarkan suatu premis tertentu jumlahnya ditetapkan melebihi tingkat rata-rata upah di sektor

pertanian subsisten tradisional. Tingkat upah di daerah perkotaan sekurang-kurangnya harus 30 persen lebih tinggi dari pada rata-rata pendapatan di daerah pedesaan untuk memaksa para pekerja pindah dari desa-desa asalnya ke kota (Todaro dan Smith, 2006).

Perubahan struktur ekonomi tersebut ditandai dengan menurunnya kontribusi sektor pertanian dan meningkatnya kontribusi sektor industri dan jasa, baik dalam produk domestik bruto (PDB) maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan akan merubah pola konsumsi masyarakat terhadap barang-barang pertanian. Peningkatan pendapatan masyarakat akan menggeser permintaan masyarakat dari barang-barang makanan (pertanian) ke barang-barang *non* makanan (industri dan jasa). Hal ini sejalan dengan hukum Engel yang menyatakan elastisitas pendapatan terhadap permintaan barang-barang pertanian menurun seiring meningkatnya pendapatan.

Perubahan pola konsumsi tersebut akan meningkatkan *output* sektor industri (modern) sehingga menyerap tenaga kerja dengan produktivitas marginal nol yang ada di sektor tradisional (Todaro dan Smith, 2006). Oleh karenanya, sektor industri seringkali dijadikan tolok ukur kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara; semakin tinggi kontribusi sektor industri dalam perekonomian, semakin maju pula perkembangan pembangunannya (Sastrosoenarto, 2006).

Studi yang dilakukan oleh Jesus Felipe, Connie Bayudan-Dacuycuy dan Matteo Lanzafame, yang berjudul *The Declining Share of Agricultural Development in China: How Fast?*, bertujuan untuk memodelkan determinan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengurangan *share* ketenagakerjaan pada sektor pertanian di China. Dengan menggunakan periode pengamatan yang cukup panjang, yakni dari 1962-2013 dan metode *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) Model, Felipe *et.al* mencoba mengidentifikasi dampak, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dari beberapa variabel, seperti perubahan GDP per Kapita, *Industrial Gross Value Added*, porsi FDI terhadap GDP, dan porsi kredit ke sektor privat terhadap GDP, pada *share* ketenagakerjaan di sektor pertanian China.

Hasilnya diketahui bahwa FDI memiliki dampak jangka panjang, yang mana ini mengindikasikan kebijakan intensifikasi ekonomi terbuka akan membantu China dalam mentransformasikan struktur ekonominya. Selain itu, kredit domestik, yang diproyeksikan dengan porsi kredit ke sektor privat terhadap GDP, didapati juga berpotensi untuk berkontribusi mengurangi *share* tenaga kerja di sektor pertanian. Sementara itu, dibandingkan dengan dua variabel sebelumnya, *industry value added* dan *income per capita* diketahui memiliki dampak jangka panjang terbesar terhadap penurunan porsi tenaga kerja sektor pertanian China. Dari konstelasi variabel yang didapati signifikan, Felipe, *et.al*, menyimpulkan bahwa proses transformasi struktural yang terjadi di China mengikuti pola lintasan perkembangan yang normal.

Dengan model determinan yang telah diestimasi, Felipe, *et.al*, melakukan proyeksi bagaimana kondisi ketenagakerjaan di sektor pertanian China dalam jangka panjang. Dalam hal ini, Felipe, *et.al*, menemukan bahwa perlu waktu antara 80-87 tahun (terhitung dari tahun 1962) bagi China untuk memiliki porsi ketenagakerjaan di sektor pertanian yang sama dengan kondisi di negara-negara maju saat ini, yakni 5 persen. Dibandingkan negara-negara maju lainnya, proyeksi waktu yang dibutuhkan China untuk mencapai pengurangan tenaga kerja sektor pertanian hingga tinggal menyisakan 5 persen relatif cepat. Kondisi ini terjadi, menurut Felipe, *et.al*, tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi China yang melaju dengan cepat dalam beberapa dekade terakhir. Sekalipun begitu, berdasarkan temuannya ini, Felipe, *et.al*, lebih lanjut menyimpulkan bahwa China saat ini belum melampaui *Lewis Turning Point*, yang berarti bahwa belum sepenuhnya surplus tenaga kerja di sektor pertanian China berpindah ke sektor yang lebih produktif (manufaktur/jasa).

Sejumlah literatur lain mengenai transformasi struktural, seperti Chenery (1982), berargumen bahwa negara besar yang jumlah penduduknya banyak dan kekayaan alamnya berlimpah memiliki kemampuan membangun industri yang lebih besar ketimbang negara kecil. Lantaran pasar domestiknya luas, negara besar seperti Cina, India, dan Brazil, memiliki struktur industri yang lebih besar dan beragam dibandingkan negara kecil. Akibatnya, sektor industri memberikan

kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan berkembang di atas pertumbuhan rata-rata sektor lain. Proporsi sektor manufaktur di Indonesia yang menurun sejak 2004 mengindikasikan gejala pertumbuhan jangka panjang yang berbeda dengan negara besar lain (Anwar, 2015).

B. TRANSFORMASI STRUKTURAL: KASUS MEKSIKO DAN INDONESIA – SUATU PERBANDINGAN

Upaya modernisasi perekonomian Meksiko, diarahkan untuk menciptakan perubahan struktur dalam perekonomian Meksiko melalui pengembangan sektor industri atau kebijakan industrialisasi. Hal ini terlihat dari geliat industri yang tumbuh dengan cepat di daerah-daerah di Meksiko. Sebagai contoh, Audi, salah satu perusahaan otomotif dunia, berencana untuk memindahkan lokasi produksi mobil Q5 dari Jerman ke Meksiko. Menariknya, lokasi produksi baru yang dipilih Audi adalah daerah pinggiran Meksiko, yakni San Jose Chiapa, Negara Bagian Puebla. Kegiatan industrialisasi yang menggeliat di daerah pinggiran Meksiko membawa dampak positif, yakni tingginya penyerapan tenaga kerja di daerah periferi atau pinggiran Meksiko.

Sungguhpun begitu, upaya transformasi sektoral di Meksiko sebagaimana tertulis jelas di dalam artikel didapati menyisakan banyak persoalan. Persoalan pertama menyangkut aspek budaya. Penduduk Meksiko, khususnya yang hidup di daerah pinggiran dan yang merupakan penduduk asli disebut dengan *mexico profundo* memiliki persistensi budaya yang kuat terhadap proses transformasi yang tengah berlangsung. Penduduk San Jose Chiapa, misalnya, merasa bahwa dengan pindahnya lokasi produksi mobil Audi ke kota mereka akan berdampak buruk terhadap tingkat kriminalitas, keamanan, ataupun kesehatan lingkungan. Persoalan lain yang tak kalah pentingnya, adalah terjadinya *mismatch* antara jenis industri yang berkembang dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada di Meksiko. Klaster industri yang berkembang di Meksiko di antaranya adalah industri mobil, pesawat, barang-barang elektronik, dan perlengkapan elektronik lainnya. Industri-industri ini berkontribusi terhadap 70 persen nilai ekspor, atau setara dengan 18 persen GDP Meksiko. Jika dilihat jenis-jenis industri di atas lebih bersifat kapital intensif, atau lebih dominan penggunaan kapitalnya daripada tenaga kerja.

Kalaupun membutuhkan tenaga kerja, maka tenaga kerja yang dibutuhkan adalah yang terdidik. Ini menjadi persoalan tersendiri bagi pasar tenaga kerja Meksiko belum semuanya terdidik. Apalagi tenaga kerja yang ada di daerah pinggiran tempat kegiatan industri mulai menggeliat. Kondisi *mismatch* ini berdampak pada kurang optimalnya penyerapan tenaga kerja oleh sektor modern, atau dalam hal ini, sektor industri. Persoalan lain adalah kebijakan integrasi ekonomi intrakawasan dibawah pandu NAFTA tidak cukup membawa kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi domestik Meksiko. Meski salah satu landasan pembentukannya adalah pengentasan kemiskinan, tapi pada faktanya tujuan ini belum dapat diwujudkan nyatakan secara optimal. Sebab, sebagaimana terungkap, hampir setengah dari penduduk Meksiko hidup dalam kemiskinan. Khususnya di daerah-daerah yang relatif terbelakang, seperti Meksiko bagian selatan.

Lebih lanjut, proses transformasi struktural yang berlangsung di Meksiko, yang ditandai dengan adanya program industrialisasi, menyebabkan terjadinya ketimpangan kesejahteraan, baik pada level antarwilayah maupun pada interwilayahnya. Aktivitas industri di Meksiko yang terdiri dari industri otomotif, pesawat, barang-barang elektronik dan produk elektronik lainnya lebih terfokus di wilayah bagian utara dan tengah yang ditinggali oleh hampir 70 persen penduduk Meksiko. Nuevo Leon, daerah yang berada dekat dengan perbatasan Amerika dan menjadi daerah pusat industri Meksiko, bahkan memiliki produktivitas ekonomi yang setara dengan Korea Selatan. Sementara itu, wilayah bagian selatan Meksiko yang kondisinya relatif tertinggal, memiliki tingkat produktivitas ekonomi yang sama dengan Honduras. Hal ini menunjukkan lebarnya kesenjangan antara wilayah bagian utara dan selatan Meksiko. Kesenjangan, pada kenyataannya, juga terjadi pada level interwilayah. Program industrialisasi yang mulai mengarah ke daerah periferi Meksiko pada faktanya lebih dinikmati oleh kelompok yang disebut dengan elite lokal. Kelompok elite lokal inilah karena lebih adaptif didapati lebih mampu menyesuaikan diri dengan ritme industrialisasi yang tengah berkembang, sehingga mereka bisa lebih maju, terutama dari aspek pola pikirnya, dibanding golongan lain golongan bukan elite lokal yang jumlahnya jauh lebih besar. Secara umum, selain persoalan spasial di atas,

perbedaan antara wilayah utara dan selatan Meksiko, dalam kerangka analisis oposisi biner, dapat dinyatakan sebagai perbedaan antara yang formal dan informal; antara *rule of law* dan ketiadaan institusi.

Meskipun relatif tertinggal, bukan berarti kegiatan industrialisasi di daerah bagian selatan Meksiko tidak ada sama sekali. Penduduk yang tinggal di bagian selatan Meksiko, yang dicirikan dengan tingkat produktivitas ekonomi yang lebih rendah dari Utara, sejatinya juga menjalankan kegiatan industri. Hanya skala usahanya relatif kecil. Yang disayangkan, perkembangan industri di bagian selatan Meksiko, pada prakteknya, terganggu oleh ketiadaan infrastruktur yang memadai, sedikitnya tenaga kerja berkeahlian (*skilled labour*), akses keuangan yang relatif terbatas, dan persoalan rendahnya kepercayaan terhadap pelaku usaha. Konfigurasi negatif yang menghambat pengembangan usaha di wilayah selatan Meksiko, memaksa pelaku usaha khususnya yang berada di desa untuk bermigrasi ke pusat kota.

Jika diperhatikan kondisi yang terjadi di Meksiko di atas dalam upaya mendorong terjadinya transformasi struktural melalui program industrialisasi memiliki relevansi yang erat dengan kasus Indonesia. Sejak Orba yakni, rezim yang mengedepankan tiga aspirasi, yang meliputi pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dan pemerataan hasil-hasil pembangunan berkuasa, program industrialisasi dikedepankan dalam rangka mempercepat proses transformasi struktural untuk menuju tahap lepas landas. Program industrialisasi yang dilaksanakan menghasilkan efek yang sangat positif dimana ekonomi Indonesia rata-rata bertumbuh 6.7 persen per tahun selama 1967-1996. Perkembangan yang monumental, dalam kerangka transformasi struktural, terjadi pada 1990-2000. Pada 1990, *share* Indonesia atas ekspor produk manufaktur dunia mencapai 0.4 persen. Pada 2000, *share*-nya meningkat menjadi 0.8 persen. Secara relatif terhadap negara-negara berpendapatan menengah, *share* Indonesia atas ekspor produk manufaktur meningkat dari 7 persen pada 1990 menjadi 24 persen pada 2000. Dampaknya, peran sektor manufaktur menjadi semakin penting bagi perekonomian Indonesia.

Tren dari 1985-2000 menunjukkan kenaikan *share* sektor manufaktur relatif terhadap PDB, dari 16 persen pada 1985 menjadi 27.7 persen pada 2000. Dan, ini berdampak dominannya *share* ekspor produk manufaktur

Indonesia relatif terhadap total eksportnya, dari 13 persen pada 1985 menjadi 57.7 persen pada 2000. Meski kemudian ditemui adanya kecenderungan deindustrialisasi, dimana *share* manufaktur mengalami penurunan dari 27.7 persen pada 1990 menjadi 25 persen pada 2013 terhadap PDB, sektor manufaktur masih tercatat sebagai salah satu sektor yang dominan. Selain perubahan struktur produksi, kebijakan transformasi struktural di Indonesia juga memunculkan terjadinya perubahan dalam struktur ketenagakerjaan. Jumlah (*share*) tenaga kerja yang bekerja di sektor modern, yakni manufaktur dan jasa, secara gradual terus membesar. Di sisi yang lain, *share* tenaga kerja yang bekerja di sektor agrikultur terus menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi migrasi tenaga kerja dari sektor tradisional agrikultur ke sektor modern, yakni sektor manufaktur dan jasa.

Sungguhpun demikian, perkembangan positif di atas juga mengandung sejumlah catatan penting yang perlu perhatian serius. Seperti halnya yang terjadi di Meksiko, kebijakan transformasi struktural yang diakselerasi dengan pelaksanaan program industrialisasi di Indonesia juga menyisakan eksekusi negatif. Utamanya yang menyangkut dengan masalah ketimpangan. Jika di Meksiko ketimpangan terjadi antara wilayah bagian utara dan selatan, di Indonesia ketimpangan terjadi antara wilayah Jawa dan *Non Jawa*. Aset masih tetap terkonsentrasi di Pulau Jawa. Meski luasnya hanya sekitar 7 persen dari total wilayah Indonesia, Jawa menyumbang 57 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Di tingkat provinsi, empat provinsi penyumbang PDB nasional terbesar juga terdapat di Jawa, yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dengan sumbangan kumulatif PDB nasional lebih dari 50 persen, peran penting Jawa dalam pembangunan dilihat dari serapan tenaga kerja sangatlah dominan. Jawa menyerap lebih dari 80 persen tenaga kerja Indonesia periode 1976-2001. Dominasi penyerapan tenaga kerja disebabkan karena sebagian besar aktivitas Industri Besar dan Sedang (IBS) terkonsentrasi di Jawa. Bersama Sumatera, keduanya adalah dua wilayah yang sangat dominan dengan sumbangan mencapai 80 persen terhadap PDB nasional.

Sementara itu, dari unit analisis yang lebih mikro yakni, individu ketimpangan juga melebar. Setelah sempat berkontraksi cukup dalam pada saat krisis, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif rata-rata sekitar 5 persen dalam 10 tahun terakhir. Tapi tidak berarti pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini terdistribusi dan dirasakan oleh segenap masyarakat Indonesia. Kenyataannya, sedikit sekali porsi dari pertumbuhan ini yang dinikmati oleh kelompok mayoritas, yakni kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang jumlahnya mencapai 40 persen dari total populasi. Trennya bahkan terus saja menurun. Pada 2002, kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah telah menerima 20.92% bagian pertumbuhan nasional. Pada 2011 porsinya turun hingga hanya mencapai 16.85%. Ironisnya, di sisi lain, penurunan distribusi pendapatan di 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah ini justru diikuti oleh kenaikan porsi pertumbuhan nasional yang dirasakan oleh 20% kelompok terkaya di negeri ini. Pada 2002 kelompok ini memperoleh porsi sebesar 42.2% dari pertumbuhan nasional, nilainya meningkat menjadi 48.4% pada 2011. Ketimpangan ekonomi antarkelompok masyarakat terus melebar. Hal ini tergambar dari naiknya indeks Gini, yang merupakan indikator ketimpangan, dimana angkanya meningkat dari 0.33 pada 2002 menjadi 0.41 pada 2011. Ketimpangan pada level individu ini mengkrystal, salah satunya, disebabkan oleh faktor industrialisasi yang tidak inklusif. Hambatan *mismatch* dalam program industrialisasi terjadi karena sektor manufaktur yang dibangun lebih bersifat kapital intensif, dan tidak didukung oleh keberadaan sumber daya domestik.

Untuk mengurangi eksek negatif yang berwujud ketimpangan ini, salah satunya, adalah dengan membangun infrastruktur yang memadai di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini penting karena infrastruktur adalah urat nadi bagi perekonomian. Salah satu alasan kenapa Jawa dipilih oleh IBS adalah karena ketersediaan infrastrukturnya yang mantap. Dengan adanya pembenahan infrastruktur di luar Jawa, maka pusat pembangunan ekonomi dapat disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Beberapa agenda pemerintah, seperti program transmigrasi dan pembangunan desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, pengembangan kawasan ekonomi khusus dan industri, penguatan interdependensi ekonomi antardaerah, pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan

bebas. Penyelenggaraan sejumlah rencana kerja di atas, adalah bagian dari upaya mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah, dengan cara meningkatkan integrasi dan interkoneksi seluruh wilayah di Indonesia yang pada gilirannya akan bermuara pada pemerataan pembangunan. Penumbuhkembangan sektor industri diluar Jawa juga perlu diperkuat dengan kebijakan fiskal, baik lewat kebijakan penerimaan ataupun belanja negara. Kebijakan insentif melalui kebijakan penerimaan negara dapat berupa pembebasan bea masuk; bea keluar; PPN tidak dipungut/dibebaskan; dan fasilitas PPh Badan. Kebijakan insentif dari sisi belanja negara dapat berupa subsidi sektor tertentu dan pajak ditanggung pemerintah.

Pada sisi lain, proses transformasi struktural perlu dipercepat guna mendorong tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor manufaktur dan jasa. Kebijakan ini harus ditempuh karena kontribusi sektor pertanian sudah menyusut sangat besar terhadap perekonomian. Padahal, meski secara relatif sudah menurun, proporsi tenaga kerja yang berada di sektor pertanian Indonesia masih mencapai 38% pada 2013. Kondisi ini berakibat pada tingginya angka kemiskinan di sektor pertanian. Upaya untuk mendorong tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor manufaktur dan jasa bukanlah hal yang mudah. Sebab sektor industri memerlukan tenaga kerja berketerampilan dan berpendidikan, sementara 65% tenaga kerja hanya tamat SMP ke bawah faktor rendahnya kualitas pendidikan ini menjadi determinan atas masih rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia. Ada *mismatch* antara kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja yang ada. Dalam situasi ini, upaya gradual yang dapat dilakukan pemerintah guna mendorong penyerapan tenaga kerja oleh sektor industri adalah, pertama, membangun sektor industri dan jasa yang mengolah sektor pertanian dengan teknologi sedang, sehingga lompatan keterampilan yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi. Kedua, perlu akselerasi yang masif untuk meningkatkan pendidikan masyarakat agar tercapai 50-60% porsi penduduk yang berpendidikan minimal SMA. Faktor ini sangat penting, karena dari kasus di banyak negara maju, diketahui bahwa keberhasilan proyek industrialisasi sangat ditentukan oleh ketersediaan tenaga kerja yang berketerampilan dan berpendidikan (Dijk, *et.al*, 2006). Dengan kualitas pendidikan yang lebih baik, upaya modernisasi

perekonomian Indonesia dengan cara mendorong terjadinya transformasi struktural akan dapat dirasakan efek positifnya oleh seluruh masyarakat. Sehingga, sifat dari pembangunan ekonomi yang dicapai lebih inklusif.

Aspek strategis lain yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengurangi *coordination failures*. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sinergitas kebijakan antarkementerian dan antarlembaga terkait. Solusinya bisa dengan menyederhanakan jumlah kementerian dan lembaga. Jumlah kementerian tidak perlu banyak. Kementerian atau lembaga negara yang tugas pokok dan fungsinya bersinggungan akan lebih efektif bila digabungkan. Misalnya, antara Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Jumlah kementerian yang terlalu gemuk seringkali memperburuk persoalan koordinasi. Selama ini relatif banyak kebijakan antarkementerian dan antarlembaga yang tumpang tindih. Konfigurasi seperti ini menyulitkan perkembangan sektor industri dan upaya transformasi struktural di Indonesia. Pada prakteknya, peraturan yang tumpang tindih menjadi salah satu halangan dalam mendorong efektivitas penerapan kebijakan industrialisasi nasional karena lebih mendorong terjadinya perilaku *rent-seeking* dan moral *hazard* dalam birokrasi sehingga menciptakan kondisi ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itu, selain perampangan kementerian, seluruh kebijakan yang sifatnya tumpang tindih juga harus dipangkas. Sinergitas kebijakan antarlembaga perlu diupayakan agar tercipta kepastian institusi atau hukum.

C. JEBAKAN PENDAPATAN MENENGAH (*MIDDLE INCOME TRAP*) : PROSPEK INDONESIA

Secara kualitatif, fenomena *middle income trap* dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada mulanya, perekonomian suatu negara berada pada tahap pendapatan yang rendah terminologi ekonomi-politik untuk negara semacam ini adalah “negara berkembang”. Negara dalam tahapan ini dicirikan oleh kondisi masyarakatnya yang masih tradisional, terbelakang dan menghadapi persoalan *poverty gap*. Akan tetapi, negara berpendapatan rendah memiliki keunggulan komparatif di pasar internasional dengan memproduksi barang-barang berbiaya rendah. Kelompok negara dengan kategori ini umumnya menggunakan teknologi yang diimpor dari luar. Pada saat perekonomian meningkat menjadi

negara berpendapatan menengah, negara tersebut mendapatkan hasil produktivitas melalui realokasi tenaga kerja dari sektor agrikultur ke sektor industri manufaktur. Perubahan ini ditandai dengan membesarnya porsi sektor manufaktur dan jasa terhadap total *output* dan pekerja. Ketika perekonomian masuk kategori pendapatan menengah, terjadi perubahan struktural dalam pasar tenaga kerja, level teknologi dan keunggulan komparatif. Pada pasar tenaga kerja terjadi perpindahan dari surplus pekerja menuju kekurangan tenaga kerja. Konsekuensinya, upah riil pun meningkat. Bila kenaikan upah riil ini tidak disertai dengan level produktivitas pekerja yang meningkat, maka perekonomian akan kehilangan keunggulan komparatifnya umumnya, pada tahap ini jenis industri yang dominan masih bersifat *labor intensive*. Dalam keadaan di atas, tidak mungkin lagi mengalihkan surplus tenaga kerja ke sektor industri karena biayanya yang membesar. Dampaknya, peranan sektor manufaktur terhadap perekonomian akan menurun. Perekonomian dalam kondisi ini akan mengalami *middle-income trap* atau perangkap pendapatan menengah (LPEM, 2015).

Van Tho (2013) di dalam jurnalnya, *The Middle Income Trap: Issues for Members of ASEAN*, mengklasifikasi ekonomi dunia ke dalam empat kelompok. Kelompok pertama terdiri dari negara-negara berpendapatan rendah yang masih digelayuti persoalan kemiskinan atau *poverty trap*. Kelompok kedua terdiri dari negara-negara yang telah mencapai level pendapatan menengah selama puluhan tahun bahkan dalam banyak kasus sudah selama 50 tahun tapi kemudian menghadapi persoalan rendahnya tingkat pertumbuhan, bahkan *zero growth*. Kelompok ketiga terdiri dari negara-negara yang baru saja mencapai atau mendekati level pendapatan menengah China dan termasuk beberapa negara ASEAN termasuk ke dalam grup ini. Kelompok keempat terdiri dari negara-negara berpendapatan tinggi, seperti negara-negara OECD. Negara-negara yang berada dalam kelompok kedua, yang diistilahkan sebagai *old middle-income countries*, inilah yang dideskripsikan tengah menghadapi kondisi *middle-income trap*.

Untuk dapat menyimpulkan apakah suatu negara tengah mengalami jebakan pendapatan menengah, diperlukan adanya suatu ukuran. Dalam konteks ini, Felipe (2012) memberi batasan waktu yang jelas menyangkut berapa lama suatu negara harus berada dalam kelompok negara berpendapatan menengah untuk dapat dikategorikan sedang mengalami *middle income trap*. Felipe (2012) membaginya menjadi dua jebakan (*trap*), yakni *lower middle income* dan *upper middle income trap*. Jangka waktu agar suatu negara tidak dikategorikan sebagai negara yang mengalami *lower middle income trap* adalah 28 tahun. Sedangkan jangka waktu untuk suatu negara agar tidak dimasukkan ke dalam kelompok *upper middle income trap* adalah 14 tahun. Artinya, dalam kurun waktu kurang dari 28 tahun, negara yang sudah mencapai level *lower middle income* harus segera mampu mencapai level pendapatan per kapita kategori *upper middle income* untuk itu, suatu negara perlu tingkat pertumbuhan minimal 4.7 persen selama 28 tahun agar terhindar dari jebakan. Kondisinya sama untuk *upper middle income*, dimana negara-negara dengan kategori pendapatan per kapita ini, harus dapat mencapai level *high income countries* kurang dari 14 tahun untuk itu butuh pertumbuhan pendapatan sedikitnya 3.5 persen selama 14 tahun. Kalau tidak, negara-negara tersebut akan digolongkan sebagai negara yang tengah mengalami kondisi jebakan pendapatan menengah atau *middle income trap*, baik untuk *lower middle trap* maupun *upper middle trap*.

Felipe (2012) mendapati bahwa dari total 124 negara yang menjadi sampel studinya 29 negara di antaranya tergolong ke dalam *low income countries*; 31 negara ke dalam *lower middle-income*; 30 negara ke dalam *upper middle-income*; dan 34 negara ke dalam *high-income countries*. Dengan mengombinasikan data Bank Dunia dan data pada Maddison (2010), Felipe (2012) menemukan bahwa, pada tahun 1950, 82 negara dari total sampelnya sebagai negara berpendapatan rendah, 33 negara sebagai negara berpendapatan menengah-bawah, 6 negara sebagai negara berpendapatan menengah-atas, dan hanya 3 negara – yakni, Kuwait, Qatar dan UEA yang tercatat sebagai negara berpendapatan tinggi (*high income countries*). Amerika Serikat, sebenarnya, telah mencapai level negara berpendapatan tinggi sejak tahun 1944. Hanya, kemudian turun menjadi negara dengan pendapatan menengah-atas (*upper middle-income*)

karena tingkat pendapatan per kapitanya melorot disebabkan perang pada tahun 1945. Posisi Amerika Serikat kembali ke level negara berpendapatan tinggi pada tahun 1962, yang juga diikuti oleh Australia, Kanada, Selandia Baru, Swiss dan Venezuela.

Pada dekade 1950an didapati adanya lonjakan transformasi yang signifikan dari negara berpendapatan rendah (*low income*) ke menengah-bawah (*lower middle-income*). Jumlahnya mencapai 13 negara. Secara total, 42 dari 82 negara pada 1950 telah mampu keluar dari kelompok negara berpendapatan rendah menuju kelompok negara berpendapatan menengah-bawah maupun menengah-atas pada 2010. Sementara itu, pada akhir 1960an-1980, dan pada akhir 1980an-2010, yang oleh Maddison (1982) disebut sebagai *golden age*, didapati terjadi lonjakan yang tinggi pada kelompok negara berpendapatan tinggi (*high income*). Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi transformasi perekonomian dari negara berpendapatan menengah-atas ke pendapatan tinggi. Yang menarik, negara-negara *non european countries*, seperti Korea Selatan, Singapura dan China Taipei berhasil mentransformasi ekonominya masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi. Secara keseluruhan, jumlah kelompok negara berpendapatan tinggi meningkat dari yang hanya 4 negara pada 1960 menjadi 21 negara pada 1980, 23 negara pada 1990 dan 32 negara pada 2010 (Felipe, 2012).

Di antara negara-negara yang berhasil melampaui *threshold high income countries*, Korea Selatan merepresentasikan kisah yang eksepsional dalam hal transisi menuju negara maju. Korea Selatan bergerak dari kondisi *income* per kapita sekitar US\$ 2.000 pada 1960, hingga pada 2008, besaran *income* per kapita-nya telah melonjak menjadi US\$ 28.000 (*in PPP*). Proses transisi Korea yang cepat ini dimulai pada 1962. Ketika itu dirumuskan rencana pembangunan lima tahunan untuk pertama kalinya. Rencana lima tahunan ini dimaksudkan sebagai upaya koordinasi antar-sektor publik dan privat untuk meningkatkan kinerja perekonomian. Korea berhasil mengakselerasi pertumbuhan ekonominya dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 7 persen sampai tahun 1997. Perkembangan ekonominya ditandai dengan tingkat tabungan dan investasi yang tinggi. Politik otoritarian ketika itu melarang adanya serikat pekerja, dan ini dimaksudkan sebagai langkah untuk menekan upah kerja

agar tetap rendah untuk mendukung investasi ini disebut dengan tahap pertama pembangunan. Tahap kedua pembangunan ekonomi Korea meliputi fase krisis finansial tahun 1997-1998. Kala itu, Korea Selatan termasuk negara yang terkena imbas krisis dengan cukup parah. Tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonominya yang negatif, meningkatnya jumlah pengangguran secara drastis dari 2.4 persen pada 1997 menjadi 6.8 persen pada 1998 -, dan bertambahnya jumlah orang miskin dari 11.4 persen pada 1997 menjadi 23.2 persen pada 1998. Yang menarik, Korea mampu pulih dengan cepat. Tepat satu tahun setelah tertimpa krisis, ekonomi Korea langsung dapat bertumbuh positif 10.7 persen. Ekspor meningkat dari 9 persen pada 1999 menjadi 18.2 persen pada 2000. Tingkat pengangguran dan jumlah orang miskin turun, yang masing-masingnya, menjadi 4.5 persen dan 18 persen pada 1999. Secara berkelanjutan dari tahun 1998-2008, Korea berhasil mencatatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 5 persen. Salah satu alasan kenapa transisi Korea berjalan relatif mulus, dari negara berpendapatan menengah ke tinggi, di saat banyak negara lain mengalami kesulitan, adalah karena kebijakan *countercyclical* moneter dan fiskal yang dijalankan secara agresif. Selain itu, mereka juga melakukan reformasi besar-besaran pada sektor bisnis, perbankan, sektor publik dan pasar tenaga kerjanya (Foxley, *et.al*, 2011).

Meski didapati beberapa negara dengan kecenderungan progresif, seperti Korea Selatan, Singapura dan Taiwan yang secara gradual mampu terus mentransformasi perekonomiannya dari negara berpendapatan rendah ke negara pendapatan tinggi, sejatinya terdapat lebih banyak negara di dunia ini yang mengalami stagnasi atau mengalami *middle-income trap*. Bank Dunia (2012) melaporkan bahwa dari 101 negara yang tergolong *middle income* pada 1960, hanya 13 negara diantaranya yang berhasil bertransformasi menjadi *high income countries*. Atau, dengan kata lain, terdapat 88 negara lainnya yang mengalami stagnasi.

Kondisi stagnasi yang paling kentara terjadi di Kawasan Amerika Latin, dengan Argentina bersama dengan Uruguay sebagai aktor utamanya. Di antara kelompok negara Amerika latin yang lain yang juga mengalami *middle income trap*, seperti Brazil dan Chile, Argentina tercatat sebagai negara terlama yang berada di level *upper middle income*, yakni 51 tahun.

Padahal, tingkat pendapatan per kapita Argentina pada tahun 1914, pernah lebih tinggi dari Amerika Serikat. Namun, karena disebabkan tata kelola pemerintahan yang buruk, seperti ketidakpastian penegakan hukum dan fokus investasi yang keliru, menjadikan Argentina tidak mampu bertransformasi menjadi negara *high income* untuk waktu yang sangat lama (Kotler, *et.al*, 1997). Proyeksi yang optimistik memperkirakan jika pada tahun 2020 mendatang, barulah Argentina akan masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi dengan *income* per kapita sebesar US\$ 23.285. Itu pun dengan asumsi segala persyaratan seperti tingkat pertumbuhan ekonomi minimum yang harus dicapai terlebih dulu dapat terpenuhi (Foxley, *et.al*, 2011). Jika tidak, maka akan lebih lama lagi Argentina mengalami kondisi *middle income trap*.

Untuk diketahui, *Middle income trap*, sebagaimana dikatakan oleh Vivareli (2014), disebabkan adanya perlambatan pertumbuhan yang lebih dipengaruhi oleh faktor *productivity slowdown* daripada faktor *decreasing return* dari akumulasi kapital. Persentase pengaruh *productivity slowdown* atau total *factor productivity* terhadap perlambatan pertumbuhan bahkan mencapai 85 persen, dan hanya 15 persen yang berasal dari akumulasi kapital (Eichengreen, *et.al*, 2012). Oleh sebab itu, berdasarkan temuan di atas, diketahui bahwa human *capital*, perubahan struktural, dan inovasi adalah faktor utama yang mendorong pertumbuhan *total factor productivity* (TFP). Dan karenanya, sekaligus menjadi solusi atas permasalahan *middle income trap*. Selain itu, kesepakatan sosial dan politik juga penting untuk menghindari kondisi stagnasi. Kapasitas dari pemimpin politik dalam membangun konsensus selama pelaksanaan manajemen krisis dan reformasi struktural dibutuhkan pada tahapan *post crises*, dan ini sangat mempengaruhi hasil yang akan diperoleh. Karena tak dapat dipungkiri bahwa krisis merupakan siklus dalam ekonomi sering diistilahkan dengan konjungtur. Sehingga, aspek stabilitas sosial politik diperlukan dalam proses pemulihan, dan sekaligus pembangunan ekonomi (Foxley, *et.al*, 2011). Salah satu alasan kenapa negara-negara kawasan Sub Sahara Afrika tetap tidak mampu membangun ekonominya, bahkan terus tergolong sebagai negara berpendapatan rendah dari tahun 1950 sampai saat ini dimana 31 dari 37 negara di dunia selalu berada di level *low*

income countries berasal dari Sub Sahara Afrika adalah kondisi sosial politiknya yang terus bergejolak.

Dalam konteks Indonesia, PDB per kapita Indonesia didapati terus bertumbuh, dari US\$ 570 pada tahun 2000, menjadi US\$ 3.420 pada tahun 2012. Selama periode yang relatif singkat, tingkat kesejahteraan penduduk mengalami perbaikan. Dengan besaran pendapatan ini, Indonesia berdasarkan ukuran klasifikasi Bank Dunia merupakan negara berpendapatan menengah-bawah atau *lower middle income*. Berdasarkan ukuran waktu Felipe (2012) seperti telah diuraikan di atas sejatinya Indonesia belum termasuk negara di dunia yang menghadapi masalah *middle income trap*. Hal ini karena Indonesia baru selama 25 tahun menyangang status sebagai negara *middle income* lebih tepatnya, *lower middle income*. Indonesia masih punya batas waktu 3 tahun dari yang ditentukan untuk menuju tahap lanjutan, yaitu menjadi kelompok negara *upper middle income*. Apabila ingin lolos dari perangkap *lower middle income trap*, pendapatan per kapita Indonesia harus tumbuh rata-rata 15 persen dalam waktu yang tersisa (LPEM, 2015). Hanya, bila melihat konfigurasi saat ini, proyeksi yang paling realistis menunjukkan bahwa Indonesia cuma mampu bertumbuh maksimal 4-6 persen per tahunnya. Ini berarti bahwa potensi Indonesia untuk mengalami situasi *middle income trap* sangatlah besar.

Untuk dapat terus menaikkan pendapatan per kapitanya, Indonesia perlu meningkatkan pertumbuhannya dengan cara mendorong *productivity*, inovasi dan perubahan struktur. Pada dasarnya, *productivity*, inovasi dan transformasi struktural dapat ditingkatkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia secara khusus, kualitas tenaga kerjanya. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, dalam jangka menengah dan panjang, akan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan. Meski didapati kecenderungan yang positif, yakni terus meningkatnya proporsi alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan relatif terhadap PDB, dari 2.46 persen pada 2001 menjadi 3.56 persen pada 2012 untuk bidang pendidikan, dan 2.23 persen pada 2001 menjadi 3.03 persen pada 2012 untuk bidang kesehatan, kualitas SDM Indonesia masih jauh dari kata optimal. Ini tercermin dari komposisi angkatan kerja Indonesia yang masih didominasi oleh tenaga kerja

berpendidikan rendah. Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 50 persen angkatan kerja berpendidikan SD atau kurang. Hanya sekitar 70 dari 100 anak yang masuk kelas 1 SD yang menyelesaikan pendidikan SMP. Atau, ada sekitar 30 orang anak sisanya yang putus sekolah. Proporsi anak yang melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi yakni, SMA dan perguruan tinggi pasti jauh lebih kecil lagi angkanya. Bonus demografi penduduk yang dirasakan Indonesia yakni, proporsi penduduk usia produktif lebih besar daripada yang *nonproduktif* akan lebih dapat teroptimalkan apabila kualitas dari manusianya memadai.

Dalam konteks era *knowledge-based economy*, penting bagi suatu negara untuk menggalakkan kegiatan *research and development*. Sebab, dari kegiatan ini, akan dihasilkan inovasi-inovasi yang dapat memperkuat daya saing dan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang dapat menjadi negara kelompok *high income countries* tanpa didukung oleh daya atau kemampuan berinovasi yang baik. Negara-negara yang paling berhasil mentransformasi perekonomiannya dengan relatif mulus menjadi *high income countries*, seperti Korea Selatan dan Finlandia, di awal pembangunan ekonominya memilih langkah yang berbeda dibanding negara-negara lain. Kalau negara lain berfokus pada kapital fisik seperti, China Korea Selatan dan Finlandia di fase-fase awal pembangunan lebih mengarahkan investasinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mereka menganggarkan begitu besar dana untuk kepentingan riset. Untuk aspek ini, Indonesia relatif jauh tertinggal. Ini bisa dilihat dari *budget* pemerintah untuk aktivitas keilmuan dan teknologi di Indonesia yang justru mengalami penurunan cukup tajam. Anggaran untuk riset yang dialokasikan pemerintah sejak tahun 1986-2002 menurun rata-rata 0.18 persen dari PDB. Pada tahun 2005-2009, rata-rata anggaran untuk riset relatif terhadap PDB hanya sebesar 0.08 persen. Ini berimbas pada aktivitas riset di Indonesia yang tidak semarak, tercermin dari sedikitnya jumlah peneliti di Indonesia yang baru mencapai 100 peneliti per sejuta penduduk, atau secara total baru berjumlah 25.000 peneliti. Padahal, untuk dapat masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi dibutuhkan sekurangnya 250.000 peneliti. Konsekuensinya adalah sangat sedikit artikel ilmiah peneliti Indonesia yang terpublikasi di jurnal-jurnal internasional. Saat ini, untuk aktivitas

riset, jangankan dari Singapura atau Malaysia, dibandingkan Vietnam saja Indonesia relatif sudah tertinggal.

Sementara itu, dari sisi kesehatan, dampak dari terfragmentasinya layanan kesehatan di Indonesia adalah kondisi kesehatan di Indonesia masih terbilang kurang baik. Ini terlihat dari ukuran *life expectation at birth* atau angka (umur) harapan hidup waktu lahir masyarakat Indonesia yang relatif rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Berdasarkan data UNDP tahun 2012, umur harapan hidup waktu lahir masyarakat Indonesia adalah 69.8 tahun. Umur harapan hidup waktu lahir di Indonesia ini masih lebih rendah dari yang ada di Australia, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam dan Malaysia. Kehadiran JKN-BPJS yang digagas pemerintah baru-baru ini diharapkan bisa meningkatkan kadar kesehatan masyarakat. Dengan adanya JKN-BPJS, akses layanan kesehatan relatif sudah lebih inklusif. Ini penting, karena selama ini layanan kesehatan di Indonesia berlaku diskriminatif dengan lebih mengedepankan kelompok tertentu. Layanan kesehatan di Indonesia seringkali mengeksklusi kelompok masyarakat miskin. Padahal, kesehatan adalah hak asasi terlepas dari apapun status sosial seseorang. Bila tingkat kesehatan masyarakat rendah, maka tidak ada manfaatnya masyarakat yang cerdas. Karena tanpa sehat, seseorang tidak mungkin bisa bekerja dan produktif. Dengan kata lain, masyarakat yang tidak sehat memiliki produktivitas yang rendah, dan ini pasti berdampak pada level kesejahteraannya. Mengingat pentingnya isu kesehatan ini, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran kesehatan. Program JKN-BPJS perlu diperluas, tidak hanya dari sisi kepesertaan, tapi juga dari sisi manfaatnya. Berdasarkan satu hasil studi diketahui bahwa agar kepesertaan JKN-BPJS dapat menyentuh seluruh penduduk Indonesia, yakni 240 juta, dibutuhkan anggaran jaminan kesehatan senilai Rp 100 triliun. Anggaran kesehatan sebesar ini, selain sudah meliputi seluruh penduduk, juga sudah mencakup seluruh jenis penyakit, termasuk penyakit terminal yakni, penyakit yang butuh penanganan rutin, dan umumnya biayanya amat mahal, seperti cuci darah. Jika dilihat dari nilai anggaran yang dibutuhkan, sesungguhnya tidaklah besar. Nilainya bahkan jauh lebih rendah dari subsidi BBM yang pernah mencapai lebih dari Rp 250 triliun per tahun. Padahal, subsidi BBM ini, selain hanya untuk kepentingan konsumtif berdasarkan hasil evaluasi

sejumlah lembaga juga relatif lebih dinikmati oleh penduduk menengah atas. Bila dikomparasi manfaat sosialnya pastilah relatif lebih rendah dibandingkan subsidi anggaran kesehatan yang sejatinya lebih dinikmati dan dibutuhkan oleh kelompok masyarakat miskin yang secara etis memang perlu dibantu kehidupannya.

Untuk aspek sosial politik, faktor institusional perlu mendapat perhatian yang utama di Indonesia. Pentingnya faktor institusional sebagai determinan pembangunan ekonomi telah terverifikasi dari hasil studi La Porta, *et.al*, (1997, 1998) yang menunjukkan bahwa kualitas institusi legal dari suatu negara memiliki efek positif dalam mencegah perilaku *rent seeking* oleh *corporate insider*, sehingga mendorong terjadinya perkembangan ekonomi. Tanpa adanya kepastian aturan formal, informal, dan penegakan hukum, kondisi sosial politik Indonesia justru akan berdampak regresif terhadap upaya pembangunan ekonomi. Kepastian hukum, dengan penagakannya yang adil, dengan sendirinya dapat menjamin berlangsungnya stabilitas sosial dan politik. Dalam konteks ini, salah satu upaya *critical* yang harus dilakukan adalah meningkatkan sinergitas antarlembaga agar tidak terdapat mekanisme atau aturan yang sifatnya tumpang tindih. Sinergitas dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur dalam pembangunan yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Untuk Indonesia, dari berbagai hasil laporan menunjukkan bahwa persoalan aturan yang tumpang tindih, hingga menyebabkan birokrasi perizinan menjadi panjang dan berbelit, masih menjadi hambatan besar yang harus diselesaikan. Seringkali, faktor institusi yang kacau-balau semacam ini mendorong maraknya perilaku koruptif oleh pengambil kebijakan, baik di pusat maupun daerah. Kondisi ini menciptakan *high cost economy*. Ujung-ujungnya biaya tambahan yang tak terduga ini akan dibebankan ke konsumen melalui harga jual produk yang tinggi. *The Political and Economic Risk Consultancy* pada tahun 2005, misalnya, menunjukkan bahwa untuk dapat berinvestasi di Indonesia, seorang investor harus melalui proses perizinan yang panjang sehingga membutuhkan biaya yang besar (*high cost economy*). Laporan ini didukung oleh hasil kajian *Doing Business 2007* yang menunjukkan kalau posisi Indonesia berada di peringkat 135 dari 175 negara dalam hal kemudahan memulai usaha baru.

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peringkat daya saing ekonomi Indonesia bahkan melorot 4 peringkat (sebelumnya peringkat 131 pada tahun 2006). Bahkan dalam *survey Global Competitive Index* tahun 2013-2014, faktor institusi dan birokrasi masih menjadi persoalan yang problematis. Dari berbagai laporan tersebut dapat diidentifikasi bahwa salah satu faktor penggerus utama daya saing ekonomi nasional adalah hambatan aturan dan birokrasi (Basri, 2007). Bergerak dari kondisi ini, upaya memudahkan izin pendirian perusahaan dan investasi agar lebih menggeliatkan kegiatan industri, perlu dilakukan. Untuk mencapai hal ini, kebijakan PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu yang telah dicanangkan harus dengan serius diwujudkan. Paling tidak, dengan menawarkan berbagai kemudahan dari sisi administratif, Indonesia relatif sudah menghilangkan satu hambatan besar yang selama ini mengganggu kelancaran pembangunan ekonominya. Faktor-faktor pendukung lain seperti stabilitas makroekonomi, ketersediaan infrastruktur yang memadai di seluruh wilayah Indonesia, penguatan struktur perdagangan internasional melalui upaya pendalaman pasar (diversifikatif), juga perlu untuk dijaga dalam besaran yang kondusif untuk mendorong pembangunan ekonomi. Kombinasi yang solid atas seluruh determinan di atas pada akhirnya akan dapat mendorong dan mengakselerasi proses transisi Indonesia dari negara berpendapatan menengah-bawah, menuju negara berpendapatan menengah-atas, bahkan tinggi.

D. RANGKUMAN MATERI

Pembangunan ekonomi yang dimaknai sebagai upaya suatu negara untuk mengembangkan aktivitas ekonomi adalah fokus utama dari setiap pengambil kebijakan di semua negara. Pembangunan ekonomi yang oleh Meier (2001) didefinisikan sebagai proses mendorong peningkatan pendapatan per kapita suatu negara dalam jangka panjang menjadi penting karena sedikitnya memiliki tiga tujuan pokok yang harus dicapai.

Pada prakteknya, pembangunan ekonomi selalu dicirikan dengan adanya proses transformasi struktural dimana pada periode ini beberapa sektor tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang lain (Mecik, 2014). Pada pelaksanaannya, proses transformasi struktural dicirikan dari tiga hal, yakni pertama, transformasi struktural menciptakan adanya

perubahan pada struktur ketenagakerjaan. Dalam hal ini, berlangsungnya proses transformasi struktural akan menyebabkan terjadinya migrasi tenaga kerja dari sektor primer sektor pertanian ke sektor manufaktur dan jasa. Kedua, adanya perubahan dalam struktur permintaan, dari yang sebelumnya lebih dominan pada komoditas pertanian, perlahan mengarah ke hasil produksi manufaktur dan jasa. Hal ini menyebabkan proporsi anggaran untuk belanja komoditas pertanian rumah tangga relatif menurun sepanjang waktu. Ketiga, adanya perubahan dalam struktur produksi. Perubahan dalam struktur produksi, sebagai akibat dari proses transformasi struktural, sebenarnya merupakan konsekuensi dari adanya perpindahan atau realokasi sumber daya, dan perubahan dalam struktur permintaan masyarakat. Perubahan struktur produksi ditandai dengan lebih dominannya barang-barang yang bersifat industrial dalam suatu perekonomian.

Dalam empirisnya, langkah transformasi struktural yang mengarah pada penumbuhkembangan sektor modern telah terbukti berhasil meningkatkan standar hidup di negara-negara dunia pertama berdasarkan fakta historis, negara maju lebih dulu melakukan realokasi sumber daya ke sektor modern, dan ini menjadi salah satu faktor yang mendorong kemajuan mereka. Pengaruh keberhasilan penerapan kebijakan transformasi struktural di negara-negara maju inilah yang kemudian membuat pengambil kebijakan di negara-negara dunia ketiga yakni, kelompok negara-negara berkembang pada akhirnya memilih jalur kebijakan yang sama dalam rangka membangun perekonomiannya.

Akan tetapi, proses transformasi struktural juga bukannya tanpa persoalan, seperti yang terjadi di Meksiko dan Indonesia. Salah satu isu yang paling menantang dari transformasi struktural ini adalah tren meningkatnya ketimpangan ekonomi di antara kelompok masyarakat. Tantangan lainnya adalah mengantisipasi gagal berkembangnya suatu negara akibat terjebak pada perangkap pendapatan menengah (*middle income trap*). Dengan situasi saat ini, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara yang memasuki perangkap pendapatan menengah ini. Untuk dapat terus menaikkan pendapatan per kapitanya, Indonesia perlu meningkatkan pertumbuhannya dengan cara mendorong *productivity*, inovasi dan perubahan struktur. Pada dasarnya, *productivity*,

inovasi dan transformasi struktural dapat ditingkatkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia secara khusus, kualitas tenaga kerjanya. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, dalam jangka menengah dan panjang, akan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan.

TUGAS DAN EVALUASI

Setelah membaca dan memahami materi tentang perubahan struktur ekonomi dalam proses pembangunan, berikutnya anda diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Jelaskan apa yang menjadi tujuan pokok dalam pembangunan ekonomi?
2. Apa saja ciri-ciri proses perubahan struktur dalam perekonomian?
3. Jelaskan dampak yang ditimbulkan dari proses transformasi struktural terhadap perekonomian Meksiko dan persamaannya dengan kondisi di Indonesia?
4. Apa yang dimaksud dengan *middle income trap*?
5. Apa yang dapat dilakukan oleh suatu negara agar terhindar dari kondisi *middle income trap*?

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M.A., dkk. 2015. Laporan Riset Kebijakan Transformasi Struktural dan Perangkat Pendapatan Menengah: Menelaah Proses Pembangunan di Indonesia Menuju 2030. Bappenas.
- Budiharsono S. 1996. Transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia, 1969-1987. Disertasi. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Clark C. 1951. The Condition of Economic Progress. Macmillan & Co Ltd, London
- Felipe, J., Abdon, A., & Kumar, U. (2012). Tracking the middle-income trap: What is it, who is in it, and why?. *Levy Economics Institute, Working Paper*, (715).

- Felipe, J., Bayudan-Dacuycuy, C., & Lanzafame, M. (2016). The declining share of agricultural employment in China: How fast?. *Structural Change and Economic Dynamics*, 37, 127-137.
- Mecik, Oytun. 2014. The Effects of Structural Transformations in Economy on Labor Markets: the Case of OECD Countries. *International Journal of Business and Social Science*.
- Meier, G. M. (2001). The old generation of development economists and the new. *Frontiers of development economics: The future in perspective*, 13-50.
- Saedy Romli, M., dkk. 2016. Transformasi Struktural: Faktor-Faktor dan Pengaruhnya Terhadap Disparitas Pendapatan Di Madura. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol 5 No 1, hlm. 25-44.
- Sastrosoenarto H. 2006. Industrialisasi serta pembangunan sektor pertanian dan Jasa. Jakarta: Gramedia
- Szirmai A, Wim N , Nobuya H 2012. Structural Change, Poverty Reduction And Industrial policy In The Brics. Viena. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
- Todaro MP, Smith SC. 2006. Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan. Erlangga, Jakarta
- Tran, V. T. (2013). The middle-income trap: Issues for members of the Association of Southeast Asian Nations.
- World Bank. 2015. Indonesia's rising divide. World Bank, Jakarta.

EKONOMI PEMBANGUNAN

BAB 8: TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Robert Tua Siregar, Ph.D

STIE Sultan Agung

BAB 8

TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI

A. PENDAHULUAN

Pada saat ini sudah mulai banyak negara di belahan dunia berkembang, dan salah satunya ialah negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi dan merosotnya perekonomian pada orde lama. Mulainya era reformasi di negara Indonesia membuat negara Indonesia mulai mengalami perubahan baik dalam hal perekonomian. Pada era sekarang Indonesia mulai mengalami perubahan baik dalam hal infrastruktur maupun perekonomian. Pemerintah lebih memusatkan terhadap sektor pariwisata sehingga banyak warga luar ingin berlibur ke negara Indonesia, hal tersebut dapat disimpulkan perekonomian Indonesia mengalami kenaikan dari faktor pariwisata lokal. Ada juga hal lain yang membuat perekonomian Indonesia mengalami kenaikan yaitu faktor *eksport* dan *import*. Faktor tersebut telah menjadi bagian atau salah satu faktor penting yang membuat berbagai negara berkembang. Pembangunan ekonomi tidak hanya memandang dari sisi kuantitasnya saja, tetapi turut memperhatikan pemerataan pembangunan.

Pembangunan ini secara menyeluruh mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi anggota masyarakat. Seperti yang kita ketahui, adanya pembangunan ekonomi, tingkat pendapatan perkapita secara terus-menerus dikatakan meningkat dari tahun ke tahun. Pembangunan ekonomi tersebut diartikan untuk selalu memperbaiki serta meningkatkan

kehidupan masyarakat dengan berbagai perubahan yang lebih baik (Suryono, 2010).

Teori pembangunan ekonomi ini diawali dari kondisi perekonomian suatu negara yang dapat disebut masih baru-baru ini terlepas dari sejarah yang rumit. Adapun keadaan negara yang dimaksud dapat dilihat dari kondisi perekonomiannya rumit dan rendah, prasarananya lemah, adanya tingkat pengangguran yang sangat tinggi, kegiatan produksi yang mengakibatkan investasi rendah, kehidupan yang belum aman dan makmur, serta meningkatnya angka kemiskinan. Hal itu menyebabkan perlunya melakukan suatu penyesuaian dalam memperbaiki dinamika perekonomian dalam melakukan pembangunan yang lebih baik lagi. Teori pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh suasana lingkungan.

Jika situasi dan kondisi dalam keadaan normal atau stabil, damai dan tenteram, maka dalam hal ini teori pembangunan memiliki intensitas rendah akan tetapi aplikasinya sangat tinggi. Sedangkan dalam situasi dan kondisi tidak normal atau labil teori pembangunan memiliki intensitas tinggi tetapi aplikasinya sangat rendah atau bahkan bertolak (Suryono, 2010). Pertumbuhan ekonomi sering disamakan dengan pembangunan ekonomi (Wibowo *and* Prodi, 2016). Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka akan ada pembangunan ekonomi dimana dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri akan memunculkan pembangunan ekonomi. Teori Pembangunan, terbagi atas 3 teori, antara lain teori modernisasi, dependensi dan teori dunia, yang semua teori ini berpangkal pada sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi.

Perdagangan industri, dan alat-alat produksi di kendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (Robert Tua Siregar *Et All*, 2021). Dalam sistem ini pemerintah tidak dapat campur tangan langsung dalam kegiatan ekonomi hanya sebatas pelindung dan pengawas dalam hal ekonomi.

Bukan hanya meneliti pergantian peranan beragam sektor dalam proses pembangunan negara-negara maju, namun mereka pula pergantian hal-hal yang lain yang berarti dalam analisa menimpa persoalan-persoalan pembangunan ekonomi negara-negara itu. Teori

perubahan ekonomi struktural mementingkan pada mekanisme transisi dialami oleh negara berkembang yang awalnya bertahan serta fokus dengan transformasi sektor pertanian ke struktur ekonomi baru dipimpin oleh sektor *non-primer* (Tambunan, 2001).

Didalam Bab ini akan membahas beberapa tahapan pembangunan ekonomi, diantaranya tahap pembangunan menurut Rostow, Tahap perkembangan usaha kecil, surplus pertumbuhan ekonomi, dan konteks pertumbuhan perekonomian.

B. PENGERTIAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ini tentu mengarah dalam proses perubahan mendatangkan perbaikan yang diusahakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik lagi. Pembangunan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan nasional yang diakibatkan adanya pertumbuhan penduduk yang selalu bertambah dan disertai dengan adanya perubahan dalam struktur perekonomian suatu negara (Rustan, 2019). Pembangunan ini termasuk dalam kegiatan yang rumit dilakukan karena memiliki sifat multifaset dan multidimensional. Dalam hal ini, bagaimana ekonomi yang primitif dan miskin dapat tumbuh menjadi relatif lebih makmur dari sebelumnya. Ada beberapa hal penting yang bersangkutan terhadap pembangunan tersebut yakni: pembangunan dianggap sebagai proses, dimana kegiatan yang dimaksud tersebut yaitu suatu proses yang seharusnya dilalui oleh suatu negara.

Selanjutnya pembangunan merupakan suatu usaha kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan total, peran masyarakat serta pemerintah sangatlah diperlukan. Perubahan untuk menaikkan tingkat pendapatan haruslah dengan waktu yang cukup panjang, yang nantinya akan menyebabkan kegiatan ekonomi secara rata-rata akan meningkat. pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Robert Tua Siregar, 2021). Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan produk nasional bruto (PNB, GNP) riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi ini menyebabkan pendapatan antar masyarakat mengalami kenaikan dalam jangka panjang dengan istilah lain kegiatan ekonominya meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan zaman saat ini perlu adanya usaha yang tinggi dalam mempertahankan pendapatan perkapita tanpa harus mengabaikan pertumbuhan penduduk tersebut (Rustan, 2019). Oleh karena itu, dalam hal ini peran masyarakat serta elemen-elemen yang ada pada suatu negara diharapkan ikut serta membantu dalam melakukan pembangunan ekonomi tersebut demi perbaikan kesejahteraan masyarakat.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi tentu tidak terlepas dari tujuan ataupun manfaatnya. Melakukan suatu pembangunan, pasti dikarenakan ingin menempuh tujuan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dimana pembangunan ekonomi memiliki beberapa tujuan, yakni: memperbaiki kehidupan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, memperhatikan perkembangan sektor pendidikan, memperluas distribusi terhadap kebutuhan pokok, perlunya pengetahuan dan pemahaman, serta memperluas pilihan ekonomi seluruh masyarakat. Perkembangan ekonomi juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menjunjung nilai-nilai luhur serta adanya penambahan pilihan-pilihan ekonomi untuk masing-masing individu dan seluruh masyarakat dalam suatu negara.

Pembangunan ekonomi memiliki 2 tujuan yakni:

1. Tujuan pembangunan dalam jangka panjang, adanya keinginan yang besar untuk menjadikan masyarakat yang makmur sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila.
2. Tujuan pembangunan dalam jangka pendek, perlunya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta pengetahuan yang optimal guna memperbaiki taraf hidup lebih baik salah satunya mengurangi tingkat pengangguran guna menurunkan angka kemiskinan.

Pembangunan ini mempresentasikan kegiatan yang dilakukan pada beberapa bidang ekonomi. Dalam hal ini ukuran kesejahteraan hidup dapat kita ketahui dari besarnya nilai PDB yang diperoleh dari perekonomian suatu negara (Frisdiantara *and* Mukhklis, 2016). Adanya teknologi sangat berdampak untuk perkembangan yang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Manfaat pembangunan ekonomi mempunyai hal positif bagi seluruh masyarakat dan mampu memberikan suatu pengetahuan yang cukup tinggi kepada masyarakat dalam menaklukkan alam serta meningkatkan keleluasaan anggota masyarakat agar tetap dapat melakukan kegiatan yang mereka inginkan, serta mampu menurunkan kesenjangan sosial. Ada beberapa manfaat pembangunan ekonomi yakni:

1. Meningkatkan lapangan pekerjaan yang nantinya tentu akan mengurangi tingkat pengangguran
2. Meningkatkan pendapatan nasional suatu negara
3. Mempermudah berbagai hal dalam sistem ekonomi
4. Mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam suatu negara
5. Memperbaiki serta meningkatkan pendidikan
6. Meningkatnya SDM dan SDA
7. Adanya peningkatan investor asing ataupun lokal yang dapat menumbuhkan modal di negara Indonesia
8. Mempunyai penghasilan yang memadai serta negara menjadi jauh lebih tertata
9. Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk
10. Memudahkan masyarakat dalam pembangunan semua sektor
11. Menegapkan kekayaan negara dengan lebih baik lagi serta lebih optimal dari sebelumnya
12. Menumbuhnya tingkat kepercayaan masyarakat untuk tetap bisa berkembang

Dengan adanya pembangunan ekonomi juga dapat menyebabkan terciptanya kesenjangan pembangunan yaitu timbulnya suatu perbedaan laju pertumbuhan antara kawasan yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan serta kemakmuran dan kemajuan antar negara khususnya yang sedang berkembang.

D. PENDEKATAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi dilakukan dengan berbagai kebijakan yang digunakan dengan beberapa elemen-elemen misalnya tentang budaya dan juga politik. Dalam melakukan pembangunan ekonomi, perlu dilakukan suatu perencanaan yang strategis serta terarah dalam mewujudkan visi pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur serta keseimbangan dalam kesempatan, namun untuk mewujudkan beberapa hal tersebut bukan suatu hal yang mudah dilakukan, tetapi penting adanya pendekatan-pendekatan dan strategi yang tepat supaya pembangunan ekonomi tepat sasaran yang mampu meningkatkan sektor-sektor yang berhubungan langsung bagi pendapatan seluruh masyarakat suatu negara. Mengenai pendekatan tersebut (Warjio, 2016), menyebut ada beberapa pendekatan dalam pembangunan ekonomi yakni:

1. Pembangunan menjadi kemajuan historis
2. Pembangunan menjadi eksploitasi sumber daya alam
3. Pembangunan menjadi suatu suasana
4. Pembangunan menjadi modernisasi
5. Pembangunan menjadi pertumbuhan bidang ekonomi
6. Pembangunan menjadi perubahan yang struktural
7. Pembangunan menjadi sebuah proses
8. Pembangunan menjadi kekuatan dalam hal produksi

Gagasan-gagasan pembangunan menjadi pemikiran yang eksplisit tentang masa depan global. Banyak yang mengatakan bahwa pembangunan tidak memiliki sejarah. Kekosongan historis yang cukup menarik perhatian dan besarnya kefokusannya terhadap masa depan memang dianggap sebagai dimensi mendasar yang sangat penting dari konsep tersebut. Dalam pembangunan ekonomi, masa depan dinyatakan dimulai dari sekarang yang harus diselamatkan dari masa lalu yang kurang tertata. Pendekatan ekonomi pembangunan juga memperlihatkan beberapa faktor-faktor sosial dan politik dalam pembuatan yang direncanakan. Dalam pendekatan ini, modernisasi juga sangatlah berperan penting. Dimana harus berorientasi pertumbuhan yang dikaitkan menjadi sebuah ideologi dalam meningkatkan pembangunan. Pembangunan tanpa

mengkaitkan pertumbuhan di dalamnya akan menjadi kurang ilmiah, salah arah, dan menyebabkan sebuah pembangunan yang tentunya kurang maksimal.

Pendekatan dalam pembangunan ekonomi juga bisa ditingkatkan dengan berbagai kebijakan yang dilakukan dengan kajian yang menyeluruh. Pendekatan konstruktif dalam pembangunan ini juga sangat diperlukan dimana berperan penting serta membutuhkan sinergi strategi yang tinggi dalam pembangunan ekonomi. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menumbuhkan sikap bermoral di semua elemen baik bidang ekonomi ataupun *non* ekonomi.

E. PENGERTIAN UNSUR DAN FUNGSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Perencanaan ekonomi merupakan bersifat komprehensif adapun bersifat (*comprehensive plan*) menyesuaikan sasaran ataupun aspek ataupun bidang ekonomi meskipun terpisah sektor publik Unsur-unsur perencanaan pembangunan ekonomi merupakan sesuatu proses permodalan akan melaksanakan secara efisien penataan permodalan secara efisien akan melaksanakan bersaing beserta penataan program tujuan investasi.

Investasi merupakan penjelasan dalam zona pembangunan ekonomi yang secara individu ataupun internal dalam penyerapan tenaga kerja dan *output* yang dihasilkan penghematan devisa atau penambahan devisa (Lincoln, 2015). Fungsi perencanaan ekonomi merupakan mengadakan sesuatu ekonomian Indonesia yang direncanakan baik membuat penetapan sasaran atau merangkum tujuan peluang tersendiri ataupun akan penetapan sarana termasuk dibutuhkan dimensi ataupun standar sehingga ini bahkan dulu wajib diseleksi pula.

F. TAHAP-TAHAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Tahap perencanaan ekonomi merupakan menilai kesiapan pangkal potensi manusia ekonomi atau sedikit dalam zaman perancangan ekonomi terkandung deposito, dorongan dari negara, pencapaian pengelola, pencapaian kegiatan, kemampuan kegiatan, ataupun sebagainya. Perencanaan ekonomi tersebut untuk pertumbuhan, penciptaan

kesempatan kerja, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan dan sebagainya (Frisdiantara *and* Mukhklis, 2016).

Tahap pembangunan ekonomi merupakan tahap penyusunan atau berupaya membongkar permasalahan atau dialami sebab negeri atau lagi tumbuhan tentukan berbeda pada tahap penyusunan ekonomi ini negeri maju, sebab bermacam berbagai ataupun pengaruhi tetapkan seadanya negara miskin (lagi tumbuh) mengalami perkara gimana mempertahankan keramaian, sebaliknya di negeri atau telah maju ataupun sudah menggapai stabilitas *social* perdagangan (Rustan, 2019).

G. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Sistem perancangan penyusunan sosial ialah sesuatu proses susunan fungsi perencanaan ataupun mengawalkan menggunakan keputusan masalah ekonomi ataupun sasaran sosial kepada negara, ataupun mengusulkan menggunakan perumusan ataupun kerangka kegiatan bagi kerja implementasi, sistem atau pengamatan dampak. Sedangkan proses perencanaan penyusunan ekonomi merupakan bahwa perekonomian Indonesia yang sudah berkembang dan menyebabkan daerah maju menemui kebutuhan perdagangan penurunan inflasi ataupun rendah kebutuhan ekonomi daerah maju. Perkembangan perekonomian Indonesia menuntut semakin ikut dalam proses globalisasi pada dunia luar.



Sumber: (Lincoln, 2015)

Gambar 8.1 Perkembangan Teori Pembangunan Ekonomi

1. Perencanaan Dalam Perekonomian Kapitalis

Perancangan pada umumnya merupakan usaha dengan tingkatan kerja tinggi dan harga inginkan yang stabil melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan fisik dan moneter. Alat kebijaksanaan kapitalis yang bersifat gejala neraca, perpajakan dan hubungan perdagangan luar negeri. Sedangkan bersifat langsung rencana ekonomi yang terisi dikebanyakan perekonomian kapitalis dapat artikan sebagai institusi tujuan atau perancangan ekonomi menetapkan pada bawah studi kasus pada masa lampau atau estimasi keadaan dimasa kapitalis hal-hal ini mempengaruhi keberlangsungan sistem ini untuk dapat terus berkembang (Sari *et al.*, 2020).

2. Perencanaan Dalam Perekonomian Sosialis

Perencanaan dalam perekonomian sosialis merupakan sumber daya sosial persediaan ataupun *financial*, mendapatkan suatu rangkaian kemajuan ekonomi yang diinginkan akan tetapi juga berupaya mengimplementasikan sebagai kerangka sosialis, membedakan peranan perencanaan dalam perekonomian sosialis suatu rangkaian yang menetapkan berupayakan mengimplementasikan pada strategi perekonomian sosialis sebagai proses perekonomian secara keseluruhan melakukan pembangunan ekonomi. Seperangkat sasaran yang tertentu menetapkan kemajuan sosialis yang diinginkan akan tetapi berupaya mengimplementasikan ekonomi semakin meningkatkan dalam produksi distribusi dan penetapan harga sejumlah besar barang-barang konsumsi.

3. Perencanaan Dalam Perekonomian Campuran

Peranan campuran atau perencanaan campuran sebagai proses keberadaan sistem perdagangan institusional ataupun hukum nonpasar maupun bekerja mengendalikan (hukum-hukum Indonesia). Sebagian pangkal cara memiliki atau mengelola pada daerah otonomi, ataupun sebagian pula pada daerah ekonomi atau Negara (Siregar *et al.*, 2020). Proposi kebutuhan pangkal campuran pada kedudukan daerah yang membedakan dari suatu daerah ke pemerintah negara. Adapun perekonomian campuran mengendalikan kebijakan pemerintah untuk mempermudah ataupun bahkan mengendalikan keadaan ekonomi

campuran untuk menjamin sesuatu hubungan yang serasi antara pengusaha swasta dengan pemerintah pusat.

Dimana hanya sebagian kecil saja sumber daya atau alat produksi yang langsung dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah pertumbuhan campuran atau proses peranan ekonomi selalu ditandai oleh adanya pemilikan serta pengawasan sumber daya oleh pemerintah dalam jumlah atau nilai yang *relative* besar. Dapat disimpulkan bahwa sistem perekonomian campuran memiliki tujuan maka pemerintah termasuk mengutamakan sesuatu perancangan kualitas menentukan kepada menguasai kejadian negara-negara berkembang masalah perekonomian Indonesia ataupun masalah kebutuhan ekonomi yang ada sistem perekonomian campuran.

H. MASALAH-MASALAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Masalah pembangunan ekonomi merupakan salah satu struktur umur penduduk dan masalah pengangguran ketersediaan lapangan kerja bagi penduduk dari kota ke desa kecil sangat berlebihan pemukiman desa meningkat pada lambat serta menghasilkan kejadian populasi desa tumbuh dengan cepat serta menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk dikota-kota besar (Sukirno, 2006).

Pembangunan masyarakat kota merupakan sebagai sesuatu sistem penduduk sekitar menggunakan pelaksana negara pengelola berupaya mendapatkan merenovasikan situasi ekonomi sosial serta kultur internal penduduk atau berkaitan mengintegrasikan penduduk ini hayat internal negara atau masyarakat. Sedangkan masalah perencanaan ekonomi adalah sesuatu proporsi internal perencanaan akan menghindarkan kesulitan atau keuntungan dengan tahap perencanaan (Lincolin, 2015).

I. STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN REGIONAL DALAM KAJIAN VARIASI KERUANGAN

Perancangan pengembangan merupakan sebagian tahapan yaitu rangka ini terdapat sesuatu menggunakan perdagangan menjadi ataupun kelengkapan membagikan berkualitas daerah penunjang atau perencana daerah serta memperoleh terbentuk daerah-daerah internal sektor

negara-negara yang berkembang pada ekonomi sedang bertumbuhan maupun sosial, perumahan serta perikanan potensial ataupun mengharapkan akan mengawali langkah perubahan industri serta kemampuan maupun mempangkal menetapkan realisasikan (Sukirno, 2006). Sedangkan variasi keruangan dibagi menjadi dua yaitu konsep pusat pinggiran atau *Coreperiphery* merupakan selaku mengutamakan perekonomian daerah serta mengantungkan konsep-konsep regional sebabkan menumpuk diatas pertumbuhan ekonomi tentang keterampilan, pokok serta peralatan-peralatan ekonomi ataupun rasional pertumbuhan serta daerah bursa terbuka menghendaki membantu perkembangan sesuatu kedudukan negara ini.

Sketsa sumbu-sumbu perkembangan merupakan daerah-daerah serta kegunaan ragam serta abstrak atau letak wewenang-wewenang menyebarkan serta kelemahan sumbu terseret mengarahkan atau kutub pertumbuhan lain desa maupun negara membedakan suatu fungsi daerah serta kedinamisan 5 perusahaan serta interaksi fungsi daerah serta dinamiskan sekian menciptakan dengan bidang perdagangan (Perroux 2007). Sebaliknya kutub perkembangan merupakan teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan terjadi pada pusat tertentu serta menimbulkan adanya perkotaan. Sesuatu Industri "*propulvise sektor*". *Propulvise* industri merupakan industri dampak berkembang kutub pertumbuhan terdapat perusahaan-perusahaan industri bersifat *propulvise* ialah perusahaan relatif besar ataupun menimbulkan dorongan-dorongan pertumbuhan terhadap lingkungan (Frisdiantara and Mukhklis, 2016).

Sedangkan Pembangunan daerah adalah memfokuskan pemerintah daerah serta rakyat pengelola sumber-sumber daya ataupun membentuk sesuatu pekerjaan baru perkembangan kegiatan ekonomi dan wilayah atau Pemikiran difusionis yang ditempuh oleh pembangunan ekonomi (Hirshman 2003). Sehubungan perencanaan pembangunan regional ialah suatu 2 secara yaitu pembangunan daerah membagikan sesuatu proses signifikan serta menyediakan membuat wilayah ekonomi setelah itu melakukan dasar ekonomi diawali dari pembangunan daerah tingkatan tertinggi sertan (Robert Tua Siregar, 2021). Sebaliknya perencanaan daerah pola-pola dengan pertumbuhan yang ketimpangan nasional secara melaporkan kalau pembagian kerja internasional yang lama lewat

perusahaan-perusahaan nasional, menghasilkan ikatan atasan/bawahan maupun pusat pinggiran bisa menghasilkan ekonomi serta berorientasikan oleh ekonomi namun lain kepada wujud pertumbuhan serta ruang lingkup rancangan (Warjio, 2016).

J. CARA MENCAPAI TUJUAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Pencapaian dalam kemakmuran rakyat secara kuantitatif dapat diukur dari ketercapaian dalam pendapatan nasional dan secara ekonomi makro dapat diukur dari besarnya Produk Domestik Bruto suatu negara. Adanya sarana dan prasara termasuk hal yang sangat diperlukan sebab hal tersebut dapat menjadikan banyak pihak yang terlibat di dalamnya merasa mudah untuk melakukan aktivitas ekonomi mencapai perubahan. Oleh karena itu, layaknya kita sebagai generasi muda suatu negara yang menjadi dasar penggerak dalam pembangunan serta pertumbuhan pada ekonomi, tetaplah melindungi, menjaga serta meningkatkan sarana juga prasarana yang ada secara utuh. Ketika beberapa hal tersebut tidak terdukung dengan baik, usaha yang dilakukan dalam mencapai pembangunan ekonomi dapat terhalang dan tentu hasilnya menjadi kurang maksimum.

Dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara kuantitatif dapat dilihat dari ketercapaian pendapatan nasional bahkan secara ekonomi makro dapat diukur dari besarnya PDB suatu negara (Frisdiantara *and* Mukhkliis, 2016). Dalam hal ini PDB mencerminkan sejumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan dalam proses pembangunan ekonomi. Adapun indikatornya disini merupakan sebuah ukuran ekonomi yang sifatnya agregat, sehingga dapat mempermudah untuk melakukan suatu analisis terhadap kinerja perekonomian antar suatu negara. Supaya dapat mencapai perolehan PDB yang semakin meningkat diperlukan beberapa hal yaitu:

1. Penguasaan teknologi dengan baik
2. Pengelolaan sumber daya yang efisien
3. Faktor produk yang berkualitas
4. Penguatan peran modal sosial
5. Adanya partisipasi terhadap masyarakat

6. Adanya kebijakan masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang konstruktif
7. Pengumpulan modal
8. Penyebaran pelaku ekonomi
9. Daya saing yang tinggi

Dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi dengan baik dapat melibatkan banyak pihak yang terkait di dalamnya. Pihak yang dimaksud tersebut memiliki kewajiban masing-masing yang dilakukan berdasarkan pengetahuan yang tersedia terhadap sumber daya ekonomi yang ada. Tujuan dalam pembangunan ekonomi dapat dicapai dengan cara melakukan pengelolaan dari berbagai sumber daya yang masih tersedia. Pengelolaan yang dimaksud akan semakin efisien jikalau dibantu dengan pemberdayaan serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembangunan tersebut dan menyebabkan penciptaan nilai akan bertambah dalam melakukan pembangunan (Frisdiantara *and* Mukhklis, 2016).

Dalam pencapaian tujuan pembangunan (Rustan, 2019), juga mengemukakan beberapa faktor yang mampu mendorong pembangunan ekonomi disuatu negara mendapati peningkatan yaitu:

1. Masyarakat harus bisa menerima bahwa dalam melakukan pembangunan pasti ada risiko di dalamnya.
2. Masyarakat diharapkan untuk menyadari alterasi itu sebenarnya dibuat sendiri akibat masyarakat tersebut.

Disebabkan negara berkembang merupakan negara yang lagi membentuk menuju negara kontemporer, didalamnya ditemukan teknik perubahan di semua bidang duniawi yang dilakukan dengan niat berdasarkan rancangan tertentu dalam mengembangkan kedamaian masyarakat dengan adanya perubahan sosial dan budaya sebagai pendorong keberhasilannya tersebut.

K. RANGKUMAN MATERI

Tahapan pembangunan ekonomi Pembangunan ekonomi tidak hanya memandang dari sisi kuantitasnya saja, tetapi turut memperhatikan pemerataan pembangunan. Pembangunan ekonomi tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata. Penekanannya turut diikuti dengan pembangunan bidang lainnya yang memengaruhi perbaikan taraf hidup masyarakat. Sehingga pembangunan ekonomi tak melahirkan berbagai masalah sosial. Karena Tahapan pembangunan yang meliputi beberapa *sector* memerlukan tahapan perencanaan sampai pada implementasinya. Sehingga saat semua tahapan tersebut dilalui, ada indikator yang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi suatu negara sedang berjalan. Untuk itu dalam tahapan pembangunan harus memperhatikan sektor-sektor yang terkait, sehingga tahapan yang diharapkan dapat lebih optimal berjalan.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Bagaimana pemahaman tahapan pembangunan ekonomi Pembangunan ekonomi tidak hanya memandang dari sisi kuantitasnya saja?, jelaskan.
2. Apakah Pembangunan ekonomi hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata?, jelaskan.
3. Bagaimana tahapan pembangunan yang meliputi beberapa *sector* memerlukan tahapan perencanaan, jelaskan.
4. Bagaimana Pencapaian dalam kemakmuran rakyat secara kuantitatif dapat di ukur dari ketercapaian dalam pendapatan nasional dan secara ekonomi makro dapat diukur?
5. Jelaskan implementasi tahapan pembangunan yang saudara ketahui?

DAFTAR PUSTAKA

- Frisdiantara, C. and Mukhklis, I. (2016) *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoretis Dan Empiris*. Cetakan 1. Malang: Universitas Kanjuruhan Malang.
- Lincoln, A. (2015) *Ekonomi Pembangunan*. Kelima. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Robert Tua Siregar, et all (2021) *Ekonomi Pembangunan: Tinjauan Manajemen dan Implementasi Pembangunan Daerah*. Medan: Yayasan Kita Menulis. Available at: <https://kitamenulis.id/2021/09/09/ekonomi-pembangunan-tinjauan-manajemen-dan-implementasi-pembangunan-daerah/>.
- Robert Tua Siregar Et All (2021) *Ekonomi Industri*. Yayasan Kita Menulis. Available at: <https://kitamenulis.id/2021/05/10/ekonomi-industri/>.
- Rustan (2019) *Pusaran Pembangunan Ekonomi*. Cetakan Pe. Makassar: CV SAH MEDIA.
- Sari, D. C. et al. (2020) *Manajemen Pemerintah*. Gorontalo: Ideaspublishing.
- Siregar, R. T. et al. (2020) 'Regional Development Environment : Implementation , Realization & Contribution of Revenue in Pematangsiantar Regional Development Environment : Implementation , Realization & Contribution of Revenue in Pematangsiantar', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 469, pp. 1–7. doi: 10.1088/1755-1315/469/1/012052.
- Sukirno, S. (2006) *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan*. Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suryono, A. (2010) *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Cetakan 1. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Tambunan, T. T. H. (2001) *Perekonomian Indonesia. Teori Dan Temuan Empiris*. Jakarta: Indonesia.
- Warjio (2016) *Politik Pembangunan Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*. Jakarta: KENCANA.
- Wibowo, M. G. and Prodi (2016) 'Kebijakan Pembangunan Nasional: dari Pertumbuhan (Growth) Menuju Kebahagiaan (Happiness)', *Asy-Syir'ah*, 50(1).

EKONOMI PEMBANGUNAN

BAB 9: PROSES PEMBANGUNAN DALAM PEREKONOMIAN

Dessy Maulina, S.E., M.E

Universitas lambung Mangkurat

BAB 9

PROSES PEMBANGUNAN DALAM PEREKONOMIAN

A. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan secara luas tentang pemahaman pengertian dari proses, proses pembangunan secara umum, hubungannya proses pembangunan dengan perekonomian, serta proses pembangunan dalam perekonomian itu sendiri serta teori-teori yang mendukung proses pembangunan dalam perekonomian.

Mengartikan istilah pembangunan yang sering kita maknai bahwa pembangunan suatu usaha untuk membuat kehidupan suatu bangsa dari suatu negara itu menjadi lebih sejahtera. Kesejahteraan sendiri dapat dimaknai bahwa manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya dari sisi ekonomi. Namun ada pemahaman lain tentang pembangunan yang bukan hanya sekedar mencapai kesejahteraan atau kemajuan semata, pembangunan dapat mengandung arti perubahan terhadap fisik seperti apa makna pembangunan lebih kepada fisik, kita dapat melihat suatu wilayah yang memiliki kekayaan alam lalu mampu memperbaiki infrastruktur yang menunjang kegiatan usahanya. Lebih konkrit lagi satu wilayah yang dahulu hanya bersandar pada sektor pasar tradisional namun sudah berdiri banyak pusat-pusat perbelanjaan modern yang kita sering sebut pasar modern atau *mall*. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung merupakan kota-kota yang secara fisik dapat diartikan menjadi kota yang lebih maju. Hal ini bisa kita bandingkan pembangunan gedung-

gedung yang tinggi, infrastruktur yang jauh lebih maju di banding kota-kota lain, dengan kata lain terjadi transformasi ke sektor industri.

B. MEMAHAMI MAKNA PROSES

Dalam memahami makna kata proses kita mengadopsi beberapa ilmu seperti dalam ilmu teknik, proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya.

Pengertian proses merupakan suatu tahapan-tahapan yang diterapkan dari suatu pekerjaan sehingga hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut mampu menggambarkan baiknya prosedur yang digunakan. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan perlu adanya proses yang tepat agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Serangkaian tahap aktivitas manusia mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan atau target yang diinginkan juga dapat menunjukkan pengertian dari proses (Handyaningrat, 1988), sedangkan makna lain dari proses adalah jalannya sebuah keadaan dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan (J.S.Badudu, 1994).

Menyebut kata proses pasti mengandung makna segala peristiwa itu memiliki runtunan yang terus menerus berjalan, sedangkan jika dikaitkan dengan istilah pembangunan memiliki atau mengandung makna yang sama karena di dalam pengertian pembangunan memiliki makna cara atau proses itu sendiri. Dalam konsep pembangunan kita sering memahami bahwa pembangunan dapat dilihat dari suatu perubahan menjadi lebih baik seperti contoh misalnya di suatu wilayah yang awalnya lebih banyak area hijau atau hutan kemudian dibangun jalan, kota yang awalnya hanya terdapat bangunan-bangunan biasa tak terlalu tinggi dan modern lalu mulai didirikannya gedung-gedung pencakar langit dan beberapa sudut pandang tentang pembangunan.

C. PROSES PEMBANGUNAN SECARA UMUM

Kemajuan fisik suatu wilayah atau daerah menjadi ukuran yang dianggap bahwa pembangunan di negara-negara berkembang seperti Indonesia sangat banyak memberikan perubahan. Wilayah pedesaan maupun perkotaan menjadi imbas dari pembangunan. Jalan-jalan yang lebar dan mulus terus dibangun, pembangunan bukan hanya sebatas itu saja bangunan-bangunan publik seperti sekolah dasar sampai sekolah menengah bahkan sekelas perguruan tinggi yang dulu hanya terbatas di di ibukota suatu negara atau provinsi saja, namun sekarang sudah memasuki kota-kota yang bukan ibu kota suatu wilayah. Kita berkaca dari salah satu negara berkembang yaitu Indonesia, pendidikan sudah merambah kedaerah kabupaten bahkan kecamatan. Selain itu pembangunan juga menunjukkan mulai perkembangannya fasilitas kesehatan (seperti tersedianya rumah sakit), perusahaan penyedia listrik dan air bersih serta yang lainnya. Hal ini juga didukung dengan semakin teknologi yang berkembang membuat sebuah wilayah dapat semakin maju.

Proses pembangunan dapat diartikan suatu rangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan dalam konteks sebuah negara untuk membuat kehidupan suatu bangsa dari suatu negara menjadi lebih sejahtera dan maju. Bukan hanya sekedar itu pembangunan dapat dimaknai pada dasarnya tidak hanya persoalan fisik saja kiranya penting bagi kita untuk menyelaraskan makna pembangunan itu pada perspektif pertumbuhan kemajuan negara, meski makna pembangunan yang dipahami secara umum tersebut tidaklah salah. Jadi secara umum makna pembangunan adalah setiap usaha mewujudkan hidup yang lebih baik sebagaimana yang didefinisikan oleh suatu negara "*an increasing attainment of one's own cultural values*" yang dapat diartikan bahwa suatu negara dapat mencapai tujuannya tergantung pada nilai-nilai budaya negara tersebut (Tjokrowinoto, 1996). Negara Indonesia yang pada dasarnya memiliki ideologi Pancasila sudah tergambar bahwa suatu pembangunan harus mengarah kepada keadilan, selain dalam Bab XIV UUD 1945 yang menjelaskan tentang kesejahteraan untuk masyarakat menekankan pada sistem perekonomian yang dianut di Indonesia berdasar atas asas kekeluargaan, dalam hal ini sumber daya alam menjadi dasar utama kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, apabila kemakmuran bagi seluruh rakyat belum tercapai, maka Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dapat dipelihara oleh negara.

Negara-negara di dunia menjalankan pembangunan ekonominya, dalam perjalanannya setiap negara memiliki fase transformasi dari kegiatan-kegiatan yang tradisional ke sektor modern. Namun bagi negara-negara di dunia pembangunan ekonomi semua negara mengalami transformasi ekonomi dari sektor perekonomian yang tradisional menjadi sektor ekonomi modern dengan waktu yang diperlukan berbeda-beda. Sektor tradisional dapat digambarkan dari sektor pertanian (primer), sedangkan untuk sektor modern industri dan jasa (sekunder dan tersier).

Terdapat perbedaan antara negara berkembang dengan negara maju, negara maju proses transformasi pembangunan lebih cepat dibanding negara berkembang, negara berkembang memiliki permasalahan biasanya pada kependudukan, ketenagakerjaan, ketimpangan, belum adanya keadilan antar wilayah bahkan sejarah dari terbentuk negara berkembang tersebut membuat negara tersebut bisa saja tahap perubahan strukturnya lebih lambat.

D. HUBUNGANNYA PROSES PEMBANGUNAN DENGAN PEREKONOMIAN

Perekonomian tidak dapat berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai tanpa melalui sebuah proses, sedangkan pembangunan merupakan sebuah proses. Jadi dapat dimaknai hubungan proses pembangunan dengan perekonomian sangat terkait. Pembangunan sendiri mengandung makna suatu proses perubahan dalam meningkatkan kualitas dari kehidupan suatu masyarakat dari cara yang subsisten menjadi lebih modern sehingga kesejahteraan yang menjadi tujuan dapat tercapai.

Dalam Teori Arthus Lewis menjelaskan tentang proses pembangunan ekonomi yang terjadi wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan. Menurut asumsi Lewis menjelaskan bahwa perekonomian suatu negara terbagi menjadi dua yaitu perekonomian yang lebih subsisten atau mengarah pada sektor tradisional dapat digambarkan dengan sektor pertanian dipedesaan dan sektor modern yang lebih berarah pada kemajuan

teknologi atau sektor industri. Sektor subsisten yang digambarkan pada sektor pertanian yang tenaga kerjanya bergerak disektor pertanian yang sederhana tergambar dari peralatan yang sederhana dengan upah yang diterima di sektor ini lebih rendah artinya surplus tenaga kerja semakin tinggi tidak diimbangi dengan tingkat upahnya, marginal produk nol dan terjadi *law of diminishing return*. Sektor modern yang tergambar pada sektor industri lebih menunjukkan pada produktivitas dari *input* (tenaga kerja), *marginal product positif*, penambahan tenaga kerja pertambahan *output* (Suwarni, 2006). Semua negara dari tahun ke tahun terus mengalami proses transformasi ekonomi, dimana itu merupakan bagian dari proses pembangunan dalam perekonomian. Transformasi yang terus menggeser kegiatan masyarakatnya dari yang subsisten ke modern.

E. PROSES PEMBANGUNAN DALAM PEREKONOMIAN

Proses pembangunan dalam sebuah perekonomian tidak lepas dari perubahan struktur ekonomi yang terus menuju kearah yang lebih modern dengan semakin canggihnya teknologi yang mengiringi kemajuan zaman. Kuznet mengemukakan pandangan atau analisisnya tentang terdapatnya perubahan struktur dalam proses pembangunan. Kuznet mengasumsikan bahwa tidak hanya perubahan terhadap persentasi jumlah penduduk yang bekerja disektor dan sub sektor saja, melainkan menganalisis perubahan sektor dalam menyumbang pendapatan nasional (Kuznets, 1966), sedangkan menurut Chenery menganalisis berfokus pada terdapatnya corak perubahan dari kontribusi sektor-sektor industri dan sub sektor industri pengolahan (Chenery, 1960).

Kita perlu mengetahui adanya perbedaan antara taraf permulaan pembangunan negara berkembang dengan negara-negara maju. Perbedaan antara negara berkembang dengan negara maju pada proses pembangunan dalam perekonomiannya yaitu pada permasalahan kependudukan. Kita ambil satu contoh permasalahan penduduk pada negara berkembang salah satunya masih sangat terbatasnya kepemilikan terhadap lahan yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang mengolah lahan tersebut. Lahan tersebut seperti lahan pertanian di negara berkembang sangat terbatas. Pada kenyataan kasus di beberapa negara berkembang tersebut sehingga memunculkan masalah banyaknya

pengangguran dinegara berkembang. Jenis penganggurannya adalah pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung selain itu disektor pertanian tersebut juga memunculkan jenis pengangguran musiman yang menambah masalah di negara berkembang. Namun disisi lain, dapat pula sebuah proses pembangunan termasuk proses pembangunan dalam perekonomian dapat berkembang karena sejarah mengiringi negara tersebut.

Dalam kasus negara berkembang tidak hanya masalah pengangguran yang tinggi tetapi juga permasalahan peningkatan penduduk negara berkembang jauh lebih tinggi dari negara maju. Peningkatan jumlah penduduk tersebut dikarenakan angka kelahiran juga tinggi di negara berkembang, kemudian proses berpindahnya penduduk dari desa ke kota yang sangat berlebihan. Terlebih pemikiran penduduk di negara berkembang akan kemampuan hidup jika tinggal di kota tidak sebanding dengan kenyataannya bahwa ketersediaan akan pekerjaan di kota sangat tidak seimbang dengan permintaan terhadap pekerjaannya

Terdapat dua tokoh ekonomi yaitu Lewis dan diperkuat Ranis dan Fei yang menghasilkan teori mengenai corak pembangunan dan perubahan struktur ekonomi masyarakat di negara berkembang yaitu : (i) Pada sektor pertanian menjadi sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya terlebih jenis pertanian yang masih tradisional; dan (ii) Masalah kelebihan jumlah tenaga kerja disektor pertanian dari pada ketersediaan lahannya, hal ini menjadi masalah yang serius (Sukirno, 2006).

F. TEORI LEWIS: TENTANG PROSES PEMBANGUNAN DI LIHAT PADA SISI PENAWARAN TENAGA KERJA

Pemahaman tentang kondisi tenaga kerja pada proses pembangunan di dalam perekonomian, memang tidak dapat terbantahkan. Negara berkembang dan negara maju pun dapat di bedakan dari permasalahan pada tenaga kerjanya yang sangat mencolok. Ahli ekonomi yang sangat ternama, Lewis mengemukakan analisisnya yang merupakan kritikan dari asumsi ahli ekonomi sebelumnya. Dimana pandangan dari kaum Neo-Klasik yang mengutarakan dalam penawaran tenaga kerja pada masyarakat tidak berlebihan. Sedangkan pandangan Teori John Maynard Keynes menganalisis bahwa bukan hanya penawaran tenaga kerja berlebih,

tetapi tanah yang tersedia dan kapasitas memproduksi jumlahnya tidak terbatas. Lewis berpandangan bahwa hal tersebut tidak sesuai pada keadaan yang sebenarnya dalam kasus negara-negara berkembang, dikarenakan negara tersebut memiliki permasalahan pada tenaga kerja yang sangat tinggi atau berlebihan dengan tidak diimbangi dengan ketersediaan modal (Sukirno, 2006)

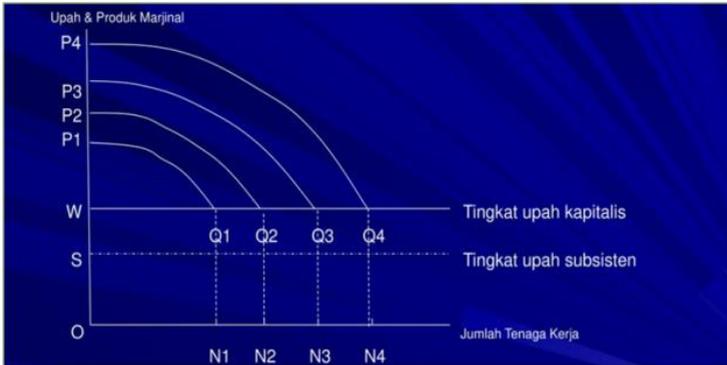
1. Corak Proses Pembangunan Yang berlaku

Lewis dalam memandang proses perekonomian lebih banyak melihat pada sisi permasalahan kelebihan tenaga kerja terdapat tiga aspek yang dianalisis sebagai berikut

- Corak proses pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri,
- Faktor dukungan utama dari permodalan yang semakin tinggi
- Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan proses pembangunan tidak dapat berjalan dengan semestinya dengan kata lain corak atau polanya berubah

Lewis menganalisis bahwa perekonomian di bagi menjadi dua sektor:

- Sektor kapitalis, kapitalis sendiri yang mengandung arti sebuah sistem ekonomi yang lebih kepada pemilik modal memiliki keuntungan. Ketika penanaman modal dilakukan oleh pemilik modal kepada kegiatan usaha-usaha sehingga memunculkan kesempatan kerja yang baru, pendapatan nasional meningkat mengakibatkan pembangunan ekonomi juga semakin meningkat dan terjadi secara terus menerus sehingga kelebihan tenaga kerja yang tidak bekerja dapat diminimalisir
- Sektor subsisten, kebalikan dari sektor kapitalis yang diasumsikan dalam analisis ini akan semakin menambah tenaga kerja atau pengangguran yang semakin meningkat secara terus menerus. Terlebih sektor subsisten hanya lebih pada untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kegiatan perekonomiannya



Gambar 9.1 Gambaran Grafis dari Proses Pembangunan Model Lewis
Sumber: (Sukirno, 2006)

Gambar 9.1 menggambarkan bahwa P_1, P_2, P_3, P_4 menunjukkan tingkat produk marginal dari setiap pekerja yang menjadi tambahan di sektor kapitalis. Selama P_1, P_2, P_3, P_4 lebih besar dari tingkat upah sektor kapitalis maka pengusaha akan meningkatkan Q_1, Q_2, Q_3 dan Q_4 . Hal ini dilakukan dengan tujuan tercapainya keuntungan yang maksimal para pengusaha sehingga peningkatan Q akan dihentikan. Ketika produk marginal sama dengan W , dan ini dicapai pada titik $Q_1 = ON_1 = P_1WQ_1$ (dalam keadaan surplus dalam teori Lewis). P_1WQ_1 merupakan surplus yang akan ditanamkan kembali sehingga terjadi perkembangan ekonomi dan produktivitas. Dari waktu ke waktu secara terus menerus akan semakin berkembang sehingga tidak terjadi kelebihan tenaga kerja dalam perekonomian yang tidak produktif

2. Tingkat tabungan

Aspek kedua dari analisis Lewis adalah mengapa tingkat tabungan bertambah tinggi dalam proses pembangunan? Jawabannya karena surplus (keuntungan) yang diperoleh dalam proses pembangunan terus bertambah sehingga akan semakin banyak tabungan. Dari mana sumber tabungan dan investasi tersebut? Sumber-sumber kenaikan tabungan dan penanaman modal: Keuntungan atau surplus yang bertambah besar. Penanaman keseluruhan keuntungan dalam bentuk modal akan melahirkan keuntungan-keuntungan baru karena sektor kapitalis akan

menciptakan barang-barang dan jasa-jasa yang dikonsumsi masyarakat yang pada akhirnya menaikkan pendapatan. Dengan demikian masyarakat akan lebih cepat mencapai tingkat tabungan yang tinggi. Pinjaman bank dan pembelanjaan defisit dari pemerintah. Tingkat laju inflasi melahirkan pinjaman-pinjaman yang disediakan sistem perbankan. Jika tingkat penanaman modal menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa maka di sisi pemerintah akan menghasilkan pendapatan besar dalam bentuk pajak. Sejalan dengan sektor kapitalis maka pemerintah pun akan menanamkan kembali keseluruhan pendapatan tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan sebagainya.

3. Perubahan Dalam Proses Pembangunan

Analisis terakhir dari pemikiran Lewis tentang proses pembangunan, dimana Lewis menyatakan empat hal yang bisa menyebabkan perubahan dalam proses pembangunan

- Terdapatnya pembentukan modal yang terjadi lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk.
- Bertambah besarnya sektor kapitalis.
- Kemajuan teknologi akan timbul di sektor subsisten dan menyebabkan kenaikan produktivitas yang selanjutnya mendorong kenaikan upah disektor tersebut.
- Tidak terdapat kenaikan produktivitas di sektor kapitalis, akan tetapi para pekerja ingin mengecap kehidupan yang lebih baik sehingga mereka menuntut kenaikan upah. Jika berhasil, kenaikan upah pekerja justru akan menghapus surplus di sektor kapitalis.

G. PERBANDINGAN TEORI LEWIS DAN RANIS-FEI (TENTANG PROSES PEMBANGUNAN DALAM PEREKONOMIAN).

Sebelum melihat perbandingan dari ketiga pandangan tokoh tersebut, kita telah mengetahui bahwa Ranis dan Fei adalah tokoh ekonomi yang terkenal dengan teori mereka *A Theory of Economic Development* dengan telaah yang dimaksudkan bahwa proses peralihan yang akan dicapai akan dilalui suatu negara terbelakang untuk beralih dari keadaan yang stagnan ke arah pertumbuhan yang lebih baik. Teori tersebut merupakan bentuk penyempurnaan dari teori Lewis.

1) **Persamaannya antara teori Lewis dan Ranis-Fei**

- a. Pada teori Ranis-Fei tentang proses pembangunan ekonomi secara garis besar sama dengan teori Lewis yaitu pada masalah kelebihan penduduk yang menyebabkan besarnya angka pengangguran.
- b. Kekayaan alam tersedia sangat terbatas.
Kedua pemikiran dari ketiga tokoh ini juga sama-sama menjelaskan bahwa terdapatnya keterbatasan akan kekayaan alam sehingga hal inilah yang menyebabkan kelebihan tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan

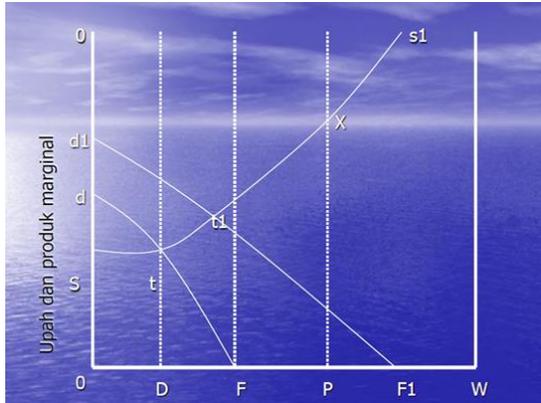
2) **Perbedaannya antara teori Lewis dan Ranis-Fei**

- a. Walaupun terdapat kesan yaitu pada corak dari proses pembangunannya. Namun kedua teori menekankan pada analisis yang berbeda. Teori Lewis lebih menganalisis pada corak pertumbuhan di sektor modern atau sektor kapitalis dengan tidak memperhatikan terjadinya perubahan pada sektor subsisten atau lebih dikenal dengan sektor pertanian. Ranis-Fei dalam teorinya menganalisis kedua sektor tersebut lebih seimbang bahkan sektor pertanian ditekankan lebih mendalam pada analisisnya.
- b. Teori Lewis hanya menguraikan gambaran bahwa peran dari pembentukan modal terhadap perkembangan dari kesempatan kerja kenaikan produktivitas di sektor kapitalis yang berakibat perubahan pada perekonomian. Teori Lewis menyebutkan dengan kenaikan kesempatan kerja maka produktivitas akan meningkat sebatas sektor kapitalis. Teori Ranis-Fei walaupun sedikit lebih berimbang antara sektor kapitalis dan pertanian namun pada dasarnya penekanannya lebih banyak kepada perubahan-perubahan di sektor pertanian. Selain itu terdapat pandangan bahwa pengaruh dari pertumbuhan penduduk dalam sebuah proses pembangunan, pengaruh dari *system* pasar yang mana terjadinya interaksi diantara sektor pertanian dan industri. Terdapatnya jangka masa pada proses pembangunan mencapai tahap negara industri.

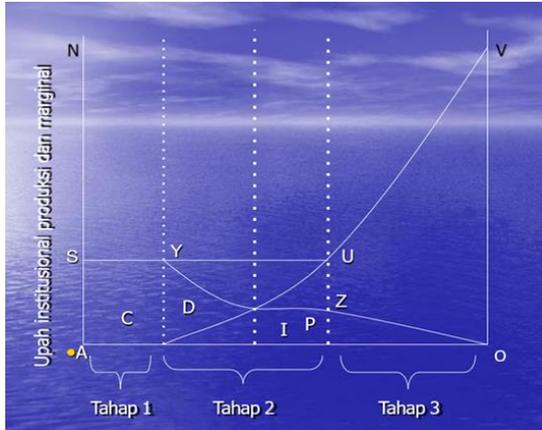
- c. Lewis, Ranis-Fei juga menguraikan analisis tentang keadaan perekonomian terbuka. Yaitu hubungan antar negara yang satu dengan negara lain dari sisi hubungan ekonomi dan perdagangan. Dalam analisis Lewis menitikberatkan terdapatnya pengaruh perpindahan modal dan tenaga kerja terhadap proses pembangunan. Namun lebih kembali menekankan ekonomi tertutup suatu negara, sedangkan Teori Ranis-Fei lebih menitik beratkan bahwa pengaruh dari adanya korelasi ekonomi dan perdagangan dengan dunia luar yang berhubungan dengan alokasi sumber daya, dan juga lebih kepada peranan perdagangan luar negeri dalam pembangunan ekonomi.

3) Proses Pertumbuhan yang berlaku (Proses Pembangunan menurut Ranis-Fei)

Ranis-Fei dalam menganalisis proses pembangunan lebih menekankan pada model proses pertumbuhan dengan menggunakan tiga buah yaitu gambar 9.2.a, 9.2.b dan 9.2.c. Pada ketiga gambar tersebut sumbu datar (horizontal) menggambarkan jumlah tenaga kerja dalam sebuah perekonomian, dan pembagian ke sektor pertanian dan sektor industri.

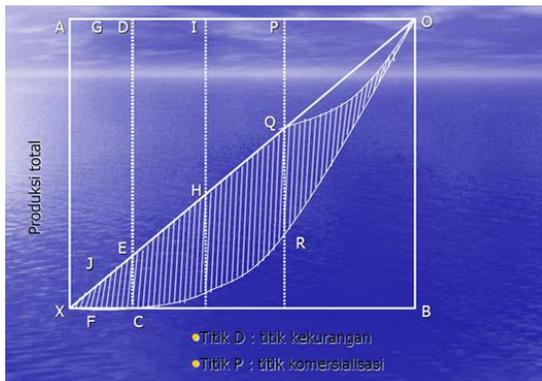


Gambar 9.2.a
Sektor Industri



Gambar 9.2.b

Tingkat Upah Institusional dan Produk Marjinal Sektor Pertanian



Gambar 9.2.c

Sektor Pertanian

Sumber : Gambar Grafik (Sukirno, 2006)

Pada gambar 9.2.a Sumbu vertikal mengandung makna ukuran dari besarnya tingkat upah yang terdapat pada sektor industri dan juga ukuran dari jumlah produk marginal dari berbagai tingkat penggunaan tenaga kerja yang ditunjukkan pada kurva dtf , $d_1t_1f_1$, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan produk marginal yang semakin keatas menjauh dari sumbu horizontal dikarenakan teknologi yang semakin berkembang. Bersama

dengan kurva Stt_1S_1 akan menentukan tingkat upah disektor industri dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut. Ranis-Fei menyatakan apabila tenaga kerja sektor pertanian masih lebih maka tingkat upah disektor industri tidak berubah (kurva St sejajar sumbu datar) serta apabila tenaga kerja sektor pertanian sudah tidak ada maka tingkat upah sektor *industry* akan meningkat (kurva t akan melengkung naik).

Gambar 9.2.b menunjukkan konsep pengangguran terselubung, tenaga kerja berlebih, dan upah institusional yang berkaitan dengan perkembangan kinerja ekonomi disektor pertanian, gambar tersebut mempertegas sumbu vertikal menunjukkan produk marginal tenaga kerja disektor pertanian dan tingkat upah institusional. Sehingga di bedakan menjadi tiga tahap proses pembangunan ekonomi. Tahap pertama adalah tahap tenaga kerja jumlahnya berlebihan sehingga nilai nol bagi produk marginalnya. Tahap kedua adalah tahap kelebihan tenaga kerja tidak terdapat lagi namun terdapat pengangguran terselubung. Tahap ketiga yaitu tahap yang mana produk marginal di sektor tersebut besarnya melebihi dari upah institusional dibanding tahap tahap sebelumnya.

Gambar 9.2.c merupakan penjelasan bahwa pada taraf pembangunan masih sangat rendah maka seluruh tenaga kerja berada disektor pertanian (OA) dan produksi pertanian yaitu produksi total. Bila terjadi penambahan tenaga kerja maka produksi akan menurun yang ditunjukkan oleh kurva ORC melengkung ke dalam. Bila tidak ada tambahan produksi walaupun ada penambahan tenaga kerja, maka dipandang sebagai tenaga kerja berlebihan. Kelebihan ini bila dipekerjakan kesektor industri maka dia tidak akan mengurangi produksi sektor pertanian.

4) Tahap-tahap Proses Pembangunan

Tahap pertama adalah adanya surplus hasil pertanian. Tahap kedua adalah harga hasil-hasil sektor pertanian relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga hasil-hasil sektor industri dimana sektor industri akan memperoleh tambahan tenaga kerja bila mereka membayar upah lebih tinggi disektor pertanian. Tahap ketiga besarnya upah di sektor industri akan mengalami kenaikan yang lebih cepat. Begitu pula disektor pertanian. Kelebihan tenaga kerja maupun pengangguran terselubung tidak ada lagi. Tahapan pembangunan ini terjadi persaingan sektor industri dan sektor

pertanian dalam memperoleh tenaga kerja dimana tenaga kerja menjadi sangat sukar diperoleh dan sektor industri akan kesulitan menarik tenaga kerja di sektor pertanian untuk beralih ke sektor industri karena pada tahap kedua telah terjadi titik komersialisasi.

H. KRITIK TERHADAP TEORI LEWIS DAN RANIS-FEI

Dalam teori-teori ekonomi selalu ada pro dan kontra terlebih banyaknya pemikiran dari beberapa ahli ekonomi disesuaikan dengan perkembangan perekonomian yang terus mengalami perubahan proses pembangunan menghadapi problematika, diawal pembahasan pada bab ini kita terkadang beranggapan pembangunan hanya berkenaan pada proses perkembangan dari fisik saja yaitu infrastruktur tetapi sebenarnya dalam proses pembangunan terdapat struktur ekonomi yang menjadi salah satu faktornya selain itu tenaga kerja disektor tertentu juga dapat menggambarkan proses pembangunan itu sendiri

Kritikan akan ketidakpuasan terhadap analisis ketiga tokoh ekonomi ini terdapat pertanyaan benarkan di banyak negara yang dikategorikan negara berkembang memiliki masalah ekonomi yaitu tenaga kerja terselubung yang semakin serius dan kelebihan tenaga kerja akibat perpindahan dari subsisten ke industri di sebabkan oleh sektor kapitalis. Terjadi pertentangan dikalangan ahli-ahli ekonomi mengenai masalah pembangunan terutama pengangguran terselubung di negara berkembang. Terjadi anggapan bahwa pengangguran terselubung merupakan bagian yang cukup besar dari tenaga kerja. Namun sejak tahun 1950-an muncul segolongan ahli ekonomi yang meragukan hal tersebut. Mereka beranggapan adalah tidak benar di beberapa negara berkembang terdapat tenaga kerja yang produktivitasnya nol dalam jumlah yang besar. Beberapa kritik atas teori Lewis dan Ranis-Fei yaitu walau terjadi ledakan pendudukan pasca perang dunia II dan urbanisasi akan tetapi hal tersebut tidak berakibat buruk pada sektor pertanian dan tidak mengurangi produksinya. Perpindahan penduduk terjadi setelah ada kesempatan kerja di sektor modern/ industri, apabila tidak maka tenaga kerja akan tetap pada sektor pertanian. Tenaga kerja di sektor pertanian berpindah ke sektor industri jika upah rill di sektor industri lebih besar dibandingkan di sektor pertanian jika tidak tenaga kerja tidak akan berpindah.

I. PROSES PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG (STUDI KASUS INDONESIA DAN JEPANG)

Proses pembangunan yang dialami diberbagai negara dibelahan dunia ini menjadi proses yang jangka waktunya terdapat perbedaan, namun dari sisi proses perubahan bisa jadi memiliki kemiripan yang diawali dari perubahan secara struktur ekonomi atau perubahan strukturalnya. Perubahan struktural yang dialami negara berkembang maupun negara maju merupakan hal yang sangat penting. Dalam uraian ini akan dijelaskan kasus proses pembangunan ekonomi pada negara berkembang yaitu Indonesia dan Negara maju yaitu Jepang, salah satunya melalui historis proses pembangunan ekonominya (Adji, 1997)

1. Pembangunan Indonesia

Apabila berkaca dari sejarah sebelum Indonesia merdeka sejak jaman penjajahan Belanda dan Jepang transformasi struktur ekonomi menjadi terlepas dari transformasi sektor yang alamiah atau yang seharusnya yaitu sektor pertanian ke sektor industri. Walaupun pada dasarnya Indonesia sebelum merdeka memiliki kekayaan alam sebagai modal dasar yang sangat besar. Menjadi daya tarik penjajahan saat itu untuk mengambil kekayaan alam tersebut secara paksa. Saat penjajahan Indonesia memiliki gangguan eksternal dalam proses pembangunannya, sehingga Indonesia tidak bebas dalam menentukan dari tujuan pembangunan ekonomi tidak tercapai. Aspek kebebasan ini sejalan dengan pendapat tokoh ekonomi Milton Friedman yang mengatakan “ *Freedom in economic arrangement is itself a component of freedom is an end in self. In the second place, economic freedom is also an indispensable means toward the achievement of political freedom.* Yang dimaknai karena terkungkung oleh masa itu karena kekuatan penjajah maka bangsa Indonesia berada pada kondisi tidak memungkinkan melakukan aktivitas pembangunan dengan bebas. Memasuki era kemerdekaan dengan beberapa periode kepemimpinan presiden, sedikit demi sedikit proses pembangunan mulai ada perubahan hingga saat ini (Adji, 1997). Memasuki tahun kemerdekaan perekonomian Indonesia mulai terlepas dari kungkungan penjajahan dan memasuki era sektor pertanian sempat menjadi primadona, hingga saat ini di Indonesia masih menjadi sumbangan pendapatan karena masih banyak penduduknya bekerja disektor pertanian. Karena sektor ini sangat terkait

dengan sumber daya alam yang di miliki Indonesia. Kemudian memasuki tahun 1990 penduduk yang semakin meningkat dengan mulai masuk teknologi memungkinkan perubahan struktural terjadi di dalam proses pembangunan di Indonesia.

Negara-negara berkembang pada masa kini berbeda dengan negara maju. Negara berkembang mulai memiliki masalah terhadap penduduk. Peningkatan angka kelahiran semakin mendorong jumlah penduduk dinegara berkembang semakin meningkat dengan permasalahan klasik yaitu permasalahan pengangguran hal ini sejalan dari pemikiran Ranis dan Fei. Tentang corak pembangunan dan perubahan struktur ekonomi dalam suatu masyarakat dimana: (1) penduduknya sebagian besar masih menjalankan kegiatan di sektor pertanian yang tradisional, dan (2) sektor tersebut mempunyai kelebihan jumlah tenaga kerja sehingga menghadapi masalah pengangguran terbuka dan tersembunyi yang serius. (Kariyasa, 2006)

Dalam sebuah kajian ekonomi menunjukkan bahwa bahwa perubahan struktur PDB atau produksi tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja pemikiran lewis dan ranis-fei dapat tergambar pada kajian bahwa sektor pertanian masih dikategorikan sektor yang tidak mendukung upah meningkat tetapi hanya kelebihan pada jumlah tenaga kerja disektor pertanian yang pada akhirnya dapat memunculkan tenaga kerja terselubung (kasus di Indonesia terdapat pula tenaga kerja terselubung disektor pertanian). Dengan kata lain sektor pertanian masih dianggap hanya menyumbang kelebihan tenaga kerja, sehingga tergambar kesenjangan pendapatan perkapitanya.

2. Proses pembangunan ekonomi negara maju (Kasus negara Jepang)

Negara Jepang sekarang sangat termasyur pembangunannya di negara-negara yang ada di Asia, Jepang yang merupakan salah satu negara maju memiliki karakteristik dari negara maju yaitu sektor industri yang semakin cepat perkembangannya yang menggambarkan bahwa perubahan struktural terus menerus berjalan di negara tersebut. Negara Jepang pun mampu menekan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya.



Gambar 9.3 Suasana Negara Jepang
Sumber: Juliatin Putri Utami (dokumen pribadi)

Gambar 9.3 menunjukkan suasana salah satu kota di Jepang dengan infrastruktur yang sangat berkembang, hal ini dapat diasumsikan bahwa bukan hanya dari kegiatan ekonominya, infrastruktur fisik menjadi tolak ukur kemajuan kota-kota di Negara Jepang. Sektor Industri yang semakin maju dengan tingkat upah yang cenderung lebih tinggi. Gaji rata-rata total di Jepang per pekerja. Sebesar 282.000 yen atau Rp. 36.900.000, gaji rata-rata pekerja di Jepang pada tahun 2021 sedangkan pekerja di sektor pertanian apabila dirupiahkan sebesar Rp 15 juta perbulan tetapi apabila masa panen sekitar Rp 25-27 jutaan sebulan,

Pada sejarahnya kajian tentang Jepang dalam proses pembangunan ekonomi yaitu perubahan strukturalnya yang sejalan dengan kultur negara Jepang yaitu pertanian. Jepang tidak seperti Eropa zaman dulu yang mengembangkan revolusi Industri. Jepang yang pada awalnya adalah sektor pertanian yang mendominasi. Seiring waktu Jepang membangun negaranya tidak lepas dari pembaharuan sosial dan politik namun tidak menghilangkan kultur kerja sama disektor pertaniannya. Kemudian terus berkembang atau bertransformasi ke sektor industri hingga saat ini. Hal tersebutlah yang mendukung Jepang untuk terus maju dari sektor tersebut, yang searah dengan jumlah tenaga kerja yang produktif seimbang dengan lahan yang terdapat di sektor pertanian dengan kata lain perubahan struktur ekonomi yang terdapat dalam proses pembangunan

pada negara Jepang terjadi secara alamiah. Sedemikian rupa Jepang yang transformasi ekonominya berkesinambungan, dengan terus mempersiapkan sektor subsisten atau pertanian dengan teknologi semakin maju dan tenaga kerja yang berkualitas untuk menyokong sektor industri semakin maju pula (Adji, 1997).

J. RANGKUMAN MATERI

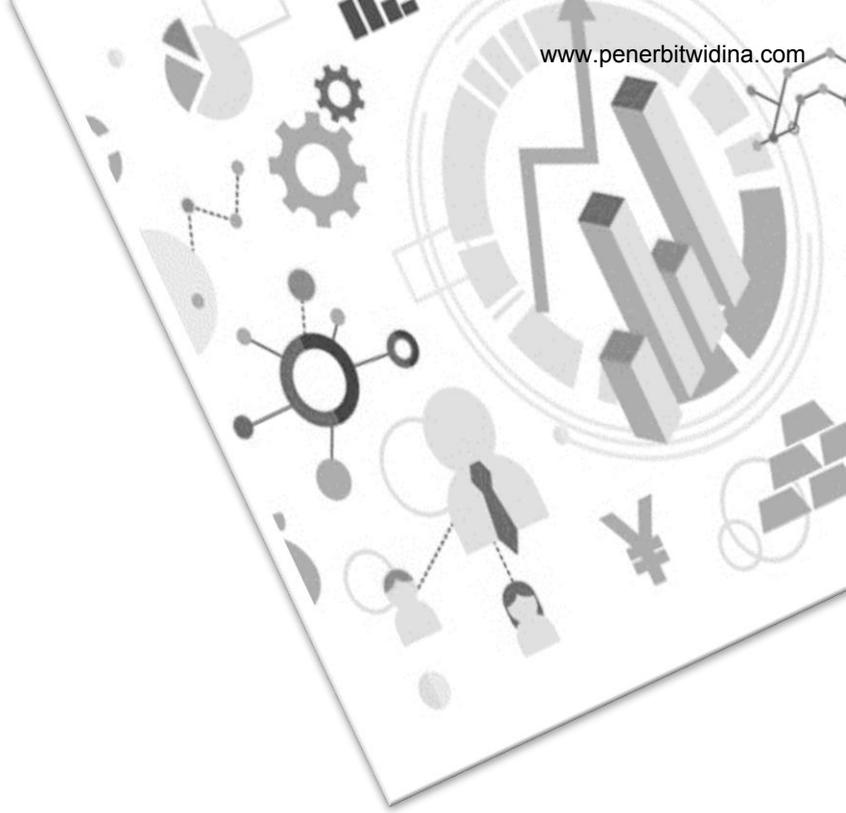
Proses pembangunan dalam perekonomian tidak akan lepas dari kegiatan perubahan struktur didalamnya, dari struktur perekonomian yang sederhana atau subsisten yaitu sektor pertanian ke arah sektor yang modern atau industri. Sektor pertanian pada dasarnya sangat banyak menampung tenaga kerja dibanding sektor industri namun dari tingkat upah riilnya tidak menyokong kesejahteraan masyarakat. Pada kasus negara-negara berkembang dan negara maju untuk proses pembangunannya memiliki kecepatan waktu yang berbeda antar negara yang ada dibelahan dunia ini. Negara berkembang bisa jadi lebih lambat dalam proses transformasi ekonominya di banding negara yang lebih maju, seperti kasus Indonesia dan Jepang memiliki historis yang berbeda sehingga dapat dikatakan Jepang sebagai negara maju lebih cepat proses pembangunannya dan terjadi secara alamiah sesuai kultur negaranya di banding Indonesia yang dari sejarah sebelum negara terbentuk terlalu lama terkurung dalam penjajahan sehingga dalam menentukan arah pembangunan tidak bebas dalam membangun sistem yang mana yang tepat. Baru saja sejak kemerdekaan pola pembangunannya berkembang.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Uraikan mengapa dalam perekonomian harus ada proses pembangunan yang berarah pada perubahan struktur ekonomi
2. Menurut anda mengapa sektor pertanian di katakan sebagai sektor subsisten dan mengapa sektor industri dimasukkan dengan sektor modern
3. Mengapa dalam teori lewis dijelaskan tentang peranan tabungan dalam proses pembangunan. Coba anda uraikan peranan tersebut
4. Jelaskan perbandingan proses pembangunan Indonesia dan Jepang
5. Mengapa terdapat kritikan terhadap teori lewis, dan Ranis-Fei

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, H. S. (1997). Proses Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Historis Komparasi antara Indonesia dan Jepang. *Economic Journal Of Emerging Markets*, 325-336.
- Chenery, H. B. (1960). Patterns of industrial growth. *The American Economic Review*, 625-654.
- Handyaningrat, S. (1988). *Pengantar Studi dan Administrasi*. Jakarta: Haji Masagung.
- J.S.Badudu, S. M. (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kariyasa, K. (2006). Perubahan Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja Serta Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 1-21.
- Kuznets, S. (1966). *Modern Economic Growth*. New Haven: Yale University Press.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Suwarni, E. (2006). Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22.
- Tjokrowinoto, M. (1996). *Pembangunan, Dilama dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Proses>, diakses 24 November 2021 pukul 08.20 WIB



EKONOMI PEMBANGUNAN

BAB 10: KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si

Institut Agama Islam Sahid

BAB 10

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

A. PENDAHULUAN

Pembangunan sangat dibutuhkan oleh setiap bangsa. Kemajuan di bidang ekonomi merupakan unsur paling penting dalam pembangunan. Kebanyakan negara berkembang saat ini lebih fokus pada bagaimana memperbaiki taraf hidup masyarakatnya dalam usaha pembangunan ekonomi. Melalui sistem perencanaan pembangunan ekonomi yang baik, maka tingkat kemakmuran masyarakat akan semakin baik. Tingkat kemakmuran yang dimaksud diantaranya adalah peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang/jasa, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan lapangan pekerjaan, perbaikan kualitas pendidikan, serta semakin banyak pilihan dari sisi ekonomis dan sosial. Kebijakan pembangunan ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan semua aspek, baik aspek ekonomi, sosial, sumber daya dan lingkungan, serta aspek pendukung lainnya seperti penggunaan teknologi. Berbagai kebijakan dan program pembangunan dilakukan untuk pendukung dan mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan sistem ekonomi kerakyatan.

B. SYARAT UMUM PEMBANGUNAN EKONOMI

Dalam pelaksanaannya, pembangunan ekonomi memiliki beberapa syarat umum, **pertama**, *Indegoneous forces* (Kekuatan internal), maksudnya kekuatan yang ada dalam masyarakat itu sendiri untuk berkembang. Kekuatan internal menjadi sangat penting untuk

mempercepat terjadinya perkembangan, selain itu ada pula kekuatan dari eksternal yang berfungsi sebagai pendorong dan pemberi fasilitas untuk berkembang. Tetapi kekuatan eksternal hanyalah sebagai pelengkap dan tidak dapat menggantikan kekuatan internal karena berasal dari masyarakat itu sendiri. Contoh kekuatan eksternal adalah adanya penanaman modal asing, yang umumnya akan melakukan investasi dengan pemanfaatan modal ke arah sumber-sumber alam untuk pasar dunia, dan belum tentu menguntungkan masyarakat setempat. Jadi bantuan luar negeri tersebut bukan suatu jaminan akan berkembangnya perekonomian suatu bangsa, maka untuk menghindari hal-hal yang merugikan diperlukan adanya prakarsa dan pengaturan terkait lembaga yang berkembang dari dalam masyarakat sendiri. Dimana semangat membangun dari dalam atau internal akan terus berkelanjutan dibandingkan dari eksternal.

Kedua, mobilitas faktor-faktor produksi, maksudnya peningkatan manfaat faktor-faktor produksi dari yang kurang produktif menjadi lebih produktif. Dalam kondisi ini *market imperfection* (ketidaksempurnaan pasar) harus dihilangkan, agar faktor produksi dapat dimanfaatkan semuanya. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan faktor produksi adalah mengganti bentuk organisasi sosial dan ekonomi, memberikan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas, peningkatan teknologi, perluasan pasar kapital, kemudahan kredit bagi petani dan pedagang kecil, serta kondisi pasar monopoli harus dikurangi.

Ketiga, akumulasi kapital, ini merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Maksudnya akumulasi kapital dapat berupa kenaikan jumlah tabungan masyarakat yang nantinya akan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan produktif. Dalam akumulasi kapital, kita dapat membentuk lembaga-lembaga keuangan dan perluasan moneter. Selain itu, kita dapat membentuk struktur pasar yang kuat agar dapat mempengaruhi mobilitas, dan dapat menyalurkan tabungan ke investasi yang bersifat produktif. Yang dimaksud dengan tabungan pemerintah adalah sisa pendapatan pemerintah setelah dipakai dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah paling utama berasal dari pajak.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa *capita* riil sangat diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi. *Capita* riil tersebut meliputi gedung, pabrik, jalan, pelabuhan dan yang lainnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengukur *capita* riil adalah perkiraan jumlah penduduk, target kenaikan pendapatan per kapita riil, rasio pertambahan investasi dan *output*. dan untuk meningkatkan pendapatan perkapita, kita harus dapat meningkatkan akumulasi kapital, artinya investasi harus ditingkatkan. Peningkatan investasi dapat melalui beberapa cara, yaitu pembatasan konsumsi agar tabungan menjadi naik, menjual obligasi, pembatasan impor barang-barang konsumsi, penambahan kapital di dalam negeri melalui pinjaman luar negeri, dan memperluas sektor perdagangan ke luar negeri.

Keempat, kriteria dan arah investasi, hal ini dikarenakan penentuan pola investasi mempunyai peran yang sama penting dengan penentuan laju pertumbuhan modal. Untuk negara terbelakang, hal yang harus dipertimbangkan tidak hanya besar kecilnya investasi, tetapi juga komposisinya. Kriteria yang harus diperhatikan dalam mengalokasikan kapital antara lain penempatan investasi dengan perbandingan kapital dan *output* (COR) yang rendah, produktivitas tenaga kerja yang tinggi, dan perbandingan antara ekspor dan investasi yang maksimal.

Beberapa faktor yang harus diperhatikan antara lain:

a. Pendapatan perkapita

Tipe investasi produksi, misalnya terdapat peningkatan proyek di sektor pertanian sehingga dibutuhkan tenaga kerja yang banyak. Hal ini artinya investasi pada sektor pertanian akan meningkatkan pendapatan di sektor tersebut, tetapi jika kenaikan jumlah penduduk dan pendapatan sama besar maka pendapatan perkapita akan kembali ke tingkat semula.

b. Pendapatan nasional

Kenaikan pendapatan nasional belum tentu menguntungkan masyarakat seluruhnya, karena mungkin pendapatan tersebut hanya diterima atau hanya dapat dinikmati oleh beberapa sektor atau golongan saja. Maka untuk meningkatkan pendapatan nasional yang

harus diperhatikan tidak hanya pendapatan perkapita, tetapi juga distribusi pendapatannya.

c. Faktor waktu

Pertimbangan terkait waktu juga sangat menentukan keberhasilan investasi. Karena belum tentu tingkat keuntungan investasi produksi tekstil pada tahun kelima adalah yang maksimal, mungkin saja tingkat keuntungan maksimal pada tahun kedelapan.

d. Kepentingan masyarakat

Pertimbangan mengenai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang paling mendesak itu menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam investasi.

e. Unsur pasar

Investasi tidak hanya ditekankan pada produksi saja, tetapi juga dari pasar produksi tersebut. Meskipun investasi efisien, tetapi pasar kurang diperhatikan maka investor mungkin saja akan mengalami kegagalan.

f. Titik pertumbuhan

Investasi sebaiknya diarahkan pada titik pertumbuhan "*growing point*". Karena umumnya posisi "*growing point*" adalah saat dimana ada keuntungan eksternal, sehingga banyak membutuhkan kapital dan mempunyai pasar yang luas.

Rostow adalah ahli ekonomi pertama yang mengemukakan tentang titik pertumbuhan dengan istilah sektor pertumbuhan primer. Rostow membagi tiga golongan sektor tersebut, yaitu sektor primer yang menyebabkan pertumbuhan, sektor pelengkap dan sektor pertumbuhan sebagai akibat lanjutan yaitu perkembangan yang didorong oleh penambahan jumlah penduduk dan pendapatan.

g. Pertumbuhan seimbang

Investasi pada titik pertumbuhan harus memperhatikan dua pertimbangan, yaitu:

- Kriteria neraca pembayaran dan produktivitas.

Hal ini disebabkan karena umumnya pada negara berkembang sering mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran, sehingga arah investasi harus pada perbaikan neraca pembayaran dan peningkatan produktivitas.

- Pertumbuhan seimbang.

Arah investasi seharusnya dilakukan pada semua sektor, karena semua sektor tersebut saling melengkapi dan terkait.

h. Teknik produksi

Teknik produksi dapat bersifat padat modal dan padat karya jika pasar telah cukup luas. Dari kedua kemungkinan teknik produksi tersebut menimbulkan beberapa pendapat. Dan salah satu pendapat menyatakan bahwa kedua kemungkinan tersebut dapat digunakan dan menghasilkan suatu *output* dengan biaya serendah-rendahnya. Jika tenaga kerja tersedia banyak dan lebih murah dari pada menggunakan mesin dan alat (kapital) maka sebaiknya teknik produksi padat modal dan pada keadaan sebaliknya dapat menggunakan teknik produksi padat karya. Dari sudut distribusi pendapatan, investasi dengan metode padat karya akan lebih baik karena dapat meningkatkan pendapatan sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan dari sudut pendapatan negara, investasi padat modal di sektor pertanian akan lebih baik karena dapat meningkatkan pendapatan perkapita.

Kelima, penyerapan kapital dan stabilitas, adalah batas kemampuan penyerapan kapital (*capital absorptial capacity*). Kapasitas ini ditentukan oleh dua hal yaitu tersedianya faktor produksi komplementer yang bekerja sama dengan kapital, dan syarat yang diperlukan untuk menghindari inflasi serta mempertahankan keseimbangan Neraca Pembayaran Internasional.

Keterbatasan kapasitas untuk menyerap kapital di negara sedang berkembang disebabkan oleh kurangnya teknologi, kurangnya tenaga ahli, kurangnya mobilitas faktor produksi dan umumnya negara berkembang sangat kekurangan tenaga terampil. Kekurangan jumlah tenaga terampil menyebabkan semakin banyak rintangan dalam produksi, sehingga produktivitas modal marjinal (*marjinal productivity of capital*) menurun. Untuk meningkatkan produktivitas tersebut dapat melalui peningkatan ketersediaan faktor-faktor produk lain yang dibutuhkan dan mencari solusi untuk mengatasi rintangan dalam produksi tersebut sehingga kapasitas dalam menyerap kapital semakin tinggi.

Selain itu, penyerapan kapital dipengaruhi oleh masa perkembangan perekonomian di negara tersebut, misalnya neraca pembayaran internasional suatu negara akan terjadi inflasi dan defisit apabila dalam penyerapan kapitalnya membutuhkan waktu yang relatif lama. Maksudnya jika akumulasi kapital melebihi kemampuan untuk menyerap kapital, maka setiap penambahan investasi akan menimbulkan inflasi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan fasilitas-fasilitas yang tersedia belum banyak dan faktor produksi belum digunakan dengan baik. Oleh karena itu harus ada faktor produksi komplementer yang cukup untuk memanfaatkan faktor produksi baru. Namun inflasi terjadi karena pembentukan modal yang salah dan pembiayaan investasi dengan inflasi sangat tidak baik bagi pertumbuhan ekonomi, karena tabungan sukarela sedikit, pinjaman jangka panjang kurang tersedia, nilai investasi produktif tidak stabil, efisiensi produksi berkurang, adanya alokasi yang salah terhadap faktor produksi dan apabila akumulasi lebih kecil dari kemampuan penyerapan kapital suatu negara maka akan menimbulkan kesulitan terutama di bidang neraca pembayaran karena negara tersebut sangat membutuhkan devisa untuk impor barang yang diperlukan. Hal ini artinya dalam perkembangan ekonomi harus ada kemampuan masyarakat yang dapat menyerap penambahan kapital serta diperlukan adanya stabilitas ekonomi.

Keenam, nilai dan lembaga yang ada, maksudnya bahwa nilai dan lembaga bersifat *non* ekonomi memiliki peranan yang tidak kalah penting dari kebutuhan baru, motif baru, metode produksi baru, serta harus ada perubahan lembaga yang ada dalam masyarakat. Manusia dapat menguasai alam dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhannya tetapi dalam pemanfaatannya harus tetap memperhatikan kelestarian dan kebudayaannya. Dalam proses mengubah cara hidup lama harus berhati-hati sebab setiap ada perubahan pasti ada kompensasinya. Artinya kita harus mengetahui terlebih dahulu kebiasaan lama yang harus diubah, kemudian bagaimana cara mengubahnya, karena dalam pelaksanaannya akan berdampak atau berpengaruh besar dalam perkembangan, baik dari sisi kemakmuran ekonomi maupun kemakmuran sosial. Konsekuensinya, cara hidup lama harus diganti dengan yang baru dan disesuaikan dengan

kebutuhannya agar dapat timbul penemuan hal baru sehingga produktivitas meningkat, dan jumlah inovator/wiraswasta semakin banyak.

Wiraswasta yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi harus memiliki sifat sensitif terhadap peluang atau kesempatan dalam pasar, mampu mengambil tindakan alternatif, dan memiliki kemampuan untuk mengkombinasi elemen-elemen secara rasional dalam keputusannya. Artinya wiraswasta harus dapat berdiri sendiri atau percaya diri dalam mengatasi kesulitan yang ada dan bertanggung jawab terhadap tindakannya. Dengan ini maka perkembangan wiraswasta sangat diharapkan di negara berkembang, bukan hanya dari bidang ekonomi tetapi juga pada bidang sosial lainnya.

C. MASALAH PEMBANGUNAN EKONOMI

Setiap negara, baik negara maju ataupun negara berkembang pasti mempunyai permasalahan dalam melakukan kegiatan pembangunan ekonomi, dan tidak ada satupun negara yang tidak mengalami permasalahan ketika melakukan pembangunan ekonomi. Akan tetapi, terdapat perbedaan permasalahan pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh negara maju dan negara berkembang. Umumnya pada negara maju, masalah pembangunan ekonomi yang dihadapi adalah kurangnya permintaan sehingga menghambat pertumbuhan *output*, sedangkan di negara berkembang, masalah pembangunan ekonomi yang paling umum dihadapi adalah kurangnya elastisitas penawaran sehingga menghalangi laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu negara berkembang dihadapkan dengan permasalahan pembangunan ekonomi lainnya.

Beberapa permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, kemiskinan, tingginya populasi penduduk, tingkat inflasi yang menyebabkan rendahnya daya beli, rendahnya produktivitas yang berakibat terhadap rendahnya pendapatan per kapita, dan dominasi sektor primer sebagai komoditas ekspor. Negara-negara berkembang umumnya cenderung bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan, ada juga negara yang hanya bergantung pada sektor pertanian saja. Kondisi ini disebut sebagai perekonomian monokultural.

Rendahnya tingkat produktivitas bisa dilihat dari pendapatan domestik bruto (PDB) perkapita atau PDB perkapita pekerja yang kecil. Pendapatan perkapita yang rendah dikarenakan rendahnya tingkat kehidupan dan ketersediaan kesempatan kerja juga rendah, terutama bagi mereka yang hanya berpendidikan rendah atau bahkan tidak berpendidikan sama sekali. Oleh karena itu, pada negara berkembang sering kali terdengar istilah lingkaran setan yang sulit diputus. Maksudnya adalah dengan mata rantai pendapatan yang rendah, maka akan berdampak pada tabungan dan investasi yang rendah pula. Apabila tabungan dan investasi rendah, maka akan mengakibatkan akumulasi modal yang lambat sehingga berujung pada produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah juga mengakibatkan rendahnya pendapatan rata-rata.

Kondisi perekonomian negara berkembang cenderung dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara di sekitarnya, terutama negara maju. Hal ini dikarenakan permintaan domestik yang sangat mengandalkan pasar ekspor, ditambah dengan barang yang diekspor adalah barang-barang primer. Pada negara berkembang, pasar dan informasi cenderung tidak sempurna, artinya cenderung tidak tersedia informasi yang lengkap. Struktur pasar barang dan jasa umumnya cenderung tidak sempurna, lebih ke arah monopoli, dan *oligopoly* dalam pasar faktor produksi. Selain itu, sebagian besar informasi pasar hanya diterima oleh para pengusaha yang mempunyai hubungan dekat dengan birokrasi yang bersangkutan. Kondisi informasi yang tidak sempurna seperti ini akan merugikan masyarakat.

Pada negara berkembang tingkat pengangguran sangat tinggi. Perhitungan angka pengangguran akan semakin tinggi apabila menggunakan angka *under unemployment*. Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan daya tampung perekonomian nasional. Pada kondisi pertumbuhan kesempatan kerja yang rendah angka pengangguran akan semakin tinggi. Rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja berkaitan erat dengan rendahnya tingkat penanaman modal, terutama pada sektor-sektor industri, dan jasa.

Rendahnya tingkat kehidupan dapat dilihat dari kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan rumah. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh UNDP

menyebutkan bahwa lebih dari satu miliar penduduk dunia di bawah garis kemiskinan, dan sekitar 80 persen berasal dari negara berkembang. Istilah kemiskinan yang dimaksud oleh UNDP adalah kekurangan gizi dan kondisi kesehatan yang buruk. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan masih banyaknya penduduk di negara berkembang yang buta huruf.

Tingkat pertumbuhan penduduk di negara berkembang umumnya dua sampai empat kali lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk di negara maju, dibuktikan bahwa 75 persen dari total penduduk dunia berada pada negara berkembang. Selain itu, distribusi penduduk yang tidak merata adalah masalah kependudukan yang lainnya. Di negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar cenderung tidak diimbangi dengan adanya pemerataan dalam penyebaran jumlah penduduk. Jumlah penduduk hanya terfokus pada wilayah tertentu, sementara wilayah lainnya justru kekurangan penduduk. Penyebaran penduduk yang tidak merata akan menghambat proses pembangunan ekonomi. Dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut adalah terjadinya pembagian pendapatan yang tidak merata.

D. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang berlaku yang bercirikan perilaku konsisten dan berulang, baik dari yang membuat kebijakan ataupun yang terkena kebijakan tersebut harus mentaatinya. Umumnya kebijakan merupakan pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berpikir. Secara lebih khusus kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan suatu tindakan. Kebijakan mengarahkan tindakan untuk mencapai sasaran atau tujuan. Kebijakan juga menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan dirancang untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan.

Pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Kebijakan pembangunan

ekonomi ada yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Kebijakan pembangunan ekonomi dari dalam negeri adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, sedangkan dari luar negeri meliputi Kebijakan Pemerintah berupa bantuan teknis, investasi asing swasta, investasi asing pemerintah, dan kebijaksanaan tataniaga serta pemerintah.

Negara sedang berkembang melaksanakan kebijaksanaan perdagangan internasional untuk melindungi industri dalam negeri. Untuk mendorong perkembangan ekonomi lainnya dengan memberikan subsidi pada industri-industri tertentu. Bantuan teknis maksudnya adalah pengaturan dengan membentuk “tim internasional” untuk memberi nasihat kepada pemerintah negara sedang berkembang dalam hubungannya dengan fasilitas-fasilitas untuk pendidikan di luar negeri.

Investasi asing swasta dapat berbentuk “investasi langsung” (*Foreign Direc Investment*) yaitu langsung punya usaha di negara tersebut dan “investasi portofolio” yaitu membeli saham-saham perusahaan di negara sedang berkembang. Sedangkan investasi asing pemerintah, berupa pinjaman dan hadiah dari pemerintah asing atau badan-badan internasional kepada pemerintah negara sedang berkembang.

Negara-negara berkembang berusaha meningkatkan pendapatan nasional melalui pembentukan nilai tambah di dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja, pembangunan serta pengembangan sektor industri. Untuk mencapai keberhasilan pengembangan sektor industri pengolahan (*manufacturing industry*), harus ada jaminan pasar yang akan menyerap hasil-hasil produksinya. Salah satu contoh peraturan tata niaga adalah pola ekspor (*Outward Looking*), dimana akan tercipta kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, serta munculnya negara eksportir dalam pasar dunia, tetapi pola ini mempunyai kelemahan berupa tuduhan bahwa negara eksportir mengorbankan negara-negara *importer*.

1. Kebijakan Fiskal

Kebijaksanaan fiskal adalah salah satu kebijakan pembangunan dari dalam negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan fiskal artinya kebijaksanaan pemerintah dalam pengeluaran dan pendapatannya dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi. Terdapat tiga instrumen kebijakan fiskal yang dapat dijalankan yaitu: (1)

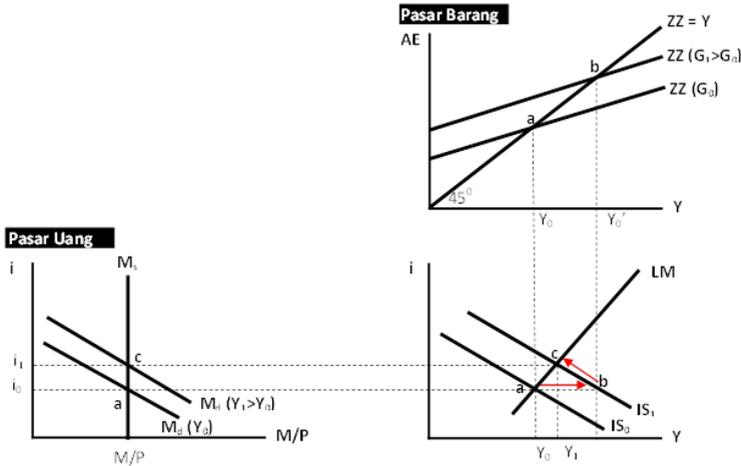
menaikkan pajak, (2) mengurangi pengeluaran pemerintah, dan (3) memberi rangsangan fiskal (*fiscal incentive*) pada pengusaha tertentu.

Tujuan kebijakan fiskal adalah menjaga dan mengembangkan perekonomian negara, meningkatkan kualitas SDM, menjaga stabilitas harga barang, serta mendorong investasi. Dengan diterapkan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Selain itu, dengan meningkatnya kualitas SDM, diharapkan SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya *demand* sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab. Tujuan kebijakan fiskal lainnya adalah untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor. Sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha.

Pada Gambar 10.1 dapat kita lihat dampak perubahan *output* dan suku bunga dengan adanya kebijakan fiskal melalui peningkatan pengeluaran pemerintah. Peningkatan pengeluaran pemerintah (G) akan meningkatkan *Aggregate expenditure* (AE), sehingga kurva ZZ bergeser ke atas. Pergeseran kurva ZZ berakibat pada peningkatan *output* (Y) dan kurva IS bergeser dari IS_0 ke IS_1 pada posisi suku bunga awal (i_0). Peningkatan *output* (Y) akan mempengaruhi permintaan uang atau dengan kata lain *Money demand* (M_d) meningkat. Agar kondisi M_d tetap sama dengan M_s ($M_d = M_s$), maka direspon dengan peningkatan suku bunga dari i_0 ke i_1 .

Crowding out effect pada Gambar 10.1 adalah kondisi disaat pemerintah melakukan intervensi kebijakan fiskal dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah (G) untuk meningkatkan *output* (Y), pada awalnya *output* (Y) meningkat dari titik a ke titik b (lihat pada kurva $IS-LM$) sedangkan kenyataannya terjadi kontraproduktif sehingga *output* (Y)

menurun kembali dari titik b ke titik c, tetapi nilai *output* (Y) pada titik c lebih besar dari titik a ($\Delta a-b-c$).



Gambar 10.1 Peningkatan *Output* (Y) melalui Kebijakan Fiskal

Dalam implementasinya, kebijakan fiskal dibagi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif biasanya diambil pemerintah pada saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsi kebijakan fiskal ekspansif adalah demi meningkatkan daya beli barang, sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif merupakan kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak yang berfungsi untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio gini.

2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara mempengaruhi penawaran uang dalam masyarakat atau dengan cara mempengaruhi tingkat bunga. Kebijakan moneter dilaksanakan melalui cara penyesuaian suku bunga, pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah, dan mengubah jumlah uang tunai yang beredar dalam pasar. Bank sentral atau badan negara yang bertanggung jawab atas rumusan kebijakan moneter,

di Indonesia kebijakan moneter diatur tunggal oleh Bank sentral yaitu Bank Indonesia. Instrumen yang digunakan oleh Bank sentral untuk mengimplementasikan kebijakan moneter yaitu:

1) Penyesuaian tingkat suku bunga

Bank sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Tingkat diskonto (tarif dasar) adalah suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Contohnya, jika bank sentral meningkatkan tingkat diskonto, biaya pinjaman untuk bank meningkat. Selanjutnya, bank akan meningkatkan suku bunga yang mereka tetapkan kepada pelanggan mereka. Dengan demikian, biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat, dan jumlah uang beredar akan berkurang.

2) Penyesuaian Giro Wajib Minimum (GWM)

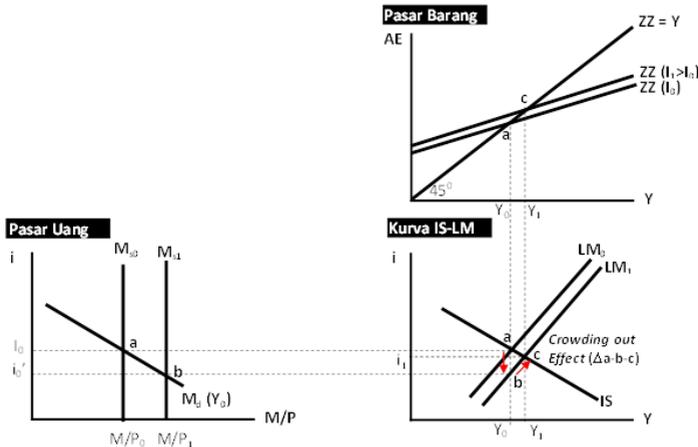
Bank sentral biasanya mengatur jumlah giro wajib minimum yang harus dipegang oleh bank komersial. Giro Wajib Minimum (GWM) adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia bagi semua bank. Dengan mengubah jumlah yang diperlukan, bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar di pasar. Jika bank sentral meningkatkan giro wajib minimum, bank komersial hanya akan menyediakan sedikit uang tunai untuk diberikan kepada pelanggan dan dengan demikian, suplai uang menurun.

3) Operasi pasar terbuka

Bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Misalnya, bank sentral dapat membeli obligasi pemerintah. Akibatnya, bank akan memperoleh lebih banyak uang untuk meningkatkan pinjaman dan uang beredar dalam pasar.

Tujuan utama kebijakan moneter adalah manajemen inflasi atau pengangguran, dan pemeliharaan nilai tukar mata uang. Dimana kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang rendah dianggap sehat bagi perekonomian sebuah negara dan dengan tingginya inflasi, maka kebijakan moneter diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Selain itu, kebijakan moneter akan mempengaruhi tingkat

pengangguran dalam suatu negara. Contohnya melalui kebijakan ekspansif diharapkan dapat mengurangi pengangguran karena pasokan uang yang lebih tinggi merangsang kegiatan bisnis yang mengarah pada perluasan pasar kerja. Dengan menggunakan otoritas fiskal, bank sentral dapat mengatur nilai tukar antara mata uang domestik dan asing. Sebagai contoh, bank Indonesia dapat meningkatkan jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Dalam kasus seperti itu, mata uang negara tersebut menjadi lebih murah dibandingkan dengan mata uang negara lain.



Gambar 10.2 Peningkatan *Output* (Y) melalui Kebijakan Moneter

Dampak perubahan *output* dan suku bunga dengan adanya intervensi pemerintah melalui kebijakan moneter, yaitu dengan melakukan peningkatan jumlah uang beredar (M_s) atau lebih dikenal dengan istilah ekspansi moneter, maka M_s akan bergeser dari M_{s0} ke M_{s1} dan mengakibatkan suku bunga (i) mengalami penurunan. Penurunan suku bunga (i) akan menggeser kurva LM dari LM_0 ke LM_1 dan investasi (I) akan meningkat dari I_0 ke I_1 . Peningkatan investasi tersebut akan mengakibatkan AE meningkat dan menggeser kurva ZZ ke atas, sehingga *output* (Y) meningkat dari Y_0 ke Y_1 . (Gambar 10.2).

Crowding out effect pada Gambar 10.2 adalah kondisi disaat pemerintah melakukan intervensi ekspansi moneter dengan meningkatkan jumlah uang beredar (M_s) untuk meningkatkan *output* (Y),

pada awalnya suku bunga (i) menurun saat nilai *output* tetap, dari titik a ke titik b (lihat pada kurva IS-LM) sedangkan kenyataannya penurunan suku bunga (i) akan meningkatkan investasi (I) sehingga *output* (Y) meningkat dari titik b ke titik c, nilai *output* (Y) pada titik c lebih besar dari titik a ($\Delta a-b-c$).

Secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa kurva permintaan agregat (AD) akan bergeser ke bawah jika diberlakukan intervensi pemerintah berupa penurunan pengeluaran pemerintah (G) atau jumlah uang beredar (M/P) atau peningkatan pajak (T), *ceteris paribus*. Sedangkan sebaliknya kurva permintaan agregat akan bergeser ke kanan jika diberlakukan intervensi pemerintah berupa peningkatan pengeluaran pemerintah (G) atau jumlah uang beredar (M/P) atau penurunan pajak (T), *ceteris paribus*.

Kebijakan moneter dapat berupa kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Dimana kebijakan ekspansif bertujuan untuk meningkatkan pasokan uang dalam perekonomian dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Selain itu, kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis dan kegiatan belanja konsumen. Tujuan dari kebijakan moneter ekspansif adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi berisiko terhadap terjadinya inflasi yang lebih tinggi. Sedangkan kebijakan kontraktif bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Ini dapat dicapai dengan menaikkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Umumnya Kebijakan ini digunakan ketika pemerintah ingin mengendalikan tingkat inflasi.

3. Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter

Terdapat beberapa perbedaan antara kebijakan fiskal dan moneter, baik dari segi pengertian, pelaksana, sifat, faktor yang terkait, tujuan kebijakan, dan instrumen kebijakan. Dari segi pengertian jelas sangat berbeda, dimana kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai penerimaan dan pengeluaran pajak untuk mempengaruhi ekonomi sebuah negara, sedangkan kebijakan moneter

adalah kebijakan yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dalam pasar. Pelaksana pada kebijakan fiskal adalah Kementerian keuangan, sedangkan kebijakan moneter adalah Bank sentral, di Indonesia adalah Bank Indonesia.

Jika dilihat dari sifatnya, kebijakan fiskal dapat berubah setiap tahun, sedangkan kebijakan moneter akan berubah disesuaikan dengan kondisi perekonomian suatu negara. Faktor yang terkait dengan kebijakan fiskal adalah pendapatan dan pengeluaran Negara, sedangkan kebijakan moneter adalah bank dan kontrol kredit. Jika kebijakan fiskal bertujuan pada pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter mempunyai fokus tujuan lain, yaitu stabilitas ekonomi. Instrumen yang dipakai pada kebijakan fiskal adalah tarif pajak dan pengeluaran pemerintah, sedangkan pada kebijakan moneter, instrumen yang dipakai adalah suku bunga dan rasio kredit.

E. RANGKUMAN MATERI

1. Dalam pelaksanaannya, pembangunan ekonomi memiliki beberapa syarat umum, yaitu *Indegoneous forces* (Kekuatan internal), mobilitas faktor-faktor produksi, akumulasi kapital, kriteria dan arah investasi, penyerapan kapital dan stabilitas, serta nilai dan lembaga yang ada.
2. Beberapa permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang adalah tingginya angka pengangguran, kemiskinan, tingginya populasi penduduk, tingkat inflasi yang menyebabkan rendahnya daya beli, rendahnya produktivitas yang berakibat terhadap rendahnya pendapatan per kapita, dan dominasi sektor primer sebagai komoditas ekspor.
3. Kebijakan pembangunan ekonomi ada yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Kebijakan pembangunan ekonomi dari dalam negeri adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, sedangkan dari luar negeri meliputi Kebijakan Pemerintah berupa bantuan teknis, investasi asing swasta, investasi asing pemerintah, dan kebijaksanaan tataniaga serta pemerintah.
4. Kebijaksanaan fiskal adalah salah satu kebijakan pembangunan dari dalam negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan fiskal artinya kebijaksanaan pemerintah dalam pengeluaran dan

pendapatannya dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara mempengaruhi penawaran uang dalam masyarakat atau dengan cara mempengaruhi tingkat bunga.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Sebutkan dan jelaskan persyaratan umum dalam melaksanakan pembangunan ekonomi.
2. Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai beberapa permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Jelaskan dan sebutkan permasalahan pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia.
3. Kebijakan pembangunan dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dari dalam negeri. Jelaskan dan gambarkan kurva yang menunjukkan dampak dengan diberlakukannya kebijakan fiskal melalui peningkatan pajak rumah tangga.
4. Dalam menetapkan kebijakan moneter, terkadang pemerintah memberlakukan ekspansi moneter atau kontraksi moneter. Jelaskan perbedaan antara ekspansi dan kontraksi moneter.
5. Jelaskan dan gambarkan kurva yang menunjukkan dampak dengan diberlakukannya kontraksi moneter oleh pemerintah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Blanchard, Olivier and David R. Johnson. 2015. *Macroeconomics*. Fifth Canadian Edition. Pearson Education Inc. Toronto.
- Dornbusch, R, S Fischer and R Startz. 2018. *Macroeconomics*. Thirteenth edition. McGraw-Hill Education. New York.
- Irawan dan Suparmoko. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keenam. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Lipschitz, L and S Schadler. 2019. *Macroeconomics for Professionals: A Guide for Analysts and Those Who Need to Understand Them*. Cambridge University Press. New York.
- Mankiw, NG. 2000. *Macro Economics*. Fourth Edition. Worth Publishers. New York.
- Romer, D. 2012. *Advanced Macroeconomics*. Fourth Edition. McGraw-Hill. California.
- Sanusi, B. 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Cetakan Pertama. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Steiner, GA and JB Miner. 1997. *Management Policy and Strategy* Penerjemah: Ticoalu dan Agus Dharma. *Kebijakan dan Strategi Manajemen*. edisi Kedua. Erlangga. Jakarta
- Sugiyanto dan AP Romadhina. 2020. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro*. Cetakan Pertama. Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju (YPSIM). Banten.
- Sukirno, S. 2017. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kedelapan. Kencana Media Group. Jakarta
- Todaro, MP. 1995. *Ekonomi untuk Negara Berkembang: Suatu Pengantar Tentang Prinsip-Prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan*. Cetakan Pertama. Bumi Aksara. Jakarta.

EKONOMI PEMBANGUNAN

BAB 11: TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI

Nur Fitriyani Sahamony, S.Pd., M.Si

Universitas Binawan

BAB 11

TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI

A. DEFINISI TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI

Teori Pertumbuhan merupakan perubahan kondisi ekonomi di negara berkembang dijelaskan oleh teori pertumbuhan, yang menyatakan bahwa perubahan tersebut saling menguntungkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi di negara tersebut. Adapun dapat didefinisikan teori pertumbuhan ekonomi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang dalam *output* per kapita dan bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi untuk membentuk proses pertumbuhan harus dijelaskan. Maka, mengenai bagaimana pertumbuhan terjadi dalam keterkaitan antar faktor ekonomi ialah teori pertumbuhan ekonomi.

Banyak ahli telah mengemukakan teori ini sebagai cara untuk memperbaiki situasi ekonomi suatu negara. Ini pada awalnya adalah teori pertumbuhan klasik, yang kemudian diperbaiki oleh kelompok neoklasik.

B. TEORI PERTUMBUHAN KLASIK

Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, sekelompok ekonom yang dikenal sebagai kelompok klasik mengembangkan teori pertumbuhan yang dikenal sebagai mobilitas klasik. Ada dua jenis sekolah klasik dalam sejarah: kelompok klasik dan kelompok neoklasik. Adam Smith, Robert Malthus, David Ricardo, dan John Stewart Mill adalah contoh ekonom klasik, ekonom yang mengajukan teori sebelum tahun 1870-an. Aliran ekonomi neoklasik termasuk mereka yang menganjurkan teori ini setelah tahun 1870. Untuk kelompok penulis ini, kita dapat menambahkan Alfred Marshall dan Walt Whitman Rostow, di antara banyak lainnya.

Ada banyak isu mikro ekonomi yang dibahas dalam aliran klasik, yang kemudian dikembangkan oleh para ekonom neoklasik. Banyak masalah pembangunan ekonomi dibahas dalam klasik, sedangkan neoklasik berfokus pada kegiatan masyarakat jangka pendek dan pembangunan ekonomi.

Ini adalah kepercayaan neoklasik bahwa dalam jangka panjang, pasar akan menstabilkan dan mengatur ekonomi, meskipun pertumbuhan ekonomi lambat. Menurut filosofi "*laissez-faire*" Adam Smith, kebijakan ekonomi harus fokus pada kebebasan setiap individu dan memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas mereka sendiri. disayat sampai ke tulang. (A. Jajang, Cupian dkk, 2021)

Selama Revolusi Industri Inggris, teori pembangunan ekonomi klasik mulai terbentuk. Era tinggal landas diantar oleh negara-negara Inggris pada saat pertumbuhan ekonomi negara maju yang cukup pesat. Kelompok klasik menelaah penyebab pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan terjadinya proses pertumbuhan bila melihat persoalan pembangunan ekonomi. Pandangan ekonom klasik berbeda dalam hal ini, sehingga masing-masing teori kelompok klasik akan diperiksa secara rinci.

1. Teori Adam Smith

Sebagai bapak ekonomi global, Adam Smith secara luas dianggap sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah. Adam Smith lebih dikenal dengan teori nilai, yaitu teori yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga atau nilai suatu barang. Karyanya yang paling terkenal, *The Nature and Reasons of the Wealth of Nations*, berfokus pada jalan negara menuju kemakmuran. Sebuah "ekonomi pasar" adalah satu-satunya cara untuk mencapai hal ini, menurut Adam Smith. Dalam buku itu, (Landreth dan Colander, 2002), teori pertumbuhan ekonomi dijelaskan secara rinci untuk pertama kalinya. Akibatnya, teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith sering dianggap sebagai tengara di lapangan. Adapun dibagi menjadi 4 tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith yang berurutan, yaitu dimulai dari tahap perburuan, tahap beternak, tahap bercocok tanam, tahap perdagangan dan yang terakhir adalah tahap perindustrian.

a. Masa Perburuan

Selama periode memburu, tidak ada sistem ekonomi yang kompleks. Anggota kelompok tidak akan pernah terlibat dalam transaksi dengan kelompok lain sebagai akibat dari aktivitas ini. Saat berburu yang pasti masih sangat tergantung pada alam, dan jika tempat itu tidak lagi memenuhi kebutuhan mereka, mereka akan mencari di tempat lain.

b. Masa Bercocok Tanam dan Berternak

Pada masa ini mulai meningkat kebutuhan masyarakat hingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Barter dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang harus berinteraksi satu sama lain untuk berdagang. Dalam sistem barter, suatu barang ditukarkan dengan barang lain yang dibutuhkan.

c. Masa Perdagangan

Pada masa ini setiap *item* transaksi ditukar dengan sejumlah mata uang tertentu selama periode transaksi. Sebagai imbalan atas pembayaran yang diminta penjual, pembeli akan menyerahkan barang atau jasa. Produksi, sirkulasi, dan konsumsi semua terjadi selama periode perdagangan.

d. Masa Perindustrian

Pengolahan menjadi barang dagangan dari bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi dengan lebih tinggi didalam nilai guna merupakan contoh kegiatan ekonomi pada masa industri. Dalam transisi dari masyarakat tradisional ke kapitalisme modern.

Menurut Smith, Ada korelasi langsung antara pertumbuhan ekonomi dan kinerja industri tertentu. Akumulasi modal, kemajuan teknologi, pembagian kerja/spesialisasi, dan perluasan pasar semuanya akan mendapat manfaat dari peningkatan kinerja departemen.

Menurut teori Adam Smith, pasar persaingan sempurna ada pada setiap tahap perkembangan. Namun, fakta menunjukkan bahwa anggapan tersebut salah. Penting juga untuk dicatat bahwa tidak ada di dunia saat ini pasar persaingan sempurna, jadi asumsi ini tidak realistis.

2. Robert Malthus

Teori pembangunan ekonomi Robert Malthus, bukan hanya tentang kelancaran kegiatan ekonomi saja kegiatan ekonomi menurun. Menurut Malthus, perekonomian tidak bergerak menuju keadaan ekuilibrium, melainkan mengalami serangkaian penurunan sebelum mencapai puncaknya. Akibat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.

Populasi manusia akan terus bertambah sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi jika kesejahteraan sosial tidak meningkat secara bersamaan, pertumbuhan ini tidak akan terjadi. Permintaan tenaga kerja akan meningkat ketika tingkat akumulasi kapital meningkat. Akibatnya, pertumbuhan penduduk didorong. Namun jika permintaan efektif naik, maka pertumbuhan penduduk akan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berbagai gagasan pembangunan ekonomi dikemukakan oleh ekonom Robert Malthus, seperti berikut ini: *Wisuda* sebagai faktor ekonomi. Untuk pertumbuhan ekonomi yang seimbang, sektor pertanian dan industri adalah dua entitas yang terpisah. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh kemajuan teknologi di kedua sektor ini. Permintaan efektif meningkat sebagai hasilnya. Distribusi kepemilikan tanah yang merata, perluasan perdagangan dalam dan luar negeri, peningkatan konsumsi *non*-produktif, dan program pekerjaan umum adalah semua cara untuk meningkatkan permintaan efektif. Faktor *non*-ekonomi, seperti pendidikan, etika, kerja keras, baik dalam manajemen, dan efektif terhadap hukum, menjadi semakin penting.

Stagnasi tidak tergantung pada akumulasi kapital menurut teori Robert Malthus yang memiliki kelemahan. Akumulasi modal dipandang sebagai hal yang buruk. Komoditas diperdagangkan untuk tenaga kerja daripada sebaliknya. Penghematan konsumen yang tidak produktif didasarkan pada satu faktor, yang memperlambat kemajuan mereka. Di samping itu.

3. David Ricardo

David Ricardo adalah tokoh kunci dalam perkembangan teori pertumbuhan klasik. Untuk bukunya "*Principles of Political Economy and Taxation*" dan teorinya tentang Ricardo antara tahun 1823 dan 1912,

David Ricardo paling dikenal. Ricardo mempelajari tahap awal pembangunan ekonomi, ketika populasi kecil dan sumber daya alam berlimpah. Pengusaha yang menggunakan sumber daya alam sebagai faktor produksi dalam usahanya.

David Ricardo menyimpulkan bahwa dampak bagi wirausahawan adalah wirausahawan dapat memperoleh keuntungan yang tinggi, yang dapat meningkatkan modal dan dengan demikian meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Selain itu, ketika produktivitas meningkat, pekerja akan menuntut kenaikan gaji mereka. Akan ada peningkatan populasi jika upah tinggi. Akan ada penurunan pendapatan dan keuntungan dari pembongkaran rumah karena kualitas tanah menurun dan biaya sewa meningkat, meskipun luas tanah tidak berubah. Oleh karena itu, modal menurun, pekerjaan menurun, dan upah menurun. Sampai tingkat upah minimum tercapai, ini akan menjadi siklus yang berkelanjutan. Perekonomian dalam keadaan “stabil” atau “stagnan” dalam hal ini (pertumbuhan berhenti).

Aristokrasi, atau aristokrasi, adalah kategori masyarakat ketiga yang dibagi Ricardo. Asumsi Ricardo mencakup fakta bahwa digunakan untuk produksi gandum, tenaga kerja pertanian semua tanah yang mempengaruhi distribusi industri, dan hukum hasil yang semakin berkurang berlaku untuk tanah. Permintaan inelastis gandum untuk tanah adalah tetap, tingkat pengetahuan teknis adalah tetap, semua pekerja menerima upah hidup minimum, dan harga penawaran tenaga kerja adalah tetap. Penawaran tanah bersifat inelastis. Pemupukan mempengaruhi kebutuhan akan tenaga kerja. Sejauh menyangkut modal, manfaat pertumbuhan ekonomi telah menghasilkan persaingan sempurna dan pemupukan modal sebagai hasil produksi sosial.

Tuan tanah menerima sewa, pengusaha atau kapitalis menerima keuntungan, dan pekerja menerima upah dalam sistem pembagian pendapatan ini. Akumulasi modal adalah akumulasi kekayaan yang akan digunakan untuk menciptakan modal baru. Akumulasi modal merupakan fungsi dari kemampuan seseorang untuk menabung dan keinginan seseorang untuk melakukannya. Kemampuan untuk menyimpan uang sangat penting karena di sinilah uang tumbuh. Namun, jika tidak ada

keinginan untuk menabung, kemampuan ini tidak akan berguna sama sekali.

Ricardo berkeyakinan bahwa keuntungan dalam perekonomian pada akhirnya akan turun, menghasilkan kondisi mapan bagi negara. Jumlah total produksi dan, akibatnya, dana upah, akan meningkat jika peningkatan laba menyebabkan peningkatan akumulasi modal. Peningkatan dana upah akan menyebabkan peningkatan populasi, yang akan menyebabkan peningkatan permintaan gandum dan peningkatan harga gandum.

Seiring bertambahnya populasi, begitu pula permintaan. Untuk memenuhi permintaan gandum yang terus meningkat, tanah itu masih ada, tetapi harus dibudidayakan di tanah yang berkualitas buruk. Sewa lahan akan meningkat sebagai akibat dari penggunaan lahan yang lebih luas. Pemilik modal dan tenaga kerja akan memiliki bagian kue yang lebih kecil sebagai hasilnya. Upah bisa jatuh ke titik di mana mereka hampir tidak cukup untuk standar hidup dasar. Di sisi lain, tuan tanah akan melihat peningkatan pendapatan sewa mereka.

Sampai upah minimum tenaga kerja yang dipekerjakan sama dengan *output* dari lahan tambahan, proses kenaikan sewa dan penurunan keuntungan ini akan terus berlanjut. Ujung-ujungnya tidak untung. Sebuah fitur stabilitas ekonomi adalah bahwa upah sama dengan upah subsisten, yang berarti bahwa pertumbuhan penduduk, kewirausahaan, akumulasi modal, pendapatan tuan tanah, dan kemajuan teknologi semua berhenti karena upah sama dengan upah subsisten.

Meskipun iklim ekonomi saat ini, kemajuan teknologi dan kesediaan tuan tanah untuk digunakan pendapatan sebagai membentuk modal masih ada. Bagi pengusaha, peningkatan produktivitas dan kemajuan teknologi telah menghasilkan peningkatan pendapatan dan upah. Pertumbuhan ekonomi dapat berlanjut sebagai hasil dari tingkat pendapatan yang tinggi ini, yang dapat digunakan untuk perusahaan yang lebih besar

Ketika populasi tumbuh dan upah serta pendapatan bagi pemberi kerja turun, siklus ini tidak dapat berlanjut. Akibatnya, kemajuan teknologi hanya merupakan pilihan untuk memperlambat proses pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pendapatan sewa dari tanah dapat digunakan

sebagai bentuk modal komersial oleh tuan tanah yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Namun, tuan tanah, menurut Ricardo, terkenal boros dan konsumtif, lebih suka menghabiskan uang mereka untuk barang-barang sembrono seperti pakaian desainer daripada kebutuhan praktis. Akan ada lebih sedikit persaingan jika sejumlah besar pengusaha kaya memasuki industri yang sama.

Ada beberapa kekurangan dalam teori distribusi Ricardo, seperti fakta bahwa tanah diproduksi selain gandum dan bahwa modal dan tenaga kerja bukanlah koefisien tetap, teori Ricardo adalah teori distribusi, tanah diproduksi selain gandum, dan modal dan tenaga kerja bukanlah koefisien tetap. Pertama-tama abaikan suku bunga daripada pembagian tanah.

4. John Stuart Mill

Teori yang dikemukakan John Stuart Mill seperti yang dikatakan Adam Smith: "Spesialisasi atau pembagian kerja akan meningkatkan keterampilan pekerja, memperbaiki struktur organisasi proses produksi, dan mendorong inovasi, sehingga meningkatkan tingkat produktivitas." proses pertumbuhan. Ukuran pasar membatasi spesialisasi yang luas.

Menurut teori yang sama dengan teori Ricardo, populasi akan terus bertambah dan luas daratan akan tetap, sehingga berlaku hukum penurunan surplus *output*, sehingga menghasilkan lingkungan ekonomi yang stabil. Faktor-faktor *non*-ekonomilah yang memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi yang disumbangkan oleh pabrik-pabrik.

Faktor-faktor *non* ekonomi tersebut antara lain:

1. Masyarakat yang percaya.
2. Pemikiran masyarakat yang ada.
3. Adat istiadat.
4. masyarakat yang memiliki corak-corak didalam institusi-institusi.

Mill berpendapat bahwa faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam stagnasi ekonomi Asia. Karena tingkat pengetahuan masyarakat di dalam penentuan yang dapat dicapai dalam perekonomian didalam tingkat kemajuan industri, hal ini juga akan mempengaruhi pembangunan ekonomi. Itu adalah keyakinan Mueller bahwa tanah, tenaga kerja, dan

modal semua memainkan peran dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan produksi lebih cepat daripada tenaga kerja dapat meningkatkan kesejahteraan, tanah dan modal diperlukan.

- a. Menjaga populasi pada tingkat yang stabil Bagi Mill, teori Malthus bahwa membatasi populasi adalah kondisi yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi kelas pekerja sehingga mereka dapat menuai keuntungan dari kemajuan teknologi dan akumulasi modal adalah argumen yang meyakinkan untuk membatasi populasi.
- b. Tingkat di mana modal sedang dibangun. Mill percaya bahwa tingkat akumulasi modal dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu jumlah dana yang dapat menghasilkan tabungan dan keinginan yang kuat untuk menabung." Untuk membangun modal, seseorang harus mengurangi konsumsi saat ini untuk meningkatkan konsumsi masa depan Pengetahuan masyarakat dan penghapusan hambatan untuk pembangunan ekonomi manusia adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi, menurut teori pembangunan Mueller Akibatnya, Mill menekankan pentingnya pendidikan semacam ini, karena dapat membantu orang memperoleh lebih banyak teknis pengetahuan, dan juga dapat membantu orang mengembangkan yang lebih modern dalam pandangan dan kebiasaan.

C. TEORI PERTUMBUHAN NEO KLASIK

Teori pertumbuhan neoklasik adalah teori ekonomi baru yang menggantikan teori ekonomi klasik dalam hal kemanjurannya. Telah ada peningkatan pentingnya kemajuan teknologi dan penemuan metode produksi baru, yang telah menyebabkan pergeseran ini. Teori neoklasik adalah nama yang diberikan untuk pendekatan ini. Ada banyak perdebatan di antara para ekonom Neoklasik tentang teori tingkat bunga dan masalah akumulasi modal. Menurut teori neo klasik perkembangan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam perkembangan ekonomi ada faktor penting yaitu dengan adanya akumulasi kapital.
2. Proses yang gradual ialah perkembangan.
3. proses yang harmonis dan kumulatif ialah perkembangan.

4. optimis terhadap perkembangan merupakan boptimisme dari aliran neoklasik.
5. Dalam perkembangan tersebut terdapat aspek internasional.

Pandangan neoklasik berpendapat bahwa tabungan dapat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan. Tinggi rendahnya investasi juga dapat dipengaruhi oleh suku bunga. Investasi akan naik jika suku bunga rendah, begitu pula sebaliknya. Permintaan akan investasi meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Harga barang modal akan naik sebagai akibat dari tambahan investasi ini karena suku bunga akan naik. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk membatasi investasi lebih lanjut pada proyek-proyek yang dianggap menguntungkan. (A. Jajang, Cupian dkk, 2021)

Akibat proyek tersebut, suku bunga akan sangat rendah, permintaan investasi akan menurun, dan masyarakat tidak lagi tertarik untuk menabung. Perekonomian mencapai keseimbangan yang stabil pada saat ini. Tidak ada perkembangan jika Anda memiliki banyak uang. Perekonomian yang stabil mengharuskan kesempatan kerja penuh dipertahankan selama proses akumulasi modal.

Mengadakan proyek-proyek yang bersifat sosial atau melakukan proyek pekerjaan umum sangat diharapkan dari pemerintah.

1. Alfred Marshall

Investasi dalam teknologi adalah proses yang berkelanjutan dalam pandangan Alfred Marshall. Untuk menemukan teknologi yang sebelumnya tidak dikenal, seseorang harus melihat ke masa lalu. Perekonomian internal dan eksternal juga bertanggung jawab atas adanya hal-hal tertentu dalam pembangunan ekonomi. Sumber daya dan efisiensi wirausahawan memainkan peran utama dalam pertumbuhan ekonomi internal perusahaan. Ekonomi eksternal, di sisi lain, sangat bergantung pada kemajuan industri yang biasanya memenuhi kebutuhan inovasi bersama. (A. Jajang, Cupian dkk, 2021)

Saling ketergantungan ekonomi dan saling melengkapi adalah tema sentral dalam karya Marshall. Situasi ini akan memiliki manfaat jangka panjang dan mendorong pertumbuhan industri lain di masa depan.

Pembagian kerja pekerja sangat penting untuk pengembangan inovasi, kata Alan Young. Sementara pembagian kerja ini bergantung pada skala pasar, di sisi lain skala pasar bergantung pada pembagian kerja saat ini dan seterusnya. Ketika satu departemen tumbuh, itu mendorong pertumbuhan yang lain. Tidak ada divisi yang terpisah. Itu selalu merupakan pandangan positif bagi perekonomian di Neoklasikisme, karena mereka percaya bahwa manusia mampu mengatasi pertumbuhan yang terbatas dan bahwa teknologi akan selalu maju secara bertahap dan terus menerus. Neoklasikisme menekankan pentingnya menabung dan berhemat setiap saat. Upaya tambahan telah dilakukan untuk menangani masalah saat ini.

Suatu negara dalam perkembangan ekonomi akan mengalami tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Negara peminjam atau impor *capital (immature debtor)* awalan dalam suatu negara.
- 2) Dimulai negara tersebut membayar deviden dan bunga atas pinjaman kapital saat kapital memberikan hasil,
- 3) Sebagian dari penghasilan itu digunakan untuk pelunasan hutang dan sebagian lagi meminjamkan ke negara lain yang membutuhkan saat pendapatan nasionalnya meningkat terus, maka. Akan tetapi, yang harus dibayar dalam deviden dan bunga masih keharmonisan melebihi deviden dan bunga yang diterima dari negara lain. Maka negara tersebut termasuk negara dengan tingkat debitur yang sudah mapan (*mature debtor*).
- 4) Menerima deviden dan bunga saja dari negara lain pada akhir negara tersebut. Pada tingkat kreditur sudah mapan (*mature creditor*) di negara tersebut.

2. Walt Whitman Rostow.

Walt Whitman dalam Teori pertumbuhan ekonomi serta Teori linearitas dipelopori oleh Rostow. Seperti yang diajarkan Rostow, transisi dari tidak pernah mencapai kemajuan ekonomi dapat dijelaskan sebagai rangkaian tahapan yang harus dilalui semua negara dalam model pembangunan tahap pertumbuhan. Ini adalah proses lima tahap: masyarakat tradisional, persiapan kerangka dasar untuk pertumbuhan

berkelanjutan, tahap lepas landas dari pertumbuhan berkelanjutan, dan tahap konsumsi skala besar. (Jhingan, 2011). Penjelasan dari masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

Tahap 1, Perekonomian ini sangat bergantung pada hasil pertanian dan bahan baku lainnya, sehingga sebagian besar barang yang dihasilkan berasal dari sumber tersebut. Akibatnya, model ekonomi masyarakat masih tradisional dan fokus mencari nafkah. Akibatnya, menggunakan teknologi dalam proses manufaktur cukup terbatas.

Tahap 2, Agar fase lepas landas dapat dimulai, perlu untuk membangun fondasi untuk pertumbuhan jangka panjang. peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat *industry* dalam tahap ini. Dalam perekonomian, selain pertanian, sektor industri mulai mengakar. Industrialisasi dan kemajuan teknologi dipercepat pada saat ini dalam perekonomian, serta investasi skala besar di bidang manufaktur, yang didorong oleh dana publik. b) revolusi teknologi di bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan yang terus meningkat; c) peningkatan impor modal; d) peningkatan investasi infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi; dan e) perluasan impor; ini adalah tahap kedua dari industrialisasi. Manufaktur dan pemasaran sumber daya alam untuk ekspor pembiayaan impor. Tahap lepas landas adalah tahap pengembangan penting berikutnya, dan tahap ini sangat penting dalam mempersiapkannya.

Tahap 3, Fase awal sangat penting untuk pengembangan komunitas. Ada perubahan besar dalam metode produksi selama periode ini. a) Meningkatnya tingkat investasi produktif antara 5-10 persen dari pendapatan nasional, b) Berkembangnya satu atau beberapa sektor manufaktur penting dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, dan c) Munculnya kerangka kerja politik, sosial, dan kelembagaan yang cepat. yang menimbulkan keinginan untuk berekspansi di sektor modern sehingga dampak eksternalnya memberikan kekuatan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Seperti yang Anda lihat, persyaratan pertama dan kedua saling terkait. Tingginya tingkat pertumbuhan investasi akan menyebabkan pertumbuhan yang tinggi di berbagai sektor perekonomian, terutama sektor manufaktur. Industrialisasi didorong oleh pertumbuhan manufaktur, yang merupakan indikator sejauh mana kemajuannya. Jika

sektor manufaktur tumbuh cepat, sektor lain akan mengikuti. Agar syarat pertama dan kedua terpenuhi dengan baik, syarat ketiga harus dipenuhi, dan syarat itu adalah iklim yang memungkinkan terpenuhinya syarat pertama dan kedua dengan baik. Persyaratan pertama dan kedua tidak akan terpenuhi jika persyaratan ketiga tidak terpenuhi.

Tahap 4, Teknologi modern sekarang dapat digunakan secara efektif dengan sumber daya yang ada dalam tahap kedewasaan. Ada beberapa departemen baru yang muncul sebagai akibat dari tahap produksi jangka panjang ini. Tiga perubahan besar akan terjadi ketika negara mencapai kematangan teknologi: a) tenaga kerja terdidik dan kepribadian pengusaha bergeser dari pekerja keras dan pekerja kasar menjadi lebih ramah. bos yang kompeten. c) masyarakat sudah muak dengan industrialisasi dan menginginkan lebih banyak perubahan.

Tahap 5, Tahap pertama konsumsi massal. Orang-orang telah pindah dari pusat kota dan ke pinggiran kota dalam jumlah besar pada saat ini, menurut Rostow, yang melihat ini sebagai tahap akhir pembangunan. Ada kebutuhan akan transportasi umum, seperti kereta api, untuk berkeliling. Dari sisi penawaran ke sisi permintaan, sistem produksi telah mengalami kemajuan. Perilaku ekonomi juga telah berubah, bergeser dari fokus pada sisi produksi menjadi fokus pada sisi konsumsi pada saat yang bersamaan. Kesejahteraan sosial, bukan hanya masalah pribadi, mulai dilihat sebagai masalah yang lebih besar yang hanya dapat diselesaikan dengan mengonsumsi semua barang pribadi yang dapat diperoleh seseorang. Sudah diterima secara luas bahwa negara maju telah melewati tahap *“automatically coming sustainable economic growth take-off”*, sedangkan negara berkembang atau terbelakang umumnya masih berada pada tahap kedua, yaitu persiapan ekonomi, klaim WW in Rostow. pertumbuhan. Sebuah kerangka untuk pembangunan. Pangkalan untuk lepas landas (Todaro dan Smith, 2015).

D. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI

1. Sumber Daya Manusia

Modal manusia sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, diperhitungkan di suatu negara untuk mencapai

hal ini. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari tingkat keahlian, pengetahuan, orisinalitas, dan kreativitas yang dimilikinya, serta tingkat pendidikan dan pelatihannya. Sudah pasti bahwa produk suatu negara akan memiliki kualitas tertinggi jika tenaga kerjanya sangat terampil dan terlatih. Pertumbuhan ekonomi akan terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia yang terampil, sedangkan kelimpahan sumber daya manusia akan berdampak kecil. Tenaga kerja suatu negara harus memadai untuk memenuhi permintaan keterampilan dan kemampuan saat ini untuk menumbuhkan ekonominya.

2. Sumber Daya Alam

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat dipengaruhi oleh kekayaan sumber daya alamnya. Ini termasuk tanah dan dasar laut, serta sumber daya yang ditemukan di alam. Sumber daya alam suatu negara selaras dengan iklim dan lingkungannya. Dengan kata lain, negara-negara dengan sumber daya alam yang melimpah lebih mungkin untuk tumbuh daripada negara-negara dengan sumber daya yang terbatas.

3. Pembentukan Modal

Bangunan, mesin, dan transportasi adalah contoh aset modal yang berkontribusi pada pembentukan modal dalam perekonomian. Produksi semua barang buatan manusia adalah proses pembentukan modal. Pembentukan modal dapat meningkatkan ketersediaan modal dalam angkatan kerja dan dapat meningkatkan rasio modal atau tenaga kerja dalam suatu angkatan kerja tertentu. Karena itu, berpotensi untuk meningkatkan *output* dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

4. Pengembangan Teknologi

Pekerja menggunakan berbagai alat teknologi sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Dengan sumber daya yang terbatas, kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan produktivitas. Karena penggunaan teknologi, negara-negara yang telah berkembang pesat dapat mengungguli negara-negara yang belum. Membuat keputusan pengembangan teknologi yang tepat dapat berdampak signifikan pada perkembangan ekonomi.

5. Faktor Sosial dan Politik

Pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh faktor budaya seperti adat istiadat, tradisi, nilai, dan kepercayaan yang unik di setiap negara. Iklim politik suatu negara berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Memiliki lingkungan politik yang stabil sangat penting bagi kemampuan suatu negara untuk berjalan dengan lancar, membuat warganya bahagia, dan meningkatkan *output*nya. Dengan kata lain, dalam masyarakat yang bebas, orang lebih mungkin mengembangkan dan memanfaatkan potensi mereka sendiri.

E. RANGKUMAN MATERI

Berbagai teori dan metode untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dapat kita pelajari dari penjelasan bab ini. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Namun masing-masing metode sesuatu yang penting yang ditekankan, seperti model tahap linier, yang menekankan pentingnya tabungan dan investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan mengamati apa yang telah terjadi, teori baru berfungsi sebagai metode alternatif untuk menjelaskan pola-pola pembangunan yang terjadi di negara-negara tertentu. Kemajuan teknologi endogen, aglomerasi industri, dan strategi intra-industri dalam perdagangan global semua pertimbangan penting dalam teori pertumbuhan baru, yang memperhitungkan kepentingan relatif mereka. Teori geografi ekonomi baru melakukan hal yang sama. Setiap teori ekonomi ini menyediakan kerangka kerja untuk mengelola ekonomi dengan cara yang memaksimalkan pertumbuhan sambil meminimalkan dampak lingkungan. Meskipun kita mungkin menyadari di masa depan bahwa sejauh ini teori pembangunan tradisional hanya mengajarkan bagaimana mengendalikan ekonomi material, dan fokusnya hanya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi dan mendistribusikan ekonomi kepada semua orang, kita masih memiliki beberapa jalan untuk dilalui. Itu mendapat kurang perhatian, tapi itu selalu menjadi prioritas. *Trade-off* pertumbuhan versus ekuitas. Sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia, sumber daya manusia perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan teknis yang canggih.

TUGAS DAN EVALUASI

Cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan tentang teori-teori pembangunan konvensional serta tinjauannya dalam perspektif Islam berikut ini!

1. Jelaskanlah terkait konsep mekanisme pasar di dalam pemikiran fundamental dari Adam Smith!
2. Jelaskanlah perubahan sektor ekonomi yang terjadi di Indonesia Model manakah yang dapat mendekati ?
3. Menurut Anda, apakah dualisme dalam konteks pembangunan benar-benar terjadi di sebagian negara sedang berkembang khususnya Indonesia? Jika iya, maka tunjukkan bukti-buktinya serta bagaimana argumen Anda!
4. Apakah yang dimaksud dengan kontrarevolusi neoklasik? Apa premis-premis yang diusulkan pada teori tersebut? Bagaimana pandangan Anda mengenai premis tersebut dengan kasus pembangunan di Indonesia?
5. Menurut Anda, dari sekian banyak teori-teori pembangunan konvensional yang telah dipelajari, teori ekonomi pembangunan mana yang memiliki perbedaan mendasar dengan konsep pembangunan dalam perspektif Islam?

DAFTAR PUSTAKA

- A.Jajang,Cupian dkk. (2021). Ekonomi Pembangunan Islam. Departemen Ekonomi dan Keuangan
- Berg, H. V. (2001). Economic Growth and Development. McGraw-Hill. New York USA.
- Jhingan, M. (2011). The Economic of Development and Planning 40th Revised and Enlarged Edition. Vrinda Publication (P) Ltd. Delhi.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development, 12th Edition. Pearson Education Limited. United Kingdom.

EKONOMI PEMBANGUNAN

BAB 12: PEMBANGUNAN SEIMBANG DAN PEMBANGUNAN TIDAK SEIMBANG

Erdah Litriani, S.E., M.Ec.Dev

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

BAB 12

PEMBANGUNAN SEIMBANG DAN PEMBANGUNAN TIDAK SEIMBANG

Pembangunan berimbang dan pembangunan tidak berimbang merupakan strategi-strategi dalam melaksanakan pembangunan masa kini yang berkaca pada masa lalu. Setelah Perang Dunia II, negara-negara bekas jajahan Barat yang mencoba menggunakan strategi pembangunan sosialis tidak mampu menunjukkan dorongan menuju komunisme melainkan mengupayakan sasaran-sasaran pembangunan dalam parameter liberal kapitalis. Sedangkan negara-negara yang tidak menggunakan strategi pembangunan sosialis lebih percaya pada *a third path of development*, yang didefinisikan sebagai bukan kapitalis dan bukan pula sosialis model Uni Soviet atau RRC. Dunia Ketiga atau negara sedang berkembang adalah tantangan bagi para ekonom pasca Perang Dunia II dalam menjawab masalah kemiskinan, ketimpangan, kelaparan, mortalitas dan produktivitas yang rendah. (Easterly, 2002, P, 181).

Kemiskinan atau lingkaran setan adalah masalah yang umum ditemui pada negara berkembang. Lingkaran setan kemiskinan bekerja pada sisi permintaan dan sisi penawaran. Lingkaran setan kemiskinan mengandung arti bahwa deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang bereaksi satu sama lain. Dari sisi permintaan dimulai dari produktivitas yang rendah tercermin dari pendapatan masyarakat yang rendah, hal ini menyebabkan permintaan pada barang dan jasa menjadi rendah tingkat pendapatan yang rendah berbanding lurus dengan tabungan yang juga rendah. Akumulasi tabungan yang rendah akan menyebabkan investasi dan

pembentukan modal yang rendah pula. Kekurangan modal pada gilirannya bermuara kembali pada produktivitas yang rendah. Dari sisi penawaran, tingkat pendapatan rendah juga mencerminkan rendahnya investasi dan penyebab kurangnya modal, hal ini sama dengan sisi penawaran. Kekurangan pembentukan modal akan menyebabkan produktivitas juga rendah.

Selain kemiskinan, beberapa aspek yang dapat menghambat pembangunan ekonomi adalah tingkat pembentukan modal yang rendah dari sisi tabungan maupun sisi investasi, aspek lainnya adalah hambatan sosio-budaya (Jhingan, 2016). Kemudian, bagaimana memutus lingkaran setan kemiskinan?, dibutuhkan beberapa strategi-strategi pembangunan. Berikut akan kita bahas mengenai beberapa strategi pembangunan ekonomi :

A. PEMBANGUNAN SEIMBANG (*BALANCED GROWTH*)

1. Pengertian Pembangunan Berimbang

“The synchronised application of capital to a wide range of different industries” - Nafziger (1990, p. 85). Sebagai cara untuk keluar dari lingkaran-setan kemiskinan, teori ini mengandaikan perlunya pengalihan modal secara serentak di dalam berbagai industri. (wahyudi kumorotomo, 2021)

Pertumbuhan berimbang adalah keseimbangan antara berbagai industri barang konsumen, antara barang konsumen dengan industri barang modal. Keseimbangan antara sektor industri dan sektor pertanian, antara sektor luar negeri dan sektor dalam negeri, keseimbangan antara *overhead* sosial dan *overhead* ekonomi, keseimbangan antara eksternal vertikal dan eksternal horizontal. Ringkasnya adalah pembangunan berimbang mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis dari berbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor tumbuh secara bersamaan. (Jhingan, 2016, p, 182).

Pembangunan berimbang biasanya dilakukan dengan tujuan untuk menjaga proses pembangunan dari berbagai hambatan, dalam hal :

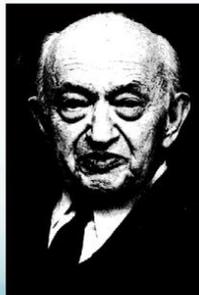
1. Memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi, serta fasilitas untuk distribusi hasil produksi ke pasar
2. Memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan yang akan diproduksi.

Berdasarkan hal tersebut, pembangunan berimbang dapat juga diartikan sebagai usaha pembangunan yang berupaya untuk mengatur arus investasi dalam mengatasi berbagai hambatan yang bersumber pada penawaran atau permintaan. Pembangunan berimbang membutuhkan investasi yang lebih besar, pendapat sebagian ahli disebut juga teori dorongan besar-besaran (*big push Theory*).

2. Teori Pembangunan Berimbang

a. Teori Rosenstein Rodan

Teori pembangunan berimbang pertama kali dicetuskan oleh Rosenstein-Rodan atau di kenal juga dengan *Big Push Theory* berawal dari keprihatinan terhadap situasi setelah perang di Eropa Timur. Teori ini menjelaskan bahwa dalam melakukan industrialisasi didaerah yang kurang berkembang merupakan cara yang tepat untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata dan juga untuk meningkatkan pendapatan didaerah yang bersangkutan. Dalam rangka mencapai hal tersebut diperlukan pembangunan industri secara serentak.



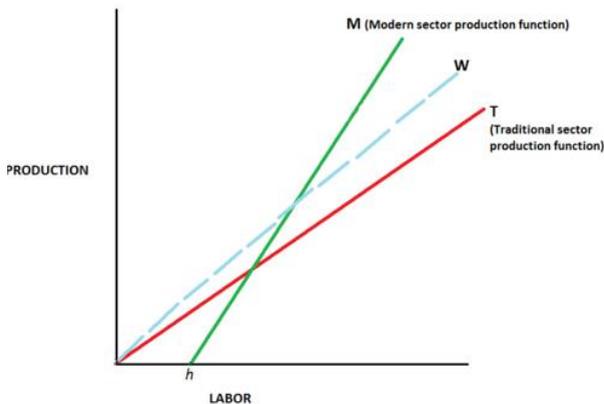
Paul Rosenstein-Rodan
1902 - 1985

Rosenstein-rodan membedakan 3 jenis syarat mutlak untuk melancarkan pembangunan ekonomi. Pertama, syarat mutlak minimal dalam fungsi produksi, khususnya syarat mutlak minimal pada persediaan modal *overhead* sosial. Kedua, syarat mutlak minimal pada permintaan. Ketiga, syarat mutlak minimal dalam persediaan tabungan.

Teori *Big Push* atau “daya dorong yang besar” sangat erat modal dan infrastruktur. Kemudahan modal dan keberpihakannya kepada daerah berkembang merupakan langkah yang strategis. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang menghubungkan banyak daerah dengan pusat bisnis seperti ini memang perlu diprioritaskan oleh pemerintah. Asumsi model pertumbuhan seimbang terdapat pelengkap praktis dan komersial dalam industri pada proses produksi di berbagai sektor sesuai dengan *external economics* dan produksi besar-besaran serta serentak. Oleh karena itu, model pertumbuhan seimbang ini sering di sebut sebagai *Big Push Theory* oleh segolongan ahli ekonomi. (Wafi Farhan, jurnal metropolis, 2020):

Asumsi:

- Pembayaran Faktor Produksi
- Permintaan Domestik
- Penawaran dan Permintaan Internasional
- Struktur Pasar
- Teknologi
- Faktor Produksi

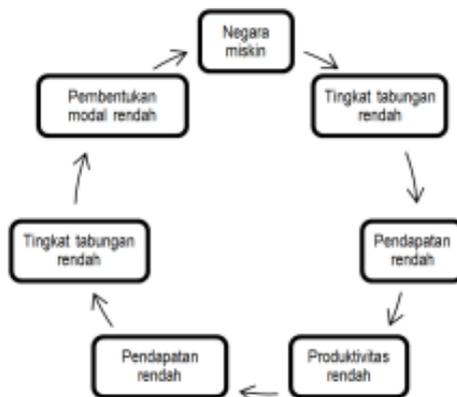


Gambar diatas menunjukkan sumbu X merepresentasikan tenaga kerja yang digunakan, dan sumbu Y menggambarkan tingkat produksi. Produksi di sektor tradisional ditunjukkan oleh kurva T dan produksi di sektor modern ditunjukkan oleh kurva M dan Kurva M bersifat positif. Produksi di sektor tradisional tunjukkan oleh kurva T dan produksi di sektor modern tunjukkan oleh M. Kurva M memiliki intersep positif pada sumbu X

menunjukkan bahwa ketika tingkat produksi nol, tingkat pekerja minimal masih tetap bekerja untuk melakukan kegiatan administrasi. Dengan asumsi bahwa pekerja dalam perekonomian, sektor modern akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi daripada sektor tradisional. Kemiringan kedua fungsi produksi adalah dimana tenaga kerja marginal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit *output* tambahan. Tingkat ini lebih rendah untuk sektor modern daripada untuk sektor tradisional. Asumsikan bahwa sektor tradisional membayar pekerja satu unit *output* yang kemudian dibelanjakan secara merata oleh mereka di semua sektor. Sektor modern membayar upah yang lebih tinggi kepada pekerja. Jika semua pekerja dipekerjakan oleh sektor tradisional, maka permintaan yang dihasilkan untuk *output* masing-masing sektor adalah T . Intervensi pemerintah dengan cara penanaman modal dilakukan pada industri-industri yang memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang yang lebih tinggi.

b. Teori Ragnar Nurkse

Teori Ragnar Nurkse menjelaskan bahwa banyak kegagalan pembangunan yang terjadi diberbagai negara yang disebabkan oleh masyarakat atau negara itu sendiri terjebak kedalam lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle underdevelopment*). Berikut gambaran lingkaran setan kemiskinan.



Gambar 12.1 Lingkaran Setan Kemiskinan

Sumber : Damanhuri (2010)

Lingkaran kemiskinan dinegara miskin, penduduk negara miskin masih berupaya untuk memenuhi kebutuhan primer atau habis untuk konsumsi, sehingga menyebabkan tingkat tabungan masih sangat rendah. Akumulasi dari tingkat tabungan masyarakat yang rendah menyebabkan pendapatan secara keseluruhan juga rendah. Dari sisi usaha, ketika tidak ada permodalan yang cukup menyebabkan tingkat produktivitas juga rendah, produktivitas rendah atau tingkat produksi yang rendah mengakibatkan pendapatan yang diterima juga rendah, pendapatan yang habis untuk dikonsumsi tidak akan mencukupi untuk tabungan dan menyebabkan akumulasi tingkat tabungan menjadi rendah, salah satu pembentukan modal berasal dari tingkat tabungan. Jika tabungan rendah, maka pembentukan modal juga menjadi rendah.

Nurkse memiliki pemikiran yang sama dengan Rosenstein-Rodan dalam hal pertumbuhan berimbang. Namun, ada beberapa saran dalam perbaikan pemikiran tersebut. Dia sepakat dengan teori "*Big Push*", tetapi perlu ada koordinasi yang dilakukan juga oleh lembaga-lembaga swasta, misalkan perbankan.

Kontribusi secara teoritisnya adalah menekankan pada pentingnya mencapai keseimbangan diantara berbagai sektor ekonomi.

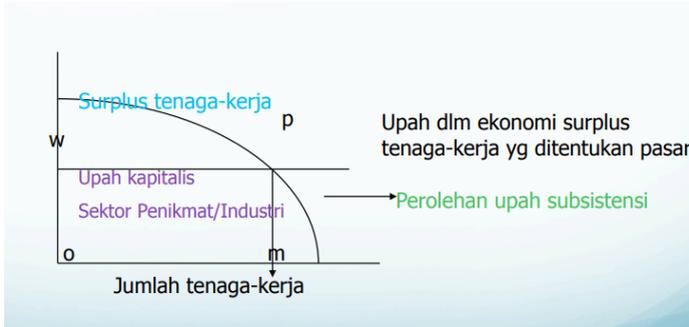


Ragnar Nurkse
1907 - 1959

Nurkse memberikan pendapat bahwa dibutuhkan serangan gelombang investasi yang frontal diberbagai industri yang beraneka ragam (pertumbuhan berimbang) guna memutus lingkaran setan kemiskinan ini. Artinya, investasi modal secara kontinu pada beraneka ragam industri yang dapat memperluas pasar merupakan tindakan fundamental untuk mengatasi lingkaran setan kemiskinan.

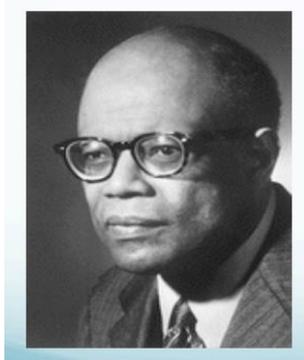
c. Teori Arthur Lewis

Teori Arthur Lewis Menjelaskan tentang konsep teori pembangunan di negara-negara berkembang yang memiliki surplus tenaga-kerja, sama seperti Nurkse, dia melihat pentingnya keseimbangan antara sektor agraris dan sektor industri.



Dalam teori ini Lewis memiliki asumsi dasar:

1. Perekonomian hanya mempunyai sektor pertanian dan sektor industri.
2. Pada awalnya buruh berasal dari sektor pertanian. Sehingga, pemanfaatan buruh tidak terlalu efisien dan menyebabkan produktivitas menjadi rendah atau hampir mendekati angka nol.
3. Jika keadaan yang terjadi adalah upah pada sektor industri lebih tinggi. Maka, buruh dari sektor pertanian akan pindah.
4. Kurangnya efisiensi dan rendahnya produktivitas pada sektor pertanian tidak terlalu dipermasalahkan meskipun buruh yang bekerja hanya sedikit.
5. Asumsi selanjutnya adalah tabungan dan investasi akan terus dilakukan jika sektor industri mengalami keuntungan.
6. Intinya adalah tabungan dan investasi $>$ inflasi atau upah.
7. Kondisi ini jika terjadi terus menerus maka akan menaikkan permintaan terhadap tenaga-kerja.



Implikasi Teori Lewis bagi Negara Berkembang terdapat Perbedaan antara Utara dan Selatan dalam hal bobot produksi agraris dengan produksi industri dan ketenagakerjaan. Di Utara Potensi tersembunyi yang dimiliki negara berkembang adalah cadangan tenaga-kerja pedesaan yang tak terbatas, bekerja di sektor agraris dan siap untuk beralih ke sektor perkotaan yang modern. Sedangkan Di Selatan, ko-eksistensi antara dua sektor bersifat dualistis sehingga Sektor agraris menyediakan tenaga-kerja bagi industri; dan industri membeli pangan dari mereka; tetapi tidak ada hubungan yang jelas antara keduanya. Produktivitas di sektor agraris demikian lambat sehingga banyak terjadi pengangguran tak-kentara (*disguised unemployment*) yang menyebabkan yaitu surplus tenaga kerja. (wahyudi kumorotomo, 2021)

Transformasi yang dinamis diantara keduanya tergantung kepada tenaga kerja pedesaan ke sektor industri, sehingga ketika produksi di sektor industri naik tidak ada perubahan dalam produksi di sektor agraris. Karena asumsinya bahwa yang dapat melakukan investasi dan tabungan hanyalah sektor industri, teori Lewis dianggap pro-kapitalis dan tidak berpihak pada buruh.

B. KETERBATASAN PERTUMBUHAN BERIMBANG

Kritik pada pertumbuhan berimbang berasal dari Solow-Swan 1956 dengan menyatakan bahwa percepatan pertumbuhan dapat terjadi jika tabungan investasi meningkat, Teori Lewis hanya berlaku untuk jangka waktu yang pendek, pertumbuhan jangka panjang akan kembali kepada tingkat sebelumnya. Selain itu, teori pertumbuhan berimbang juga

memiliki beberapa kekurangan, antara lain; Teori Dorongan besar atau *big push Theory* dalam praktiknya sulit untuk dilakukan, Perencana harus berkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu saja, Prioritas hanya dapat dilakukan berdasarkan kaitan-kaitan antar industri *linkages*, Kaitan antar industri itu yang sering tidak jelas di negara-negara berkembang.

Teori Lewis bersifat pro-kapital yang anti terhadap distribusi pendapatan bagi buruh sehingga mengakibatkan meningkatnya ketimpangan karena mementingkan pertumbuhan. Tidak mengakui pengaruh faktor-faktor kelembagaan dalam penentuan upah, misalnya kebijakan upah minimum, serikat pekerja, dan praktik tawar-menawar kolektif. Keterbatasan lainnya adalah asumsi mengenai sebuah Strata Kapitalis sebagai sumber investasi dan pertumbuhan tidak memiliki dasar kuat. Percepatan pertumbuhan bisa terjadi karena meningkatnya tabungan/investasi, Teori Lewis hanya berlaku untuk jangka pendek, Pertumbuhan jangka panjang akan kembali ke tingkat yang sebelumnya.

C. PEMBANGUNAN TIDAK SEIMBANG (*UNBALANCED GROWTH*)

1. Pengertian Pembangunan Tidak Berimbang

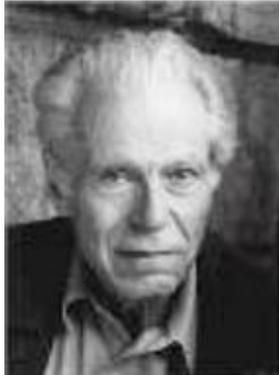
Dalam pembahasan pembangunan tidak seimbang dilandasi dari kritik terhadap pembangunan yang seimbang yaitu Dorongan besar (*Big Push*) dalam praktiknya sulit untuk dilakukan disebabkan para Perencana harus berkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu saja dan dapat diterapkan pada kaitan-kaitan antar industri (*linkages*), Kaitan antar industri itu yang sering tidak jelas di negara-negara berkembang.

2. Teori Pembangunan Tidak Berimbang

a. Albert Hirschman

Dalam tulisannya *The strategy of Economic Development* (1958) Albert Hirschman mengaitkan antara industrial dengan pertumbuhan tidak berimbang. Negara-negara berkembang menghadapi kendala dalam hal sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, sehingga membutuhkan prioritas investasi untuk mengawalinya. Menurut pendapatnya *Big Push* harus ditujukan pada beberapa industri saja untuk mendorong pertumbuhan tidak berimbang, dalam beberapa hal selalu terjadi kecenderungan tidak berimbang. Misalnya beberapa sektor yang

disorong investasi mungkin saja mengalami *overcapacity*, *outputnya* menjadi murah karena *economic of scale*. Akibat selanjutnya adalah peralihan investasi hulu (*upstream investment*).



Dalam penentuan prioritas investasi harus menentukan sektor andalan yang ditentukan berdasarkan kaitan industrial kedepan maupun kebelakang (*Backward and forward linkage*). Dengan membuat skala prioritas investasi yang tepat, perekonomian akan berputar terus dan proyek-proyek baru yang ia sebut sebagai *induced investment* akan berjalan memanfaatkan eksternalitas ekonomi maupun *social overhead capital* dari proyek sebelumnya.

b. Walt Whitman Rostow

Walt Whitman Rostow menerbitkan *The Stages of Economic Growth* yang bisa dikatakan sebagai pendukung doktrin pertumbuhan tidak berimbang. Seperti Hirschman, Rostow membuat sebuah idealisasi pembangunan yang bersifat *self-propelling* dan bertumpu pada dua sektor; tradisional dan modern. Dan sebagai seorang ahli sejarah ekonomi, konstruksi teoritik yang dibangunnya menunjukkan bagaimana Rostow berpikir sangat linear dan percaya bahwa semua negara akan berkembang dalam sebuah rentetan fase yang sama.



Bagian paling penting teori Rostow yang membutuhkan penjelasan di hampir seluruh bagian bukunya ditambah sejumlah *paper* karyanya sendiri adalah bahwa ia melihat perkembangan ekonomi berlangsung dalam lima tahap; tahap masyarakat tradisional, tahap prakondisi menuju lepas landas, tahap lepas landas, tahap dorongan menuju kematangan dan terakhir adalah tahap konsumsi massa tinggi. Rostow mengklaim bahwa teorinya tentang lima tahap perkembangan masyarakat tersebut lebih dari sebuah teori ekonomi tetapi juga sebuah teori mengenai sejarah masyarakat modern secara keseluruhan.

Klaim tersebut berangkat dari argumen Rostow sendiri mengenai ciri masyarakat pada masing-masing tahap yang meliputi beberapa indikator ekonomi dan sosial serta budaya. Dan yang terpenting adalah bahwa dia mengklaim diri telah menyusun sebuah kerangka besar pengganti marxisme seperti tercermin dari anak judul bukunya; *a noncommunist manifesto*, sebagai tonggak baru pengganti manifesto komunis yang ditulis Marx dan Engels.

Pada bagian akhir *The Stages of Economic Growth*, Rostow mengakui sejumlah kesamaan antara analisis tahapan pertumbuhannya dengan argumentasi Marx mengenai tahapan menuju masyarakat komunis. Beberapa yang terpenting adalah; *Pertama*, Marx dan Rostow mengakui bahwa perubahan ekonomi membawa dampak pada struktur sosial dan politik; mengubah budaya dan perilaku. *Kedua*, sama-sama mengakui realitas adanya kepentingan kelompok dan kelas dalam proses sosial politik yang berkaitan dengan keuntungan ekonomi. *Ketiga*, keduanya melihat adanya motif-motif ekonomi di balik formasi konflik politik.

Keempat, meski memiliki struktur pemikiran yang berbeda, Marx maupun Rostow mempercayai adanya satu tujuan akhir masyarakat yang benar-benar sejahtera (*true affluence*). (Easterly, 2002, P, 185).

D. KETERBATASAN PEMBANGUNAN TIDAK SEIMBANG

Doktrin pertumbuhan tidak berimbang juga memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: Kurangnya perhatian pada komposisi, arah dan saat pertumbuhan tidak berimbang, Mengabaikan perlawanan, Diluar kemampuan Negara terbelakang, Kekurangan fasilitas dasar, Kekurangan mobilitas *factor*, Timbulnya tekanan inflasi, Dampak kaitan tidak didasarkan data, Terlalu banyak penekanan pada keputusan investasi.

E. RANGKUMAN MATERI

1. Pembangunan Seimbang (*Balanced Growth*)

a. Pengertian Pembangunan Berimbang

Pertumbuhan berimbang adalah keseimbangan antara berbagai industri barang konsumen, antara barang konsumen dengan industri barang modal. Keseimbangan antara sektor industri dan sektor pertanian, antara sektor luar negeri dan sektor dalam negeri, keseimbangan antara *overhead* sosial dan *overhead* ekonomi, keseimbangan antara eksternal vertikal dan eksternal horizontal. Ringkasnya adalah pembangunan berimbang mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis dari berbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor tumbuh secara bersamaan. (Jhingan, 2016, p, 182). sebagian ahli disebut juga teori dorongan besar-besaran (*big push Theory*).

b. Teori Pembangunan Berimbang

1) Teori Rosenstein Rodan

Teori ini menjelaskan bahwa dalam melakukan industrialisasi didaerah yang kurang berkembang merupakan cara yang tepat untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata dan juga untuk meningkatkan pendapatan didaerah yang bersangkutan. Dalam rangka mencapai hal tersebut diperlukan pembangunan industri secara serentak. Teori *Big Push* atau “daya dorong yang besar” sangat erat modal dan

infrastruktur. Kemudahan modal dan keberpihakannya kepada daerah berkembang merupakan langkah yang strategis. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang menghubungkan banyak daerah dengan pusat bisnis seperti ini memang perlu diprioritaskan oleh pemerintah.

2) Teori Ragnar Nurkse

Teori Ragnar Nurkse menjelaskan bahwa banyak kegagalan pembangunan yang terjadi diberbagai negara yang disebabkan oleh masyarakat atau negara itu sendiri terjebak kedalam lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle underdevelopment*). Nurkse memiliki pemikiran yang sama dengan Rosenstein-Rodan dalam hal pertumbuhan berimbang. Namun, ada beberapa saran dalam perbaikan pemikiran tersebut. Dia sepakat dengan teori "*Big Push*", tetapi perlu ada koordinasi yang dilakukan juga oleh lembaga-lembaga swasta, misalkan perbankan. Kontribusi secara teoritisnya adalah menekankan pada tercapainya keseimbangan pada seluruh sektor ekonomi. Nurkse memberikan pendapat bahwa dibutuhkan serangan gelombang investasi yang frontal diberbagai industri yang beraneka ragam (pertumbuhan berimbang) guna memutus lingkaran setan kemiskinan ini. Artinya, investasi modal secara kontinu pada beraneka ragam industri yang dapat memperluas pasar merupakan tindakan fundamental untuk mengatasi lingkaran setan kemiskinan.

3) Teori Arthur Lewis

Teori Arthur Lewis Menjelaskan tentang konsep teori pembangunan di negara-negara berkembang yang memiliki surplus tenaga-kerja, sama seperti Nurkse, dia melihat pentingnya keseimbangan antara sektor agraris dan sektor industri. Transformasi yang dinamis diantara keduanya tergantung kepada tenaga kerja pedesaan ke sektor industri, sehingga ketika produksi di sektor industri naik tidak ada perubahan dalam produksi di sektor agraris. Karena asumsinya bahwa yang dapat melakukan investasi dan tabungan

hanyalah sektor industri, teori Lewis dianggap pro-kapitalis dan tidak berpihak pada buruh.

2. Pembangunan Tidak Seimbang (*Unbalanced Growth*)

a. Pengertian Pembangunan Tidak Berimbang

Dalam pembahasan pembangunan tidak seimbang dilandasi dari kritik terhadap pembangunan yang seimbang yaitu Dorongan besar (*Big Push*) dalam praktiknya tidak mudah untuk dilakukan karena negara hanya konsentrasi pada sektor tertentu dan hanya dapat diterapkan pada *linkage* (keterkaitan antar industri). keterkaitan antar industri biasanya tidak terjadi pada negara berkembang.

b. Teori Pembangunan Tidak Berimbang

1) Albert Hirschman

Dalam penentuan prioritas investasi harus menentukan sektor andalan yang ditentukan berdasarkan kaitan industrial kedepan maupun kebelakang (*Backward and forward linkage*). Dengan membuat skala prioritas investasi yang tepat, perekonomian akan berputar terus dan proyek-proyek baru yang ia sebut sebagai *induced investment* akan berjalan memanfaatkan eksternalitas ekonomi maupun *social overhead capital* dari proyek sebelumnya.

2) Walt Whitman Rostow

Walt Whitman Rostow menerbitkan *The Stages of Economic Growth* yang bisa dikatakan sebagai pendukung doktrin pertumbuhan tidak berimbang. Seperti Hirschman, Rostow membuat sebuah idealisasi pembangunan yang bersifat *self-propelling* dan bertumpu pada dua sektor; tradisional dan modern. Dan sebagai seorang ahli sejarah ekonomi, konstruksi teoritik yang dibangunnya menunjukkan bagaimana Rostow berpikir sangat linear dan percaya bahwa semua negara akan berkembang dalam sebuah rentetan fase yang sama.

TUGAS DAN EVALUASI

Kerjakan Tugas dan Evaluasi berikut:

1. Jelaskan perbedaan pertumbuhan berimbang dan pertumbuhan tidak berimbang!
2. Jelaskan *Big Push Theory*!
3. Jelaskan pertumbuhan berimbang menurut Nurkse!
4. Jelaskan Pertumbuhan tidak berimbang menurut teori Albert Hirschman!
5. Jelaskan Kelebihan dan kelemahan dari pertumbuhan berimbang dan pertumbuhan tidak berimbang!

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta : BPFE
- Damanhuri. 2010. Masalah dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Bogor : IPB Press.
- Easterly William. The Elusive Quest for Growth. 2002. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
- Farhan,wafi. Dkk. 2020. Penerapan Teori Big Push dalam Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengatasi Kemiskinan Jember. Jurnal Matropolis Jember.
- Jhingan, M. L. 2012. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta : Rajawali Press
- Kuncoro, Mudrajad. 2000, Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan. Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Sutcliffe. Robert B. Balanced and Unbalanced Growth. 1964. The Quartely Journal of Economics Vol.78, No.4. Published by : Oxford University Press
- Todaro, Michael. P. 1997. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid 1 & 2. Jakarta : Erlangga

EKONOMI PEMBANGUNAN

BAB 13: SUMBER DANA PEMBANGUNAN

Dr. Nurjanna Ladjin, S.E., M.Si

Universitas Muhammadiyah Luwuk

BAB 13

SUMBER DANA PEMBANGUNAN

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan proses pembangunan yang berkesinambungan bagi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang melakukan pembangunan nasional di segala bidang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan dana yang *relative* besar. Dalam suatu pembangunan memerlukan andil dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Tentunya pendanaan merupakan hal penting terutama dana dari pemerintah dalam negeri. Sistem pemerintahan Indonesia yang terdesentralisasi, Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam menyediakan dana kepada pemerintah daerah dari APBN untuk program-program pembangunan. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk menciptakan sumber pendapatan mereka sendiri untuk mendukung pembangunan

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa pendapatan negara merupakan penerimaan yang bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak dan penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

B. PENDAPATAN NEGARA

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya satu tahun. Konsep pendapatan nasional dicetuskan pertama kali oleh Sir

William Petty yang berasal dari Inggris yang melakukan penaksiran pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665.

Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian tingkat ekonomi suatu negara. Data pendapatan nasional yang sudah dicapai dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian negara di masa yang akan datang.

Jika dilihat dari perkembangan APBN mencatat pada tahun 2020 pendapatan negara mencapai Rp 1.699,9 triliun yang bersumber dari penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.444,5 Triliun, penerimaan Negara bukan pajak mencapai Rp 298,2 Triliun dan penerimaan hibah mencapai Rp 0,9 triliun. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 13.1.



Gambar 13.1: APBN Tahun 2016 - 2021

Sumber: Informasi APBN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2021

Sumber pendapatan negara menurut Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan *non* pajak dan hibah.

1. Penerimaan pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang. Uang tersebut dibayar oleh wajib pajak sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah. Sehingga bias dikatakan bahwa pajak merupakan penghubung dengan pendapatan, pemilik, harga beli barang, dan sebagainya.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak merupakan iuran rakyat yang disetor kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak kemudian dikoreksi menjadi : pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak penduduk kepada kas negara untuk pembiayaan pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk pembiayaan *public investment*.

Menurut Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R, Pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam tujuh sektor, yaitu :

- Pajak penghasilan (PPh) yaitu pajak yang ditanggung orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak
- Pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu Pajak berlaku pada konsumsi barang kena pajak atau jasa di dalam daerah pabean
- Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yaitu pajak yang berlaku pada barang yang bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi masyarakat tertentu, dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi, barang yang menunjukkan status, dan dapat merusak kesehatan serta moral masyarakat.
- Pajak bumi dan bangunan (PBB) yaitu Pajak yang berlaku buat kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan
- Bea Materai yaitu Pajak yang berlaku atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat nominal uang di atas jumlah tertentu.
- Pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai.

b. Karakteristik Pajak

- Pajak adalah kontribusi wajib pajak pada negara
- Tidak ada imbalan yang diterima secara langsung oleh wajib pajak
- Bersifat memaksa
- Diatur oleh Undang-Undang

c. Jenis-Jenis Pajak

1) Pajak Berdasarkan Sifat, terdiri dari:

- Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak apabila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

- Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

2) Pajak Berdasarkan pemungutnya :

- Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat seperti PPN, PPh, dan PPnBM.
- Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah seperti PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, dan BPHTB. Pajak adalah sumber penerimaan utama daerah selain transfer dari pemerintah pusat.

3) Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

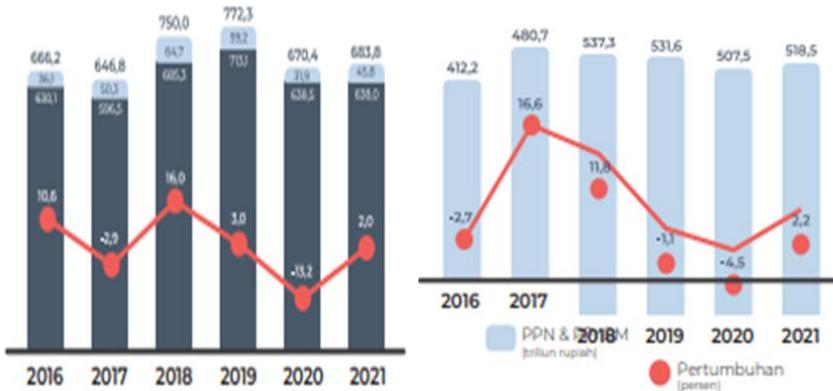
- Pajak Objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea meterai, dan masih lainnya.
- Pajak Subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

Perkembangan Penerimaan PPh dari tahun 2016-2019 menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,0% seiring dengan peningkatan ekonomi dan kenaikan harga komoditas. Pada tahun 2020, penerimaan PPh berkontraksi sebesar 13,2% sebagai akibat dari penurunan ekonomi dan pemberian insentif fiskal pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, diperkirakan PPh akan tumbuh sebesar 2,0% sebagai akibat pulihnya harga komoditas.

Pada tahun 2016-2019, PPN dan PPnBM mengalami pertumbuhan tumbuh rata-rata sebesar 8,8% per tahun. Pada tahun 2020, PPN dan PPnBM diperkirakan akan berkontraksi sebagai akibat dari penurunan aktivitas ekonomi dan kebijakan insentif percepatan pengembalian PPN untuk membantu likuiditas dunia usaha dampak pandemi Covid-19.

Pada APBN tahun 2021, PPN dan PPnBM diproyeksikan meningkat sejalan membaiknya prospek perekonomian, perbaikan administrasi pajak, dan implementasi pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik (PSME).

Selain itu, pada tahun 2016-2019, penerimaan perpajakan rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 6,4% per tahun sejalan dengan kinerja ekonomi yang meningkat tahun 2020, perpajakan diperkirakan berkontraksi 9,2% sebagai dampak pandemi Covid-19. Tahun 2021 ditargetkan tumbuh sebesar 2,9% seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Penerimaan Pajak tumbuh sebesar 2,6% dengan mengoptimalkan penerimaan melalui perluasan basis pajak dan pelaksanaan reformasi serta mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan yang selektif dan terukur. Lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 13.2.



Gambar 13.2: Penerimaan PPh, PPN dan PPnPM Tahun 2016-2021

Sumber: Informasi APBN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2021

Kepabeaan dan Cukai

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melalui kebijakan kepabeaan dan cukai yang pada tahun 2020 mencapai Rp 215,0 Triliun, mengambil langkah-langkah kebijakan antara lain :

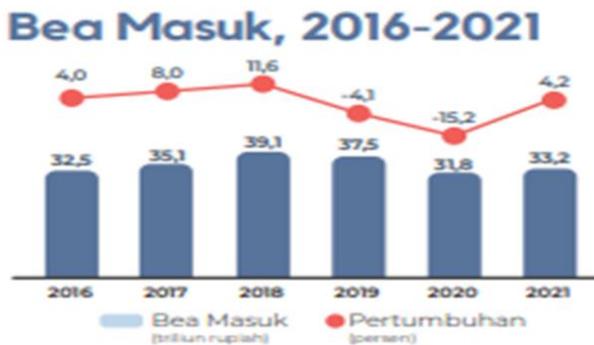
- Dukungan pemulihan ekonomi nasional terutama untuk kemudahan kegiatan ekspor dan impor dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku *local* dan rileksasi bagi Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan ekspor (KITA).
- Penataan ekosistem logistik nasional dengan tujuan untuk menurunkan biaya logistik, penurunan waktu logistik, Peringkat *Trading Across Border* (TAB) dalam EODB naik dari 116 ke 87.
- Dukungan transformasi ekonomi melalui pengembangan sistem pengawasan cukai terintegrasi (*excise connection*) dan pengembangan *smart customs* dan *excise system*.



Gambar 13.3: Penerimaan PPh, PPN dan PPnPM Tahun 2016-2021

Sumber: Informasi APBN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2021

Pada tahun 2016-2019, pertumbuhan cukai rata-rata sebesar 6,3% per tahun seiring dengan program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) melalui pemberantasan pita cukai ilegal. Tahun 2020, diperkirakan cukai berkontraksi 0,1% sebagai akibat dari penurunan konsumsi sebagai dampak pandemi Covid-19. Lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 13.4.



Gambar 13.4: Penerimaan PPh, PPN dan PPnPM Tahun 2016 -2021

Sumber: Informasi APBN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2021

Gambar 13.4 diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2016-2019 rata-rata pertumbuhan sebesar 4,9% per tahun sejalan dengan peningkatan kelancaran arus lalu lintas barang. Tahun 2020 diperkirakan berkontraksi sebesar 15,2% akibat penurunan aktivitas perdagangan internasional dan pemberian insentif fiskal penanganan pandemi Covid-19. Tahun 2021, bea masuk diproyeksikan tumbuh 4,2% seiring peningkatan aktivitas impor.



Gambar 13.5: Penerimaan PPh, PPN dan PPnPM Tahun 2016 -2021
 Sumber: Informasi APBN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2021

Gambar 13.5 diatas menunjukkan bahwa selama periode tahun 2016-2019, bea keluar tumbuh rata-rata sebesar 5,6% per tahun akibat dari peningkatan ekspor hasil tambang. Tahun 2020, bea keluar diperkirakan terkontraksi 53,1% seiring dengan penurunan ekspor komoditas tertentu dan pemberian insentif fiskal. Bea keluar Tahun 2021, ditargetkan tumbuh 8,1% sejalan dengan pulihnya ekonomi global dan tren kenaikan harga komoditas unggulan.

Kebijakan Insentif pajak

Sebagai instrumen fiskal dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penguatan transformasi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan terkait dengan insentif pajak, antara lain :

- a. Percepatan Pengembalian Pendahuluan PPN membantu *cashflow* perusahaan untuk kembali melakukan aktivitas usaha
- b. Insentif PPh 22 Impor dalam rangka memenuhi impor kebutuhan bahan baku produksi untuk sektor-sektor yang masih terdampak pandemi Covid-19
- c. Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) mendukung daya saing dan keekonomian sektor tertentu

- d. *Tax Holiday & Tax Allowance* menarik penanaman modal untuk meningkatkan investasi di dalam negeri dalam rangka mendorong diversifikasi ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan wilayah

Kebijakan :

- 1) Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional Insentif kepabeanaan terutama untuk kemudahan ekspor dan impor memenuhi kebutuhan bahan baku lokal dan relaksasi bagi Kawasan Berikat (KB) & Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
- 2) Penataan Ekosistem Logistik Nasional dengan target a.l: - Menurunkan biaya logistik - Menurunkan waktu logistik - Peringkat *Trading Across Border* (TAB) dalam EODB naik dari 116 ke 87
- 3) Dukungan Transformasi Ekonomi
 - Pengembangan sistem pengawasan cukai terintegrasi (*excise connection*)
 - Pengembangan *Smart Customs* dan *Excise System*

Pajak Sebagai sumber penerimaan negara yang paling utama berperan besar dalam pembangunan ekonomi. Hampir 70% lebih penerimaan NKRI bersumber dari pajak, baik pajak yang berasal dari pusat maupun pajak daerah. Oleh karena itu, untuk menciptakan *system* perpajakan yang efisien, perlu dilakukan dengan suatu cara yang dapat membantu distribusi pendapatan yang lebih merata, mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi serta memperkuat kebijaksanaan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh sistem administrasi melalui fungsi perpajakan. Ada 4 fungsi utama dari pajak, yaitu :

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Pajak adalah sumber pemasukan keuangan negara dengan menghimpun dana dari masyarakat yang disetor ke kas negara. Tujuan pajak adalah untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi, pajak difungsikan untuk pembiayaan pembangunan sebagai infrastruktur, pemerluasan lapangan kerja, dan lainnya.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak digunakan sebagai alat mengatur dalam melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah dalam kegiatan perekonomian dan kegiatan sosial. Fungsi mengatur antara lain memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, pajak yang berfungsi untuk menghambat laju inflasi, pajak untuk mendorong ekspor, dan pajak untuk menarik serta mengatur investasi modal demi perekonomian yang produktif. Implementasi dari fungsi mengatur antara lain:

- Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk menghambat laju inflasi.
- Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
- Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3) Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memiliki dana dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas negara, sehingga inflasi dapat dikendalikan melalui pemungutan pajak, mengatur peredaran uang di masyarakat, dan penggunaan pajak yang efektif efisien.

4) Fungsi pemerataan pembangunan (redistribusi)

Fungsi pajak sebagai pemerataan artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat.

2. Pendapatan negara *non*-pajak

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 merupakan pungutan yang dibayar orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung ataupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan

hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Singkatnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang asalnya bukan dari penerimaan perpajakan.

Urusan pemungutan PNBP ini dilakukan instansi pengelola PNBP yang terdiri atas kementerian/lembaga dan kementerian yang berfungsi sebagai bendahara umum negara.

Sumber pendapatan negara *non* pajak terdiri dari :

- a. Penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA) yaitu penerimaan yang terdiri dari penerimaan SDA minyak dan gas (migas) dan *non*migas
- b. Kekayaan negara yang dipisahkan yaitu penerimaan yang berasal dari keuntungan yang dibukukan BUMN
- c. PNBP lainnya yaitu Penerimaan ini diperoleh dengan memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN), seperti aset hingga sewa tanah dan bangunan.
- d. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yaitu Penerimaan ini dapat dari hasil penyediaan layanan berupa penyediaan barang, jasa, hingga pelayanan administratif.

PNBP Sumber Daya Alam (SDA) dari migas mengikuti pergerakan harga dan *lifting* minyak dan gas bumi, sementara PNBP SDA *Non*migas terutama akan dipengaruhi harga dan produksi batu bara. Pada tahun 2020 sebesar 79,1 Triliun dan diproyeksikan pada tahun 2021 sebesar 104,1 Triliun.

Pendapatan dari KND. Optimalisasi penerimaan dividen dengan mempertimbangkan aspek kesinambungan dan mitigasi risiko serta efisiensi kinerja BUMN. Tahun 2020 sebesar Rp 65,0 T dan pada tahun 2021 26,1 T.

Pendapatan yang diperoleh BLU merupakan peningkatan kinerja pelayanan BLU dengan mengutamakan kualitas pelayanan yang *affordable*, *available*, dan *sustainable*. Tahun 2020 Pendapatan BLU sebesar Rp 50,0 T dan ditargetkan pada tahun 2021 sebesar 58,8 T.

Pelayanan PNBP K/L pada tahun 2021 diharapkan lebih optimal sejalan dengan pulihnya aktivitas perekonomian. Tahun 2020 sebesar Rp 100,1 T dan pada tahun 2021 ditargetkan PNBP K/L sebesar 109,2 Triliun.



Gambar 13.6: Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2016-2021

Sumber: Informasi APBN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2021

3. Hibah

Dalam undang-undang, penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara, baik devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Ada sejumlah tujuan dari penerimaan hibah ini, yaitu buat mendukung program pembangunan nasional dan mendukung penanggulangan bencana alam hingga bantuan kemanusiaan. Itulah kenapa hibah yang diterima Pemerintah dimasukkan dalam APBN

Hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada pemerintah tetapi bukan bersifat pinjaman. Hibah bersifat sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus. Dana bantuan yang didapat biasanya diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan. Selain itu, penerimaan yang berasal dari luar negeri juga masuk dalam pinjaman program atau pinjaman proyek dengan jangka waktu tertentu. Lembaga internasional yang pernah memberi bantuan pada Indonesia adalah Bank Dunia (*World Bank*), *Asean Development Bank* (ADB), dan *International Monetary Fund* (IMF).

Penerimaan hibah itu terdiri dari beberapa jenis

- a. Hibah terencana (DRKH) yaitu Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan yang tertuang dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH)
- b. Hibah Langsung (*Non-DRKH*) yaitu Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan
- c. Hibah melalui KPPN yaitu Hibah yang proses penarikan dananya dilaksanakan di Bendahara Umum Negara (BUN) atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- d. Hibah tanpa melalui KPPN yaitu Hibah yang proses penarikan dananya tidak dilaksanakan di BUN/KPPN.
- e. Hibah dalam negeri yaitu Hibah dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga *non* keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di Indonesia, lembaga lainnya serta perorangan.
- f. Hibah luar negeri yaitu hibah yang bersumber dari negara asing, lembaga PBB, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga *non* keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar Indonesia serta perorangan.

C. RANGKUMAN MATERI

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan negara menyatakan bahwa pendapatan negara merupakan penerimaan yang bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Pajak dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang produktif dan reproduktif.

Beberapa sumber pajak adalah pajak penghasilan (PPh), Pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea Materai, Pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 merupakan pungutan yang dibayar orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung ataupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang

diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Adapun Sumber pendapatan negara *non* pajak terdiri dari Penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA) Kekayaan negara yang, PNBP lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada pemerintah tetapi bukan bersifat pinjaman yang bersifat sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus. Hibah terdiri Hibah terencana (DRKH), Hibah Langsung (*Non-DRKH*), Hibah melalui KPPN, Hibah tanpa melalui KPPN, Hibah dalam negeri, dan Hibah luar negeri.

Pajak mempunyai 4 fungsi yaitu, fungsi anggaran (*budgeter*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas dan fungsi pemerataan pembangunan (redistribusi).

TUGAS DAN EVALUASI

1. Sebutkan dan jelaskan fungsi APBN?
2. Sebutkan dan jelaskan mekanisme penyusunan APBN?
3. Sebutkan jenis-jenis pengeluaran pemerintah pusat dan belanja daerah?
4. Sebutkan dan jelaskan 3 (tiga) *system* pemungutan pajak di Indonesia?
5. Apa yang dimaksud dengan *self assesment system*? jelaskan!

DAFTAR PUSTAKA

- <https://lifepal.co.id/media/3-sumber-pendapatan-negara/> Diakses 11 Noverber 2021)
- <https://money.kompas.com/read/2021/06/13/100059626/mengenal-pajak-definisi-manfaat-fungsi-dan-jenis-jenisnya?page=all>
- <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5520474/4-fungsi-pajak-arti-dan-manfaatnya-untuk-pembangunan> Diakses 7 Noverber 2021)
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/090000769/sumber-pendapatan-negara-dan-pengeluaran-negara> (Diakses 5 Noverber 2021)
- https://www.kompasiana.com/elanurlathifah/5c2e40d16ddcae6586444652/sector-pajak-sumber-utama-pembiayaan-pembangunan-di-indonesia?page=1&page_images=1 (Diakses 7 Noverber 2021)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. Informasi APBN “Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Penguatan Reformasi. Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Anggaran.

GLOSARIUM

A

Absolute Advantage: Keunggulan mutlak suatu negara dari negara dalam perdagangan internasional karena dapat memproduksi dengan lebih efisien

B

Backward Linkages: Ukuran untuk melihat keterkaitan ke belakang antara sektor ekonomi.

Bea Keluar: Pungutan negara berdasarkan undang-undang mengenai kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.

Berimbang: Setimbang, Sebanding, strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara pengalokasian dana yang seimbang pada berbagai sektor.

Big Push: Dorongan besar pada salah satu sektor agraris atau industri melalui investasi

C

Comparative Advantage: Keunggulan komparatif suatu negara karena mempunyai biaya kesempatan (*opportunity costs*) yang lebih rendah dalam memproduksi barang

D

E

Ekspor: Penjualan barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri untuk dikonsumsi di negara lain.

F

FOB: Singkatan dari *free on board* merupakan kondisi dimana penetapan harga mencakup nilai barang dan semua biaya sampai barang berada di atas kapal.

Forward Linkages: Sebuah perhitungan untuk melihat keterkaitan antara sektor dengan sektor lainnya yang akan digunakan sebagai *input* dalam proses produksi.

G

GDP: *Gross Domestik Bruto* atau Produk Domestik Bruto

G7: *Major Developed Economies*

Gini Ratio: Salah satu perangkat yang menunjukkan tingkat ketidakseimbangan dalam pembagian upah relatif antara penduduk suatu distrik.

Global Value Chain: Proses penciptaan nilai tambah yang melibatkan lebih dari satu negara di dunia.

H

HDI: *Human Development Index*

Hilirisasi: Perkembangan industri yang awalnya memproduksi bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

I

IMF: *International Monetary Fund*

Industrialisasi: Usaha yang mengembangkan industri dalam suatu negara.

International Monetary Fund (IMF): Suatu asosiasi di seluruh dunia yang sibuk dengan masalah moneter dan selanjutnya memberikan kredit kepada setiap negara bagiannya dan bertujuan untuk memperluas perputaran moneter di seluruh dunia dan selanjutnya menjaga stabilitas keuangan, memperluas pertukaran global, dan selanjutnya mengurangi tingkat kemiskinan.

Impor: Penjualan barang dan jasa yang dihasilkan di negara lain untuk dikonsumsi di dalam negeri

Investasi: Penanaman modal dalam suatu proyek atau perusahaan.

Inward Looking Development Strategy: Kebijakan pembangunan dengan menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

J

K

Kemiskinan: Kondisi dimana ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan mendasar.

Kuota: Pembatasan kuantitas ekspor atau impor sejumlah tertentu pada jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari bahan baku (dalam kasus kuota ekspor) atau dari persaingan asing (dalam kasus kuota impor)

L

M

Modal: Sejumlah uang atau barang yang digunakan dalam menjalankan usaha.

N

Neraca Perdagangan: Selisih antara ekspor dikurangi impor.

O

Outward Looking Development Strategy: Kebijakan pembangunan yang berorientasi luar negeri lewat strategi ekspor dan investasi asing.

Overhead Ekonomi: Barang modal yang menjadi dasar untuk kegiatan ekonomi yang secara tidak langsung dapat meningkatkan hasil produksi. *Ex:* jalan, pelabuhan, irigasi.

Overhead Sosial: Barang modal yang penting untuk keperluan masyarakat yang secara tidak langsung dapat meningkatkan hasil produksi. *Ex:* rumah sakit, rumah ibadah, perumahan.

P

Pembangunan: Proses perubahan yang meliputi seluruh kegiatan ekonomi, sosial, politik, pertahanan, pendidikan, teknologi, budaya.

Pengangguran Tak-Kentara: Pengangguran yang disebabkan karena tidak adanya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

PPP: *Purchasing Power Parity*, artinya keseimbangan kemampuan berbelanja

Produk Domestik Bruto (PDB): Ukuran penciptaan tenaga kerja dan produk yang dapat dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Kapasitas Produk Domestik Bruto adalah untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu negara.

Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN): Pengembangan investasi untuk mengkoordinasikan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilengkapi dengan penyandang dana dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Penanaman Modal Asing (PMA): Tindakan penempatan modal serta koordinasi usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penyandang dana yang asing, baik dengan menggunakan modal yang sama sekali asing maupun karena usaha bersama dengan penyandang dana dalam negeri.

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN): Rangkaian program pemulihan perekonomian nasional yang penting bagi pengaturan moneter negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) serta menghadapi bahaya yang membahayakan perekonomian nasional dan juga stabilitas sistem keuangan dan menyelamatkan perekonomian nasional.

Pembangunan Ekonomi: Cara untuk memperluas pendapatan total maupun pendapatan per kapita dengan mempertimbangkan angka penambahan populasi yang diikuti oleh perubahan penting pada struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan untuk penduduk suatu negara.

Pengarusutamaan Gender: Sistem untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dan keseragaman gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang mempertimbangkan pertemuan, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan pria dan wanita selama waktu pengevaluasian untuk memeriksa dan menilai semua bagian kehidupan dan pembangunan.

Pengangguran Terbuka: Orang-orang yang sedang tidak bekerja sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja atau orang yang lagi mencari pekerjaan. Fenomena ini banyak terjadi di negara berkembang

Pengangguran Terselubung: Orang-orang yang merupakan tenaga kerja yang bekerja tidak optimal atau dengan kata lain produktivitasnya kurang baik atau didalam suatu pekerjaan mereka bisa saja tidak bekerja.

Pengangguran Musiman: Jenis tenaga kerja hanya bekerja pada periode tertentu misal pekerja di sektor pertanian tidak bekerja setiap hari hanya pada saat musim tanam atau panen dan lain-lain, selebihnya mereka menganggur.

Produktivitas: Kemampuan seseorang, perusahaan, atau sistem dalam menghasilkan sesuatu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Q

R

S

Sektor Agraris: Kegiatan usaha dengan cara memanfaatkan lahan atau tanah sebagai faktor produksi utama.

Sektor Industri: Sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

Struktur Ekonomi: Susunan atau komposisi sektor-sektor ekonomi berdasarkan baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier.

Surplus Tenaga Kerja: Kondisi kelebihan tenaga kerja

T

Tabungan: Simpanan, simpanan uang perorangan atau perusahaan pada bank dengan syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan pihak bank.

Tidak berimbang: Strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara pengalokasian dana yang tidak seimbang atau lebih mengoptimalkan 1 sektor andalan.

U

UNDP: *United Nation Development Programme*

V

W

X

Y

Z

PROFIL PENULIS

Dr. Fitri Amalia, M.Si



Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 10 Juli 1982. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2004, kemudian menyelesaikan Pendidikan Magister dengan Program Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan di Universitas Padjadjaran pada tahun 2007. Pada tahun 2020 menyelesaikan S3 pada program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Padjadjaran. Sejak tahun 2010 menjadi Dosen Tetap di Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan saat ini mendapat tugas tambahan sebagai Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB UIN Jakarta.

Roeskani Sinaga, S.P., M.Si



Bidang keahlian penulis adalah Ilmu Ekonomi Pertanian. Ilmu ekonomi pasti berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk menulis *book chapter* dengan judul sub bab “Pertumbuhan Ekonomi Dunia”. Penulis lahir di Pematang Purba tanggal 20 Juli 1985. Telah menyelesaikan studi S1 di Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau, S2 Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian (EPN) Institut Pertanian Bogor (IPB). Pada tahun 2016 penulis melanjutkan studi di Program Doktor IPB pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian yang di sponsori oleh LPDP BUDI-DN. Mulai tahun 2012 penulis diterima sebagai dosen tetap Yayasan di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Simalungun. Untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Harapan penulis dengan adanya sumbangan tulisan yang tertuang di dalam buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca ataupun mahasiswa ilmu ekonomi.

Dr. H. Asyari, S.Ag., M.Si., CSS., CRP



Penulis bernama lengkap Dr. H. Asyari, S.Ag., M.Si., CSS., CRP. Lahir di Sumani, 25 Maret 1974. Doktor bidang ilmu ekonomi diraih tahun 2016 di Universitas Andalas Padang Sumatera Barat. Sejak 1999 sampai sekarang menjadi Staf Pengajar Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Bukittinggi dengan bidang keahlian ilmu ekonomi dan ekonomi syariah. Selain sebagai staf pengajar, penulis juga aktif menulis di Media Massa Lokal dan Nasional dengan tema opini/artikel Ekonomi dan Sosial serta aktif di organisasi Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan Masyarakat Ekonomi Ekonomi Syariah (MES). Saat ini penulis tercatat sebagai pemegang 2 sertifikat keahlian berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP RI) di bidang *Syariah Supervisor* dan *Risk Profesional*.

Rahmah Farahdita Soeyatno, S.P., M.Si



Penulis lahir di Jakarta, 23 November 1987. Ia mendapat gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2010). Kemudian penulis mendapatkan Beasiswa Unggulan BPKLN Dikti untuk melanjutkan pendidikan S2 dan lulus di Magister Sains Agribisnis, Institut Pertanian Bogor (2013) dengan gelar Master Sains (M.Si). Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Tetap di Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang sejak 2016. Selain itu, penulis merupakan Dosen Tidak Tetap pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Konsultan di BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) RI semenjak tahun 2017. Saat ini penulis menempuh pendidikan Doktorat pada Ilmu Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor 2019 melalui Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri (BUDI-DN) LPDP Kementerian Keuangan RI.

Dr. Dikson Silitonga, M.M



Ketertarikan penulis terhadap ilmu manajemen dimulai sejak 1983 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Negeri Padangsidimpuan dengan memilih jurusan Tata Niaga dan berhasil lulus pada tahun 1986. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di Jurusan Pendidikan Dunia Usaha prodi Tata Niaga IKIP Negeri Medan (UNIMED) pada 1991. Pada tahun 2008, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Magister Management pada PPs Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nusantara Jakarta. Dua tahun kemudian, penulis melanjutkan pendidikan S3 (Program Doktor) pada PPs Universitas Negeri Jakarta prodi Manajemen Pendidikan dan berhasil lulus tahun 2014. Untuk meningkatkan kepakarannya dibidang manajemen, khususnya Manajemen Sumber Daya Manusia, penulis mengikuti pelatihan-pelatihan bersertifikat, seperti Pelatihan *Certified Compensation Professional (CCP)* tahun 2020 dan Pelatihan *Certified Professional Human Capital Management (CPHCM)* tahun 2020. Sedang dibidang ekonomi, penulis aktif mengajar mata kuliah Ekonomi Makro/Mikro, Perekonomian Indonesia, dan Ekonomi manajerial. Dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen *professional*, penulis aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut yang sebagian besar dipublikasikan di Jurnal Kampus. Sebagai peneliti, penulis juga aktif menulis modul dan buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi nusa dan bangsa. Dan untuk pengabdian masyarakat, penulis juga mendirikan PANUTURI *Consulting Education* pada tahun 2010.

Email Penulis : diksonpanuturi@gmail.com

Akhmad Solikin, S.E., M.A., Ph.D., CA



Penulis atau yang sering disebut akhsol adalah dosen Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN). Sebelum menjadi dosen, AkhSol meniti karier di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan, sejak lulus Diploma III Akuntansi dari STAN tahun 1995. Mulai tahun 2007 bertugas di Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan dengan tugas melakukan analisis berbagai kebijakan di bidang pendapatan negara, misalnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pajak internasional, dan bea masuk (kepabeanan). Pendidikan S1 ditempuh dari PE FEUI, Depok. Gelar MA pada bidang *International Development and Economic Cooperation* diperoleh dari Hiroshima University, Jepang, tahun 2004. Gelar PhD pada bidang *International Development Studies* dari Ruhr University Bochum, Jerman, tahun 2015. Minat penelitian pada bidang Keuangan Publik, Ekonomi Pembangunan serta *Governance*. Penulis dapat dihubungi lewat email akhsol@pknstan.ac.id.

Aulia Keiko Hubbansyah, S.I.A., S.Akt., M.M., M.S.E



Penulis adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Menyelesaikan studi sarjana dan magister di Universitas Indonesia dan Universitas Terbuka. Saat ini sedang melanjutkan studinya pada program Doktor Ilmu Ekonomi Pertanian di Institut Pertanian Bogor. Topik penelitian yang menjadi *interest* penulis adalah *financial economics*. Ia dapat dihubungi melalui email akhubbansyah@univpancasila.ac.id

Robert Tua Siregar, Ph.D



Penulis lahir di Pematangsiantar pada tanggal 18 November 1967. Ia menyelesaikan kuliah dan mendapat gelar Sarjana Teknik Manajemen Industri pada 06 Januari 1992, dan Sarjana Sospol pada 04 November 1992. Ia merupakan alumnus Jurusan Teknik Manajemen Industri Fakultas Teknik Universitas Sisingamangaraja XII Medan dan Sosiologi Fakultas Sospol Univ. Sumatera Utara Indonesia Medan. Pada tahun 1998 mengikuti Program Tugas Belajar pada Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan dan lulus pada tahun 2001 dari Universitas Sumatera Utara Indonesia Medan. Pada tahun 2007 menjalani Tugas Belajar Doktor Falsafah Bidang Urban & *Regional Planning* pada *University Of Malaya*. Sejak tahun 1994 menjadi dosen pada perguruan tinggi swasta di Pematangsiantar, dan pada tahun 2012 beralih fungsi status dari Pegawai Pemerintahan menjadi Dosen DpK di Universitas Swasta Pematangsiantar dan ditempatkan di Program Pascasarjana Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota dan Fakultas Ekonomi pada program studi studi pembangunan. Saat ini Dosen di STIE Sultan Agung Pematangsiantar. tuasir@gmail.com

Dessy Maulina, S.E., M.E



Penulis yang merupakan asli kelahiran Pulau Kalimantan ini, lahir pada 11 Desember 1984 di kota Banjarmasin. Menyelesaikan Pendidikan S1 dan S2nya di bidang Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Penulis aktif dalam beberapa penelitian di lingkungan universitas dan juga lingkungan pemerintah daerah. Penulis yang merupakan mantan penyiar televisi lokal di Banjarmasin ini, sejak tahun 2009 sampai sekarang aktif dalam dunia Pendidikan sebagai dosen. Penulis sekarang aktif menjadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat.

Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si



Penulis lahir di Jakarta, 2 Oktober 1981. Meraih gelar Sarjana Peternakan bidang Sosial Ekonomi Industri Peternakan dari IPB *University* (2004) dan Magister Sains Ilmu Ekonomi Pertanian dari Universitas yang sama (2008). Tesis dengan judul “Dampak Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah terhadap Permintaan dan Penawaran Beras di Indonesia” dengan metode *Two Stage Least Squares* (2SLS) berhasil dipertahankannya. Saat ini bekerja sebagai staf pengajar di program studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan, Kewirausahaan, Manajemen Agribisnis, Matematika ekonomi dan Ekonometrika, serta sedang menempuh pendidikan Program Doktorat (S3) Ilmu Ekonomi Pertanian di IPB *University* melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI. Selain itu, Ia aktif dalam kepengurusan Asosiasi Agribisnis Indonesia (AAI) wilayah Bogor dan Asosiasi Sistem Dinamik Indonesia (ASDI).

Nur Fitriyani Sahamony, S.Pd., M.Si



Penulis lahir di Bogor, 13 April 1991. Penulis adalah Pengajar di Universitas Binawan, penulis merupakan anak pertama dari tiga saudara. Penulis menyelesaikan gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Prof. dr. HAMKA, dan menyelesaikan gelar Magister di Institut Pertanian Bogor. Penulis mempunyai pengalaman riset di bidang ekonomi, matematika.

Erdah Litriani, S.E., M.Ec.Dev



Penulis lahir di Sukarami 15 Juli 1987, pendidikan terakhir S2 Magister Ekonomi Pembangunan diselesaikan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2009-2011). Tahun 2011-2014, beliau bekerja di kantor Appraisal Yogyakarta, dan sejak 2015-sekarang menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. buku

yang telah diterbitkan berjudul Ekonometrika dengan menggunakan aplikasi SPSS. Buku kedua adalah Estimasi Nilai Ekonomi Wisata Religius Kawah Tengkreup dengan Pendekatan *Travel Cost Method* dan *Contingent Valuation Method*. Buku selanjutnya dengan judul Pemberdayaan Santri Pondok Pesantren Al-Firdaus pada era Industri 4.0 (Melalui Literasi Digital Akad-akad Transaksi Syariah).

Dr. Nurjanna Ladjin, S.E., M.Si



Penulis lahir di Luwuk, 17 Desember 1976 Dosen Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai. Tamat SD Muhammadiyah 1 Luwuk Tahun 1988, MTs Negeri Luwuk Tahun 1991, SMU Negeri 2 Luwuk tahun 1994, Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Palu Tahun 1999, Magister Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008, Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang Tahun 2019. Aktif diberbagai organisasi dan mengikuti Seminar nasional dan internasional serta menulis beberapa Buku. Email: annaladjin@yahoo.com

EKONOMI PEMBANGUNAN

Istilah Ekonomi pembangunan diartikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan di negara berkembang yang berfokus pada metode pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan sosial, ekonomi pembangunan juga memperluas kesempatan bagi penduduk dengan mendukung perbaikan kondisi kesehatan, pendidikan, dan tempat kerja melalui sektor publik atau swasta. Ekonomi Pembangunan juga merupakan salah satu bagian dari ilmu Ekonomi yang secara spesifik mempelajari persoalan pembangunan yang sudah, sedang, dan akan terjadi di negara berkembang. Pembangunan tersebut mencakup industri, perbankan, keuangan, dan bisnis.

Selain dari pada itu juga dihadirkan sebuah analisis berbagai isu isu perekonomian untuk kemudian mencari dan menemukan solusi dari berbagai persoalan ekonomi secara kritis, kreatif, dan inovatif. Kemudian memberikan kesiapan pada setiap komponennya untuk menjadi perencana bidang pembangunan ekonomi sehingga bisa turut membantu terciptanya kesejahteraan bersama. Berdasarkan hal tersebut maka, buku ini menyajikan segala yang dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi pembangunan dalam menjalankan roda perputaran perekonomiannya agar dapat menciptakan kualitas dan kuantitas perekonomiannya yang baik.

Oleh sebab itu buku ini hadir dihadapan sidang pembaca sebagai bagian dari upaya diskusi sekaligus dalam rangka melengkapi khazanah keilmuan dibidang ekonomi pembangunan, sehingga buku ini sangat cocok untuk dijadikan bahan acuan bagi kalangan intelektual dilingkungan perguruan tinggi ataupun praktisi yang berkecimpung langsung dibidang ekonomi pembangunan.